mizan

SALIM HAJI SAID

Menyaksikan 30 Tahun

PEMERINTAHAN OTORITER SOEHARTO

Menyaksikan 30 Tahun

PEMERINTAHAN OTORITER SOEHARTO

MIZAN PUSTAKA: KRONIK ZAMAN BARU adalah salah satu lini produk (*product line*) Penerbit Mizan yang menyajikan buku-buku bertema umum dan luas yang merekam informasi dan pemikiran mutakhir serta penting bagi masyarakat Indonesia.

Menyaksikan 30 Tahun

PEMERINTAHAN OTORITER SOEHARTO

SALIM HAJI SAID

MENYAKSIKAN 30 TAHUN PEMERINTAHAN OTORITER SOEHARTO

Penyunting: Andityas Prabantoro
Proofreader: Ine Ufiyatiputri

Agustus 2016
Diterbitkan oleh Penerbit Mizan
PT Mizan Pustaka
Anggota IKAPI
Jln. Cinambo No. 135 (Cisaranten Wetan),
Ujungberung, Bandung 40294
Telp. (022) 7834310 – Faks. (022) 7834311
e-mail: kronik@mizan.com
http://www.mizan.com
facebook: Penerbit Mizan
twitter: @penerbitmizan
Desainer sampul: Andreas Kusumahadi
Digitalisasi: Ibn' Maxum
Sumber foto sampul: Arsip Nasional RI

ISBN 978-979-433-952-7

E-book ini didistribusikan oleh
Mizan Digital Publishing
Jln. Jagakarsa Raya No. 40,
Jakarta Selatan 12620 Telp. +6221-78864547 (Hunting); Faks. +62-21-788-64272
website: www.mizan.com
e-mail: mizandigitalpublishing@mizan.com
twitter: @mizandotcom
facebook: mizan digital publishing

Buku ini dimungkinkan terbit atas bantuan

Dr. Saiful Mujani, Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) dan Kim J. Mulia, PT Asuransi Intra Asia.

Penulis dan penerbit mengucapkan terima kasih kepada kedua dermawan tersebut.

ISI BUKU

Pengantar Penulis

I

Pada pagi hari 1 Oktober 1965, sejumlah prajurit TNI binaan PKI melancarkan usaha menculik para jenderal pimpinan Angkatan Darat yang dinilai PKI sebagai sangat anti-Komunis. Kecerobohan perencanaan operasi penculikan menyebabkan sasaran terpenting operasi terbunuh di tempat. Sisanya dihabisi di Lubang Buaya. Dengan latar belakang itu, muncullah Mayjen TNI Soeharto, Panglima Kostrad waktu itu.

Presiden Sukarno menyikapi terbunuhnya para jenderal sebagai suatu hal yang “biasa terjadi dalam Revolusi”. Dengan sikap demikian, langkah pertama Sukarno pagi itu bukanlah mencari tahu siapa yang membunuh para jenderal dan di mana mayat para pemimpin tentara dikuburkan. Yang segera dilakukan Sukarno pagi hari awal bulan Oktober itu adalah segera menunjuk Mayjen TNI Pranoto Reksosamodra (Asisten III bidang Personalia Panglima Angkatan Darat) menjadi pejabat sementara (Pjs.) pimpinan Angkatan Darat menggantikan Jenderal Ahmad Yani yang telah dibantai para perwira binaan PKI beberapa jam sebelumnya.

Kemudian, ternyata Jenderal Pranoto tidak dimungkinkan menjalankan perintah Sukarno. Dengan

cepat—mengikuti kebiasaan di Angkatan Darat sejak Jenderal Yani menduduki kursi Panglima Angkatan Darat —Panglima Kostrad, Mayjen TNI Soeharto dengan dukungan Jenderal TNI A.H. Nasution mengambil alih pimpinan Angkatan Darat dari pejabat yang "menghilang". Beberapa waktu kemudian, Pangkostrad memerintahkan penangkapan Pranoto Reksosamodra. Alasan tindakan itu adalah karena operasi intel yang berhasil menangkap Kolonel Latif mendapatkan surat pada saku sang Kolonel—seorang yang berperan penting dalam Gerakan Tiga Puluh September (Gestapu)—yang ditujukan kepada Pranoto. Isi surat itu adalah Latif meminta perlindungan Pranoto sebagai pejabat pimpinan Angkatan Darat yang baru ditunjuk Presiden Sukarno. Surat itu memperkuat kecurigaan terhadap Pranoto, seorang Sukarnois, sebagai perwira yang paling sedikit dianggap bersimpati kepada Gestapu.

Melewati *power struggle* (pertarungan kekuasaan) antara Soeharto—sebagai pemimpin "partai" tentara—melawan Presiden Sukarno, pada awal 1968, akhirnya Presiden pertama Republik Indonesia tersingkir. Jenderal Soeharto tampil dan bertakhta pada singgasana kekuasaan tertinggi Indonesia selama 30 tahun (1968-1998).

Modal utama kekuasaan Soeharto adalah dukungan tentara dan kemarahan rakyat kepada Partai Komunis Indonesia (PKI). Sebagai seorang dengan insting kekuasaan yang ternyata tajam, Soeharto sadar tidak memiliki cukup karisma dan pengalaman politik seperti

yang dipunyai pendahulunya. Dengan latar belakang yang demikian, Soeharto yakin kekuasaannya hanya akan tegak dan bertahan jika potensi pesaing di kalangan militer disingkirkannya dengan segera.

Setelah "membereskan" Sukarno, Soeharto menempuh tiga cara untuk membangun dan mempertahankan kekuasaannya. **Pertama**, menyingkirkan semua Perwira berorientasi kiri dan Sukarnois. **Kedua**, mempromosikan para jenderal yang dianggapnya tidak punya potensi menggunakan tentara melawan sang Presiden. **Ketiga**, para pendukung yang berjasa bagi kemenangan politik Soeharto, tetapi menonjol dalam masyarakat, atau dianggap mempunyai agenda sendiri, dengan segera disingkirkan dari posisi-posisi berpengaruh.

Dengan secara konsisten dan berkelanjutan, Soeharto menyingkirkan perwira tinggi yang dianggapnya punya potensi mengancam. Akibatnya, militer Indonesia secara berangsur "terbonsai", berkembang menjadi hanya alat bagi kekuasaan Soeharto, terutama setelah pergantian generasi dalam aparat pertahanan dan keamanan. Berbagai cara dikembangkan sang Presiden demi menjaga dan melanggengkan kekuasaannya. Pada dasarnya, cara-cara itu bukanlah cara baru ciptaannya. Soeharto pada hakikatnya—seperti hampir semua penguasa otoriter —adalah seorang Machiavellian yang mempraktikkan taktik *stick and carrot* (tongkat dan wortel). Mereka yang menguntungkan kekuasaan, mendapat anugerah, sementara yang berpotensi membahayakan, dengan cara

saksama dan secepatnya, disingkirkan.

Buku ini mencatat kasus-kasus yang menunjukkan bagaimana cara Soeharto menguasai tentara. Jenderal Ahmad Kemal Idris, Jenderal H.R. Dharsono, Jenderal Sarwo Edhi Wibowo, Jenderal Sumitro, Jenderal Ali Murtopo, Jenderal Benny Moerdani, dan banyak lagi lainnya, adalah tokoh-tokoh yang pada suatu titik dalam perjalanan karier militer mereka dipersepsikan Soeharto sebagai potensi yang mengancam kekuasaan sang Presiden. Dan karena itu sesegera mungkin disingkirkan dari pendopo kekuasaan.

Para jenderal secara perlahan-lahan akhirnya memang sadar terhadap taktik dan strategi Soeharto membangun, memperkokoh, dan melanggengkan kekuasaannya. Namun, Soeharto sudah menguasai posisi sebagai Presiden dan pemimpin tertinggi yang secara perlahan tetapi ketat mengontrol tentara. Para jenderal terlambat menyadari agenda Soeharto yang berbeda dari rencana para petinggi militer tersebut. Ketika para jenderal mulai menyadari kenyataan sebenarnya setelah bertahun-tahun berada dalam *kesadaran palsu* (*false consciousness*), Soeharto sudah telanjur makin kuat dan kecanggihan politiknya sudah bukan tandingan bagi para jenderalnya.

Kumpulan tulisan dalam buku ini membahas secara saksama—sebisa mungkin—interaksi dan ketegangan selama hampir 30 tahun antara Soeharto dan para jenderalnya. Penting diperhatikan, semua ketegangan itu berakhir dengan kemenangan Soeharto.
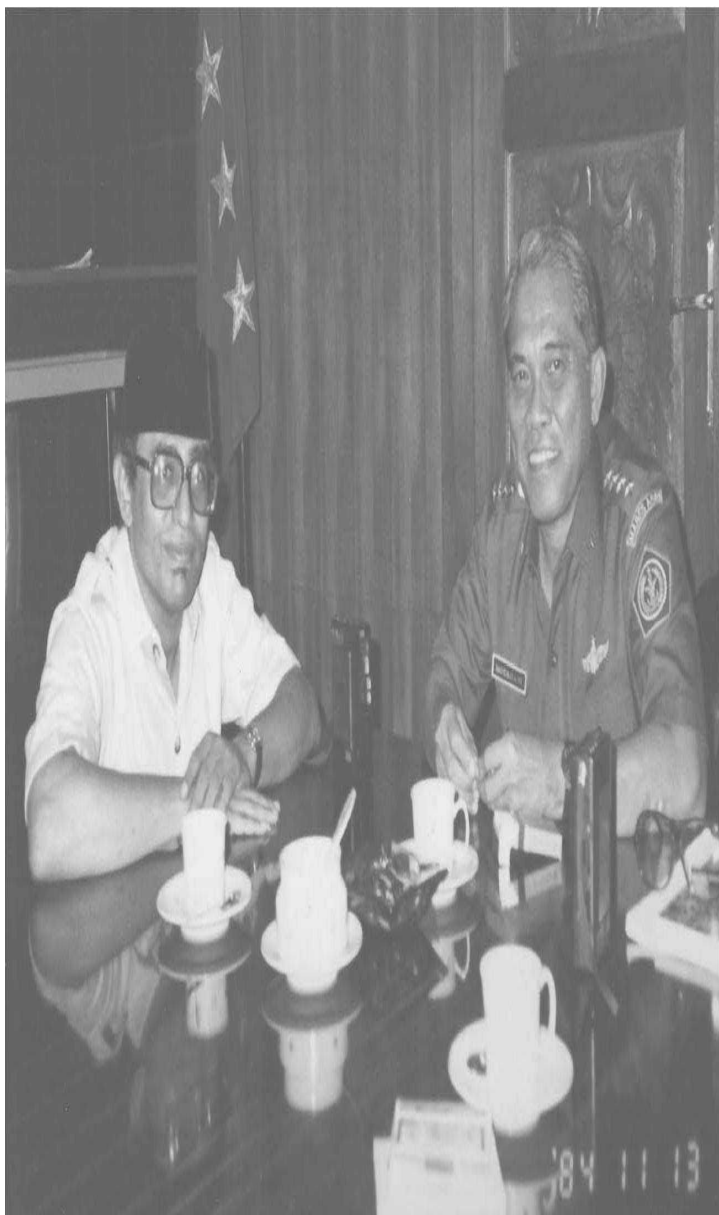
DOK PRIBADI

Salim Haji Said mewawancarai Pangab Benny Moerdani, November 1984.

Akibat "pembersihan" permanen para pimpinan tentara, makin lama lingkaran kekuasaan yang berada di sekitar Bapak Presiden makin menyempit. Ini hal yang menguntungkan dan membuka peluang bagi seorang penguasa otoriter membangun suatu dinasti yang kemudian terlihat memang direncanakan Soeharto.

Interaksi, apalagi ketegangan, antara Soeharto dan para politisi sipil hampir tidak mendapat tempat dalam buku ini. Interaksi demikian memang nyaris tidak pernah ada. Berbeda dengan pengalaman Presiden Sukarno sebelumnya, kekuatan politik sipil memang tidak pernah secara signifikan merupakan ancaman bagi Soeharto. Selama sang Jenderal berkuasa, pemerintah memang "memelihara" kelompok politik sipil yang dipacu berkompetisi memperebutkan kursi di DPR. Kompetisi terbatas dan terkontrol itu dirancang secara canggih dengan tujuan "melegalkan" peran politik tentara dan kekuasaan Soeharto di mata publik Indonesia dan dunia internasional.

Golkar, PDI, dan PPP adalah perwakilan politik peserta pemilihan umum resmi menurut aturan pemerintah. Golkar adalah kelompok yang dibangun militer sebagai kendaraan politik mereka. Tugas Golkar menduduki sebanyak mungkin kursi di Dewan Perwakilan Rakyat untuk memberi legitimasi pada kekuasaan Soeharto. PDI dan PPP merupakan kelompok politik hasil fusi sejumlah

partai sebagai buah rekayasa aparat kekuasaan. Keduanya adalah produk bonsai kekuasaan yang lebih difungsikan sebagai "pelengkap penderita" di atas pentas politik yang dikuasai Soeharto.

Orang-orang yang dipandang berpotensi kritis pada kekuasaan tidak pernah mungkin menemukan tangga memanjat ke panggung politik. Semua yang mendapat izin memperebutkan kursi di DPR dan MPR serta kedudukan strategis dalam birokrasi adalah mereka yang "steril" setelah secara saksama ditapis aparat sekuriti Peneliti Khusus (Litsus) penguasa. Usaha meneguhkan dan memantapkan kekuasaannya itu akhirnya mendorong, membawa, dan memperkuat rencana Soeharto mewariskan kekuasaannya kepada putrinya, Siti Hardianti Rukmana (Mbak Tutut). Tanpa saya sadari, apalagi direncanakan, saya terlibat dalam kegiatan terakhir ini sebagaimana yang bisa dibaca dalam salah satu bagian dalam buku ini.

SYAHDAN, AKHIRNYA SOEHARTO JATUH JUGA. Namun, berlainan dengan jatuhnya para tokoh otoriter yang didukung tentara seperti yang terjadi di banyak belahan bumi lain, Soeharto tidak jatuh karena perlawanan militer. Akibat krisis moneter (krismon) yang melanda Indonesia sejak pertengahan 1997, secara perlahan Soeharto tidak lagi punya cukup dana "membeli" dan membiayai para pendukungnya dan masyarakat luas pada umumnya. Dengan kata lain, strategi *stick and carrot* tidak bisa lagi dijalankan. Tentara (ABRI) tidak bisa bertindak menyelamatkan Soeharto, karena mereka sudah lama

tidak bersatu—sebagai akibat rekayasa pecah-belah Soeharto. Dalam tubuh tentara juga tidak cukup tersedia pimpinan yang mencapai puncak organisasi lewat seleksi berdasar *merit* dan kepemimpinan sewajarnya.

Pada hari-hari terakhir masa kekuasaan Soeharto, tentara bukan saja tidak bisa membela dan mempertahankan sang Presiden dari tuntutan mundur. Tentara sendiri tidak lagi punya semangat, keberanian, dan dukungan masyarakat—seperti pada 1966—mengambil alih kekuasaan dari tangan Soeharto.

Tidak berapa lama setelah kejatuhan Bapak Presiden, tentara (ABRI) pada April 2000 bahkan secara resmi meninggalkan posisinya sebagai kekuatan politik legal yang dulu populer sebagai **Dwifungsi.**

II

Lengsernya Soeharto adalah perubahan politik terpenting keempat dalam sejarah Republik Indonesia. **Pertama** adalah Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945. **Kedua,** keputusan Presiden Sukarno (dengan dukungan aktif Kepala Staf Angkatan Darat, Jenderal A.H. Nasution) memberlakukan kembali UUD 1945, membubarkan Dewan Konstituante,membentuk Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara (MPRS), membubarkan Dewan Perwakilan Rakyat hasil Pemilu 1955 untuk kemudian membentuk Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong (DPRGR) yang anggotanya dipilih sendiri oleh Sukarno. Lewat perubahan itu Sukarno berkuasa nyaris mutlak sebagai penguasa otoriter Indonesia. Berbeda dengan Soeharto di kemudian hari, Sukarno

punya sejumlah lawan-lawan politik sipil. Inilah latar belakang pembubaran partai politik Masyumi dan PSI (Partai Sosialis Indonesia).

Perubahan politik terpenting berikutnya—yang **ketiga**—adalah runtuh dan berakhirnya rezim ciptaan Presiden Sukarno (Demokrasi Terpimpin) secara dramatis dan berdarah-darah sebagai akibat Gerakan 30 September dan perlawanan tentara serta masyarakat. Perubahan tragis ini membuka gerbang bagi Jenderal Soeharto menaiki singgasana kekuasaan dan bertakhta di sana selama 30 tahun.

Lengsernya Soeharto dan masuknya Indonesia kembali ke era demokrasi melalui serentetan reformasi adalah perubahan politik penting berikutnya, yang **keempat**. Salah satu yang menonjol dari reformasi ini adalah keputusan militer (secara nyaris sukarela) menanggalkan peran politik mereka yang terkenal sebagai Dwifungsi.

Menarik untuk dicatat, pada semua perubahan ini para pemimpin rezim baru selalu memulai kekuasaan dengan janji setia kepada UUD, memperjuangkan nasib rakyat, merencanakan sebuah Indonesia yang aman, makmur, dan berkeadilan. Ketika rezim Demokrasi Parlementer tidak kunjung berhasil memenuhi janjinya, Sukarno dan militer bekerja sama mengambil alih kekuasaan dan membangun Demokrasi Terpimpin. Sukarno waktu itu meyakinkan cukup banyak orang, Demokrasi Terpimpin sesuai dengan Kepribadian Nasional Indonesia, ketika Demokrasi Parlementer dicap sebagai sistem impor dari

Barat. Nyatanya, dalam waktu singkat praktik Demokrasi Terpimpin lebih buruk dan sepanjang usianya dilanda ketegangan politik antargolongan yang memuncak pada tragedi berdarah Gestapu yang disempurnakan dengan pembubaran PKI.

Pada awal masa panjang kekuasaannya, Jenderal Soeharto mengkritik pelanggaran konstitusi, kultus individu serta korupsi yang terjadi pada masa Demokrasi Terpimpin. Tak berselang lama, banyak kesalahan yang tadinya dilakukan Sukarno diulangi kembali Presiden Soeharto. Bahkan, mungkin dalam skala lebih besar dan yang pasti dalam waktu yang lebih lama.

Kegaduhan politik pada masa Demokrasi Parlementer, kekuasaan nyaris diktatorial pada masa Presiden Sukarno, dan kemudian pada masa Presiden Soeharto, semua terjadi di depan mata rakyat yang tanpa daya mencegahnya. Demokrasi Parlementer berakhir karena tindakan pelanggaran konstitusi oleh Sukarno dan tentara, sementara Demokrasi Terpimpin berakhir karena kegagalan doktrin Nasakom. Adapun jatuhnya Presiden Soeharto bukan oleh pengkhianatan militer, melainkan akibat krisis moneter melumpuhkan strategi Soeharto yang kehabisan duit melanjutkan politik *stick and carrot*-nya.

Perbedaan terpenting di antara empat perubahan politik utama di Indonesia itu terdapat pada masyarakatnya. Masyarakat Indonesia pada dekade terakhir Orde Baru—akibat pembangunan ekonomi rezim Soeharto—secara perlahan memperlihatkan sikap

independen dan bahkan makin lama makin berani, terutama pada tahun-tahun menjelang jatuhnya Soeharto. Mereka layaknya kelas menengah yang siap mengatur diri sendiri setelah lepas dari pemerintahan otoriter sejak awal Demokrasi Terpimpin. Maka ketika terjadi krismon, itulah momen bagus bagi kelas baru yang mulai muncul di Indonesia tersebut.

Saya belum terlalu berani dan yakin mendeklarasikan kelas menengah telah lahir dan teguh berdiri di Indonesia. Yang bisa saya katakan, masyarakat Indonesia paling sedikit sudah "naik kelas"—meminjam istilah Jenderal T.B. Simatupang—sehingga pemerintahan otoriter tidak lagi sanggup bertahan lebih lama. Dan setelah runtuh, hampir pasti sulit bangkit dan berkuasa kembali di Indonesia.

Gambaran ini menjadi jelas jika kita membandingkan Indonesia, Mesir, dan Thailand. Ketiga negara ini mengalami reformasi dan demokratisasi yang waktunya tidak berbeda banyak. Namun, di Thailand dan Mesir, dalam waktu singkat tentara kembali mengambil alih kekuasaan, sementara di Indonesia TNI tetap memegang teguh keputusan mereka meninggalkan Dwifungsi. Ini jelas menunjukkan bahwa di Indonesia ada masyarakat yang lebih kuat dibanding dengan yang ada di Thailand dan Mesir.

Yang justru menjadi persoalan—mungkin juga bisa disebut ancaman—terhadap kelanjutan reformasi dan demokratisasi di Indonesia adalah para elite yang menguasai partai-partai. Skandal "Papa minta saham"

yang menghebohkan dan menyebabkan mundurnya Setya Novanto dari jabatan Ketua DPR dan serentetan skandal para politisi lainnya (banyak menteri, anggota DPR, dan pejabat tinggi, pada tingkat pusat maupun daerah, dipaksa berurusan dengan Komite Pemberantasan Korupsi, KPK) ditakutkan akan menimbulkan semacam *democratic fatigue* (kelelahan berdemokrasi) dalam masyarakat yang pada gilirannya bukan tidak mungkin membuka kesempatan bagi lahirnya kebutuhan akan "orang kuat" yang dianggap dan diharapkan menjadi juru selamat. Jika ini yang terjadi, maka TNI bakal menghadapi ujian berat, tergoda menyediakan "orang kuat" atau setia kepada janji dan tekadnya menghindarkan diri dari praktik politik praktis.

III

Jika ada pelajaran penting yang saya harap bisa kita petik dari pengalaman di bawah pemerintahan otoriter Indonesia selama hampir 40 tahun (Orde Lama dan Orde Baru), maka itu menyangkut soal konstitusi dan peranan politik tentara. Suatu pemerintahan otoriter selalu berkecenderungan memperpanjang masa berkuasanya. Di banyak negara, perpanjangan masa berkuasa menjadi akar dan landasan pembangunan dinasti.

Pada masa otoriter Demokrasi Terpimpin, Sukarno menerima promosi dirinya sebagai Presiden Seumur Hidup. Pada masa Orde Baru, dengan memanipulasi birokrasi dan mengerahkan militer, Soeharto—dengan menggunakan UUD 45 yang tidak membatasi masa kepresidenan—terus-menerus "terpilih". Untuk

mengantisipasi hari-hari setelah sang Presiden tidak aktif lagi, dia secara diam-diam menyiapkan anaknya sebagai penggantinya.

Di negeri-negeri otoriter di Timur Tengah, hal demikian sudah menjadi “tradisi”. Bashar El Assad, Presiden Suriah sekarang, adalah seorang dokter ahli mata (optomologis) yang sedang belajar di London ketika dipanggil pulang menggantikan Presiden Hafez El Assad, ayahnya yang meninggal mendadak.

Di Mesir, Presiden Husni Mubarak mempersiapkan Gamal Mubarak, putranya, menduduki kursi kepresidenan yang akan ditinggalkan ayahnya. Gamal gagal menduduki kursi yang disediakan untuknya. Rezim yang dibangun Gamal Abdel Naser, dilanjutkan oleh Anwar Sadat dan terakhir Mubarak, terguling oleh pemberontakan rakyat sebagai bagian dari Peristiwa Musim Semi Arab.

Pemimpin Libia, Muammar Gaddafi, hampir bisa dipastikan bakal digantikan oleh putranya, Saiful Islam. Seperti Gamal Mubarak, Saiful Islam juga gagal menduduki kursi yang dipersiapkan sang ayah. Gaddafi terguling dan terbunuh sebagai akibat pemberontakan yang diilhami oleh Peristiwa Musim Semi Arab yang bermula di Tunisia.

Di Irak, Saddam Hussain juga sudah mempersiapkan salah seorang putranya yang bisa dipastikan bakal menjadi penggantinya. Seandainya Presiden Bush tidak memerintahkan tentaranya menyerbu Irak dan menghancurkan kekuasaan Saddam, rencana itu hampir pasti akan menjadi kenyataan.

Suatu negara yang UUD-nya tidak membatasi masa jabatan presiden bisa dipastikan akan membuka jalan luas bagi sang Presiden memanipulasi kekuasaan guna memperpanjang masa berkuasanya. Dan jika dia mendadak sakit parah atau meninggal dunia, pada umumnya sang Presiden dan para kroninya akan memilih pengganti yang telah dipersiapkan dan sudah diperhitungkan tidak akan mengganggu warisan kekuasaan serta kekayaan yang dikumpulkan sang Presiden. Yang paling mungkin menjamin kelanggengan kekuasaan dan kekayaan (umumnya hasil korupsi) adalah keluarga sang Presiden sendiri.

Sejarah menunjukkan umumnya pelanjut dinasti adalah anak atau istri sang penguasa. Dalam kasus Indonesia—sebagaimana yang saya tulis dalam buku ini—saya menyaksikan "rencana" Soeharto menyiapkan putri sulungnya sebagai calon penggantinya kelak. Perhitungan saya, pada masa jabatan pertama Tutut sebagai Ketua Golkar (menggantikan Harmoko), Soeharto dengan alasan usia dan kesehatan akan melaksanakan gagasannya *Lengser Keprabon.* Pada saat itu, yang akan menggantikan Bapak Presiden adalah pemimpin golongan politik terbesar, yakni putrinya sendiri yang telah menjadi Ketua Umum Golkar lewat Munas Golkar berikutnya. Serangan krismon yang tak terantisipasi serta tak teratasi menyebabkan rencana Soeharto berantakan.

Pemerintahan otoriter pada umumnya didirikan oleh tentara—lewat kudeta—atau pemerintahan diktator pimpinan tokoh sipil yang berhasil mendapat dukungan

militer. Pengalaman Indonesia: Pemerintahan otoriter sipil pimpinan Presiden Sukarno adalah jenis pemerintah otoriter sipil dengan dukungan militer. Kerawanan jenis otoriter ini menempatkan sang otoriter banyak bergantung pada militer.

Menghindari ketergantungan pada militer, kekuasaan tentara dipreteli Sukarno dengan cara dipecah-belah. Untuk mengimbangi Angkatan Darat yang dipimpin para jenderal "anti-Komunis", selain memanfaatkan Angkatan Udara (pimpinan Omar Dani) Sukarno juga memanfaatkan gagasan lamanya, Nasakom. Dengan gagasan politik itu, Sukarno memanfaatkan PKI menjadi pendukung sipilnya dalam menghadapi Angkatan Darat. Kebijakan itu gagal, PKI bubar dan Marsekal Madya Omar Dani, pendukung fanatik sang Presiden, mengalami nasib buruk bersama Sukarno dan golongan Komunis.

Pemerintahan otoriter Soeharto adalah pemerintahan yang pada mulanya dibangun tentara dengan dukungan masyarakat. Soeharto pada awalnya lebih memandang dirinya dan dipandang selaku pelaksana politik aspirasi tentara, sebagaimana dirumuskan oleh gagasan-gagasan yang dikembangkan lewat Seminar Angkatan Darat II di Bandung pada 1966. Inilah penjelasan mengapa Soeharto, sebagai Presiden, jauh lebih mudah menguasai tentara dibanding Sukarno. Soeharto datang dari dalam tentara, Sukarno berasal dari luar barak.

Karena Soeharto harus mengamankan kekuasaannya, bahkan para pendukung setianya pun—yang dinilainya mengancam kontrolnya atas negara dan tentara—

disingkirkan. Penyingkiran demikian sudah dikenal sejak zaman purba. Pada masa awal Kesultanan Turki (Kemaharajaan Ottoman), misalnya, sejumlah sultan membunuh saudara kandungnya sendiri begitu sang Sultan naik takhta. Dengan demikian, cerita "matahari kembar" selalu berhasil dicegah sejak awal. Di Uni Soviet, entah berapa banyak mantan *kamerad* seperjuangan Stalin membangun Uni Soviet yang dibinasakannya. Hal yang sama juga melanda kediktatoran proletariat di berbagai negara Komunis. Pengalaman Stalin juga terulang kembali ketika Mao Zedong memimpin Cina. Semua pemerintah otoriter di Timur Tengah juga tidak terbebas dari kebiasaan pembinasaan para kontender kekuasaan yang dipersepsikan mengancam kekuasaan sang Diktator.

Soeharto dan Sukarno memang tidak seganas para sultan Turki, Stalin, dan para pemimpin otoriter lainnya. Sukarno yang menyingkirkan Jenderal Nasution (menggantikannya pada Juni 1962 dengan Jenderal Yani) masih memberi posisi militer bagi Nasution, meski sudah tanpa kendali atas pasukan seperti yang dimiliki Nasution sejak militer Indonesia terbentuk pada awal Revolusi. Soeharto menyingkirkan banyak jenderal—Kemal Idris, Dharsono, Sarwo Edhie Wibowo—dengan mendudukkan mereka sebagai duta besar. Terhormat, tetapi jauh dari kekuasaan.

Kendati demikian, demi menjaga stabilitas dan kelanggengan kekuasaan, praktik para pemimpin otoriter dari masa lalu dan masa kini tetap tidak terhindarkan oleh

Soeharto. Dengan kebijakan "tangan besi bersarung sutra", seperti yang sejak awal dipraktikkannya, secara perlahan Soeharto mengontrol negara dan tentara sebagai strategi menguasai Indonesia secara berkesinambungan.

Untuk waktu lama, para jenderal Indonesia pada umumnya "menderita" kesadaran palsu. Mereka merasa dan bersikukuh memandang Soeharto masih bagian dari tentara yang berkuasa melaksanakan cita-cita yang mendasari pemerintahan yang dirancang ABRI pada 1966. Dalam buku ini bisa ditemukan kisah tragis Benny Moerdani yang pada mulanya tidak sanggup membedakan antara Soeharto dan negara. Memerlukan waktu panjang bagi Moerdani dan para Jenderal untuk akhirnya menyadari mereka sudah lama terkecoh Bapak Presiden yang makin berkuasa dan makin canggih.

Pada titik ini, saya sulit menghindar dari ingatan kepada Letjen TNI (Purn.) Harsudiono Hartas, mantan Kepala Staf Sosial Politik ABRI. Pada 1997—dalam sebuah wawancara kami—sang Jenderal menjawab sendiri pertanyaannya kepada saya, "Siapa yang merusak ABRI?" Dengan nada geram, Jenderal Hartas menyebut nama Soeharto. Perlu diingat, pada masa aktifnya sebagai pejabat tinggi aparat keamanan beberapa tahun sebelumnya, orang-orang sipil yang kritis kepada kepemimpinan Presiden Soeharto tampak di mata Jenderal Hartas sebagai kutu yang akan "dipites" sang Jenderal.

Hatta, maka mulailah mereka "berontak". Pelopor

“pemberontakan” awal sebenarnya adalah Pangkopkamtib, Jenderal Sumitro. Dengan posisi sebagai Pangkopkamtib dan Wakil Panglima ABRI, Sumitro memandang dirinya dan dipandang sebagai pemimpin kelompok tentara profesional/lapangan yang pada awal Orde Baru dibedakan dan membedakan diri dari “tentara istana” dalam bentuk “Opsus” yang secara langsung meladeni kepentingan politik Soeharto. Konflik antara dua kelompok tentara ini makin lama makin tajam. Oleh Bapak Presiden, mereka dibiarkan bertarung saling menghancurkan. Puncak “perang” meledak dalam bentuk Malapetaka Januari 1974 (Malari).

Awalnya, yang tampaknya menang dari pertarungan pada waktu itu adalah kelompok Ali Murtopo. Sumitro kalah telak. Namun, dengan kekuasaan resmi yang dimilikinya serta kecanggihan politiknya, pemenang sebenarnya akhirnya adalah Soeharto sendiri. Sumitro terlempar dari ABRI (pensiun dini), sementara Ali Murtopo dan kelompoknya dihabisi secara perlahan.

Bersama Sumitro juga tersingkir dari kepemimpinan ABRI sejumlah Jenderal yang diidentifikasi Soeharto sebagai pengikut sang Pangkopkamtib. Letjen TNI Sayidiman Suryohadiprodjo, alumnus Akademi Militer Yogyakarta (MA/Militaire Academie) dan Wakil KASAD waktu itu, adalah salah seorang yang di mata Soeharto tergolong kelompok Sumitro. Sayidiman tersingkir. Akibatnya, tak seorang pun lulusan MA Yogyakarta yang mencapai pangkat Jenderal bintang empat dan berkesempatan menduduki kursi KSAD.

Kalau pada "pemberontakan" ABRI pertama, Sumitro yang ternyata kurang canggih berpolitik tidak secara langsung berhadapan dengan Soeharto, pada "pemberontakan" ABRI selanjutnya—terjadi pada bagian akhir masa berkuasanya Benny Moerdani dan para jenderal binaannya—mereka langsung, meski secara terselubung, berhadapan dengan Soeharto. Sebagian besar usaha mereka digagalkan Soeharto. Tidak berhasil mencegah Sudharmono menjadi Wakil Presiden, gagal menghalangi Harmoko menjadi Ketua Umum Golkar, mereka kemudian hanya sukses "memaksa" Soeharto menerima Jenderal TNI Try Sutrisno, mantan Panglima ABRI,sebagai Wakil Presiden.

Soeharto masa itu sudah amat berkuasa, memiliki banyak dana dan kecanggihan politiknya makin sempurna. Singkat cerita "pemberontakan" Moerdani dan "jamaah" jenderalnya dengan gampang dilikuidasi Soeharto. Reaksi Bapak Presiden: "de-Benny-isasi." Try Sutrisno sendiri menjadi Wakil Presiden yang nyaris tidak difungsikan sang atasan.

Pelajaran terpenting dari pemerintahan otoriter jenis ini, Jenderal yang didukung mengambil alih kekuasaan mewakili aspirasi militer mudah sekali bertransformasi menjadi dirinya sendiri dan lebih meladeni kepentingan keluarga dan para kroni pendukungnya. Menjalankan dan memanipulasi pemerintahan dan tentara oleh seorang diktator militer menjadi makin mudah pada negara yang konstitusinya tidak membatasi masa jabatan presiden.

Konstitusi Indonesia kini—sebagai akibat Reformasi—

telah diamandemen, seorang Presiden telah dibatasi hanya bisa berkuasa selama 2 kali masa jabatan. Kendati demikian, kemungkinan bangkitnya otoritarianisme di negeri ini belumlah mutlak tertutup. Namun, tentara hanya dimungkinkan mengambil alih kekuasaan jika rakyat capek berdemokrasi, terutama karena kehilangan kepercayaan kepada para politisi. Dalam keadaan demikian, rakyat lalu mencari jalan pintas. Dari "terobosan" inilah, kemungkinan terbukanya gerbang bagi masuknya "orang kuat" ke atas panggung politik. Di negeri seperti Indonesia, "orang kuat" besar kemungkinan hanya datang dari kalangan militer atau tokoh yang didukung dan "dikendalikan" militer.

IV

Sebagian tulisan dalam buku ini pernah terbit dalam bentuk singkat pada beberapa buku saya sebelumnya. Atas saran dan desakan sejumlah teman, saya melakukan penelitian tambahan dilengkapi sejumlah wawancara untuk lebih memperdalam analisis serta cakupan topik-topik yang dibahas pada buku-buku sebelumnya. Soal Letjen TNI Prabowo Subianto, misalnya, yang dalam versi awal tulisan ini sama sekali tidak disinggung, sekarang saya punya lebih banyak kesempatan dan bahan membicarakannya. Memanfaatkan sejumlah bacaan baru —pada umumnya memoar—dan wawancara dengan sejumlah pelaku dan saksi, bukan hanya "konflik" Prabowo versus L.B. Moerdani, melainkan juga hubungan tegang Prabowo dengan Jenderal Wiranto (Panglima ABRI waktu itu) mendapat tempat dalam buku edisi revisi ini.

Karena sensitivitasnya persoalan yang dibahas, banyak sekali narasumber yang tidak diuntungkan jika nama mereka diungkapkan. Namun, saya jelas amat berterima kasih atas kepercayaan sejumlah perwira tinggi TNI yang berbagi informasi *inside* yang menjadi dasar bagi tulisan-tulisan dalam buku ini.

Untuk menghindari fitnah, saya sangat berhati-hati dalam menapis informasi. Cek dan ricek saya lakukan sebisa mungkin.Dalam urusan kehati-hatian ini saya mendapat ilham dari cara kerja para pencari dan penghimpun hadis Nabi Muhammad Saw. sekian ratus tahun silam. Karena takut berdosa, mereka sangat teliti dan hati-hati dalam menerima dan mengumpulkan ucapan serta tingkah laku Rasul Allah tersebut.

Namun, itu tidak berarti saya pasti terbebas dari kesalahan dan kekeliruan. Terhadap kemungkinan bersalah itu saya mohon diberi maaf sebesar-besarnya oleh para tokoh, para ahli waris atau keturunannya yang nama serta tindakannya dibicarakan dalam buku ini. Semoga Allah memaafkan kesalahan dan dosa saya yang mungkin timbul dari kekeliruan tersebut.

Buku ini ditulis dengan niat memberi sumbangan kepada penjernihan sejarah kita sebagai bangsa. Semoga Allah membimbing kita agar Bangsa Indonesia terhindar dari mengulangi kesalahan masa lalu. Terutama kesalahan yang banyak mengorbankan orang-orang yang sebenarnya tidak berdosa.

Salim Haji Said

Jakarta, Januari 2016

Kisah Tragis Tiga "King Maker"

Letnan Jenderal TNI (Purn.) Ahmad Kemal Idris wafat Rabu pagi 28 Juli 2010 dalam usia 84 tahun. Dengan kematian itu habislah tiga King Maker yang pernah bekerja keras menaikkan Soeharto ke takhta kepresidenan. Dua lainnya, Hartono Rekso (H.R.) Dharsono dan Sarwo Edhie Wibowo sudah lebih dahulu berangkat ke alam baka. Pada awal pasca-Orde Lama, mereka bertiga secara bersama telah bekerja keras menyingkirkan Sukarno agar terbuka jalan kekuasaan bagi Soeharto.

Kebanyakan orang memang hanya melihat kepergian Ahmad Kemal Idris sebagai pertanda nyaris habisnya generasi Angkatan 45 TNI dalam masyarakat. Kemal, begitu almarhum populer dikenal, memang salah seorang tokoh penting dari angkatannya. Tapi, yang mungkin tidak menjadi perhatian orang banyak adalah peran penting Kemal pada dua peristiwa besar dalam sejarah dan peran politik militer Indonesia. Terbentang jarak yang jauh antara saat Kemal menghadapkan meriam ke Istana Merdeka dan masa beliau memimpin Kostrad sebagai *King Maker* senior yang berhasil menyingkirkan Sukarno dan menaikkan Soeharto sebagai pengganti presiden pertama

tersebut.

Memulai kegiatan militernya sebagai pemuda angkatan pertama yang dilatih oleh Jepang, keterampilan militer itulah yang mendorong Kemal memilih lapangan ketentaraan dalam mengabdikan diri mempertahankan Indonesia yang baru merdeka. Dia bertempur—*bertarung* istilah yang disukainya—dari Tangerang hingga Madiun untuk akhirnya kembali lagi bergerilya di Jawa Barat menjelang akhir masa Revolusi.

Namun, Kemal untuk waktu yang lama lebih dikenal sebagai seorang komandan tentara di Jakarta dengan pangkat mayor yang—atas perintah KSAD Kolonel A.H. Nasution—memasang dan mengarahkan laras meriamnya ke Istana Merdeka pada 17 Oktober 1952. Angkatan Darat hari itu mencoba, tetapi gagal, mendesak Presiden Sukarno membubarkan Parlemen. Sebagai salah satu akibatnya, Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Nasution kehilangan posisi. Untuk sekian tahun—sebelum pada 1955 diangkat kembali menjadi KSAD—Nasution menjadi Kolonel tanpa jabatan.

Kemal memang tidak kehilangan jabatan sebagai akibat aksi pasang meriam itu, tapi sejak itu dia "dicatat" Sukarno sebagai musuh. Akibatnya, karier militer Kemal terhambat lama. Pada Juni 1956, Kemal terlibat lagi dalam suatu gerakan militer. Kali ini yang jadi target adalah justru Nasution. Sejumlah perwira—sebagian besar berasal dari Siliwangi—waktu itu bertekad menurunkan Nasution dari kursi KSAD. Tapi, usaha yang melibatkan Kolonel Zulkifli Lubis itu juga berakhir dengan gagal. Nasib Kemal pun

makin memburuk, sebab selain Sukarno, kini Nasution juga memusuhinya.

Setelah bertahun-tahun tidak punya posisi dan kegiatan sebagai tentara, adalah Letjen Ahmad Yani, pimpinan Angkatan Darat, pengganti Nasution, yang memasukkan kembali Kemal dalam jajaran militer. Bersama Kemal, Suwarto—dimusuhi Nasution karena juga ikut gerakan usaha penyingkiran KASAD bersama Zulkifli Lubis dan Kemal—juga mendapatkan peranan militer aktif kembali. Suwarto kemudian menjadi pimpinan Seskoad yang menyiapkan konsep-konsep Angkatan Darat untuk memainkan peran politik, sementara Kemal—setelah bertugas sebagai pasukan perdamaian PBB di Kongo—menemukan dirinya menjadi perwira yang ditempatkan dalam jajaran Kostrad pimpinan Mayjen TNI Soeharto.

Nama Kemal muncul di publik ketika Panglima Kostrad Soeharto, dalam rangka Konfrontasi dengan Malaysia, menugaskannya sebagai Panglima Komando Tempur (Kopur) Kostrad yang bermarkas di sekitar Medan. Tugas Brigjen TNI Kemal Idris sebenarnya adalah menyiapkan penyerbuan ke Malaysia Barat. Tapi dalam kenyataannya, dia lebih banyak melaksanakan perintah Soeharto mencari jalan damai dengan negara jiran tersebut. Untuk tujuan itulah, Kemal melakukan Operasi Khusus (Opsus) yang lembaganya kemudian, pada masa Orde Baru, digunakan Ali Murtopo melancarkan operasi politik menyingkirkan musuh-musuh politik Soeharto dan musuh-musuh politik Murtopo sendiri.

Nama Kemal lebih muncul ke permukaan setelah almarhum ditarik ke Jakarta mengambil alih pimpinan Kostrad. Kemal yang pemberani, anti-Komunis, dan musuh lama Sukarno, adalah orang yang tepat membantu Soeharto dalam operasi pemberantasan kekuatan Komunis dan penyingkiran Sukarno. Pada saat itu, Kemal berhadapan kembali dengan dua musuh lamanya, PKI yang diperanginya di Madiun dulu (1948) dan Sukarno yang selama bertahun-tahun ikut mempersulit karier militernya.

Dengan kerja sama Mayor Jenderal H.R. Dharsono, Panglima Siliwangi, dan Kolonel Sarwo Edhie Wibowo, Komandan Resimen Para Komando Angkatan Darat (RPKAD), Kemal yang paling senior di antara mereka dengan cepat mentransformasikan trio itu menjadi *King Maker* yang merancang, mendukung, bahkan mendesak Soeharto untuk secepatnya menjadi Presiden menggantikan Sukarno. Kemal adalah tokoh yang menggagas beroperasinya pasukan tanpa tanda satuan yang mengepung Istana Kepresidenan pada 11 Maret 1966. Pelaksana operasi adalah Kolonel Sarwo Edhie.

Pangkostrad, Mayjen Kemal Idris, 1967.

Kalau pada 17 Oktober 1952, Kemal gagal memaksa Sukarno membubarkan Parlemen, pada 11 Maret 1966

Kemal berhasil “memaksa” Sukarno lari terbirit-birit meninggalkan sidang Kabinet di Istana Negara Jakarta untuk pada malam harinya di Istana Bogor menyerahkan kekuasaan, kepada Soeharto. Seperti diketahui, beberapa jam setelah operasi anak buah Sarwo Edhie di seputar Istana itu, Sukarno menyerahkan Surat Perintah Sebelas Maret (Supersemar) kepada Soeharto.

Dengan mandat dari Presiden, Pemimpin Besar Revolusi, dan Panglima Tertinggi ABRI itulah Soeharto segera membubarkan PKI, menangkap sejumlah anggota kabinet, dan melakukan pembersihan dalam tubuh militer. Mula-mula yang disingkirkan adalah mereka yang berhaluan kiri, tapi kemudian para simpatisan Sukarno juga mendapat giliran. Setelah yang kiri dan Sukarnois dibersihkan, barulah tiba giliran teman seiring, para pendukung, disingkirkan.

Sebagai jenderal yang punya insting politik canggih, Soeharto tahu riwayat hidup Kemal, seorang pejuang berwatak pemberang, berpendirian tegas, dan tidak kenal kompromi. Jenderal seperti Kemal Idris itu, bagi Soeharto, keberadaannya di Jakarta hanya akan membahayakan kekuasaan sang Presiden. Setelah memantapkan kontrol selepas menghancurkan PKI dan menyingkirkan para loyalis Sukarno, tibalah giliran Kemal untuk “dibereskan”. Melepaskan jabatan Panglima Kostrad, Kemal dikirim ke Makassar menduduki posisi Panglima Komando Wilayah Pertahanan (Kowilhan), lembaga yang baru saja diciptakan tanpa wewenang yang jelas.

Bersama Kemal, Dharsono dan Sarwo Edhie juga

terlempar dari posisi strategis yang secara bersama telah mereka pergunakan menaikkan Soeharto. Sarwo Edhie ditugaskan ke Medan sebagai Panglima Daerah Militer (Pangdam), dan Dharsono ke Bangkok sebagai Duta Besar. Beberapa waktu kemudian Sarwo Edhie dilempar lebih jauh lagi, sebagai Pangdam di Papua. Sebenarnya Sarwo tadinya sudah diwacanakan mendapat pos sebagai Duta Besar di Moskow. Tapi, pada saat terakhir terjadi perubahan, entah apa alasannya. Adapun Dharsono, dia juga kemudian dimutasi ke negara yang jauh lebih kecil dan terpencil, sebagai Dubes di Phnom Penh, Kamboja.

Di markasnya di Makassar, pada September 1972 Kemal tiba-tiba mendapat perintah menyerahkan jabatan Panglima Kowilhan kepada Jenderal Witono. Perintah disampaikan oleh Jenderal TNI Sumitro, Pangkopkamtib. Pada saat yang sama, Kemal diminta bersiap-siap ke Beograd menduduki jabatan Duta Besar untuk Yugoslavia. Terkejut karena tidak pernah membayangkan dirinya dilempar jauh sebagai Duta Besar, Kemal ke Cendana "mengadukan nasib"-nya langsung kepada Soeharto, mantan atasannya selama bertahun-tahun di Kostrad. Bapak Presiden cuma berkata, "Kamu masih militer, nggak? Kalau kamu masih militer, ini perintah." Kemal tidak punya pilihan lain. Sebagai tentara, Kemal tidak bisa menolak perintah. Dia berangkat ke pos barunya, meski jabatan itu tidak disukainya.

Sebagai Duta Besar di Beograd, almarhum harus tinggal beberapa tahun di Yugoslavia menghabiskan banyak waktunya berburu di hutan-hutan sekitar ibu kota

bersama Josip Broz Tito, Presiden Yugoslavia waktu itu. Ketika berkunjung ke Jakarta pada 1974, Kemal kebetulan jumpa Laksamana Sudomo yang waktu itu memimpin Kopkamtib. Dari Sudomo-lah, menurut Kemal, dia tahu bahwa laporan tentang dirinya kepada Soeharto bersumber dari Ali Murtopo.

Bertahun-tahun menjadi atasan Kemal, Soeharto sebenarnya tidak memerlukan laporan Ali Murtopo untuk menyingkirkan mantan anak buahnya itu. Soeharto tahu riwayat hidup serta sepak terjang Kemal. Soeharto pasti tahu bahwa Kemal sebagai Pangkostrad pernah menolak saran Sultan Hamengkubuwono IX dan Mashuri, S.H. untuk mengambil alih kekuasan dari Soeharto yang mereka nilai terlalu lamban menyelesaikan urusan Sukarno. Tetapi, loyalitas Kemal kepada diri sang Presiden itu tetap saja tidak menggoyahkan kecurigaan Soeharto kepada Kemal.

Ketika kemudian balik ke Jakarta sebagai pensiunan Dubes dan Letnan Jenderal TNI Purnawirawan, dengan penuh harga diri Kemal menolak tawaran fasilitas bisnis dari Soeharto. "Pak Harto sudah sibuk mengurusi negeri ini, biarlah saya mengurusi diri saya sendiri," begitu kira-kira ucapan Kemal menolak tawaran fasilitas dari Soeharto. Setelah itu, Kemal dikenal sebagai "Jenderal Sampah", sebab perusahaannya memang bergerak di bidang pengolahan sampah.

Pilihan jenis bisnis itu bagi seorang pejuang seperti Kemal, menjelang akhir hayatnya, sangat simbolis tapi sekaligus juga ironis. Pada waktu itu, dia sering mengeluh

terhadap perlakuan para pejabat di kantor Gubernur Jakarta (DKI) yang berurusan dengan perusahaan pembersihan sampah miliknya. Tapi, Kemal tidak lagi punya kekuasaan untuk berbuat sesuatu kepada para birokrat yang dinilainya sangat korup. Dia hanya jenderal pensiunan yang tidak pula dekat dengan lingkaran kekuasaan Soeharto.

"Seperti Memakamkan Kucing Saja"

Ketika jumpa Soeharto pada suatu reuni para mantan Tentara Pembela Tanah Air (PETA) di Bogor, Kemal menyampaikan kepada sang Presiden pengalamannya berurusan dengan DKI. "Apa komentar Pak Harto?" tanya saya. "Dia senyum saja," kata Kemal. Kisah Kemal tak berakhir pada sampah. Ketika dilihatnya Soeharto sudah menjadikan dirinya penafsir tunggal konstitusi dan Pancasila pada 1980, Kemal secara terbuka menyatakan simpatinya kepada para pemrotes yang secara bersama menandatangani petisi (Petisi 50), meski Kemal sendiri tidak ikut bertanda tangan. Tentu saja sejak itu Soeharto makin kesal kepadanya. Dan seperti biasa, makin sulitlah kegiatan bisnis Kemal.

JIKA DIBANDINGKAN DENGAN DHARSONO, sebenarnya nasib Kemal masih lebih baik. Dharsono malah sempat dipenjara karena dituduh terlibat Peristiwa Tanjung Priok. Padahal, yang dilakukannya bersama A.M. Fatwa—seorang tokoh Muhammadiyah—hanyalah menyatakan protes terhadap pembantaian rakyat di kawasan Tanjung

Priok oleh pasukan ABRI. Bersama A.M. Fatwa, Dharsono mendekam sekian tahun di penjara. Sekali lagi nasib Dharsono lebih buruk, bukan cuma menjadi narapidana, melainkan semua tanda jasanya juga dicabut.

Panglima Siliwangi Jenderal H.R. Dharsono bersama Komandan RPKAD, Brigjen Sarwo Edhie Wibowo, 1966.

Beberapa saat setelah mendengar kabar kematian Dharsono, saya menelepon KSAD, Jenderal Hartono, agar mempertanyakan kepada Presiden Soeharto status Dharsono. Apakah setelah semua tanda jasanya dicabut masih dimungkinkan memakamkan jasad mantan Panglima Siliwangi itu di Taman Makam Pahlawan. Jawaban Bapak Presiden, "Sudah, begitu saja." Artinya, pemakaman tidak secara militer, juga tidak di Taman Makam Pahlawan. Kemal Idris hadir di pemakaman umum di Bandung melepas kepergian teman seperjuangannya. Gerutu Kemal, "Seperti menguburkan kucing saja."

Berbeda dengan kedua teman sesama *King Maker* lainnya, Sarwo Edhie—seorang kolonel di antara dua koleganya yang Jenderal waktu itu—tidak pernah jelas apa kesalahannya yang menjadi alasan bagi Soeharto untuk secara perlahan "menamatkan" karier militernya. Cerita yang beredar waktu itu adalah bahwa dalam penyingkiran Sarwo, Ali Murtopo memainkan peran besar. Ali yang sejak awal kabarnya sudah memproyeksikan dirinya suatu kali akan menggantikan Soeharto, masuk akal kalau sejak dini—dengan menggunakan "tangan Soeharto"—secara perlahan menyingkirkan tokoh-tokoh yang dianggapnya potensial bakal jadi saingannya pada masa mendatang.

Berbagai sumber waktu itu menjelaskan, isu Sarwo Edhie ditakutkan bakal me-Najib-kan (menyingkirkan Soeharto seperti Kolonel Nasser di Mesir menyingkirkan

Jenderal Najib, seniornya yang bersamanya menggulingkan Raja Farouk) kabarnya berasal dari kelompok Ali Murtopo. Isu demikian memang sempat beredar di kalangan terbatas di Jakarta. Dalam rangka isu itu, tatkala menjabat sebagai Panglima di Medan, pada suatu hari pagi-pagi sekali Brigjen TNI Sarwo Edhie mampir di rumah pondokan saya di Matraman Raya dalam perjalanan pulang ke rumahnya di Cijantung.

"Dari mana Bapak pagi-pagi sekali?" tanya saya dengan sedikit heran. "Dari Cendana," jawab beliau. Cendana itu tempat kediaman pribadi Presiden Soeharto. Acara penting pertemuan Sarwo Edhie dengan Soeharto pagi itu adalah membicarakan soal isu "Sarwo akan menggulingkan Soeharto". Sarwo bertanya: "Pak Harto, apakah soal itu sudah Bapak cek?" Apa jawab Soeharto? "Beliau hanya tersenyum." Tidak ada komentar Sarwo atas jawaban Soeharto yang jelas mengecewakannya itu.

Mengetahui rekam jejak Sarwo yang wataknya bertolak belakang dari Kemal yang pemberang, dan Dharsono yang suka politik (dekat dengan orang-orang Partai Sosialis Indonesia, PSI, dan berperan penting menggagas konsep Dwi Partai di Bandung), Soeharto hampir bisa dipastikan tidak mudah percaya Komandan RPKAD itu akan menggulingkannya. Ali Murtopo mungkin saja mencoba menghasut Soeharto, tapi kebijakan sang Presiden diputuskan tentu berdasarkan kalkulasi untung rugi bagi kelanggengan kekuasaannya sendiri.

Pengalaman bertahun-tahun bersahabat dengan Sarwo Edhie meyakinkan saya bahwa almarhum bukan

orang yang tahu politik, juga bukan seorang yang ambisius. Sarwo cuma tentara, suatu profesi yang dicintainya, tidak lebih dari itu. "Apakah Bapak tidak curiga pada pagi 1 Oktober 1965 itu PKI ada di balik Gestapu?" tanya saya kepada beliau sekian belas tahun kemudian setelah peristiwa berdarah itu. "Tidak menduga sama sekali, sebab PKI itu, kan menerima Pancasila, Manipol, dan selalu menyatakan kesetiaannya kepada Pemimpin Besar Revolusi," jawab beliau dengan polos. Ini buat saya merupakan indikator yang jelas mengenai rendahnya pengetahuan dan minat Sarwo kepada politik. Padahal, beberapa hari sebelum terbunuh pada subuh 1 Oktober itu, Panglima Angkatan Darat, Ahmad Yani datang berkunjung ke markas RPKAD dan memberi taklimat kepada pasukan pimpinan Sarwo. Hari-hari itu ketegangan politik antara PKI dengan Angkatan Darat sudah sangat mencolok.

Yani dan Sarwo adalah teman lama sejak latihan militer pada zaman Jepang. Keduanya berasal dari Purworejo, Jawa Tengah. Satu sumber mengisahkan kepada saya bahwa suatu saat Yani sebenarnya ingin mengambil Sarwo sebagai ipar. Kedekatan kedua perwira TNI asal Purworejo itulah kabarnya yang ikut membakar kemarahan Sarwo kepada PKI setelah Gestapu.

Bahwa Sarwo sebagai Komandan Pasukan Khusus dalam masa tegang antara Angkatan Darat dan PKI sama sekali tidak tahu perkembangan politik, itu berarti Yani tidak mengajaknya bicara politik. Kemungkinan besar Yani tidak merasa perlu bicara politik kepada Sarwo yang

kesetiaannya jelas tidak dia ragukan. Tapi, juga bukan tidak mungkin karena Yani tahu bahwa Sarwo itu hanya tentara yang ikut perintah komandan dan tidak tertarik politik.

Kemudian, terbukti bahwa memang ada pejabat-pejabat penting Angkatan Darat masa itu yang tidak tahu atau tidak tertarik politik. Panglima Jakarta Raya waktu itu, Mayjen TNI Umar Wirahadikusuma adalah salah satunya. Fahmi Idris, tokoh HMI yang kemudian menjadi menteri pada era pasca-Orde Baru, punya cerita menarik mengenai Panglima Umar dan politik. Syahdan, pagi hari 1 Oktober 1965, Fahmi Idris dan Ekky Syahruddin, juga tokoh HMI, menemui Umar di markasnya yang terletak di depan kantor Pertamina sekarang. “Pak Umar tidak tahu dan tidak curiga kalau kejadian pagi hari itu di belakangnya ada berdiri PKI. Kami mencoba meyakinkannya, tapi sulit,” cerita Fahmi. Dalam perjalanan pulang dari Markas Kodam, Ekky curiga, jangan-jangan Umar terlibat. “Ah, tidak mungkin. Dia tidak tahu saja,” kata Fahmi pula.

Ahmad Yani, Sarwo Edhie, dan Suryo Sumpeno (duduk) sebagai perwira PETA pada zaman Jepang.

Kembali ke kasus Sarwo Edhi, untuk mengerti langkah Soeharto menyingkirkannya harus dicari penjelasan lain. Baik Jusuf Wanandi maupun Julius Pour dalam buku

mereka masing-masing ada bercerita bahwa Soeharto mulai tidak percaya bahkan curiga kepada Kolonel Sarwo Edhie pada hari kedua pasca-pembantaian Jenderal oleh Gestapu. Ceritanya bermula ketika dari pangkalan udara Halim Perdana Kusuma, Sarwo yang baru saja menyelesaikan pendudukan lapangan terbang itu berencana melapor ke Soeharto.

Laksamana Muda Udara Herlambang yang secara darurat memimpin Angkatan Udara waktu itu (Panglima AU Omar Dani sudah tidak berfungsi efektif saat itu) meyakinkan Sarwo, Jenderal Soeharto ada di Bogor. Dan kalau Sarwo mau ke Bogor, sang Kolonel dipersilakan ikut terbang bersama dengan menggunakan helikopter yang akan membawa Herlambang ke Istana Bogor. Sarwo dengan pengawalan Mayor Gunawan Wibisono, asisten Operasi RPKAD, ikut terbang bersama perwira tinggi Angkatan Udara itu. Tiba di Istana, Soeharto ternyata masih dalam perjalanan. Sarwo malah sempat jumpa Sukarno yang berpakaian dalam dan tidak pakai kopiah. Komandan RPKAD yang memang tidak pernah melihat Sukarno dari dekat, tidak segera mengenal "orang tua" itu. Kepada saya, Sarwo menceritakan kedongkolannya kepada "orang tua" yang memandang terbunuhnya Yani sebagai hal biasa dalam Revolusi. "Orang dibunuh kok, soal biasa," kata Sarwo kesal.

Wangsit Sarwo Tak Kembali ke Langit

Soeharto menganggap Sarwo melapor kepada Sukarno sebelum kepada Pangkostrad. Soeharto marah. Sarwo

boleh kesal kepada Sukarno, tapi pertemuannya dengan Pemimpin Besar Revolusi itu mendorong Soeharto menganggap Komandan RPKAD itu punya rencana sendiri yang berbeda dengan kebijakannya sebagai pimpinan sementara Angkatan Darat. Kecurigaan dan kemarahan Soeharto kepada Sarwo itu berakibat fatal. Karier militer mantan Komandan RPKAD dibunuh secara kejam meski perlahan-lahan.

Dari Medan Sarwo dilempar ke Papua. Dari Papua ke Magelang menduduki kursi Gubernur Akabri. Dari Magelang dikirim ke Korea sebagai Dubes. Pulang ke Jakarta didudukkan di Departemen Luar Negeri sebagai Inspektur Jenderal (Irjen). Dari Pejambon rencananya Sarwo akan dilempar lebih jauh lagi, ke Brasil. Entah mengapa, terjadi perubahan. Digeser beberapa puluh meter dari kantor Irjen Deplu, Sarwo menemukan dirinya mengurusi kursus Pancasila di BP7. Tidak bisa menolak keputusan Soeharto mendudukkannya pada kursi Kepala BP7, Sarwo Edhie hanya bisa merasa sedih terhadap perlakuan atasannya.

> Kepada kami anak-anaknya, Papi sempat mengutarakan rasa sedihnya. Ya, benar, dia sempat merasa kecewa dengan keputusan itu. Bukan berarti Papi mengecilkan arti BP7, melainkan karena dia merasa langkahnya mendadak dibelokkan ke arah yang tidak pernah dia bayangkan. Papi terlahir sebagai orang yang sangat mencintai dunia militer. Dia masih memiliki hasrat berkobar untuk meneruskan semangat “Sarwo Edhie” seperti yang dia tunjukkan saat peperangan kemerdekaan Agresi Militer Belanda ke-2, masa-masa memimpin RPKAD, dan era pemberantasan PKI.

Begitu cerita Ani Yudhoyono (istri Presiden Susilo Bambang Yudhoyono), salah seorang putri Sarwo Edhie, dalam bukunya, *Kepak Sayap Putri Prajurit*. Sarwo sebenarnya sudah merasa disingkirkan ketika dia akan dikirim sebagai Dubes di Korea Selatan. Saya ingat waktu itu dia bertekad menolak dan akan pensiun saja. Di Cijantung di depan Ibu Sarwo, saya berusaha meyakinkan Jenderal itu agar menerima posisi Dubes, sebab kalau dia pensiun, pasti akan selalu diintai intel. Artinya, hidupnya tidak akan tenang. ”Bapak nikmatilah posisi dubes itu,” bujuk saya.

Sarwo yang pernah Sesko di Australia, kemudian bersedia menjadi Dubes asal ditempatkan di Canberra. “Pak, posisi di sana itu baru saja diisi oleh Jenderal Hertasning.” Akhirnya, Pak Sarwo berangkat juga ke Korea Selatan sebagai Dubes Indonesia pertama di Seoul. Posisi pimpinan KBRI di Korsel itu sebelumnya diduduki oleh Kolonel L.B. Moerdani, dengan pangkat diplomatik Kuasa Usaha.

Ketika saya berkunjung ke tempat tugasnya, saya tidak melihat atau mendengar keluhan dari Pak Dubes. Sarwo seorang serdadu yang terbiasa melakukan perintah atasannya sebaik mungkin tanpa mengeluh, apalagi di depan orang lain.

KALAU ANDA PERCAYA PADA MISTIK JAWA, dengarlah penjelasan seorang paranormal mengenai akar buruknya hubungan Soeharto-Sarwo. Cerita paranormal itu disampaikan kepada saya di Praha ketika saya menjabat

Duta Besar di negeri tersebut, tidak lama setelah mantan Presiden Soeharto meninggal. Kata paranormal tersebut, Soeharto yakin bahwa yang punya wangsit (wahyu) setelah dirinya adalah Sarwo Edhie. Untuk memperpanjang dan mengamankan kekuasaannya, maka semua jalan yang dipandang Soeharto mungkin dimanfaatkan Sarwo Edhie mempergunakan wahyunya untuk "naik takhta", harus ditutup.

Itulah, katanya, penyebab dihabisinya karier militer Sarwo Edhie sedini mungkin. Kata paranormal itu lagi, Soeharto lupa bahwa wangsit Sarwo itu tidak kembali ke langit ketika mantan Komandan RPKAD itu wafat setelah koma selama sekitar setahun. Wangsit itu tetap padanya untuk akhirnya hinggap ke putrinya, Herawati Kristiani Yudhoyono. Itulah, kata sang paranormal, penjelasan di balik terpilihnya Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), suami Herawati, menjadi Presiden Republik Indonesia.

"Ah, itu cerita omong kosong. Pak Harto marah kepada Bapak karena ke Bogor itu. Bapak dicurigai sebagai orang ambisius oleh Soeharto," kata Ibu Sunarti Sarwo Edhie, istri Jenderal Sarwo Edhie, kepada saya pada 29 Desember 2012 di rumah Cijantung, Jakarta Timur.

Masih mengenai hubungan Soeharto dengan Sarwo Edhie, Daud Sinyal, wartawan senior yang bersama saya meliput operasi RPKAD di Jawa Tengah pada November 1965, mempunyai penjelasan tambahan. "Sarwo itu teman Yani, sementara Soeharto tidak suka kepada Yani." Dan pada hari-hari awal Gestapu, Sarwo melapor langsung kepada Jenderal Nasution, Kepala Staf Angkatan

Bersenjata waktu itu. Baru setelah Soeharto menjadi Panglima Komando Operasi Pemulihan Keamanan dan Ketertiban (Pangkopkamtib), Sarwo melapor langsung kepada Soeharto. Faktor ini tentu berpengaruh juga terhadap sikap Soeharto kepada Sarwo Edhie. Jadi, penyingkiran Sarwo Edhie bisa dilihat juga sebagai bagian dari kebijakan Soeharto membersihkan teman-teman Yani dari pusat kekuasaan militer. Menarik untuk dicermati, ketika dulu Yani menggantikan posisi Jenderal TNI Nasution sebagai pimpinan Angkatan Darat pada 1962, Yani juga "membersihkan" orang-orang Nasution dari Markas Besar Angkatan Darat.

DOK. PRIBADI

Soeharto dan Sarwo Edhie, 1966.

SAYA BERSAHABAT DENGAN SARWO EDHIE sejak almarhum masih berpangkat kolonel pada masa operasi pembersihan terhadap Gestapu. Persahabatan berlanjut hingga akhir hidupnya pada November 1989. Kami berjumpa di Solo dalam posisi saya sebagai reporter muda yang meliput operasi RPKAD membersihkan Gestapu di kalangan militer Jawa Tengah waktu itu. Persahabatan kami berlangsung hampir 30 tahun lamanya. Nah, selama bergaul dengan almarhum tidak sekali pun saya mendengar almarhum menggerutu mengenai Soeharto. Satu-satunya kritik Sarwo Edhie kepada Soeharto yang diucapkannya pada tahun delapan puluhan adalah: "Kok, Pak Harto itu tak seorang pun anaknya yang jadi tentara." Anak lelaki serta tiga mantu Sarwo memang semua tentara. Putranya, Jenderal Pramono Edhie Wibowo, bahkan berhasil menjadi Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) setelah sebelumnya menjadi Komandan Jenderal Kopassus, Panglima Kodam Siliwangi, dan Panglima Kostrad.

Prinsip Soeharto tampaknya adalah, kalau bisa kaya raya dengan cepat, mengapa harus bersusah-susah jadi bawahan sebelum akhirnya jadi jenderal. Lagi pula jadi jenderal pun belum tentu kaya. Buktinya adalah Sarwo Edhie sendiri. Almarhum adalah seorang Jenderal terkenal yang tetap tidak punya apa-apa—bahkan tidak punya rumah pribadi—hingga akhir hayatnya. Dalam hal ini, Soeharto jelas lebih cerdik, praktis, dan realistis tinimbang

Sarwo Edhie. Buktinya, anak-anak Soeharto difasilitasi untuk berdagang saja. Dan memang semua kemudian menjadi kaya raya.[]

“Kau Laporkan Ini kepada Pak Harto, Ben!”

Jenderal TNI Muhammad Jusuf dilantik di Istana Negara sebagai Panglima ABRI pada suatu hari di bulan Maret 1978. Sebagai wartawan majalah Tempo, saya ditugaskan meliput upacara tersebut. Berdiri di samping Letjen TNI Wijoyo Suyono, saya berbisik kepada Panglima Kowilhan (Komando Wilayah Pertahanan) Jawa-Madura waktu itu: “Jangan-jangan Pak Jusuf sudah tidak tahu aturan baris-berbaris.” Jenderal yang juga mantan komandan RPKAD itu cuma tersenyum, tanpa komentar. Barangkali karena tahu saya wartawan. Tentu saja Jenderal itu tidak ingin dikutip berkomentar tentang Panglimanya yang hari itu dilantik.

Meski setengah bergurau saya sebenarnya punya dasar bertanya. Ketika dilantik menjadi Panglima ABRI, Jenderal TNI Muhammad Jusuf sudah 14 tahun meninggalkan jajaran militer aktif, yakni sejak menjadi menteri pada zaman akhir Demokrasi Terpimpin (1965). Dan dalam masa 14 tahun itu telah terjadi perubahan tata baris-berbaris ABRI.

Di kemudian hari, dari Atmadji Sumarkidjo, wartawan

dan penulis biografi Jenderal Jusuf, saya mendapat informasi Jenderal TNI Jusuf menjelang hari pelantikannya memang berlatih baris-berbaris selama tiga hari di ruang tamu kediamannya. Pengawas latihan adalah Elly Jusuf, istri sang Panglima.

Pangkat terakhir Jusuf dalam jajaran ABRI adalah Brigadir Jenderal. Jabatan militer terakhirnya adalah Panglima Kodam XIV/Hasanuddin. Kesuksesannya mengakhiri pemberontakan Kahar Muzakkar di Sulawesi Selatan menarik perhatian Presiden Sukarno. Beberapa bulan setelah Kahar Muzakkar tertembak mati dalam sebuah operasi pimpinan Kolonel M. Jusuf, Sukarno mempromosikan Pangdam Hasanuddin tersebut menjadi Menteri Perindustrian Ringan.

Adalah menarik untuk mengetahui peran Kahar Muzakkar atas diri Jusuf ketika mereka bersama-sama di Yogyakarta pada awal Revolusi. Jusuf adalah ajudan Kahar yang waktu itu sudah menduduki posisi penting pasukan yang akan diselundupkan ke Sulawesi Selatan oleh Markas Besar Tentara (MBT). Menurut Dr. A.M. Fatwa, seorang sepupu Jusuf, Kahar-lah yang mendesak Jusuf untuk segera kawin. Andi Mattalatta, seorang tokoh pejuang dan pimpinan militer orang-orang Sulawesi Selatan di Pulau Jawa waktu itu, adalah pimpinan panitia perkawinan Jusuf.

Jusuf kawin dengan Maesorah, putri Ibu Hilal, seorang cucu K.H. Ahmad Dahlan, pendiri Muhammadiyah. Selain aktivis Islam, calon mertua Jusuf tampaknya juga seorang pejabat cukup penting di Istana Kepresidenan, Gedung Agung Yogyakarta. Karena itu, Jusuf (berpangkat Kapten

waktu itu) setiap hari mengantarkan mertuanya ke Gedung Agung. Menurut Mayjen TNI Andi Mattalatta dalam memoarnya *Meniti Siri' dan Harga Diri* (2003),

> Perangai Kapten Andi Mo'mang [nama kecil Jusuf di kampungnya] sopan dan halus, sangat menarik simpati Presiden. Akhirnya, Kapten Andi Mo'mang dianggap sebagai anak tertua dari Bung Karno.

Tidak banyak yang diketahui mengenai kisah perkawinan Jusuf dan Maesorah, kecuali bahwa mereka mendapatkan seorang anak perempuan, bercerai, dan Maesorah kemudian kawin dengan seorang Melayu Singapura, dan menetap di sana sebagai warga negara di negara pulau tersebut hingga akhir hayatnya.

Istri Jusuf yang dikenal publik adalah Elly Saelan, saudara Emmy Saelan, seorang yang berjuang bersama Walter Monginsidi di Makassar pada awal Revolusi (ditangkap dan dihukum mati oleh pengadilan Negara Indonesia Timur, NIT) dan Kolonel Maulwi Saelan, Wakil Komandan Pasukan Pengawal Presiden Sukarno, Cakrabirawa. Dari Elly, Jusuf mendapatkan seorang anak laki-laki yang meninggal ketika masih kecil. Tampaknya Jusuf tidak pernah punya hubungan dengan anaknya dari Maesorah.

Kenyataan bahwa Jusuf dikenal Presiden Sukarno secara pribadi sejak awal Revolusi di Yogyakarta mungkin memegang peranan menentukan ketika Jenderal Soeharto mendukung gagasan Jusuf menemui sang Presiden di Istana Bogor pada 11 Maret 1966. Seperti luas diketahui, pagi harinya secara sangat tergesa-gesa Presiden Sukarno menyingkir dengan helikopter ke Istana

Bogor meninggalkan sidang Kabinet yang sedang berlangsung. Waktu itu, Istana dilaporkan sedang berada dalam kepungan pasukan yang tidak mempergunakan tanda pengenal.

BEBERAPA BULAN SETELAH JUSUF MENJADI MENTERI, terjadi Gestapu pada 1 Oktober. Di tengah kegalauan politik dan militer pasca-Gestapu, nasib mujur hinggap pada diri Jusuf. Ditemani oleh Jenderal Basuki Rachmat dan Jenderal Amir Mahmud, Jenderal Jusuf berhasil mendapatkan Surat Perintah 11 Maret (Supersemar) dari Sukarno untuk Soeharto.

Supersemar adalah senjata perkasa bagi naiknya Jenderal Soeharto ke kursi kekuasaan. Ironisnya, tiga perwira yang berhasil "mendesak" Sukarno mengeluarkan Supersemar—Kemal Idris, H.R. Dharsono, dan Sarwo Edhie—justru mengalami nasib tragis. Ketiga *king maker* tersebut tersingkir dan terbuang jauh dari pusat kekuasaan.

Nasib mujur itu bukannya datang dengan tak terencana. Cerita bermula ketika terjadi Gestapu pada 1 Oktober 1965. Waktu itu Brigjen TNI M. Jusuf berada di Beijing sebagai bagian dari 600 pejabat tinggi Indonesia yang diundang pemerintah Tiongkok menghadiri hari nasional negeri tersebut.

Begitu mendapat kabar tentang terjadinya Gestapu di Jakarta, dengan segera Jusuf mencari sendiri jalan pulang. Pemerintah Tiongkok dicurigai menghambat kepulangan para tamu Indonesia dengan alasan perlu waktu

menyediakan pesawat terbang untuk rombongan besar dari Jakarta.

Jusuf mengambil jalan pintas. Dengan kereta api, lewat Guangdong, sang Jenderal berangkat sendiri ke Hongkong. Mendapatkan informasi yang cukup tentang apa yang terjadi di Indonesia selama transit di koloni Inggris itu, Jusuf terbang sendiri ke Jakarta.

Tiba di Kemayoran, dia tidak langsung melapor ke bosnya, Presiden Sukarno. Jusuf mengarahkan langkahnya ke Kostrad, tempat Soeharto memimpin operasi penumpasan PKI. Keputusan Jusuf yang sangat jitu itu patut diduga bersumber pada insting politiknya yang tajam, yang menuntunnya berdasarkan keyakinan era Sukarno sudah akan berakhir, dan takhta bakal beralih ke tangan Soeharto.

Hampir sepuluh tahun sebelumnya di Makassar, insting politik Jusuf juga menuntunnya dengan baik. Ini berhubungan dengan cerita lahirnya Permesta (Perjuangan Semesta) yang diproklamasikan oleh Kolonel Infantri H.N.V. Sumual, Panglima Tentara dan Teritorium (TT) VII waktu itu. Jusuf adalah pendukung bahkan ikut merancang konsep Permesta.

Namun, Sumual dalam memoarnya menulis tentang Jusuf:

> Begitu Permesta diproklamasikan 2 Maret, Jusuf langsung melapor ke Yani di MBAD, dan minta instruksi militer. Artinya, memberi diri untuk menghantam kami. Padahal, dia paling aktif bersama Saleh Lahade, Dokter Engelen, dan Bing Latumahina dalam merancang Permesta."

Lewat Jenderal Yani, karier Jusuf menanjak ketika teman-temannya di Permesta terpojok untuk akhirnya menjadi pemberontak yang ditumpas TNI. Yani adalah teman lama Jusuf sejak mereka berjumpa ketika sama-sama belajar di Amerika Serikat sekian tahun sebelumnya.

Oleh karena itu, kalau dulu Jenderal TNI Yani yang menjadi titian karier Jusuf, selepas tewasnya Panglima Angkatan Darat itu di tangan Gestapu, Jenderal TNI Soeharto, yang lebih berkuasa daripada Yani, merupakan tangga lanjutan bagi karier Jenderal dari Makassar itu. Adalah loyalitasnya kepada Soeharto—melapor langsung ke Kostrad dari Lapangan Terbang Kemayoran—yang membuka kesempatan baginya dipercaya Soeharto menemui Sukarno di Istana Bogor yang berakhir dengan keluarnya Supersemar.

Soeharto adalah orang yang tahu berterima kasih kepada mereka yang mendukungnya tanpa kemudian menjadi potensi ancaman bagi kepentingan dan kekuasaannya. Dari singgasana kekuasaannyalah Soeharto kemudian "membayar" jasa-jasa Basuki Rahmat, Amir Mahmud, dan Andi Muhammad Jusuf.

Ketiga jenderal itu mendapat "anugerah" jabatan-jabatan tinggi. Yang pertama mendapat "anugerah" adalah Basuki Rahmat. Masih pada awal kekuasaan Soeharto, mantan Pangdam Brawijaya dari Jawa Timur itu sudah didudukkan sebagai Menteri Dalam Negeri. Ketika Basuki mendadak wafat di kantornya, Amir Mahmud—waktu itu Panglima Kodam Jakarta Raya—dipromosikan menggantikan almarhum Jenderal Basuki. Yang terakhir

mendapatkan "anugerah tanda terima kasih" adalah Jusuf.

Berbeda dengan Amir dan Basuki yang kebagian jabatan di luar struktur militer, Jusuf yang sudah lebih lama menanggalkan pakaian dinas militer—menduduki kursi Menteri Perindustrian selama 14 tahun—justru diangkat Soeharto memimpin ABRI. Bisa diduga bahwa ini adalah suatu sensasi besar dan topik pembicaraan yang hangat pada masa itu. Jusuf sendiri kabarnya terkejut. "Pak Jusuf tidak pernah mimpi, apalagi membayangkan dirinya jadi Jenderal berbintang empat dan memimpin ABRI," kata seorang keponakannya di Makassar kepada saya tidak lama setelah Jusuf wafat.

Namun, Soeharto punya mau dan kuasa. Tak berhenti pada Jusuf. Bapak Presiden juga kemudian mengangkat L.B. Moerdani ke posisi Panglima ABRI, padahal Benny lebih tidak memenuhi syarat menduduki posisi pemimpin tertinggi tentara.

Tidak memiliki pengalaman komandan yang memimpin tentara lebih tinggi dari tingkat batalion, tidak pernah menduduki jabatan teritorial dan pendidikan, tidak pernah mengikuti pendidikan Sekolah Staf (Sesko), sebagian besar kariernya di pasukan tempur dan dunia intelejen, Soeharto toh menjadikan Moerdani sebagai Panglima ABRI. "Pengangkatan Pak Benny sebagai Pangab tidak mengikuti rute yang lazim," menurut Mayjen TNI (Purn.) Zacky Anwar. "Kekuasaannya besar dan solid. Tidak ada Panglima ABRI yang memiliki kekuasaan atau sejumlah jabatan rangkap seperti Pak

Benny. Sebagai Asintel (Asisten Intelijen Hankam), dia sering melewati atau melakukan *by pass* kebijakan Kas (Kepala Staf Angkatan)," lanjut Jenderal Zacky Anwar.

Seperti Jusuf sebelumnya, Benny juga terkejut menemukan dirinya duduk di kursi Panglima ABRI. "Saya tidak pernah bermimpi duduk di kursi ini. Saya sudah teken mati sebagai intel," kata Moerdani kepada saya di kantornya di Jalan Merdeka Barat, pada 14 November 1984.

Tambahan penjelasan di balik pengangkatan Jusuf menjadi Panglima ABRI bisa ditemukan dalam memoar Jusuf Wanandi, *Shades of Grey*. Wanandi dari Centre for Strategic and International Studies (CSIS) waktu itu adalah seorang yang sangat dekat dengan pusat kekuasaan, jadi tentu saja dia tahu banyak pergolakan dalam tubuh pemerintah. Menurut Wanandi, dalam sebuah rapat para jenderal pada awal 1978 di Markas Besar ABRI, muncul suara-suara kritis kepada kebijakan Soeharto, terutama mengenai sikap pemerintah yang keras kepada mahasiswa sebagaimana yang dijalankan oleh Menteri Pendidikan, Dr. Daud Jusuf, dan tindakan keras oleh Pangkopkamtib, Laksamana Sudomo.

> Adalah Jusuf, waktu itu Menteri Perindustrian, yang berbicara lantang mendukung Soeharto, dan kebijakan yang keras kepada mahasiswa. Dia memperingatkan para jenderal agar jangan mencoba-coba merampas kekuasaan dari Soeharto. Dia bahkan mengancam akan menentang semua usaha menyingkirkan Soeharto.

Dengan kekuatan apa Jenderal Jusuf, yang Menteri

Perindustrian, akan melawan para jenderal yang kritis terhadap Soeharto? Yang tahu jawaban pertanyaan itu hanya Bapak Presiden. Soeharto barangkali saja mengambil keputusan menjadikan Jusuf Panglima ABRI berdasarkan laporan Moerdani yang menyaksikan sendiri "pameran" kesetiaan Jusuf kepada Soeharto di hadapan banyak jenderal.

Selanjutnya kita boleh sibuk berdebat panjang untuk mengerti dasar atau alasan Soeharto mengangkat Jusuf, Moerdani, Panggabean, dan Sudomo sebagai Pangkopkamtib. Kita juga tidak akan kehabisan cerita mengenai tingkah laku Benny yang berangkat dari loyalitas penuh kepada Soeharto kemudian berakhir dengan "de-Benny-isasi" akibat kemarahan sang Presiden kepadanya. Atau, Jusuf yang lebih banyak di lapangan—membagi-bagi rezeki kepada para prajurit—daripada duduk di kursinya di Departemen Pertahanan dan Keamanan (Hankam).

Akan tetapi, satu hal yang pasti, semua itu dimungkinkan oleh kekuasaan Soeharto yang luar biasa sehingga bisa berbuat apa saja, kapan saja, dan mengangkat siapa saja ke nyaris jabatan apa saja. Tapi, mengapa Jusuf? Mengapa Moerdani? Pertanyaan bisa diteruskan dengan juga menyebut nama Maraden Panggabean, Panglima ABRI yang digantikan oleh Jusuf, dan Panglima Kopkamtib, Laksamana Sudomo. Dan mengapa, misalnya, bukan Kemal Idris yang telah amat berjasa, atau R. Soedirman yang jauh lebih senior dari Panggaben dan Jusuf? Pertanyaan ini akan segera

terjawab jika kita bisa menemukan persamaan dan perbedaan di antara para jenderal tersebut.

Soedirman Berani Melawan Nasution

Kendati keempat yang pertama memiliki sejumlah perbedaan, di mata Soeharto, persamaan mereka jauh lebih menonjol. Semuanya tidak merupakan ancaman potensial bagi kekuasaan sang Presiden. Dengan pendekatan seperti inilah, Soeharto tidak memilih Letjen TNI Raden Soedirman (mantan Panglima Brawijaya, mantan Komandan Seskoad) untuk menggantikannya sebagai Panglima Angkatan Darat ketika jabatan itu harus ditinggalkannya.

Soedirman adalah seorang santri Jawa Timur yang amat saleh—setelah pensiun aktif di Majelis Ulama Indonesia—dan terkenal sebagai orang yang berani melawan Kolonel A.H. Nasution pada peristiwa 17 Oktober 1952, tapi kemudian menjadi pendukung Jenderal tersebut ketika KSAD itu melawan komunis.

Di mata Soeharto, bisa diduga, Letjen TNI Raden Soedirman adalah potensi ancaman bagi kekuasaannya. Kemal Idris juga kurang lebih sama saja dengan R. Soedirman. Keduanya diperhitungkan Soeharto sebagai tidak akan memberi jaminan aman bagi kelanggengan kekuasaan Bapak Presiden.

Jenderal Panggabean yang lebih junior dari Soedirman adalah penganut Kristen Protestan, berasal dari Tanah Batak, Sumatra Utara, dan sebagian besar dinas militernya berlangsung di luar Jawa. Jusuf beragama Islam, orang Bugis dari Sulawesi Selatan yang nyaris semua masa aktif

militernya juga berlangsung di luar Jawa. Dan yang lebih penting, ketika diangkat menjadi Panglima ABRI, Jusuf sudah 14 tahun meninggalkan dinas militer aktif. Dengan latar belakang demikian, Jusuf yang tidak berakar dalam ABRI tentu telah diperhitungkan Soeharto sebagai sulit menggunakan tentara menentang Bapak Presiden.

Sudomo dari Angkatan Laut, meski putra seorang haji dari Malang, waktu diangkat, sang Laksamana itu karena perkawinan sedang beragama Protestan. Benny Moerdani memang dari Jawa Tengah, tapi perwira Komando dan Raja Intel itu beragama Katolik, berdarah Indo-Jerman, dan jabatan tertingginya dalam militer hanya komandan batalion bisa diduga menurut perhitungan Soeharto, Moerdani juga sulit berakar dalam ABRI. Artinya, bukan potensi ancaman.

Oleh karena itu, ketika ternyata kemudian Moerdani mempunyai keberanian dan keterampilan secara perlahan mengalihkan loyalitasnya dari Soeharto ke lembaga ABRI —setelah menguasai tentara lewat aparat intelijennya (Bais)—dengan cepat, mudah, dan saksama, Soeharto menyingkirkan panglima yang Intel itu dan orang-orang yang dianggap sebagai pengikut Benny.

Dalam biografi M. Jusuf, *Jenderal M. Jusuf: Panglima Para Prajurit*, Atmadji Sumarkidjo menulis:

> Jusuf tidak menolak teori bahwa dia dipercaya menjadi Menhankam/Pangab karena dianggap tidak memiliki faktor yang cukup untuk membahayakan kedudukan Presiden. Dia sadar bahwa dia adalah "orang seberang" yang sulit (pada waktu itu) untuk bisa bercita-cita menjadi Presiden. Dalam anggapan banyak orang dan juga Presiden Soeharto, orang yang bisa

mengancam kedudukannya sebagai Presiden pasti mempunyai tiga hal: seorang tentara berpangkat jenderal, beragama Islam, dan suku Jawa.

SEBAGAI PANGLIMA ABRI, Jusuf dengan cepat menjadi populer, karena meski semua kegiatan publiknya selalu atas nama Soeharto (selalu menyampaikan salam Pak Harto kepada para prajurit yang didatanginya), kunjungan dan perhatiannya kepada prajurit bukan cuma menarik perhatian dan simpati tentara, melainkan juga masyarakat luas.

Ketika cerita buruk tentang Soeharto dan keluarganya sudah perlahan merayap ke masyarakat luas, fokus harapan berangsur tertuju kepada Jusuf. Akibatnya, Soeharto dikabarkan mulai agak cemas. Jusuf sadar keadaan itu. Mantan Menteri Perindustrian ini tidak terlalu cemas sebab tahu dirinya terus menerus dibayang-bayangi oleh Moerdani, Kepala Intel ABRI dan Laksamana Sudomo, Panglima Kopkamtib dan Wakil Panglima ABRI.

Oleh karena itu, Jusuf yakin Soeharto tahu Panglima ABRI sama sekali tidak melakukan hal-hal yang mengancam kekuasaan Soeharto. Setiap menghadapi hal-hal yang sensitif, Jusuf selalu memberi perintah kepada Kepala Intelnya: "Kau laporkan ini kepada Pak Harto, Ben."

Sadar dimata-matai dan diawasi, Jusuf toh tidak mengabaikan kesempatan menyatakan pendapatnya tentang praktik Dwifungsi waktu itu. Selain melarang tentara berdagang, melarang tentara jadi gubernur, Jusuf juga punya gagasan agar ABRI berdiri di atas semua

golongan. Artinya, ABRI tidak lagi mendukung Golkar.

Soeharto menilai tidak realistis gagasan Jusuf yang terakhir ini. Pada Rapim ABRI di Pekanbaru bulan Maret 1980, Soeharto dengan tegas menyebut ABRI masih akan mendukung Golkar. Soeharto memerintahkan Laksamana Sudomo memberi penjelasan kepada para panglima Kodam di seluruh penjuru Indonesia, menyosialisasikan keputusan Soeharto tersebut.

Sadar bahwa Soeharto sangat percaya kepada Moerdani waktu itu, konon Jusuf pulalah yang menyarankan agar Benny saja yang diangkat menjadi penggantinya. Mungkin Jusuf berpikir, "Daripada ditugasi memata-matai Panglima, sekalian saja dijadikan Panglima." Berbeda dengan Jusuf yang tidak membangun jaringan pengikut dalam ABRI, jaringan intel yang bertahun-tahun dibangun Moerdani menjadi modal bagi Panglima ABRI dan Kepala Intel itu menguasai tentara. Kekuasaan dan kontrol yang ketat Moerdani atas ABRI itulah yang tampaknya kemudian menimbulkan ketakutan Soeharto.

Dengan demikian, setelah Moerdani akhirnya disingkirkan secara prematur dari posisi Panglima, Soeharto dengan cepat melancarkan pembersihan terhadap para perwira yang dipandang sebagai pengikut Benny. "Orang-orang yang dianggap dekat dengan saya sulit mendapat promosi," kata Moerdani kepada saya di kantor CSIS beberapa tahun sebelum mantan Panglima ABRI itu jatuh sakit yang kemudian berakhir pada kematiannya.

Saya Ini Orang Bugis

Pembersihan dalam tentara tidak perlu dilakukan Soeharto setelah dengan baik-baik menurunkan Jusuf dari kursi Panglima ABRI sesuai dengan jadwal. Jusuf memang tidak dianggap, oleh siapa saja, sebagai membahayakan Soeharto. Kendati demikian, sang Presiden kabarnya pernah juga cemas melihat popularitas Jenderal dari Makassar itu. Dalam buku biografi M. Jusuf, ada dikisahkan suatu pertemuan di kediaman pribadi Presiden yang dihadiri sejumlah pejabat tinggi negara.

> Adalah Mendagri [Jenderal TNI Amir Mahmud] yang berbicara pertama kali, [bahwa] dengan semakin populernya Jenderal Jusuf selaku Menhankam/Pangab, maka diduga ada "ambisi-ambisi tertentu" Jenderal Jusuf yang perlu ditanyakan kepada yang bersangkutan.
>
> Tiba-tiba Jenderal Jusuf menggebrak meja dengan tangannya. Dengan suara keras dia berkata, "Bohong! Itu tidak benar semua! Saya ini diminta untuk jadi Menhankam/Pangab karena perintah Bapak Presiden. Saya ini orang Bugis. Jadi, saya sendiri tidak tahu arti kata kemanunggalan yang bahasa Jawa itu. Tapi, saya laksanakan perintah itu sebaik-baiknya tanpa tujuan apa-apa."

Gebrakan meja Jusuf mengejutkan semua yang hadir. Soeharto sebagai tuan rumah dengan cepat membubarkan pertemuan yang berlangsung hanya beberapa menit. Konon sejak itu, hubungan Jusuf-Soeharto mulai mendingin dan sidang-sidang kabinet di Binagraha tidak pernah lagi dihadiri Jusuf. Untuk mengikuti sidang kabinet, Panglima ABRI selalu mengirim wakilnya, Laksamana TNI Sudomo.

Meski kelihatan janggal, tapi sebenarnya bisa dimengerti jika Jusuf marah di kediaman Bapak Presiden. Pertemuan membicarakan popularitas Jusuf mudah dipastikan tidak akan berlangsung tanpa persetujuan, kalau tidak malah digagas oleh, sang Presiden sendiri. Amir Mahmud berani memulai pembicaraan mengenai soal yang sangat peka pastilah atas petunjuk Soeharto. Jenderal Jusuf yang telah dengan sadar menjaga agar popularitasnya tidak mencemaskan Soeharto jelas kesal melihat bosnya tetap saja mewaspadainya.

Dalam keadaan was-was terhadap akibat popularitas M. Jusuf, intel-intel Soeharto ternyata tidak juga pernah mempunyai cukup informasi mengenai langkah-langkah Panglima yang bisa dicurigai sebagai sedang membangun dukungan di dalam ABRI. Hal itu jelas berbeda dengan persepsi Soeharto kepada langkah-langkah Moerdani di kemudian hari.

Di mata Soeharto, Moerdani menggunakan aparat intel dan kontrolnya atas ABRI untuk suatu rencana kekuasaan. Moerdani yang beragama Katolik dan berdarah Indo, menguasai intel selama 14 tahun, tapi sadar dirinya tidak mungkin menjadi Presiden. Maka, masuk akal jika Moerdani ditengarai hanya berambisi menjadi *King Maker.* Dan ambisi itu kabarnya terbaca oleh Soeharto. Ketika Try Sutrisno—di mata Soeharto sudah jadi orang binaan Moerdani—dicalonkan ABRI menjadi Wakil Presiden, Soeharto dengan cepat melihat Moerdani berada di balik pencalonan tersebut.

Sebaliknya, sebagai orang Bugis, penganut Islam yang

taat, dan berasal dari Kodam kecil di luar Jawa, Jusuf tahu betul jabatan Panglima ABRI adalah jabatan dengan kekuasaan tertinggi yang mungkin dicapainya. Jabatan Wakil Presiden tidak akan diraihnya selama Soeharto masih berkuasa.

Lagi pula, sejak muda, dia tidak mempunyai kemampuan membina pengikut. Dalam semua jabatannya, dari pangkat Letnan sebagai ajudan Kahar Muzakkar di Yogyakarta, sebagai ajudan untuk Kolonel Kawilarang di Makassar, Panglima Kodam VII, sampai pada posisi bintang empat yang duduk di Mabes ABRI, Jusuf dikenal sebagai orang yang selalu menghindar dari tamu, terutama keluarga dekat atau orang sekampungnya.

Di atas pintu kediamannya di Jalan Teuku Umar, misalnya, Jusuf memasang C*lose Circuit Television* (CCTV) sehingga mudah baginya memonitor dan menyeleksi tamu yang berkenan diterimanya. Atau—yang kebanyakan—ditolaknya. Kesalahan Jusuf sebagai Panglima ABRI barangkali adalah kurangnya kepekaan sang pemimpin tentara ini kepada publikasi yang berlebihan mengenai diri dan kegiatannya. Ketika di televisi (hanya ada TVRI dengan satu saluran waktu itu) setiap malam berita Jusuf mengunjungi prajurit di seluruh penjuru Indonesia dan berbicara spontan kepada mereka dengan aksen Bugisnya yang kental—suatu tontonan yang jelas lebih menarik dibanding penampilan Soeharto yang berpidato monoton—tentu saja Bapak Presiden merasa terganggu.

Panglima ABRI, Jenderal TNI M. Jusuf di Papua, 1981.

Popularitas demikian difasilitasi oleh Panglima dan Menhankam itu dengan menyediakan kamera dan peralatan elektronik canggih untuk Pusat Penerangan (Puspen) Departemen Pertahanan dan Keamanan (Dephankam) agar setiap saat dan dalam waktu singkat bisa mengirimkan laporan perjalanan Jusuf ke TVRI pusat dari lokasi mana saja di seluruh pelosok Indonesia.

Citra Jusuf dan popularitas Jenderal dari Makassar tersebut bisa juga ditafsirkan sebagai ekspresi kebosanan masyarakat kepada Soeharto. Jadi, kewaspadaan Soeharto kepada Jusuf bukan terutama karena curiga kepada Jusuf secara pribadi. Yang tampaknya lebih ditakuti Bapak Presiden adalah opini publik yang dirasakannya makin kurang positif terhadap diri, keluarga, dan rezimnya yang terdorong ke permukaan oleh aktivitas dan popularitas sang Panglima.

JUSUF SENDIRI SESUNGGUHNYA adalah tokoh kontroversial. Terlahir sebagai bangsawan tinggi tanah Bugis, putra Arung (raja) Kajuara, Bone, di kemudian hari —pada masa Demokrasi Terpimpin—dia menghapuskan gelar bangsawan, Andi, di depan namanya. Wakil Presiden Dr. H.M. Jusuf Kalla masih ingat iklan yang dipasang Jusuf di koran Makassar pada awal tahun enam puluhan yang secara terbuka menyatakan dirinya tidak lagi memakai gelar Andi. Penjelasannya, menurut Jusuf Kalla sebagai tokoh masyarakat Sulawesi Selatan asal Bone yang dekat dengan sang Jenderal, "Di masa kecilnya di Bone, Pak

Jusuf muak melihat kesewenang-wenangan beberapa bangsawan kepada rakyat kecil." Kendati demikian, sejumlah orang melihat keputusan menanggalkan gelar itu sebagai suatu kebijakan politik penyesuaian diri kepada alam Demokrasi Terpimpin yang populis.

Namun, tabiat sehari-hari Jenderal Jusuf—terutama dalam berhadapan dengan orang lain yang lebih rendah derajat sosialnya—tetaplah seperti layaknya para bangsawan yang sadar akan tempatnya dalam masyarakat. Mungkin kesadaran sebagai bangsawan itulah yang membuatnya menjaga jarak dengan siapa saja. Dengan latar belakang demikian, M. Jusuf jelas sulit punya pengikut.

Dekat dengan para prajurit sebagai kelompok, Jenderal Jusuf tidak mempunyai kedekatan pribadi hampir dengan siapa pun, juga dalam ABRI. Karakter pribadi seperti itulah yang berperan menghindarkan Jenderal Jusuf dari kemungkinan berkonspirasi terhadap kekuasaan Soeharto. Juga ketika banyak yang berharap dia bisa membangun kekuatan menggantikan Bapak Presiden. Karena itu, Jusuf selamat.

Sebagai tanda senang dan pernyataan terima kasih Soeharto kepada Jusuf, segera setelah mantan Panglima ABRI itu pensiun dari dinas ketentaraan, Presiden mendudukkannya sebagai Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), suatu jabatan yang posisi protokolnya setara dengan Presiden.

Masjid Al-Markaz Al-Islami di Makassar.
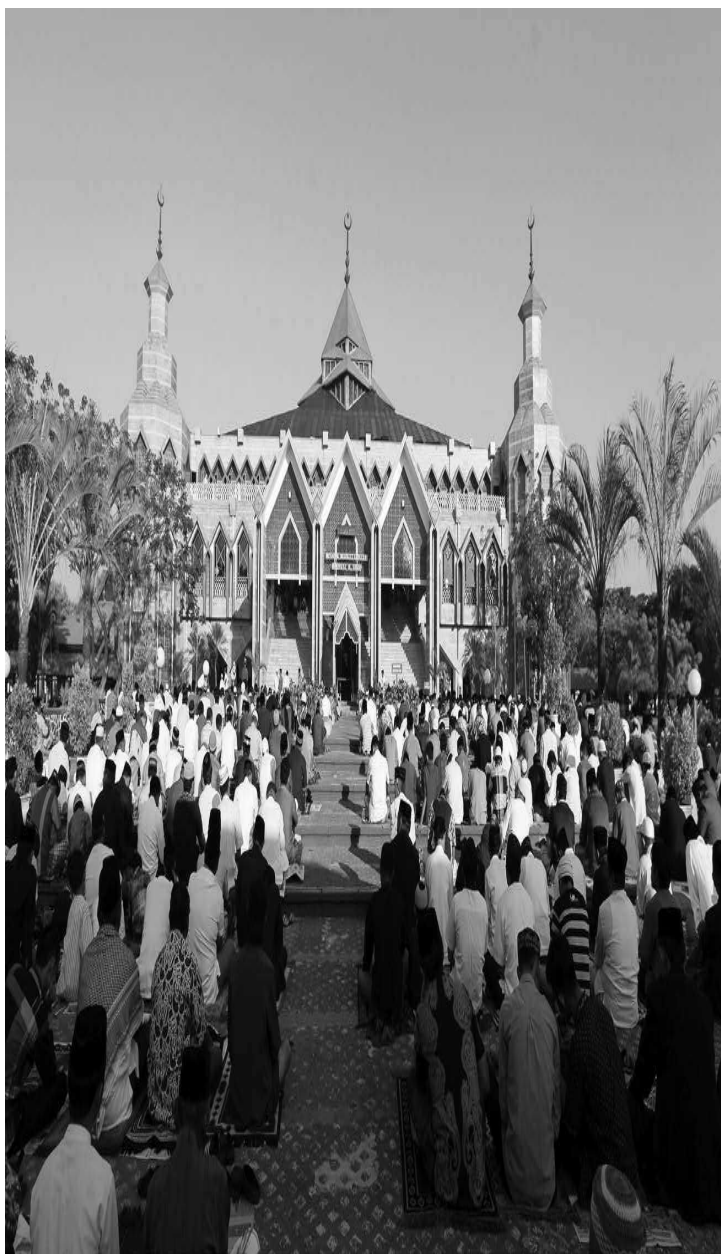
Ketika kemudian Jusuf kembali ke Makassar sebagai pensiunan dan mendirikan masjid (Al-Markaz Al-Islami), orang-orang di sekitar Soeharto—Mar'ie Mohammad (Dirjen Pajak), Aburizal Bakrie (Ketua Kadin), konglomerat seperti Sudwikatmono, James Riyadi, Anthoni Salim, serta sejumlah konglomerat lainnya beramai-ramai memberikan bantuan. Mobilisasi bantuan itulah yang menyebabkan masjid, dengan arsitektur cantik itu, tercatat sebagai masjid terbesar Indonesia yang tercepat selesai pembangunannya.[]

Sumitro, Gagasan Tanpa Cukup Dukungan

Dalam sejarah Orde Baru, tampaknya sulit mencari tokoh yang posisi dan pengalamannya seunik Jenderal (Purn.) Sumitro. Pada awal tahun '70-an, dia menonjol sebagai orang terkuat di Indonesia setelah Presiden Soeharto. Tetapi, mendadak setelah Malari (Malapetaka Januari 1974), dia hilang begitu saja dari peredaran elite kekuasaan. Lima tahun kemudian—setelah hanya aktif sebagai pebisnis—dia tiba-tiba muncul kembali lewat sejumlah gagasan politik yang dikampanyekannya dengan penuh passion. Tampil kembali pertama kali lewat sebuah artikel di Harian Kompas, pertengahan Mei 1979, dia secara berangsur mulai berbicara kritis terhadap pemerintahan Orde Baru.

Sumitro yang pada awalnya tergolong tentara yang menganggap rendah elite politik sipil—seperti umumnya tentara masa itu—menjelang akhir hayatnya berbalik mengharapkan politisi sipil menjadi Presiden Indonesia. Hal demikian terjadi setelah Sumitro kehilangan kepercayaan kepada para pimpinan militer yang di mata mantan Pangkopkamtib itu sudah secara sempurna

dikontrol Soeharto.

Inilah salah satu alasan yang menyebabkan membaca buku Sumitro, *Dari Pangdam Mulawarman Sampai Pangkopkamtib*, menjadi sangat menarik. Buku ini menarik karena tokohnya adalah Sumitro dengan segala konotasi yang disandangnya sebagai orang penting kedua di Indonesia pada periode awal Orde Baru, pengkritik senior terhadap Orde Baru dan Soeharto sejak pertengahan hingga menjelang akhir usia kekuasaan Orde Baru. Yang tidak kurang penting, menyangkut gaya bertutur (dicatat dengan baik oleh Ramadhan K.H., penulis buku ini) gaya Jawa Timurannya, suatu hal yang dibanggakan Sumitro sendiri pada berbagai kesempatan. Terutama ketika mulai membedakan diri dengan Presiden Soeharto yang berbudaya Jawa Tengahan. Budaya Jawa Timuran sangat *extrovert* berhadapan dengan budaya Jawa Tengahan yang *introvert*.

Tentang Sumitro, salah satu sifatnya yang menonjol lewat buku ini adalah kesibukannya dengan gagasan. Tatkala menjadi Panglima Brawijaya di Jawa Timur, dia tampil dengan gagasan mengenai soal bagaimana sebaiknya memperlakukan masyarakat Cina di Jawa Timur. Tatkala ditunjuk menjadi Kashankam (Kepala Staf Departemen Pertahanan Keamanan), Sumitro memulai jabatan penting itu dengan gagasan reorganisasi ABRI. Kebijakan Sumitro inilah yang merupakan cikal bakal adanya Mabes ABRI sekarang ini. Inilah penataan yang diperhitungkan tidak memungkinkan lagi adanya rivalitas antar-Angkatan yang pernah terbukti gampang dipolitisasi

oleh Presiden Sukarno pada masa Orde Lama dulu.

Soeharto melantik Jenderal Sumitro sebagai Pangkopkamtib.

Tatkala menjadi Pangkopkamtib dan mengurusi bukan melulu soal keamanan dan pemberantasan PKI, Sumitro tampil dengan lebih banyak gagasan lagi. Dalam bidang ekonomi misalnya, Sumitro memberikan banyak masukan kepada para teknokrat pimpinan Widjojo Nitisastro. Salah satu masukan itu adalah agar ditumbuhkannya pengusaha pribumi. Tidak dijelaskan oleh Jenderal Sumitro filosofi di belakang anjuran atau sikap ini. Namun, boleh diduga Sumitro tampaknya sadar, kelas menengah Indonesia sebagai soko guru demokrasi hanya bisa datang dari kaum pribumi, dan bukan dari kalangan perantau Cina.

Jalan pikiran seperti ini bisa kita rekonstruksi jika kita hubungkan saran Sumitro kepada Widjojo mengenai kebijakan terhadap orang-orang Cina yang dijalankannya tatkala menjadi Panglima Brawijaya sebelumnya. Sayangnya, anjuran atau sumbangan pikiran Sumitro tidak mendapat perhatian Widjojo. Tokoh teknokrat ini lebih percaya pada mekanisme pasar, hingga keadaan sosial ekonomi dan politik kita menjadi seperti sekarang.

Yang terganggu oleh kesibukan Sumitro mengajak bicara Prof. Widjojo dan para teknokrat adalah Ali Murtopo pemimpin kelompok Opsus yang waktu itu amat dekat dengan Presiden Soeharto. "Kegiatan Sumitro memanggili para menteri yang mengurusi ekonomi dianggap mengganggu oleh Pak Ali," kata seorang mantan pembantu Murtopo di CSIS. Bukan tidak mungkin sikap Ali Murtopo sebenarnya juga sikap Soeharto yang

terganggu oleh kegiatan Sumitro "merecoki" tim ekonomi pemerintahan Orde Baru.

Sebagai Panglima Kopkamtib, Sumitro juga memberi perhatian pada politik luar negeri. Untuk itulah, dia mengambil inisiatif mendirikan Pantap (panitia tetap) yang merupakan dapur pemikir bagi kebijakan luar negeri. Sumitro yang sangat terkesan pada peranan almarhum Jenderal Suwarto—tokoh yang menjadikan Seskoad sebagai dapur pemikir Orde Baru pada hari-hari pertama kekuasaan Soeharto—sibuk mengampanyekan perlunya dapur-dapur pemikir (*think tank*).

Inilah latar belakang dan penjelasan mengapa mantan Pangkopkamtib itu berkali-kali menyarankan agar Seskoad harus kembali menjadi dapur pemikir sebagaimana dulu dijalankan oleh Jenderal Suwarto. Beberapa kawan pengamat mencoba memahami fanatisme Jenderal Sumitro terhadap dapur pemikir ini dengan menyebut: pengalaman pahit Sumitro *vis-a-vis* CSIS yang dibangun Ali Murtopo, faktor penting di balik kejatuhan Sumitro tahun 1974.

Seskoad sebagai dapur pemikir Angkatan Darat sudah berfungsi jauh sebelum Soeharto memimpin Orde Baru. Dari zaman Nasution, periode Yani hingga awal kekuasaan Soeharto, Seskoad bukan hanya menjadi dapur pemikir Angkatan Darat, melainkan juga mungkin satu-satunya dapur pemikir di Indonesia. Pemimpin Seskoad yang terkemuka masa itu adalah Mayjen Suwarto, yang menderita kanker dan salah satu kakinya harus diamputasi pada masa menjelang akhir rezim Orde Lama. Konon

dengan alasan cacat fisik itu, Jenderal Suwarto pernah minta dipensiunkan oleh Panglima Angkatan Darat, Yani. Tapi kata Yani, “Yang aku perlukan otakmu, bukan kakimu.”

Suwarto meninggal pada awal Orde Baru. Dan itu secara simbolis juga mengakhiri peran Seskoad sebagai *think tank.* Sebagian peranan Seskoad sebagai “pabrik gagasan” pada awal Orde Baru diambil alih Ali Murtopo dengan membangun CSIS. Namun, setelah Soeharto “belajar banyak”, dia tidak memerlukan lagi sebuah dapur pemikir, dan CSIS ditinggalkan.

Dengan semua kegiatan yang saya sebutkan tadi serta banyak lagi yang Anda temukan dalam buku ini, sebenarnya kita cukup beralasan untuk menggolongkan Jenderal Sumitro bukan saja sebagai seorang militer, melainkan juga seorang negarawan. Sebagai militer, bahkan waktu masih perwira yang belajar di SSKAD (pendahulu Seskoad), Sumitro sudah berpikir tentang konsep pertahanan yang pantas untuk Indonesia sebagai negara kepulauan dengan wilayah tersebar luas. Ketika menjadi pejabat militer tinggi dan menentukan, dia berbicara tentang peranan Angkatan Laut Indonesia yang mestinya seimbang dengan peranan Angkatan Darat. Atas dasar itulah, Sumitro memilih Laksamana Sudomo sebagai wakilnya di Kopkamtib. Salah satu konsep pertahanan yang dirumuskan Jenderal Sumitro itu kini terlihat dalam penataan Angkatan Laut yang terdiri dari Armada Barat yang bermarkas di Jakarta dan Armada Timur yang bermarkas di Surabaya.

Kesadaran geopolitik Sumitro itu, yang sudah terlihat ketika masih menjadi siswa di SSKAD awal tahun 50-an, hingga kini masih terus berkembang. Itu terlihat pada gagasan-gagasannya mengenai pentingnya Wilayah Timur Indonesia mendapat perhatian setelah Wilayah Barat dikembangkan dan berkembang pesat.

Sebagai negarawan, pada awal Orde Baru Jenderal Sumitro sudah berpikir tentang pembatasan masa jabatan pejabat negara. Yang berhasil dia capai hanya sampai pada tingkat bupati dan gubernur. Masa jabatan Presiden yang tidak dibatasi tercantum dalam konstitusi, dan karena Undang-Undang Dasar dianggap sakral pada masa itu, Sumitro pun tidak punya keberanian membatasi masa jabatan Presiden.

Dalam soal urusan Cina, sudah kita lihat kebijakan yang dirumuskan Sumitro tatkala menjabat sebagai Pangdam Brawijaya. Sayangnya, kebijakan tersebut tidak didukung kebijakan ekonomi para teknokrat sehingga cita-cita Sumitro memberi kesempatan khusus kepada pengusaha pribumi menumpuk modal tidak berhasil hingga kini. Satu sumber di sekitar Widjojo waktu itu menjelaskan, karena kepepet waktu pembangunan yang mendesak, pemerintah terpaksa memakai para pebisnis yang ada dan sudah berpengalaman. Dan mereka itu adalah pebisnis Tionghoa.

Dalam bidang luar negeri, kita melihat pembentukan Pantap urusan luar negeri yang diprakarsai Sumitro. Lewat Pantap ini, Sumitro berusaha menjadikan politik luar negeri kita realistis, sesuai, serta mencerminkan

kepentingan nasional kita. Gagasan ini dengan mudah dilacak pada pengamatan cermat Sumitro terhadap politik luar negeri Orde Lama yang kini kita kenang sebagai politik luar negeri yang bersifat mercusuar. Dalam bidang ini pun kegiatan Sumitro bertabrakan dengan kepentingan Ali Murtopo yang lewat CSIS dan Opsus membangun jaringan lobi internasional.

Dengan latar belakang seperti ini, maka tidak sulit dimengerti jika Sumitro pada masa itu amat populer dan menarik perhatian orang-orang yang memiliki pemikiran dan gagasan. Setiap gagasan pada akhirnya memerlukan pendukung. Tabrakan kepentingan itulah yang berproses ke arah jatuhnya Jenderal Sumitro. Kehancuran Sumitro mencapai klimaksnya pada Malari. Beberapa hari setelah huru-hara yang membakar Jakarta itu, Sumitro "dipaksa" melepaskan jabatan Pangkopkamtib dan Wakil Panglima ABRI. Ditawari jabatan Duta Besar untuk Washington, Sumitro menolak dan memilih pensiun dini dengan pangkat terakhir Jenderal bintang empat.

Bagaimana menjelaskan "terusirnya" Sumitro dari jabatan militer yang amat penting waktu itu? Secara singkat bisa saya simpulkan, Sumitro merambah ranah politik tanpa menyadari dinamika wilayah yang dimasukinya. Jenderal Sumitro melihat tindakannya melulu sebagai langkah seorang patriot, bahkan negarawan, yang tidak partisan. Ditinjau dari sudut pandang pelakunya, ini memang benar adanya. Namun, persepsinya terhadap tindakannya sebagai kegiatan seorang patriot dan bukan tindakan politik, ternyata tidak

berhasil meyakinkan kontender kekuasaan lainnya. Mula-mula kelompok Opsus/Ali Murtopo, tetapi kemudian juga Presiden Soeharto.

Sumitro dengan Ali Murtopo.

Gagasan-gagasan Sumitro jelas amat berdimensi politis, yang waktu itu sejatinya memerlukan dukungan kekuasaan untuk pelaksanaannya. Pelaksanaan itu mempersyaratkan perubahan-perubahan dari tatanan yang sudah berjalan. Padahal, setiap perubahan akan selalu menguntungkan sejumlah orang atau golongan, tetapi sekaligus merugikan orang atau golongan lain. Begitulah politik. Maka, logis saja jika ada kekuatan lain yang takut pada gagasan-gagasan Sumitro tersebut. Kekuatan lain inilah yang akhirnya berhasil menjatuhkan Sumitro.

Selama sekian tahun, para pengamat politik menekankan konflik Murtopo-Sumitro-lah yang meletakkan mantan Pangkoptib itu dalam posisi terusir dari pusat kekuasaan. Kenyataan di kemudian hari menunjukkan Ali Murtopo juga tergusur secara bertahap dari beranda kekuasaan Soeharto. Kesimpulan akhir: yang menang lewat konflik Ali Murtopo/Opsus/CSIS melawan Sumitro/Kopkamtib/ABRI adalah Presiden Soeharto sendiri.

Konon, yang memulai berbicara tentang fenomena *matahari kembar* yang melatarbelakangi penyingkiran pendukung radikal Soeharto (Kemal Idris, Dharsono, dan Sarwo Edhie) adalah Ali Murtopo. Di kemudian hari, setelah Sumitro tersingkir, di mata Soeharto, Jenderal Ali Murtopo juga memainkan peran kontender kekuasaan bagi sang Presiden. Setelah Sumitro, dan Ali Murtopo,

tokoh yang kemudian juga mendekati posisi kembaran "matahari" Soeharto di mata sang Presiden adalah Benny Moerdani. Dengan tangkas Soeharto "melikuidasi" potensi-potensi "matahari kembaran" yang dia pandang sebagai ancaman bagi monopoli kekuasaan Bapak Presiden.

Analisis saya mengenai kejatuhan Jenderal Sumitro, saya simpulkan terutama dari buku yang kita bicarakan ini (terutama dari bab-bab mengenai Malari, Ramadi, Ali Murtopo, Sudjono Humardani, dan CSIS) dan sejumlah pembicaraan saya dengan mantan Pangkopkamtib ini lama setelah dinas militer ditinggalkannya. Sayangnya, soal tersebut kurang dielaborasi dalam buku ini, sehingga muncul sejumlah pertanyaan.

Salah satu pertanyaan itu, bagaimana mungkin seorang Pangkopkamtib yang menguasai aparat intel tidak mengetahui ada perkembangan yang kemudian hari merupakan bahaya fatal bagi kedudukan dirinya sendiri. Sebuah contoh: dengan latar belakang pengalaman tentang Dokumen Gilchrist (masih ingat cerita tentang *our local army friends* menjelang Gestapu 1 Oktober 1965? Yang dulu menjadi salah satu "pembenaran" aksi Gestapu), mengapa Sumitro tidak mengusut tuntas *Dokumen Ramadi* ketika laporan itu tiba padanya untuk pertama kalinya. Di kemudian hari, ternyata dokumen itu disinggung oleh Presiden Soeharto tatkala memutuskan Sumitro harus mundur dari jabatannya.

DOK. PRIBADI

Salim Haji Said bersama mantan Pangkopkamtib, Jenderal (Purn.) Sumitro, 1995.

Pada 1971, Sumitro—bahkan masyarakat politik—sudah mendengar desas-desus, Ali Murtopo adalah rivalnya. Pada masa itu, Opsus memang sangat aktif, bahkan over-aktif. Desas-desus ini ternyata tidak membuat Jenderal Sumitro waspada. Dia merasa lebih berkuasa karena Pangkopkamtib Jenderal bintang empat, sedangkan Ali Murtopo hanya penyandang bintang dua. Juga kekuasaan Pangkopkamtib—di mata Sumitro—jauh lebih besar dari kewenangan Opsus. Padahal, dalam sebuah rezim otoriter seperti yang dipimpin Soeharto, pangkat bahkan posisi formal bukan segala-galanya. Kelengahan seperti yang di-praktikkan Sumitro tersebut di kemudian hari berakibat fatal bagi kariernya.

Kita melihat Sumitro melangkah ke lapangan politik tidak dengan kesadaran politis, tetapi dengan sikap patriot, teknokratis, bahkan negarawan. Sumitro sepertinya melihat tindakan-tindakannya mereorganisasi ABRI, mengurus soal Cina, anjuran kepada Widjojo, Pantap luar negeri, anjuran pembubaran Kopkamtip dan Opsus, kebijakan komunikasi dua-arah dan gagasan "kepemimpinan baru", melulu urusan teknis semata.

Karena tidak bersikap politis itu tadi, maka Sumitro tidak melihat langkahnya sebagai langkah politis yang memerlukan kehati-hatian dan dukungan. Sumitro kelihatannya percaya tindakannya diniatkan memperbaiki posisi politik dan dukungan publik kepada Soeharto. Sang Pangkopkamtib tidak menyadari Soeharto adalah seorang

politikus dengan banyak perhitungan untung rugi. Sumitro tidak pernah sempat merenungkan apakah perubahan yang dikampanyekannya dipandang Soeharto bakal menguntungkan atau malah merugikan sang Presiden.

Lagi pula, tanpa dukungan yang jelas, sebuah gagasan perubahan politik memang tidak akan pernah menjadi kenyataan. Tanpa kehati-hatian, kunjungan ke kampus-kampus bisa dengan mudah ditafsirkan, bahkan difitnahkan, sebagai usaha membina, membangun, serta menggalang kekuatan di kalangan mahasiswa. Saran pembubaran Opsus dan Kopkamtib dengan mudah dilihat sebagai rencana yang mengancam Soeharto. Demikian juga dengan janji “kepemimpinan baru” yang dikampanyekan Sumitro di kampus-kampus mudah didiskreditkan sebagai sebuah langkah ke arah perebutan kekuasaan. Dan memang demikianlah persepsi umum terhadap Sumitro menjelang Malari dahulu.

Dari kisah ini jelas sekali Jenderal Sumitro tidak tahu betul apa yang sebenarnya diperbuatnya dan apa kemungkinan dampak dari perbuatan-perbuatan itu bagi kariernya sebagai militer dengan jabatan yang amat penting. Kelengahannya itulah yang menyebabkan Sumitro secara samar-samar hanya menggunakan latar belakang kulturnya sebagai orang Jawa Timur yang lebih spontan dan terbuka, di tengah-tengah elite politik dengan latar budaya Jawa Tengah yang lebih tertutup dan menahan diri, dan itu menjadi faktor kegagalannya.

Pendek kata, sebagai komentar terakhir saya ingin

menyimpulkan, tidak terlalu salah mengerti kejatuhan Jenderal Sumitro sebagai sebuah pengalaman sejarah yang seharusnya mengajarkan kita bahwa dalam lapangan politik, niat baik saja tidaklah cukup. Sumitro adalah patriot yang penuh niat baik. Dia tidak tahu politik, terlibat politik, dan dia lalu menjadi korban.[]

L.B. Moerdani, para Jenderal Orde Baru, dan Presiden Soeharto

Pertemuan pertama kami berlangsung di Saigon, 10 November 1974. Jenderal TNI Leonardus Benyamin Moerdani (LBM)—Kepala Intel Strategis, Kepala Intel Kopkamtib, kemudian juga merangkap Wakil Kepala Bakin —datang dari Seoul, Korea Selatan, sedangkan saya waktu itu datang dari Phnom Penh, Kamboja. Kami sama-sama menginap di Hotel Caravelle. Mungkin hotel terbaik di Saigon waktu itu.

Benny Moerdani datang bersama rombongan Jenderal TNI Surono, Wakil Panglima Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI). Mereka mampir di Saigon menengok pasukan Indonesia yang mendapat tugas PBB sebagai salah satu anggota ICCS (International Commission of Control and Supervision) dalam rangka penyelesaian konflik Vietnam Selatan-Vietnam Utara setelah Amerika menarik tentaranya dari Vietnam. Kolonel Infantri Dading Kalbuadi adalah Komandan Kontingen Indonesia di Saigon waktu itu.

Benny memancarkan kesan seorang pendiam, tapi angker. Itu kesan pertama saya. Masa itu kalau kita diperkenalkan kepada seorang perwira intel, sang Intel umumnya akan berkata, "Ah, saya kenal *you*, tapi *you* tidak kenal saya." Ada nada intimidasi di sana. "Eh, *you* jangan macam-macam, saya tahu *you* siapa, dan berbuat apa saja." Kira-kira begitu terjemahannya. Benny tidak bicara apa-apa. Tanpa ekspresi di wajahnya, dia menerima uluran tangan perkenalan saya.

Sebagai wartawan, waktu itu saya baru saja mewawancarai Presiden Kamboja, Jenderal Lon Nol, dan sejumlah pejabat tinggi negeri itu. Benny tertarik dengan kisah saya mengenai Kamboja yang keadaannya memang beranjak parah. Kami lalu bicara tentang pengalaman singkat saya di Kamboja.

Di bawah Presiden Lon Nol, negeri itu bukan hanya terancam oleh Khmer Merah—kemudian mengambil alih negeri itu dan menjadikannya *Killing Field*—melainkan juga oleh perpecahan dalam pemerintahan negeri itu sendiri. Salah satu akibat perpecahan itu adalah gagalnya tentara Kamboja memanfaatkan prajurit komando Angkatan Darat mereka yang telah dilatih di Pusat Latihan pasukan khusus Indonesia di Batu Jajar, Jawa Barat.

Tidak lama kemudian, seperti diketahui, Presiden Lon Nol tiba di Bali dalam perjalanannya ke Honolulu, Hawaii. Mantan Presiden yang terusir itu menetap di Amerika Serikat hingga akhir hayatnya. Proses perjalanannya dari Kamboja ke Bali hingga akhirnya memasuki sebuah pangkalan militer Amerika di Pasifik diurus Moerdani

sebagai pejabat tertinggi intel Indonesia.

Pada malam harinya, Moerdani mengajak rombongannya makan malam di restoran hotel yang terletak di lantai paling atas. Kolonel Dading Kalbuadi menarik saya ikut serta. Di lift—setelah memberi tahu hari itu kebetulan hari ulang tahun saya—dengan bergurau untuk menghapuskan kebekuan suasana, saya berkata kepada Benny, "*General, are you going to give me a treat for my birthday?*" Jawabannya sungguh amat mengejutkan. Tanpa basa-basi, tanpa ucapan selamat, dengan dingin dan ketus Moerdani berkata, "*If you have money, why don't you go buy yourself birthday dinner.*"

Di meja makan, pelayan meletakkan di depan Moerdani pesanannya, sepiring *escargot,* semacam bekicot yang di Prancis konon tergolong makanan mahal. Kami memang makan di restoran yang menyuguhkan hidangan Prancis. "*You* tidak boleh makan ini," katanya kepada saya sambil menunjuk *escargot* di dalam piring di depannya. "Buat orang Islam, ini makruh." Secara spontan saya puji pengetahuan Moerdani—seorang yang beragama Katolik—mengenai Islam. Pujian saya rupanya melekat lama dalam ingatannya. Pada suatu wawancara kami puluhan tahun kemudian, Benny menyebut kembali pujian saya di kota yang kini telah berganti nama menjadi Ho Chi Minh City itu.

Besok paginya, saya ikut rombongan Jenderal TNI Surono meninjau pasukan Indonesia. Kolonel Dading sangat ramah dan mengajak saya berangkat satu mobil dengannya bersama Benny. Di kursi belakang sedan yang

kami tumpangi itu saya dipersilakan duduk di tengah. Moerdani dan Dading mengapit saya. Benny Moerdani memulai pembicaraan dengan melancarkan insinuasi dengan menyebut majalah *Tempo* (tempat saya bekerja waktu itu) sebagai media yang selalu mengecam pekerjaan Benny.

Aneh. Bagaimana mungkin? Waktu itu ABRI, Kopkamtib khususnya, terutama setelah Malari (Malapetaka 15 Januari 1974) sangat ditakuti wartawan. Bagaimana pula kami mengkritik Benny yang sebagian terbesar kegiatannya tidak kami ketahui. Lagi pula Moerdani belum setahun duduk sebagai Kepala Intel. Ketika Benny melancarkan insinuasinya, Kolonel Infantri Dading merangkul saya sembari berkata, "Tidak, ah, Pak Salim ini teman kita."

Saya dengan cepat menafsirkan tingkah laku insinuatif Benny itu sebagai indikasi betapa besar kekuasaannya sehingga bisa bicara apa saja, di mana saja, kapan saja, dan mungkin kepada siapa saja. Benny waktu itu memang dengan cepat mengontrol hampir semua badan intel dan aparat sekuriti penting pada suatu zaman otoriter yang hampir segala perbuatannya tidak diketahui umum dan tidak perlu dipertanggungjawabkan. Maka tentu saja sangat menakutkan, terutama bagi kami para wartawan.

Di kemudian hari, yakni lama setelah Benny tidak lagi berkuasa, ketika perlakuan Benny kepada saya di Saigon dan ketakutan saya kepadanya saya ceritakan kepada seorang Jenderal, sang petinggi militer menanggapi, "Apa Pak Salim kira cuma Pak Salim yang takut? Kami semua

dulu juga sangat takut kepada Pak Benny dan aparat intelnya." Dengan aparat intel yang menciptakan rasa takut di kalangan para perwira itulah, antara lain, saya kira Benny Moerdani mudah mengontrol ABRI untuk waktu lama.

Benny yang memang tidak pernah melihat ancaman dalam waktu dekat akan datang dari luar, memusatkan perhatiannya mewaspadai apa saja yang dipersepsikannya sebagai potensi ancaman terhadap kekuasaan Soeharto. Maka selain mengawasi secara ketat kekuatan-kekuatan kritis dalam masyarakat, ABRI juga diamati dengan saksama oleh jaringan intel yang dikuasai Benny.

Inilah mungkin alasan mengapa Profesor Ben Anderson dari Cornell University melihat ABRI waktu itu sebagai berfungsi sama dengan tentara KNIL pada zaman kolonial Belanda dulu. KNIL memang tidak disiapkan melawan musuh dari luar. Tugas utama tentara kolonial Belanda adalah menjaga ketertiban dan keamanan dalam negeri. Terhadap ancaman dari utara (Jepang), pertahanan Hindia Belanda telah mereka serahkan kepada Amerika di Filipina dan Inggris di Singapura. Maka, ketika Filipina dan Singapura direbut Jepang, dalam waktu singkat pemerintah Hindia Belanda bertekuk lutut.

JAUH SEBELUM JUMPA DI SAIGON, saya telah mendengar banyak cerita yang nyaris legendaris mengenai Benny. Dia adalah pahlawan di Palagan Irian Barat (sekarang Papua) dan pertempuran menghadapi PRRI/Permesta. Di Pekanbaru, dia terjun payung sebelum

sempat berlatih terjun. Kehebatannya sebagai perwira intel yang menyamar sebagai pegawai perusahaan penerbangan Garuda di Bangkok serta berbagai cerita kehebatan dan keberanian prajurit komando tersebut, semua memukau saya.

Keberaniannya terjun ke wilayah Irian Barat semasa Operasi Trikora menyebabkan Presiden Sukarno menyematkan sendiri Bintang Sakti kepada Benny. Bintang Sakti adalah penghargaan tertinggi yang diberikan kepada mereka yang melakukan tugas melampaui apa yang harus dikerjakannya (*beyond the call of duty*). Bersama Moerdani, Untung, yang kemudian terlibat Gestapu, juga mendapat Bintang Sakti. Seperti Moerdani, Untung juga terjun di Irian Barat dalam rangka Operasi Trikora pembebasan wilayah yang masih dikuasai Belanda.

Cerita-cerita itu semua membuat saya melihat Benny sebagai semacam selebriti sehingga ketika jumpa, saya sulit menyembunyikan kekaguman dan keterpukauan saya kepadanya. Inilah saya kira sebabnya mengapa perlakuan kasarnya kepada saya pada pertemuan pertama kami di Saigon tidak terlalu saya masukkan di hati. Tapi, tentu saja tidak mudah saya lupakan. Lagi pula selama Orde Baru, saya beberapa kali juga mengalami atau melihat penghinaan, bahkan perlakuan kasar tentara kepada kami orang-orang sipil.

Pelantikan Jenderal L.B. Moerdani sebagai Pangab.

TEPAT SEPULUH TAHUN KEMUDIAN, saya jumpa lagi Benny Moerdani. Waktu itu, penguasa intel tersebut sudah hampir dua tahun menduduki kursi Panglima ABRI (Pangab) dengan pangkat Jenderal bintang empat. "Kursi ini ternyata sangat *powerful*," katanya, sambil menepuk-nepuk pegangan kursi yang didudukinya. "Saya sebenarnya telah teken mati jadi intel. Tidak pernah bermimpi duduk di kursi ini," katanya seperti mencoba meyakinkan saya. Pertemuan kami waktu itu berlangsung di kantornya di Jalan Merdeka Barat, bagian depan kantor Kementerian Pertahanan sekarang.

Sebagai mahasiswa program doktor yang sedang menyiapkan disertasi mengenai peran politik ABRI, waktu itu selama sebulan lebih saya berada di Jakarta mewawancarai sejumlah pembesar tentara dan politik, aktif maupun yang sudah pensiun. Beberapa hari sebelum jumpa Benny, saya mewawancarai Jenderal TNI (Purn.) A.H. Nasution. Tahu saya akan jumpa Moerdani, Nasution berkata, "*You* akan senang ketemu Benny. Dia suka pada orang sekolahan, Benny itu suka membaca."

Nasution tidak salah. Pertemuan dan wawancara saya dengan Benny di kantornya, berlangsung sangat menyenangkan. Tidak ada lagi ucapan kasar, insinuasi, dan sikap curiga. Wawancara yang tadinya dijadwalkan hanya akan berlangsung satu jam, berkepanjangan menjadi hampir dua jam. Seorang jenderal polisi harus menunggu lama di luar sebelum perwira tinggi Kepolisian itu diterima

Panglima ABRI.

Wawancara direkam dan sebagian telah saya kutip dalam disertasi saya yang kemudian terbit di Singapura sebagai buku pada 1991. Yang belum pernah saya ungkapkan adalah pernyataan Benny yang waktu itu tidak saya mengerti maksudnya. Penting saya jelaskan, wawancara itu berlangsung hanya beberapa hari setelah Perdana Menteri India, Indira Gandhi, tewas tertembak oleh orang-orang Sikh, pengawal pribadi Perdana Menteri. Indira Gandhi dengan segera digantikan oleh Rajiv Gandhi, putranya sendiri. Dua puluh tahun sebelumnya, pada 1964, ketika Perdana Menteri pertama India, Jawaharal Nehru, ayah Indira, meninggal, Indira Gandhi, putrinya, tampil menggantikannya. Anak-beranak itu semua memang tokoh pimpinan Partai Kongres yang menguasai Parlemen India era itu.

Ketika soal itu kami singgung, Benny tiba-tiba menunjuk potret Presiden Soeharto, yang tergantung di dinding kantornya sambil berkata, “Saya jamin anaknya tidak akan menggantikannya.” Di kemudian hari ketika Siti Hardianti Indra Rukmana (Mbak Tutut), putri tertua Soeharto, mulai muncul di tataran politik sebagai salah seorang pemimpin Golkar, bahkan kemudian anggota kabinet, saya teringat ucapan Benny tersebut. Apakah Benny waktu itu sudah melihat gejala Soeharto sedang mempersiapkan putri sulungnya menjadi penggantinya kelak?

PULANG DARI AMERIKA Januari 1986, saya berusaha

menjumpai Benny. Saya ingin menyerahkan sendiri *copy* disertasi sebagaimana yang saya janjikan kepadanya dalam wawancara kami. Tidak berhasil. Usaha mantan Pangkopkamtib, Jenderal TNI (Purn.) Sumitro mengatur pertemuan yang saya harapkan itu juga gagal.

Sementara itu, di masyarakat beredar kisah tentang Benny Moerdani yang makin menakutkan banyak orang, terutama para aktivis Islam. Peristiwa pembantaian orang-orang Islam di Tanjung Priok dua tahun sebelumnya, secara meluas dituduhkan kepada Benny. "Kami tahu bahwa beberapa saat setelah penembakan, Benny bersama Try Sutrisno—Pangdam Jakarta—sudah muncul di Tanjung Priok memberi ucapan selamat kepada komandan pasukan yang membantai orang-orang Islam di sana," kata seorang aktivis Islam kepada saya.

Try Sutrisno selaku Panglima Kodam V Jaya dan Panglima Kopkamtib Jenderal TNI L.B. Moerdani, 13 September 1984, memberi keterangan pers mengenai peristiwa Tanjung Priok.

Sekian tahun kemudian, Letjen TNI Marinir (Purn.) Nono Sampono, ajudan Moerdani yang menyertainya ke Priok waktu itu, menceritakan versi lain mengenai kehadiran Pangab dan Pangdam Jaya di tempat pembantaian waktu itu. "Pak Benny memang tidak memarahi para bawahannya yang menembaki orang-orang Islam itu, tapi beliau mengingatkan, yang terbunuh adalah saudara-saudara mereka sendiri." Nono juga mengisahkan kunjungan Moerdani ke Priok merupakan perintah Presiden Soeharto dengan tugas khusus menyelamatkan karier Mayjen TNI Try Sutrisno, Panglima Militer Jakarta Raya waktu itu. "Sebagai Pangdam Jaya, yang bertanggung jawab atas tragedi di Priok itu seharusnya memang Try Sutrisno."

Mereka Semua Kecewa kepada Polisi

Cerita tentang Petrus (penembak misterius) juga sudah berlalu ketika saya tiba kembali di Jakarta pada Januari 1986. Tatkala masih sebagai mahasiswa di Ohio sana, cerita tentang Petrus banyak saya dapatkan melalui surat-surat sejumlah teman dari Tanah Air, di samping berita-berita yang juga kadang bisa ditemukan di media Amerika. Harap diketahui, komunikasi lewat internet belum tersedia masa itu.

Kabar dari Indonesia pada umumnya bersikap positif terhadap operasi pembunuhan para penjahat tersebut.

Penjelasannya, masyarakat umumnya kecewa kepada polisi yang mereka anggap gagal mengatasi meningkatnya keganasan para penjahat, sehingga tentara terpaksa harus turun tangan.

Reaksi saya kepada operasi Petrus waktu itu, antara lain, saya sampaikan lewat surat kepada Kolonel Infantri Soejono, Ajudan Presiden, yang juga menantu Mayjen TNI Soegandhi, bos saya pada masa awal Orde Baru. Kepada teman lama itu saya utarakan kecemasan, kalau kurang hati-hati Petrus bisa menjalar dari pembunuhan kriminal menjadi pembunuhan politik.

L.B. MOERDANI DILANTIK MENJADI PANGLIMA ABRI dan Pangkopkamtib pada 29 Maret 1983. Tanggal tersebut tidak berjarak jauh dari dimulainya operasi pembunuhan bandit yang sebelumnya sudah dilancarkan di Yogyakarta. Operasi yang dipelopori oleh Letnan Kolonel Infantri Mohammad Hasbi, Komandan Distrik Militer (Kodim) Yogyakarta, itu kemudian secara diam-diam diambil alih Pangkopkamtib Moerdani dan diberlakukan di seluruh Indonesia.

Seorang mantan pembantu dekat Moerdani membantah atasannya yang memelopori kegiatan Petrus pada tingkat nasional. Sebelum menjadi Pangkopkamtib, menurutnya, Laksamana Sudomo sebagai pejabat tertinggi Kopkamtib yang digantikan Moerdani, sudah melancarkan sejumlah operasi pembasmian bandit. Konon Sudomo menjelaskan, "Mereka sudah sangat keterlaluan." Karena itu, Kopkamtib melancarkan Operasi

Celurit pada 1982.

Pada waktu itu, perampokan dan penjambretan memang merajalela dan sangat sadis. Untuk mendapatkan harta milik sasaran, para pelaku kriminal tidak jarang melukai korbannya, bahkan ada yang sampai dibunuh. Para perampok dan penjambret itu muncul secara mencolok di berbagai penjuru Indonesia. Bathi Mulyono, mantan tokoh pelaku kriminal di Semarang, sekian tahun kemudian, menyatakan keheranannya kepada wartawan *Tempo* terhadap fenomena tersebut. Dalam keterangannya yang dikutip pada buku yang ditulis sejumlah wartawan Tempo, *Benny Moerdani: Yang Belum Terungkap*, Bathi menjelaskan, "Terjadi perampokan bus hampir tiap malam. Anak-anak [maksudnya para pelaku kriminal anak buah Bathi] sampai bingung dan *enggak* berani bekerja. Siapa pelakunya, mereka nggak *ngerti*." Inilah sebabnya Bathi curiga pemerintah (aparat keamanan) berada di balik tindakan kriminalitas tersebut. "Tujuannya untuk menciptakan pembenaran operasi pembersihan gali pada 1980-an."

Setelah banyak korban—jumlah yang persis tidak mudah diperoleh, tapi secara kasar pelaku kriminal yang terbunuh lebih dari seribu orang—dan protes dari luar negeri yang dirasakan mulai "mengganggu" ketenangan pusat kekuasaan di Jakarta, Moerdani tampil di depan pers. Kepada para wartawan, Pangkopkamtib itu menyebut korban-korban tersebut sebagai akibat perang antarkelompok geng kriminal. Moerdani dan Jenderal Polisi Anton Sudjarwo, Kepala Kepolisian Republik

Indonesia (Kapolri) waktu itu, secara bersama membantah keterlibatan pemerintah dalam pembantaian para penjahat tersebut.

Namun, hasil penyelidikan Komnas HAM sekian tahun kemudian, menurut Yosep Adi Prastyo dari kantor Komnas, mengindikasikan pelaksana Petrus datang dari pusat yang melibatkan orang-orang dari Kopassus. "Pelaksana Petrus tidak jarang bertindak sama sadisnya dengan para gali itu sendiri."

Adalah Presiden Soeharto dalam memoarnya yang terbit pada 1989 mengakui keterlibatan pemerintah dalam pembantaian para pelaku kriminal tersebut. Sebagai "terapi kejutan", menurut sang Presiden. Moerdani yang menjabat Menteri Pertahanan ketika memoar tersebut terbit, sangat kesal. Dia merasa dipermalukan atasannya.

Yang tidak banyak diketahui waktu itu, penembakan misterius tersebut ditengarai juga sebagai mempunyai dimensi politik. Konon banyak penjahat yang dibantai itu tadinya adalah para pelaku kriminal yang dibina Opsus pimpinan Ali Murtopo. Kelompok kriminal yang di Jawa Tengah dikenal sebagai Gali (Gabungan anak liar) tersebut terutama dipakai pada kampanye pemilihan umum untuk meneror saingan-saingan politik pemerintah, terutama kekuatan Islam politik.

Di kemudian hari, Opsus tidak mampu mengendalikan para pelaku kriminal binaannya itu. Dan para Gali itu mulai mengganggu ketertiban dan keamanan masyarakat luas. Karena itulah, operasi pembantaian para pelaku kriminal itu juga ditafsirkan sejumlah wartawan dan pengamat

politik masa itu sebagai usaha pembersihan kaki tangan Ali Murtopo. Hubungan Soeharto dengan Ali Murtopo memang sudah berangsur memburuk sejak masa pasca-Malari 1974.

Peran Opsus dan Ali Murtopo dalam membina dan memanfaatkan para pelaku kriminal untuk memenangkan Golkar dalam Pemilihan Umum 1977 dan 1982, kemudian terungkap lebih jelas dalam memoar Jusuf Wanandi, *Shades of Grey* (2012). Wanandi, seorang mantan aktivis Golkar, adalah seorang pembesar CSIS yang amat dekat dengan Opsus dan Ali Murtopo.

Penting untuk diperhatikan, selain operasi Petrus, setahun setelah duduk sebagai Pangkopkamtib, pada Mei 1984 Moerdani juga membubarkan Opsus yang dibangun, dipimpin, dan selama bertahun-tahun menjadi kendaraan operasi politik Ali Murtopo. Riwayat Opsus panjang dan dengan kegiatan banyak: menjadi alat intel pada masa Konfrontasi terhadap Malaysia, pada masa operasi Timor Timur, pada sebagian besar persiapan pemilu Orde Baru, dan berbagai operasi politik Soeharto serta Ali Mutopo.

Santri Dipersulit

Sulit dibayangkan pembubaran Opsus murni kehendak dan prakarsa Moerdani. Tanpa petunjuk Soeharto, Moerdani bisa dipastikan tidak akan berani membubarkan lembaga yang dibangun dan dikendalikan oleh Murtopo yang untuk waktu lama juga dimanfaatkan Soeharto. Kabar yang beredar di Jakarta waktu itu, hubungan Moerdani dengan Murtopo memang juga sudah

merenggang ketika pamor Murtopo sudah makin redup di mata Soeharto, sementara Moerdani makin mendapat kepercayaan dan kekuasaan. "Padahal, ketika Moerdani keleleran di Kostrad setelah terlempar dari RPKAD, adalah Pak Ali yang menampungnya," kata Kolonel (Purn.) Aloysius Sugianto, salah seorang pelopor pembentukan pasukan komando Angkatan Darat dan pernah menjadi pejabat penting di Opsus dan Bakin.

PADA SAAT YANG SAMA JUGA BEREDAR kisah dipersulitnya para perwira berlatar belakang santri dalam ABRI. Robert Lowry, mantan Atase Militer Australia di Jakarta menulis mengenai soal ini dalam bukunya *The Armed Forces of Indonesia*. Menurut Lowry, "Praktis semua penganut Islam yang taat, dikenal sebagai santri, tersingkir sejak awal rekrutmen." Moerdani "yang mengumpulkan di sekitarnya kaum abangan, orang-orang Kristen, dan kaum yang berlatar belakang minoritas, mendorong banyak kaum santri dalam ABRI percaya mereka tidak mungkin bisa naik ke posisi puncak," tulis R. William Liddle, seorang ahli Indonesia, dalam sebuah artikelnya yang dimuat oleh *The Journal of Asian Studies* (1996).

Sebagai peneliti peran politik militer, saya terutama penasaran mengenai kisah terakhir ini. Saya tidak mudah begitu saja percaya macam-macam informasi yang berseliweran mengenai kegiatan Benny Moerdani waktu itu. Tapi, saya baru bisa mendapatkan informasi yang bisa digolongkan solid setelah Benny pensiun.

Sementara itu, sebelum sempat jumpa dan kemudian mewawancarai Benny, saya beberapa kali mewawancarai Jenderal TNI (Purn.) Sumitro, mantan Pangkopkamtib. Hubungan saya agak dekat dengan Jenderal Sumitro sejak saya menulis disertasi mengenai peran politik militer Indonesia. Sumitro—di samping A.H. Nasution dan T.B. Simatupang, serta banyak lagi jenderal lainnya—adalah salah satu narasumber penting yang beberapa kali saya wawancarai. Usaha saya mendapatkan kesempatan mewawancarai Jenderal M. Jusuf tidak berhasil, meski sudah mendapat bantuan Jusuf Kalla, orang dekat sang mantan Panglima ABRI.

Dalam keadaan sudah pensiun dan menjadi pengusaha yang berkantor di daerah Kemang, Jakarta Selatan, Sumitro ternyata masih memelihara hubungan dengan Benny Moerdani dan sejumlah perwira senior lainnya. Dari Sumitro-lah, saya banyak mendapat informasi mengenai Benny maupun mengenai Soeharto dan hubungannya dengan ABRI yang berangsur memburuk waktu itu. Menurut Sumitro, hubungan Benny dengan Soeharto perlahan memburuk setelah Benny menjadi Pangab.

Sumitro mengaku sebenarnya tidak sepakat dengan keputusan Soeharto mengangkat Benny menjadi Pangab menggantikan Jenderal Jusuf. "Saya sarankan agar Benny dijadikan dulu Pangkowilhan, jangan langsung jadi Pangab."

Memberi pengalaman teritorial kepada seorang jenderal memang sesuatu yang dikenal sebagai sikap

Sumitro bagi perwira tinggi yang akan duduk dalam pimpinan tinggi militer. Untuk itulah, Brigjen TNI Sayidiman Suryohadiprojo pada 1968 dikirim ke Makassar menduduki kursi Panglima Kodam Hasanuddin sebelum akhirnya diberi kepercayaan memegang posisi penting di Departemen Pertahanan dan Keamanan (Dephankam) pada 1970. Jenderal TNI Hasnan Habib tadinya juga akan dipromosikan menjadi Panglima untuk Komando Daerah Militer (Pangdam) Iskandar Muda di Aceh. Tapi, kegiatan pengintegrasian ABRI di bawah arahan Sumitro pada 1968-1969 rupanya sangat memerlukan Hasnan. "Kesempatannya jadi Panglima Kodam menjadi hilang," kata Sumitro.

Benny Moerdani, seperti umum diketahui, tidak punya pengalaman teritorial, tidak punya pengalaman staf, tanpa pengalaman sebagai pendidik, dan juga tidak pernah mengikuti Sekolah Staf Komando Angkatan Darat (Seskoad). Nyaris seluruh pengalamannya berlangsung di pasukan khusus dan intelijen. Inilah yang dilihat Sumitro sebagai kelemahan Benny sehingga mantan Pangkopkamtib itu tidak setuju Kepala Intel tersebut langsung menjadi Pangab. "Tidak ada waktu lagi," konon jawab Soeharto kepada Sumitro.

Mengapa "tidak ada waktu"? Sumitro jelas tidak berani bertanya lebih jauh kepada Bapak Presiden. Robert Lowry, pada masa itu Atase Militer Australia di Jakarta, lewat surat elektroniknya kepada saya, mencoba menjelaskan keputusan Soeharto waktu itu. "Salah satu tugas Benny sebagai Panglima ABRI adalah

menghapuskan Kowilhan [Komando Wilayah Pertahanan] yang belasan tahun sebelumnya diciptakan untuk memberi tempat kepada sejumlah jenderal, marsekal dan laksamana." Sekian tahun kemudian, sebagai akibat makin ketatnya kontrol Soeharto atas militer—terutama karena kerja keras Moerdani—akomodasi tersebut tidak diperlukan lagi.

Komando-komando ABRI sudah bisa dirampingkan dan disentralisasikan. Dari kedudukannya sebagai Panglima ABRI, Moerdani bukan saja menghapuskan Kowilhan, melainkan juga memperkecil jumlah Komando Daerah Militer (Kodam). Organisasi yang ramping itu jelas memudahkan kontrol Panglima atas ABRI.

Organisasi yang dirampingkan itu menimbulkan banyak kecemasan di kalangan para perwira menengah yang akan makin sulit mendapatkan posisi yang memungkinkan mereka menjadi perwira tinggi. Beredar isu bakal ada latihan dan pendidikan khusus bagi para kolonel yang dipersiapkan mengikuti proses alih tugas ke posisi tinggi di Kepolisian (Polri). Pada gilirannya, para perwira menengah polisi meningkat cemas oleh kemungkinan "invasi" militer tersebut.

Presiden Soeharto bersama para pimpinan ABRI pada awal Orde Baru.

JENDERAL SUMITRO WAKTU ITU sudah lebih 10 tahun berada di luar jajaran militer. Dia pensiun dini setelah keributan Malari 1974. Jabatan terakhir Jenderal Sumitro adalah Pangkopkamtib dan Wakil Panglima ABRI. Dari posisi yang amat penting itu, Sumitro mengabdikan diri mengamankan kekuasaan Presiden Soeharto. Dalam proses pengamanan itulah terjadinya kompetisi "mendekati kuping" sang Presiden. Saingannya adalah pemimpin Opsus dan staf pribadi Presiden, Ali Murtopo. Konflik terbuka antara keduanya kemudian tak terhindarkan. Dan terjadilah huru-hara Malari ketika pada Januari 1974 Perdana Menteri Jepang, Tanaka, sedang berkunjung ke Jakarta. Jenderal Sumitro beberapa hari kemudian terlempar keluar dari ABRI, sementara Ali Murtopo tersingkir secara perlahan-lahan. Yang akhirnya diuntungkan oleh Malari adalah Presiden Soeharto sendiri.

Seperti semua jenderal lainnya—aktif atau purnawirawan—mantan Pangkopkamtib itu sejak berada di luar jajaran ABRI tidak lagi punya daya apa-apa terhadap Soeharto. Dia hanya bisa mengeluh dan "berdoa saja", katanya. "Kekuatan dan kekuasaan satu-satunya di Indonesia sekarang ada di tangan Soeharto. Dwifungsi sudah lama tidak jalan," keluh Sumitro yang makin kritis terhadap sang Presiden. Dengan caranya sendiri, Letnan Jenderal TNI (Purn.) Sayidiman Suryohadiprojo—tersingkir bersama Sumitro—juga mengungkapkan hal yang dikeluhkan Sumitro tersebut. Pada 1995, Sayidiman

dikutip oleh majalah *Forum Keadilan* mengatakan:

> Kekuatan politik di Indonesia sekarang bukan Golkar, bukan PDI atau PPP, juga bukan ABRI. Kekuatan politik utama di Indonesia sekarang hanyalah Soeharto.

Sumitro maupun Sayidiman, keduanya tidak pernah sempat menjelaskan bagaimana doktrin Dwifungsi akhirnya hanya berhasil menjadi alat berkuasa sang Presiden secara hampir mutlak. Hingga akhir masa kepresidenan Soeharto.

Soal Dwifungsi dan kekuasaan Soeharto itu pernah menjadi topik diskusi saya dengan Letnan Jenderal (kehormatan) Dr. (HC) T.B. Simatupang. Secara provokatif—dengan menggunakan bahasa Inggris, dalam sebuah pertemuan kami—saya "menantang" mantan Kepala Staf Angkatan Perang (KSAP) itu: "Doktrin macam apa Dwifungsi ini? ABRI menaikkan Soeharto ke singgasana kekuasaan, tapi kemudian tidak bisa mengontrolnya?" Simatupang marah. Dengan muka merah, dia pukul meja. "Saudara jangan menganggap enteng generasi muda TNI," ucapnya.

Pernyataan dan kemarahan Simatupang tersebut sampai sekarang belum juga berhasil saya mengerti. Apakah Simatupang percaya generasi muda TNI nanti akan berhasil mengakhiri penyalahgunaan Dwifungsi dan kekuasaan otoriter Soeharto? Kalau itu ramalan dan harapan Simatupang, maka mantan KSAP jelas terbukti salah. Soeharto "dimakzulkan" oleh "Krismon" (krisis moneter 1997-1998), bukan oleh generasi muda TNI.

Jenderal T.B. Simatupang

BENNY MOERDANI, MENURUT SUMITRO, bukan saja

dipercayai memimpin intelijen sembari menjadi Panglima ABRI, melainkan juga terus dibebani kesibukan sebagai *security officer* yang bertugas menjaga keamanan Soeharto dan keluarganya. Peran menjaga keamanan Soeharto dan keluarganya ini sebenarnya sudah dikerjakan Moerdani sejak pulang dari Seoul, beberapa hari setelah Malari 1974. Dalam melaksanakan tugas memimpin berbagai lembaga intelijen di kemudian hari, Benny, di mata sejumlah jenderal senior, sebenarnya terutama lebih berperan sebagai seorang kepala *bodyguard* buat Soeharto dan keluarganya. Di kemudian hari, sejumlah perwira intel memang lebih cenderung menilai Moerdani lebih sukses sebagai Kepala Keamanan Soeharto daripada sebagai Kepala Intel strategis. "Lihat saja kegagalannya di Timor Timur," kata perwira intel tersebut.

Nah, mungkin dalam rangka tugas menjaga Soeharto itulah, setelah antara lain berdiskusi dengan Sumitro, dan juga mungkin dengan beberapa jenderal senior lainnya, pada suatu hari Moerdani, dalam kedudukannya sebagai Panglima ABRI, memberanikan diri menemui Soeharto dan dengan amat hati-hati menyarankan agar Bapak Presiden mulai mencari orang lain untuk menggantikannya. Soeharto waktu itu memang sudah hampir 20 tahun menduduki kursi kepresidenan. Cerita tentang jaringan bisnis anak-anak dan kroninya sudah pula tersebar luas. Soeharto marah.

"Kau Salah, Ben"

Benny menyampaikan kemarahan bosnya itu kepada Sumitro. "Kau salah, Ben," kata Sumitro. "Yang harus menyampaikan saran itu bukan kau, tapi kami, teman segenerasinya." Sampai meninggal, tidak pernah terdengar cerita Sumitro atau tokoh segenerasinya memberanikan diri menemui Soeharto meminta sang Presiden mencari penggantinya.

Di kemudian hari, lama setelah pensiun, mantan Pangab Try Sutrisno, dalam suatu wawancaranya dengan saya, mengaku pernah memberanikan diri menyampaikan keresahan sejumlah tokoh senior ABRI kepada Presiden Soeharto. Menurut Try, Bapak Presiden ingin tahu siapa para senior itu. Try mengaku menyebut hanya satu nama, Jenderal Sumitro. "Mereka tanya, kapan regenerasi." Reaksi Soeharto?

> Saya ini pejuang. Saya memperjuangkan idealisme bangsa. Pejuang itu tidak pernah pamrih, yang ada panggilan. Kalau saya masih dipercayai rakyat, saya terpanggil untuk mengabdi ke Indonesia. Sampai mati berdiri pun saya jalani.

Try Sutrisno juga mengaku menyampaikan keprihatinan para Jenderal Senior mengenai kegiatan bisnis putra-putri Presiden. Tanggapan Soeharto:

> Try, apakah ada aturan, atau undang-undang yang melarang anak pejabat berbisnis? Kalau ada, saya tidak mau jadi Presiden. Kan, tidak ada larangan itu. Mau jadi tentara, pegawai negeri, atau pengusaha, semua boleh.

Mengenai soal regenerasi, Sayidiman juga ada bercerita kepada saya pengalamannya "menasihati"

Presiden Soeharto. Pada 1986, Presiden yang juga mantan Pangkostrad itu merencanakan penerbitan buku tentang dirinya. Salah satu yang diminta menulis adalah Letnan Jenderal TNI Sayidiman. Mula-mula Sayidiman mengira permintaan itu tidak serius, sebab Jenderal yang juga mantan Duta Besar (Dubes) RI di Tokyo itu sadar dia tidak tergolong lingkaran-dalam Soeharto. Karena itu, dia tidak membuat tulisan.

Namun, lewat ajudan, Bapak Presiden menagih tulisan. Dengan tergesa-gesa Jenderal yang juga mantan Gubernur Lemhannas itu membuat tulisan yang diantarkannya sendiri ke kediaman Jalan Cendana keesokan harinya. Dalam tulisan itu, menurut Sayidiman,

> Saya kemukakan semua faktor yang menunjukkan keunggulan dan kekuatan Pak Harto, baik sebagai *strateeg* militer maupun politik, sebagai *family man* yang membina keluarganya dengan setia dan saksama, sebagai pemimpin yang dekat dengan petani dan nelayan tanpa dibuat-buat.
>
> Tapi, kemudian saya lanjutkan dengan pertanyaan-pertanyaan yang secara tidak langsung menggambarkan kelemahan. Seperti, mengapa Pak Harto yang sudah begitu kuat masih menunjukkan sikap kurang percaya diri dengan bertindak secara berlebihan terhadap pihak-pihak yang kurang disukai. Saya akhiri tulisan dengan saran. Apakah tidak lebih baik, ketika Pak Harto berada pada puncak kekuasaan dan karier mengikuti jejak Deng Xiaoping dan Lee Kuan Yew, yaitu melepaskan diri dari pimpinan negara secara formal. Sebagai Ketua Badan Pembina Golkar, Pak Harto masih tetap tokoh yang menguasai politik Indonesia.

Letjen TNI Sayidiman.
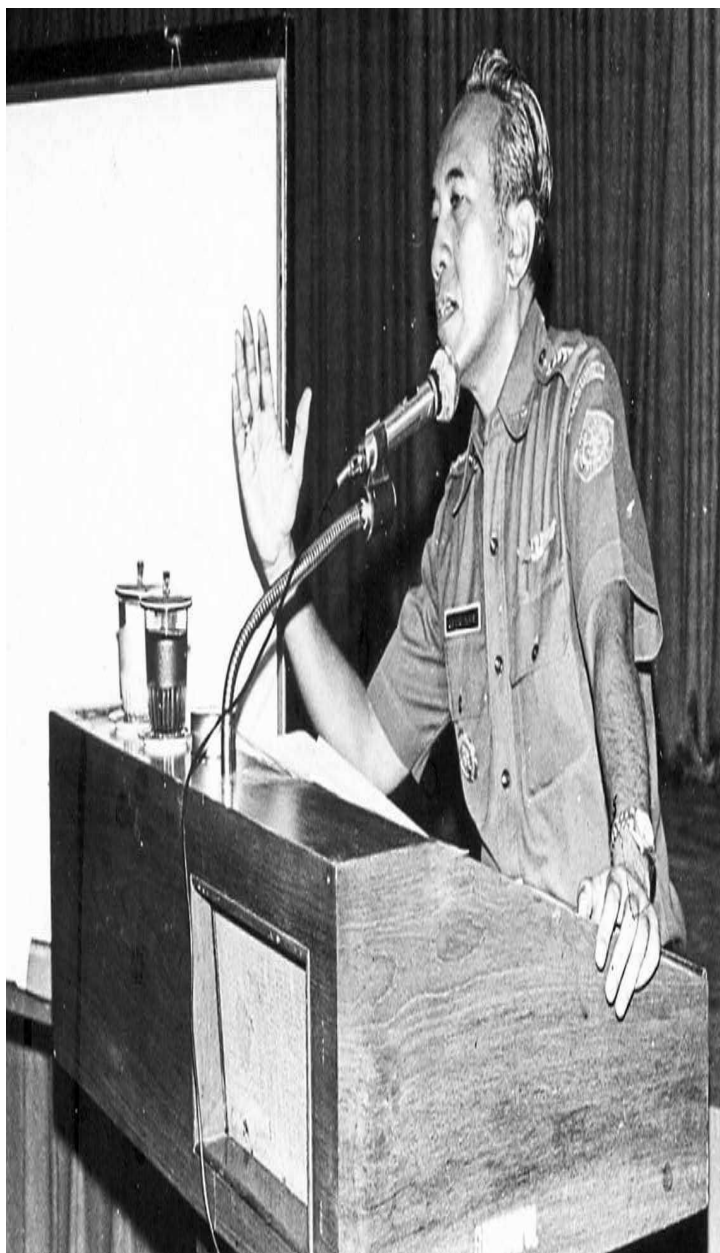
Sepekan kemudian, Sayidiman menerima pesan dari Jalan Cendana. Presiden Soeharto sudah membaca karangan tersebut, tapi hanya setuju menerbitkan bagian depan tulisan. Bagian akhir yang mengandung kritik dan saran, terpotong gunting sensor Bapak Presiden. Kepada para editor, Sayidiman menolak kompromi. Tapi, tulisan tetap terbit sesuai dengan kemauan Soeharto.

SEBELUM KEMARAHAN SOAL sebagai Presiden yang duduk lama di Istana, beberapa ketegangan juga memang sudah muncul dalam hubungan Soeharto dan Panglima Benny. Dalam sebuah pertemuan Sumitro dengan Soeharto, Bapak Presiden mengeluhkan kegiatan bisnis orang-orang di sekitar Benny Moerdani. Soeharto menyebut nama Setiawan Jody, Robby Kethek (Robby Sumampow), dan juga Teddy Rusdy.

Ketika informasi itu disampaikan Sumitro kepada Benny, Pangab itu membela diri dan mengaku tidak punya alasan mencegah Jody dan Robby Kethek berbisnis. “Mereka bukan pejabat,” kata Benny. Kendati bukan pejabat, Soeharto dan orang banyak waktu itu tahu Robby Kethek berbisnis dengan fasilitas dari Benny, terutama di Timor Timur. Robby memang teman lama Moerdani. Mereka berdua berasal dari Solo. Adalah Benny yang meminta Robby berusaha di Timor Timur agar kehidupan perekonomian di wilayah yang baru diakuisisi itu bisa digerakkan. Begitu konon alasan Benny melibatkan Robby

berbisnis di Timor Timur.

Kalah Dua Juta Dolar di Las Vegas

Adapun Setiawan Djody, pemusik ini—menurut cerita Sudwikatmono, sepupu Soeharto—mendapat fasilitas berbisnis lewat hubungan dekatnya dengan anak-anak Soeharto, terutama dari Bambang Trihatmojo.

Menurut Marsekal Muda (Purn.) TNI Teddy Rusdy, Benny pernah menahan paspor Setiawan Djody untuk menghalangi perjalanan pemusik itu bersama Sigit, putra tertua Soeharto, pergi berjudi di luar negeri. Jusuf Wanandi, dalam wawancaranya dengan saya, juga bercerita mengenai tindakan Moerdani suatu kali menahan paspor Sigit, agar tidak berangkat ke luar negeri untuk berjudi. "Sigit pernah kalah dua juta dolar dalam satu malam di sebuah kasino di Las Vegas," kata Wanandi.

Tentang kegiatan Teddy Rusdy berbisnis, alasannya mengumpulkan uang bagi kegiatan operasi intel. "Kegiatan Teddy Rusdy itu saya benarkan, sebab kegiatan intel di dalam dan di luar negeri memang memerlukan dana besar," kata Sumitro.

"Dia itu Merah"

Mengaku bukan cuma memikirkan regenerasi pada jabatan kepresidenan, bersama sejumlah perwira segenerasinya, Sumitro juga berusaha menghalangi Soeharto mengangkat Sudharmono ke kursi Wakil Presiden. "Dia itu merah," kata Sumitro. "Tapi sumber

kesalahan sebenarnya ada pada saya. Pada saat menjabat Pangkopkamtib, saya sibuk membersihkan yang di bawah, lalai melihat ke atas. Sudharmono lolos." Untuk melaksanakan agenda penyingkiran Sudharmono, kampanye besar-besaran lewat media mereka lakukan waktu itu. Sumitro mengaku mendesak Moerdani, sebagai Pangkopkamtib, bertindak.
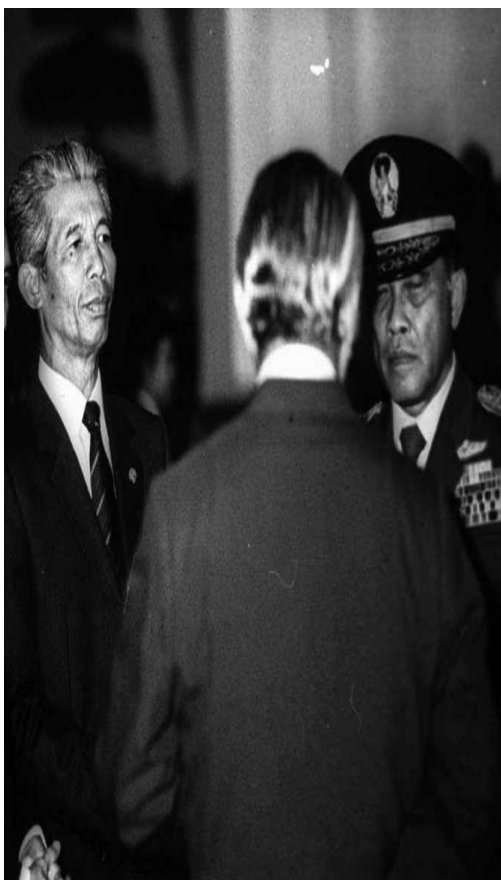
Sudarmono, Soeharto (membelakangi), dan Benny Moerdani.

Mengenai Sudharmono, Sarwono Kusumaatmadja—mantan Menteri Lingkungan Hidup dan juga mantan Sekjen pada saat Sudharmono menduduki posisi Ketua Umum Golkar—mempunyai dua cerita lain yang tidak kurang menarik. Dalam sebuah pertemuan Sarwono dengan Presiden di kediaman pribadi Jalan Cendana, Sarwono memberanikan diri mempertanyakan pengetahuan dan sikap Soeharto terhadap Sudharmono yang waktu itu gencar diserang sebagai "merah". Dengan tersenyum Soeharto membantah tuduhan tersebut. Tapi ketika Sarwono bertanya mengapa Soeharto tidak menjelaskan soal Sudharmono itu kepada para penuduhnya, sang Presiden menjawab dengan ringan, "Yah, tidak apa-apa, diamkan saja. Sekali-sekali Sudharmono ada problem, kan tidak apa-apa."

Cerita kedua Sarwono bersumber pada Ketua Umum Golkar itu sendiri. Sebelum Golkar secara resmi mencalonkan Sudharmono menjadi Cawapres, Soeharto ternyata sudah terlebih dahulu memberi tahu Ketua Umum Golkar itu tentang rencana promosinya. Tapi Sudharmono, sebagai pembantu dekat Soeharto sejak awal Orde Baru, tahu dengan baik cara kerja Bapak Presiden. Kata Sudharmono kepada Sarwono,

> Orang yang sudah diberi tahu diangkat menduduki jabatan tertentu dengan Surat Keputusan Presiden saja, bisa gagal. Keppresnya dibatalkan dan saya yang harus menyampaikan berita buruk tersebut kepada orang yang bersangkutan. Pokoknya, sampai Sidang Umum MPR nanti ketok palu, saya belum percaya saya akan menjadi Wakil Presiden.

Tentang kontroversi Sudharmono ini, Benny pernah menjelaskan kepada saya, sebagai Pangkopkamtib dia menandatangani *security clearance* bagi Sudharmono untuk jadi Wakil Presiden. "Kami tidak menemukan bukti yang dituduhkan oleh Pak Mitro dan intel-intel tua itu," kata Moerdani. Menurut perhitungan saya, penandatanganan tersebut terjadi setelah pembicaraan serius Sarwono Kusumaatmadja dengan Benny sebagai yang akan saya kisahkan nanti. Kendati demikian usaha ABRI mengganggu rencana pengangkatan Sudharmono menjadi Wapres tetap saja berjalan.

Di antara gangguan itu yang paling mencolok adalah interupsi Brigjen TNI Ibrahim Saleh. Anggota Fraksi ABRI ini—teman seangkatan Try Sutrisno di Akademi Teknik Angkatan Darat—menerobos ke mimbar sidang MPR dengan rencana memprotes agenda pemilihan Sudharmono sebagai Wakil Presiden. Tindakan nekat Ibrahim itu dilihat banyak orang waktu itu sebagai sesuatu yang dirancang atau didukung kelompok Moerdani. Dalam wawancaranya dengan saya pada Januari 1997, Ibrahim Saleh menjelaskan, semua tindakannya sepengetahuan Letjen TNI Harsudiono Hartas, Ketua Fraksi ABRI di MPR. Juga dilaporkan ke Benny Moerdani, lewat seorang perwira penghubung.

Sudharmono dalam memoarnya, *Pengalaman Dalam Masa Pengabdian*, memang ada mencatat tingkah laku aneh Moerdani terhadap pencalonan dirinya. Dalam rapat para jenderal di Markas Bais (Badan Intelijen Strategis) yang membicarakan rencana pencalonan Wapres, Benny

terang-terangan menolak Sudharmono. Cerita yang dikisahkan Sudharmono dalam memoarnya tersebut diperkuat oleh cerita Julius Pour dalam bukunya, *Benny: Tragedi Seorang Loyalis*. Dalam buku tulisan Pour itu, Benny digambarkan mendesak agar Pangab Try Sutrisno yang dicalonkan. Perlu diingat, Jenderal TNI Try Sutrisno waktu itu baru beberapa hari menduduki posisi Pangab, menggantikan Moerdani.

Selain gangguan Ibrahim Saleh, juga tidak boleh dilupakan kasus Ketua Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Jailani (Johny) Naro yang mengajukan diri sebagai salah seorang calon Wakil Presiden. Hartono Marjono, Ketua Fraksi PPP di MPR waktu itu, menjelaskan di kemudian hari, pencalonan Naro itu adalah permainan ABRI dalam usaha mereka mengganjal majunya Sudharmono ke posisi Wapres. Jenderal TNI (Purn.) Sumitro membenarkan Hartono Marjono. Menurut Sumitro kepada saya dalam salah satu wawancara kami, "Ternyata yang mendorong Naro itu Benny. Bodoh Benny itu. Dia tidak tahu Naro itu orangnya Ali Murtopo. Dan Naro itu orang Parmusi. Pak Harto [waktu itu] masih alergi terhadap golongan Islam."

Masih tentang Sudharmono, Letjen Marinir (Purn.) Nono Sampono—mantan ajudan Pangab Moerdani dan tetap dekat dengan Moerdani hingga akhir hayat mantan Pangab itu—pada awal 2015 memberi tambahan informasi kepada saya. Menurut Nono, di kantor Bais tadinya ada file tentang Sudharmono yang menjadi dasar menuduh mantan Wapres dan mantan Ketua Golkar itu sebagai

"merah". Tapi, secara misterius file itu hilang. Dugaan Nono, file itu "dihilangkan" Moerdani setelah tahu Soeharto memutuskan Sudharmono menjadi Wapresnya.

DALAM KAPASITASNYA SEBAGAI SEKJEN GOLKAR, Sarwono Kusumaatmadja menjumpai Moerdani menjelang pencalonan Sudharmono. Kesan Sarwono tidak ada masalah pribadi antara Benny dan Sudharmono. "Soalnya Soeharto tidak memberi tahu Benny bahwa Pak Dharmono disetujui sang Presiden menjadi Wapres." Benny kelihatan terkejut ketika Sarwono menyampaikan keputusan Soeharto tersebut.

> *My God*, ini gila. Saya, kan pembantunya, mengapa saya tidak diberi tahu. Sampai sekarang saya masih tetap yakin Pak Umar Wirahadikusuma akan terus menjadi Wapres. Kalau mau Sudharmono, mengapa saya tidak diberi tahu?

Soeharto tidak memberi tahu Moerdani keputusannya mencalonkan Sudharmono karena Presiden sudah tahu Raja Intel itu tidak senang pada pilihan Soeharto. Dalam bukunya, *Managing Indonesia's Transformation*, Ginandjar Kartasasmita, seorang yang dianggap "anak emas" Sudharmono, mengungkapkan perbedaan pengamatannya dengan Sarwono mengenai hubungan pribadi Moerdani dengan Sudharmono. Ginandjar menyaksikan sendiri bagaimana Moerdani secara terbuka menolak Sudharmono.

Cerita Ginandjar dalam bukunya:

> Dalam pidatonya kepada para perwira senior, Benny Moerdani

menuduh Sudharmono sebagai agen rahasia Komunis. Saya mendengarkan sendiri pidato tersebut. Moerdani [sebagai Panglima ABRI] memerintahkan Fraksi ABRI di MPR yang saya pimpin untuk tidak mendukung Sudharmono sebagai calon Wakil Presiden.

"Bapak Itu Sebenarnya Raja"

Dengan tidak mengajak bicara Moerdani mengenai pencalonan Sudharmono, menurut Sarwono, memang begitulah cara kerja Soeharto dalam mengelola politik Indonesia.

> Untuk mempertahankan kekuasaannya, Pak Harto selalu memastikan agar di antara orang-orang di bawahnya selalu ada konflik. Akibatnya, para pembantunya menjadi rival di antara sesama mereka. Semua akhirnya bergantung pada Soeharto. Kalau salah satu pihak menjadi sangat kuat, pihak itu disingkirkan. Inilah penjelasannya mengapa Sumitro, Ali Murtopo, dan Benny Moerdani disingkirkan. Dengan menjadikan Sudharmono sebagai Wapres, sebenarnya mantan Menteri Sekneg itu juga ditendang ke atas.

Tidak jauh berbeda dengan pengamatan Sarwono, adalah komentar Jusuf Wanandi. Sehubungan dengan keputusan Soeharto menjadikan Sudharmono Wakil Presiden dan resistensi ABRI terhadap pilihan tersebut, Jusuf Wanandi dalam memoarnya menulis:

> Pak Harto seyogianya memberi tahu mereka dia menghendaki Sudharmono sebagai Wakil Presiden untuk masa jabatan 1988-1993 karena loyalitas dan kerja keras Sudharmono. Pak Harto juga harus menjelaskan dia akan menduduki jabatan Presiden secara penuh selama lima tahun dan tidak berencana lengser untuk membuka kesempatan bagi wakilnya menggantikannya sebagai yang dicemaskan oleh para pimpinan ABRI. Tapi,

> komunikasi Presiden dengan pimpinan ABRI mengenai soal tersebut tidak pernah terjadi karena Soeharto menganggap apa saja kemauannya akan menjadi terlaksana karena dia seorang Raja. Menurut norma dan tradisi ini, Raja Jawa mendapat Mandat dari langit untuk berkuasa dan memerintah dan semua bawahannya harus bergantung dan melaksanakan apa saja keputusan Raja.

Sejarahwan dan wartawan Michael R.J. Vatikiotis yang selama empat tahun berada di Indonesia sebagai koresponden dan Kepala perwakilan majalah berita *Far Eastern Economic Review,* dalam bukunya *Indonesian Politics under Suharto*, juga melihat Soeharto sebagai seorang Raja Jawa. Tulis Vatikiotis,

> Keraton-keraton Jawa menyimpan banyak cerita tentang para Raja yang mengadu para abdinya satu melawan yang lainnya. Satu cerita mengungkapkan seorang Raja memberi perintah bertentangan kepada para pemimpin tentaranya sehingga mereka akhirnya bertempur sampai mati antara yang satu melawan yang lainnya. Dalam kabinet Soeharto, aliansi politik para menterinya susah dibayangkan. Di antara para pembantunya, Soeharto mengadu secara canggih menteri yang militer melawan menteri sipil, yang birokrat melawan yang teknokrat, para loyalis terhadap mereka yang progresif dan berpikir bebas.

Membaca pendapat Sarwono, Wanandi, dan Vatikiotis tentang Soeharto sebagai Raja Jawa, saya teringat percakapan saya dengan Marzuki Arifin, seorang teman wartawan, yang pernah mengaku dekat dengan keluarga Cendana dan Opsus pimpinan Ali Murtopo. Dalam suatu penerbangan ke Hong Kong pada pertengahan tahun tujuh puluhan, saya jumpa Marzuki (Juki, panggilan teman-teman) di atas pesawat. Pada kesempatan itu, Juki

bercerita banyak tentang pengetahuannya mengenai keluarga Cendana. Salah satu yang menarik adalah percakapannya dengan Ibu Tien Soeharto. Konon istri Presiden itu dalam suatu perjalanan ke luar negeri pernah berkata kepada Juki, "Bapak itu sebenarnya Raja, tapi sekarang istilah Raja tidak dipakai lagi. Yang dipakai Presiden saja."

LANGKAH BERIKUT SUMITRO DAN TEMAN-TEMAN senior serta para petinggi ABRI, termasuk Moerdani, adalah berusaha mencegah jangan sampai Sudharmono—yang akhirnya berhasil menjadi Wakil Presiden—naik ke jabatan Presiden lewat pemilihan umum berikutnya. Untuk itulah, maka Dewan Pimpinan Golkar harus mereka kuasai. "ABRI punya banyak calon," kata Panglima ABRI, Jenderal TNI Edi Sudrajat. Untuk tujuan itu, menjelang Musyawarah Nasional (Munas) Golkar, pimpinan ABRI sudah menempatkan para perwiranya pada hampir semua posisi pimpinan Golkar wilayah. Untuk jabatan Ketua Umum Golkar, sebagai pengganti Letjen TNI (Purn.) Wahono, mereka menyiapkan Letjen TNI Susilo Sudarman.

Pokoknya ABRI sdah siap menguasai Golkar. Tapi kemudian terbukti, untuk kedua kalinya, para jenderal gagal "memaksakan" kehendak mereka kepada Soeharto. Keputusan Bapak Presiden menjadikan Harmoko sebagai Ketua Umum Golkar juga tak terbendung oleh ABRI.

Apakah Benny atau Edi Sudrajat tidak suka kepada

Harmoko? “Tidak usah ditanya. Semua ABRI tidak suka Harmoko,” kata Sumitro kepada saya dengan kesal. Karena itu para jenderal tidak tinggal diam. Tidak berhasil mencegah Harmoko menjadi Ketua Umum, sebagian besar dokumen dan alat kerja di kantor pusat Golkar di Slipi diobrak-abrik dan dihancurkan oleh orang tidak dikenal. “Harmoko harus mulai lagi menyusun daftar nama para kader yang sudah kami kerjakan pada masa kepemimpinan Pak Dharmono,” kata Sarwono.

Pihak ABRI bertekad menguasai Golkar guna mencegah apa yang mereka cemaskan sebagai kemungkinan Sudharmono menggunakannya sebagai tangga untuk naik ke kursi Presiden lewat pemilu berikutnya. Tapi sebenarnya, disadari atau tidak, tekad dan langkah para jenderal tersebut juga bertujuan secara perlahan membatasi gerak Soeharto.

Dalam urusan ini tampaknya Benny yang sudah

purnawirawan memang tidak lagi tampil memainkan peran terlalu menonjol. Tapi sikap tidak positif Benny terhadap pencalonan Sudharmono sebagai Wapres, menurut Sumitro, membuat Soeharto tetap curiga pada mantan Pangab tersebut. Soeharto juga tentu tahu, pemikir utama langkah-langkah politik para jenderal waktu itu adalah Moerdani. Hubungan baik Moerdani dengan CSIS menimbulkan kecurigaan Soeharto kepada CSIS sebagai tangki pemikir bagi Benny. Akibatnya, hubungan Soeharto dengan CSIS yang secara perlahan sudah mulai memburuk sejak Malari 1974, menjadi putus sama sekali pada awal tahun delapan puluhan.

Kecurigaan Soeharto kepada Moerdani juga berdasarkan pengamatan Bapak Presiden atas Benny yang memang sangat tidak percaya pada politisi sipil. Padahal, salah satu tugas Sudharmono sebagai Ketua Umum Golkar adalah melaksanakan perintah Soeharto merekrut tokoh-tokoh sipil mengisi jajaran pimpinan organisasi tersebut. "Pak Harto memberi petunjuk agar secara berangsur Golkar mengurangi ketergantungannya kepada ABRI dan birokrasi," kata Sarwono.

Pada waktu Sudharmono menjadi Ketua Golkar, misalnya, selain Sarwono Kusumaatmadja (ditunjuk langsung Soeharto menduduki kursi Sekretaris Jenderal bahkan sebelum Munas), posisi penting lain di Golkar kemudian juga banyak diduduki oleh orang-orang sipil seperti Akbar Tanjung, Siswono Yudhohusodo, Fahmi Idris, Rahmat Witoelar, dan sejumlah politisi sipil lainnya. Moerdani dan para jenderal aktif maupun purnawirawan

tidak senang melihat langkah Soeharto mensipilkan Golkar.

Dalam rangka "konfrontasi" dengan Soeharto, para pemimpin ABRI, menyalurkan pandangan, aspirasi, dan kepentingan mereka lewat para purnawirawan. Ini tentu untuk menghindari tuduhan insubordinasi. Dalam hal ini Jenderal Sumitro dengan senang hati dan berani memainkan peran tersebut. Pada 1989, Sumitro tampil sebagai tokoh utama yang secara terbuka, meski sangat sopan, berbicara mengenai perlunya Presiden Soeharto meninggalkan kursi kepresidenan. Sumitro menyarankan kepada ABRI berperan membujuk Soeharto mundur.

Kepada Vatikiotis, Sumitro pada Maret 1990 mengungkapkan, mantan Pangkopkamtib itu telah menulis surat kepada Benny Moerdani, Edi Sudrajat, Try Sutrisno, dan Rudini untuk mendesak mereka semua bertindak sebagai calon Presiden. "Mereka tertutup antara satu dan lainnya, karena itu mereka sulit mencapai konsensus," keluh Sumitro. Tentu saja tertutup sebab memang demikianlah strategi dan kemauan Soeharto.

Sebagai seorang yang sadar memainkan peran menyuarakan opini dan kepentingan ABRI, pada awal 1992, Sumitro yang makin kritis terhadap Soeharto, secara terbuka menyerukan ABRI menciptakan jarak dengan kepemimpinan Orde Baru. Tidak ada reaksi dalam ABRI waktu itu. Suatu hal yang mudah dimengerti karena tentara sudah seluruhnya dipimpin oleh para perwira muda didikan Akademi Militer pasca-Revolusi yang menduduki posisi penting setelah secara pribadi diseleksi

dan kemudian secara ketat dikontrol Soeharto.

Muncul pada permukaan politik Indonesia di awal tujuh puluhan sebagai Panglima Kopkamtib yang kukuh menjalankan pendekatan keamanan (*security approach*), yang antara lain menghindarkan sedapat mungkin keterlibatan sipil dalam politik, menjelang akhir hidupnya Sumitro berubah haluan. Sadar akan kekuatan Presiden Soeharto yang dengan mudah menyingkirkan dirinya dan Moerdani, memorakporandakan para pengikutnya dalam ABRI kemudian dengan ketat mengontrol militer, Sumitro kehilangan kepercayaan kepada potensi dan keberanian para jenderal generasi penerus mengoreksi sang Presiden.

Satu-satunya jalan mengakhiri kekuasaan Soeharto menurut kesimpulan dan keyakinan mantan Panglima Kopkamtib itu adalah keterbukaan politik yang memungkinkan munculnya pemimpin baru. Pada saat itulah, Sumitro mulai bicara mengenai kepemimpinan sipil. Secara terbuka dalam sebuah seminar, Sumitro berkata, "Kalau Presiden kita sipil, kita akan tenang memasuki abad ke-21." Sumitro meninggal sebelum abad ke-20 berakhir.

Pukul Anak Sindir Menantu

Benny, Edi Sudrajat, Try Sutrisno, dan para jenderal pimpinan ABRI lainnya tidak senang melihat langkah Soeharto mengarahkan Golkar bergerak makin independen dari ABRI. Mereka ingin ABRI tetap mengontrol kekuasaan. Mereka tidak percaya pada kemampuan politisi sipil. Ditinjau dari titik pandang ini,

Sudharmono sebenarnya hanya sasaran antara, karena pada dasarnya, target serangan adalah kekuasaan dan kebijakan Soeharto.

Ini juga lebih kurang sama dengan cerita di balik kebencian ABRI kepada Habibie yang menguasai hampir semua industri strategis, termasuk industri yang sebelumnya berada di bawah penguasaan ABRI. Semua yang dikerjakan Habibie merupakan keputusan dan kebijakan Soeharto sendiri. Jadi, sikap permusuhan ABRI kepada Habibie, sebenarnya sama saja duduk soalnya dengan sikap ABRI yang memusuhi Sudharmono dan Harmoko.

Tindakan dan langkah politik Sudharmono dan Harmoko semuanya berdasarkan "petunjuk Bapak Presiden", sebagaimana yang selalu diucapkan Harmoko. Jadi, sasaran ABRI sebenarnya adalah Soeharto. Para pembantu Bapak Presiden itu—termasuk Ali Murtopo dan Sudjono Humardani sekian tahun sebelumnya—juga cuma sasaran antara. "Pukul anak sindir menantu," kata orang Melayu zaman dulu.

BENNY MOERDANI KELAHIRAN CEPU, DIBESARKAN DI SOLO, JAWA TENGAH, putra dari seorang ibu berdarah Indo-Jerman, Yohana Roeche, kelahiran Tuban, Jawa Timur. Ayah Benny adalah Raden Bagus Moerdani. Saudara-saudara Benny dari istri pertama Bagus Moerdani semua beragama Islam, agama Bagus Moerdani. Pangab itu sendiri dibesarkan sebagai penganut Katolik oleh istri kedua Pak Moerdani yang beragama Katolik. Benny atau

Benyamin dipermandikan ketika masih bayi dan mendapat nama baptis Leonardus Benyamin. Ini penjelasan mengapa Benny Moerdani tidak punya nama Jawa.

Latar belakang pribadi yang demikian itu—Indo dan Katolik—tampaknya ikut memacu Benny untuk lebih membuktikan dia seorang Indonesia tulen dan patriot sejati yang mampu mengatasi semua aspek yang ada pada latar belakang pribadinya. Prof. Dr. Umar Kayam pernah bercerita suatu hal kepada saya tentang Benny remaja di Solo pada zaman Revolusi. Menurut Kayam, Benny pernah hampir membunuh ayahnya hanya karena sang ayah bekerja pada perusahaan kereta api yang dikuasai Belanda.

Solo waktu itu adalah wilayah Republik Indonesia yang diduduki tentara kolonial sebagai akibat Agresi Militer Belanda II. Benny remaja, berusia 14 tahun, ikut bergerilya bersama sejumlah anggota Tentara Pelajar. "Kalau tidak dicegah oleh anggota-anggota Tentara Pelajar yang lebih senior, Benny bisa nekat menembak bapaknya," kata Umar Kayam yang bersekolah di Solo pada masa itu.

PENELITIAN SAYA MENGENAI SIKAP atau kebijakan Moerdani sebagai Panglima ABRI terhadap Islam tidak membuahkan hasil yang bulat. Sejumlah perwira senior merasa punya bukti diperlakukan secara diskriminatif karena mereka menjalankan syariat Islam dengan taat. Yang lainnya, terutama yang lebih junior, tidak merasa apa-apa. Tapi, umat Islam pada umumnya curiga kepada Moerdani. Mengenang masa itu, Solahuddin Wahid—adik

kandung Gus Dur—pernah dikutip oleh majalah *Tempo* sebagai mengatakan, "Seingat saya, perasaan tidak senang umat Islam kepada Benny [waktu itu] kuat."

Setelah mempelajari latar belakang perwira-perwira itu saya berkesimpulan, yang dicurigai oleh Benny dan para perwira di sekitarnya serta para pengikutnya adalah mereka yang ditengarai sebagai menonjol keislamannya, misalnya dengan cara mengirimkan anak ke pesantren kilat pada masa libur atau sering menghadiri pengajian. Umumnya perwira seperti ini tergolong dalam apa yang di Jawa Tengah dan Jawa Timur biasa disebut sebagai orang-orang yang berlatar belakang santri.

Mayor Jenderal TNI Edi Budianto—terakhir Asisten Intel Kepala Staf Umum (Kasum) TNI sebelum meninggal tak lama setelah pensiun— pernah menceritakan kepada saya pengalamannya ketika sebagai perwira pertama berpangkat Kapten berdinas di Bais. Dia pernah ditugaskan mengawasi seorang Kolonel. Perwira menengah senior itu mengirimkan anak gadisnya ke pesantren kilat pada masa libur. "Dicurigai fundamentalis," kata Budianto.

Dalam pertanyaan yang harus dijawab para perwira yang mengikuti tes untuk kesempatan pendidikan militer lanjutan, dicantumkan pertanyaan-pertanyaan yang bertujuan mengetahui apakah para perwira yang beragama Islam bersedia menerima pemuda non-Muslim sebagai suami bagi anak gadisnya? Kalau jawabannya menekankan perlu iman yang sama, maka perwira tersebut kabarnya bisa diduga akan bernasib buruk. Tidak

dapat kesempatan sekolah. Sang perwira dicap fanatik. Artinya, hari depan karier militernya suram. Apakah ini kebijakan yang digariskan Benny atau hanya tafsiran para anak buah yang cenderung *over acting*?

Bersarung dan Berbaju Koko

Dari perlakuan terhadap perwira berlatar belakang santri itu mungkin bisa disimpulkan, tafsiran Benny terhadap ideologi TNI adalah semacam ideologi sekuler yang melihat agama semata urusan yang sangat pribadi, yang harus disembunyikan dari mata umum terutama bagi mereka yang anggota TNI. Dan para perwira harus tunduk pada ideologi TNI sesuai dengan tafsiran sekularistik tersebut. Sehubungan dengan ini sebuah sumber menyebutkan Benny pernah menegur Pangdam Jaya, Mayjen TNI Try Sutrisno, yang melaksanakan ibadah shalat Jumat dengan berpakaian baju koko dan bersarung. Moerdani kabarnya mengharuskan para perwiranya melaksanakan ibadah di masjid dengan tetap berpakaian seragam militer.

Membicarakan sikap Moerdani terhadap Islam, menarik untuk memperhatikan pengamatan Marsekal Muda TNI (Purn.) Teddy Rusdy yang bertahun-tahun menjadi pembantu dekat Benny. Menurut Teddy,

> Dalam melihat masyarakat Indonesia, Benny menggunakan teori pendulum. Benny melihat pergeseran ke kiri dan ke kanan dalam masyarakat Indonesia. Ada saatnya ke kiri, yakni selama Orde Lama, dan ke kanan setelah Orde Lama tumbang. Intelijen yang disusunnya sangat memperhitungkan gerak pendulum tersebut.

Maka, kebijakan Benny yang oleh banyak orang dipandang sebagai "anti-Islam", mungkin sebaiknya juga dilihat dengan memperhitungkan teori pendulumnya tersebut.

Ideologi TNI versi Benny yang sekularistik itu mengingatkan saya kepada sebuah iklan Free Masonry di Praha ketika saya bertugas di negeri tersebut. Iklan itu dimuat oleh koran berbahasa Inggris, *The Prague Post* yang mengumumkan dibukanya pendaftaran menjadi anggota baru. Orang Islam juga boleh masuk, tapi syaratnya, "Mereka tidak melaksanakan syariat Islam." Ini juga mengingatkan saya pada Islam ateis di Uni Soviet dahulu. Geider Aliyev, anggota Politbiro yang berasal dari Asia Tengah adalah contoh Islam ateis. Artinya secara budaya, dia Islam, tapi tidak menjalankan syariat Islam, dan sebagai Komunis bahkan kemungkinan besar juga tidak percaya adanya Tuhan.

Marah Karena Pesantren Masuk GBHN

Sikap dan persepsi Benny yang sekularistik itulah yang kemungkinan besar diterjemahkan oleh bawahannya yang kadang ekstrem, bahkan *over acting* dan lalu menjadi bahan pembicaraan sehingga akhirnya Benny dituduh anti-Islam.

Tentang sikap pribadi Benny sendiri terhadap Islam, Marsekal Madya TNI Ginandjar Kartasasmita, anggota Fraksi ABRI dan Ketua Ad Hoc Badan Pekerja-Majelis

Perwakilan Rakyat (BP-MPR), mencatat dalam bukunya *Managing Indonesia's Transformation*, pengalamannya dipanggil dan ditegur oleh Moerdani, ketika dia sedang memimpin salah satu sidang Badan Pekerja-MPR . Tulis Kartasasmita,

> Pada suatu hari di tengah-tengah rapat penting Komite Ad Hoc yang saya pimpin, saya dipanggil oleh Jenderal Benny Moerdani, Pangab waktu itu. Atasan saya karena saya mewakili ABRI di MPR. Kepada saya, dia memprotes dimasukkannya kata "pesantren" dalam draf GBHN [Garis-Garis Besar Haluan Negara]. Pesantren adalah pendidikan tradisional Islam yang akar katanya adalah "santri" yang berarti orang yang mempelajari agama dan tinggal dalam semacam asrama. Pesantren biasanya berbentuk madrasah, atau sekolah agama. Pak Benny menentang dimasukkannya pesantren ke dalam GBHN dan menegur saya mengapa saya membiarkannya. Pak Benny juga marah terhadap dimasukkannya "*iman dan taqwa*", yang di Indonesia berarti kepercayaan dan ketaatan kepada Allah Yang Mahakuasa dan satu-satunya Tuhan yang harus disembah. Dengan memasukkan "Pesantren" serta "Iman dan Taqwa" ke dalam GBHN, bagi Pak Benny itu sama saja dengan memasukkan "Piagam Jakarta" ke dalam GBHN.

Namun, tokoh terkemuka Nahdlatul Ulama (NU) Abdurrahman Wahid alias Gus Dur—pernah menjadi Presiden untuk waktu singkat—menampik pandangan yang mencurigai Moerdani sebagai anti-Islam. Mengaku dekat dengan Moerdani sejak 1975, dalam sumbangannya pada buku *L.B. Moerdani: Langkah dan Perjuangan* (2005), Gus Dur menulis:

> Sebagian teman menyatakan kepada penulis bahwa Benny Moerdani adalah musuh Islam yang sesungguhnya, tetapi

penulis melihat kesimpulan itu sebagai sesuatu yang salah. Justru Pak Benny adalah orang yang melaksanakan pola hubungan negara dan agama seharusnya. Di antaranya, dia memegang pendiriannya bahwa harus ada perbedaan yang tegas antara mana yang menjadi tanggung jawab negara dan mana milik agama itu sendiri.

Benny dan santri.

Mengenai hubungan Moerdani dan Gus Dur, dalam buku *Benny Moerdani: Yang Belum Terungkap* tercatat komentar Solahuddin Wahid mengenai hubungan abangnya dengan Moerdani. Menurut Solahuddin,

> Gus Dur dan Benny Moerdani saling memanfaatkan. Benny butuh Gus Dur sebagai pembuka pintu. Sedangkan bagi Gus Dur mendampingi Benny sebagai bagian dari permainannya memperkuat posisi NU. Gus Dur memahami posisi politik Benny Moerdani (orang kuat rezim Orde Baru) dan mencoba memanfaatkannya … Gus Dur, setahu saya, lihai sekali memainkan momentum seperti ini untuk kepentingan dia.

Pada bagian lain memoar Jusuf Wanandi, ada cerita mengenai hubungan Gus Dur dan Moerdani yang lebih kurang sama dengan kesaksian Solahuddin. Tapi, Wanandi lebih menekankan peran Gus Dur melindungi Moerdani dari kebencian sementara masyarakat Islam.

KEMBALI KEPADA SALAH SATU TINDAKAN dan perlakuan anak buah Moerdani yang bisa dipandang sebagai bukti adanya *over acting*, pernah terjadi di Kopassus pada masa kepanglimaan Benny. Kejadiannya seperti berikut. Seorang perwira senior pada suatu hari menginspeksi ruang kerja para perwira bawahannya. Ketika melihat sajadah tersampir di kursi, sang Komandan bertanya, "Apa ini?". Jawab sang Perwira, "Sajadah untuk shalat, Komandan." Dengan membentak, sang Komandan berkata, "TNI tidak mengenal ini." Komandan yang sama juga kabarnya sering mengadakan rapat staf

pada saat menjelang waktu ibadah Jumat sehingga mempersulit para perwira yang akan shalat Jumat.

Mengenai perlakuan buruk terhadap perwira-perwira yang beragama Islam, politikus partai Islam, Hartono Mardjono, pernah dikutip Koran *Republika* (edisi 3 Januari 1997) sebagai menyebut rekrutmen untuk menjadi perwira Kopassus pada masa kepanglimaan Moerdani sangat diskriminatif terhadap mereka yang beragama Islam. Menurut informasi Hartono Mardjono, kalau direkrut 20 orang, 16 di antaranya adalah perwira beragama Kristen atau Katolik, dua dari Islam, satu Hindu, dan satunya lagi Buddha.

Masih berhubungan dengan agama, menarik untuk dicatat, Benny yang Katolik, menurut cerita Letjen TNI (Purn.) Soedibyo—dalam buku peringatan 70 tahun usia Benny—pernah memasuki wilayah Masjidil Haram di Makkah, ketika mengawal Presiden dan keluarganya melakukan ibadah umrah. Yang terakhir ini jelas bukan kesalahan Benny. Sebagai seorang Muslim, Soeharto seharusnya mengingatkan para pengawalnya, yang bukan Muslim tidak dibolehkan menginjak Tanah Haram, yakni wilayah di sekitar Makkah dan Madinah yang disucikan dan dimuliakan umat Islam.

Ketika bercerita di kantor Bais mengenai pengalamannya berada di sekitar Ka'bah, Benny kabarnya menyatakan kekagumannya kepada Masjidil Haram dan menganjurkan kepada para anak buahnya yang Muslim agar menyempatkan berziarah ke tempat suci tersebut.

Bahwa Benny nekat masuk ke wilayah Masjidil Haram,

itu suatu petunjuk bagaimana *bodyguard* itu sangat serius mengawal dan menjaga keamanan Bapak Presiden dan keluarganya. Untuk urusan keselamatan Soeharto, Benny tidak pernah percaya orang lain. Ke mana Soeharto pergi, Benny harus menyertainya. Bahkan, dalam acara-acara keluarga di Cendana, tanpa diundang, Benny hampir selalu hadir. Konon Ibu Tien Soeharto pernah mengeluhkan kegiatan pengamanan Benny itu sebagai menggganggu privasi keluarga.

Hubungan Bapak dan Anak

Siapa sebenarnya Benny Moerdani? Atau, mungkin pertanyaan yang lebih relevan, siapa sebenarnya Soeharto yang menciptakan fenomena Moerdani? Itu memang pertanyaan yang tidak mudah dijawab. Tidak lama setelah menjadi Pangab, kepada wartawan *Far Eastern Economic Review*, David Jenkins, Benny mengaku hubungannya dengan Soeharto bagaikan hubungan bapak dengan anak. Beda umur Soeharto-Benny adalah 12 tahun. Pertanyaan terhadap pernyataan Moerdani ini adalah apakah Soeharto juga melihat hubungannya dengan Benny bagaikan hubungan anak dengan bapak?

Benny mengenal Soeharto dari dekat ketika keduanya bertugas dalam Operasi Trikora. Soeharto Panglima Mandala dan Moerdani Komandan Operasi Naga yang diterjunkan di belantara Irian Barat. Kelak ketika Soeharto sudah menjadi Presiden, sementara Benny masih di Kuala Lumpur dan kemudian Seoul, setiap Kepala Negara ke luar negeri Benny selalu didatangkan khusus dan ditugasi

sebagai penasihat pengamanan. Ini berarti Soeharto sejak lama sudah mengenal dan mengakui keandalan Moerdani sebagai *security officer.*

Soeharto dan Benny Moerdani.

MESKI JAUH DI LUAR NEGERI, Moerdani secara teratur mengikuti perkembangan politik dan keamanan di Indonesia, terutama ketika hari-hari tegang menjelang huru-hara Januari 1974. Maka, ketika telepon panggilan dari Ali Murtopo (disampaikan oleh Kolonel Aloysius Soegianto) diterimanya, Moerdani langsung siap meninggalkan Seoul dengan penerbangan terakhir ke Hong Kong malam itu juga. Keesokan paginya Kolonel yang menjadi Kuasa Usaha KBRI Seoul itu melanjutkan penerbangan ke Jakarta. Di ibu kota, dengan segera Soeharto memberi peran amat besar kepada Moerdani.

Namun, dengan segala kekuasaan yang dipercayakan Soeharto kepada Moerdani, hubungan mereka tidak bersifat emosional sebagaimana layaknya hubungan anak dengan bapak. Ketika Moerdani sudah mulai mendeteksi ada yang kurang beres pada tingkah laku Soeharto dan keluarganya, sikapnya mulai berubah. Soeharto juga mendadak menjaga jarak dan secara berangsur-angsur menjauhkan Moerdani dari lingkungan sang Presiden.

Adapun Benny, menurut Dr. Ben Mboy—dokter militer yang ikut terjun bersama Moerdani di wilayah Irian Barat pada masa Trikora—dia menganggap negara adalah segala-galanya. Dia menuntut pengabdian semua orang kepada negara. Termasuk Soeharto. Ironisnya, pada saat yang sama, Moerdani juga memandang Soeharto layaknya seorang kawula melihat Rajanya.

“Dia Mengancam Fikri dengan Pistol”

Lama setelah disingkirkan oleh Bapak Presiden, Benny masih marah kepada siapa saja yang menjadikan Soeharto bahan lelucon. Jusuf Wanandi menyaksikan bagaimana marahnya Moerdani kepada Fikri Jufri—wartawan majalah *Tempo*—yang menceritakan lelucon mengenai Soeharto di depan Moerdani. “Dia mengancam Fikri dengan pistol, padahal waktu itu Benny sudah lama pensiun,” tutur Wanandi. Tampaknya sulit bagi mantan Pangab itu membedakan antara Soeharto dan negara. Kegalauan pada cara pandang yang demikian itulah yang, saya kira, akhirnya menjadi sumber tragedi bagi hidup Moerdani.

Mantan Pangab dan mantan Raja Intel itu adalah seorang patriot yang sejak muda memilih tentara sebagai lapangan pengabdiannya. Dalam perjalanan kariernya sebagai militer, Moerdani tampaknya sampai pada pikiran bahwa ideologi tentara—pengabdian total kepada negara—yang dianutnya harus menjadi pegangan semua orang Indonesia. Oleh karena itu, siapa saja yang bersikap lain dari sikap ABRI, dicurigainya. Kecuali sikap dan cara pandang kenegaraan ABRI—suatu cara pandang yang tidak dilihatnya ada dalam kalangan sipil—bagi Moerdani, semua sikap dan cara pandang lain tidak punya tempat di Indonesia, terutama dalam ABRI. Ini juga, saya duga, penjelasan bagi sikapnya yang kemudian enggan mendukung kebijakan Soeharto yang menugaskan Sudharmono mengarahkan Golkar makin independen dari ABRI.

Benny memang menganggap rendah politisi sipil sejak

Presiden Sukarno memerintahkan penaikan bendera putih di depan Gedung Negara Yogyakarta pada 19 Desember 1948. Dalam hal ini, Benny tidak sendiri. Hampir semua perwira TNI generasi pertama menganggap rendah para politisi sipil. Orang yang memberi landasan doktrin kepada sikap ini adalah Nasution. "Jalan Tengah" yang kemudian ditingkatkan Presiden Sukarno menjadi doktrin "Dwifungsi" adalah pernyataan paling jelas dari ketidakpercayaan—kalau bukan kebencian mendasar—militer Indonesia generasi pertama kepada kaum sipil.

DOK. KOMPAS

Gus Dur dan L.B. Moerdani.

Sebagai seorang Katolik, Moerdani mengaku kepada saya dia bukanlah Katolik yang baik. Sebagai orang Jawa Tengah, Benny mungkin memang lebih tepat digolongkan sebagai Katolik abangan. Sikapnya yang kurang bersahabat kepada Islam, hingga dia dituduh anti-Islam, mungkin sebagian besar bersumber pada latar belakang budayanya yang abangan. Dan kalau kemudian dia bersahabat dengan Gus Dur, itu juga lebih mudah dimengerti dengan melihat kedekatan kaum abangan dengan golongan Islam tradisional dibanding hubungan tidak bersahabat kaum abangan dengan dengan Islam modernis.

JAUH SETELAH BENNY TERSINGKIR dari pusat kekuasaan, beberapa tahun sebelum dia jatuh sakit yang akhirnya berakhir pada kematiannya, saya berkesempatan beberapa kali mewawancarainya di CSIS, yang terletak di Jalan Tanah Abang III, Jakarta Pusat. Wawancara dimungkinkan oleh bantuan Harry Tjan Silalahi, salah seorang pendiri dan pimpinan di CSIS yang juga teman lama Benny.

Pertemuan pertama kami dibuka dengan agak dramatis. "*You* ICMI, ya?" Tanya Benny dengan nada setengah menuduh, ketika saya baru saja duduk. Karena dia tidak berkuasa lagi, meski saya masih tetap takut padanya, saya tertawa sambil dengan santai berkata, "Bagaimana Bapak ini? Masa Raja Intel tidak tahu saya ini tidak pernah masuk organisasi, kecuali Persatuan

Wartawan Indonesia (PWI). Itu pun karena diwajibkan pemerintah Orde Baru bagi kami yang mencari makan sebagai wartawan."

Kepada Benny saya jelaskan, saya bukan anggota ICMI (Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia) tapi itu tidak berarti saya anti-ICMI. Dulu sebagai mahasiswa yang beragama Islam, saya juga tidak masuk HMI (Himpunan Mahasiswa Islam), PMII (Perhimpunan Mahasiswa Islam Indonesia), atau IMM (Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah). Bukan karena saya anti, melainkan karena saya malas saja. Teman saya dulu banyak di HMI, PMII, dan IMM, seperti sekarang banyak juga di ICMI. Tapi barangkali karena saya punya kecenderungan tidak suka diatur, maka saya pilih jadi orang bebas saja. "Mungkin karena saya melihat diri saya sebagai seniman," kata saya menjelaskan. Pada saat wawancara itu, saya kebetulan memang sedang menjabat sebagai Ketua Dewan Kesenian Jakarta (DKJ).

ICMI, Helikopter dan B.J. Habibie

Setelah itu, Benny mulai bercerita tentang bahaya ICMI sebagai organisasi sektarian, suatu tuduhan yang sering juga saya dengar dari Gus Dur. Benny cerita bagaimana dia berkali-kali mengingatkan Soeharto mengenai bahaya ICMI. Dia menyebut nama Imaduddin Abdurrahim, seorang tokoh ICMI, yang katanya diusir dari Malaysia karena sikapnya yang radikal. Karena sang Presiden tampaknya sudah berketetapan mendirikan ICMI, peringatan Benny disepelekan saja.

Perubahan orientasi politik dan hubungan Presiden Soeharto dengan Moerdani digambarkan dengan menarik oleh Ginandjar Kartasasmita dalam memoarnya. Menurut Kartasasmita,

> Sebagai seorang yang pragmatis, Soeharto melihat kekuatan Islam politik berkembang dan berpengaruh kepada kekuasaan. Pada tahun tujuh puluhan, pemerintah mengirimkan banyak mahasiswa dari IAIN [Insitut Agama Islam Negeri] dan sejumlah anggota HMI belajar di luar negeri. Mereka pada pulang dengan gelar doktor. Nurcholish Madjid, Amien Rais, Ahmad Syafii Maarif—semuanya pulang dari belajar di Amerika dengan gelar doktor dengan gagasan-gagasan Islam politik modern.
>
> Pak Harto melihat sesuatu harus dilakukan menanggapi berkembangnya pengaruh golongan intelektual Islam baru itu. Dia juga melihat kelompok Moerdani makin merupakan beban bagi sang Presiden. Untuk hari depan kepentingan politiknya, Soeharto merasa harus berbaikan dengan kekuatan Islam yang sedang bangkit tersebut, meski untuk tujuan itu dia harus menyingkirkan Moerdani.

Terhadap sikap Moerdani tentang perubahan orientasi politik Soeharto yang antara lain bermuara pada lahirnya ICMI, Teddy Rusdy menjelaskan,

> Moerdani sebagai minoritas ganda, sadar betul terhadap kerawanan dan "*sense of survival*" minoritas *vis a vis* mayoritas. LBM berpandangan, kalau ingin mencerdaskan umat Islam, cerdaskan seluruh rakyat Indonesia yang 80% lebih beragama Islam. Jadi, kehadiran ICMI dipandangnya lebih banyak mudaratnya daripada manfaatnya. Ini adalah sikap ABRI dan disuarakan juga oleh Jenderal Try Sutrisno dan Jenderal Edi Sudrajat yang beragama Islam.

Tentang ICMI dan latar belakang dukungan Presiden

Soeharto terhadap perkumpulan cendekiawan Muslim itu, Sarwono Kusumaatmadja juga punya informasi menarik. Berikut ini penuturannya kepada saya pada 10 Mei 2012:

> Setelah ICMI terbentuk, sejumlah orang meminta saya menjadi ketua PCPP [Persatuan Cendekiawan Pembangunan Pancasila]. Saya menolak dengan alasan, menyebut diri cendekiawan adalah satu arogansi. Itu juga alasan saya menolak masuk ICMI. Penolakan saya itu tak lama kemudian saya ceritakan kepada Pak Harto. Komentar Pak Harto, "Ah, orang-orang itu ketakutan saja kepada ICMI. Nggak usah khawatir kepada ICMI. Itu, kan saya yang bikin. Maksudnya untuk mengandangi, termasuk yang radikal, agar tahu mereka maunya apa dan lagi mengerjakan apa. Untuk memastikan ICMI itu terkendali, saya pasang Habibie di situ. Mengapa Habibie? Ya, karena kalau saya taruh Sarwono di situ, susah dipercaya, namanya nama Jawa. Kalau Habibie, namanya Baharuddin Jusuf, ya pasti Islam. Saya senang situ menolak jadi ketua PCPP. Mereka itu konyol saja dan tidak tahu ICMI itu bikinan saya untuk mengerangkeng orang-orang itu.

Informasi yang bersumber dari Sarwono itu mendapat dukungan Robert W. Hefner, seorang profesor antropologi dari Boston University, Amerika Serikat, yang dapat dibaca dalam bukunya, *Civil Islam: Muslim And Democratization in Indonesia* (2000). Menurut Hefner,

> Jelas sekali bahwa sejak awal ICMI tidak akan pernah menjadi sebuah badan independen sebagaimana yang diimpikan oleh para mahasiswa dan aktivis [Islam]. Soeharto dari semula sudah bermaksud memanfaatkan ICMI untuk tujuan politiknya sendiri. Habibie juga dari awal sudah berencana mengontrol ICMI dengan menggunakan teman-temannya para birokrat. ICMI hanyalah lembaga terbaru yang diciptakan Soeharto untuk mengooptasi dan mengerangkeng oposisi.

Sadar pada posisinya yang amat bergantung pada Soeharto, B.J. Habibie membaca keinginan Bapak Presiden dengan saksama serta mengamati dan menyadari hubungan yang makin tegang antara pimpinan militer dan Soeharto. Itulah latar belakang mengapa yang didudukkan Habibie pada pucuk pimpinan ICMI adalah para birokrat yang loyalitasnya tidak diragukan sang Ketua. Tidak menjadi soal bagi Habibie apakah para birokrat loyalis tersebut punya *track record* Islam atau tidak. Juga tidak menjadi soal apakah mereka berlatar belakang santri atau abangan.

Habibie dan Soeharto.

Dengan menutup kemungkinan bagi cendekiawan dan aktivis Islam memanfaatkan ICMI sebagai medium berpolitik, Habibie berharap menyenangkan Soeharto dan militer. Tentu saja kebijakan pemimpin ICMI yang demikian itu mengecewakan banyak aktivis dan cendekiawan Islam yang pada mulanya berharap banyak pada organisasi yang dibentuk dengan restu dan dukungan Presiden Soeharto. Salah seorang yang secara terbuka menyatakan kekecewaannya adalah Nurcholish Madjid, tokoh pemikir pembaruan Islam terkemuka waktu itu. Tidak lama setelah ICMI terbentuk, Nurcholish meninggalkan organisasi bentukan Soeharto itu.

SERANGAN KEPADA ICMI menjadi makin serius karena B.J. Habibie yang menjadi ketuanya. Kali ini masalahnya bukan soal ancaman ICMI sebagai "kekuatan sektarian" seperti yang sering dituduhkan oleh Gus Dur dan Benny Moerdani. Jauh sebelum ICMI terbentuk, Habibie sudah lama tidak populer di kalangan pimpinan ABRI. Ini lebih merupakan soal rezeki, karena secara politik ABRI sebenarnya memang tidak pernah melihat Habibie sebagai ancaman.

Atas keputusan Presiden, hampir semua proyek tentara yang berhubungan dengan teknologi diserahkan kepada Habibie. Salah satu di antara banyak proyek itu adalah pabrik kapal terbang Nurtanio di Pangkalan Udara Husein Sastranegara, Bandung. Pabrik kapal terbang yang sekarang dikenal sebagai PT Dirgantara Indonesia (PT DI) itu, pada mulanya milik Angkatan Udara yang

pembangunannya dipelopori Nurtanio.

“Benny Itu Korban Saja”

Suatu kali, Habibie merencanakan perluasan pabrik dan untuk itu kegiatan militer di pangkalan udara Husein Sastranegara harus dipindahkan. Soeharto pada mulanya mendukung gagasan Habibie. Pangab Moerdani gagal meyakinkan Soeharto mengenai bagaimana mahal dan sulitnya memindahkan sebuah pangkalan udara militer. Benny lalu memerintahkan Marsekal TNI Sukardi, Kepala Staf Angkatan Udara, untuk bicara langsung kepada Bapak Presiden. Soeharto akhirnya berhasil diyakinkan. Rencana penggusuran Pangkalan Militer Husein Sastranegara batal.

Ketika Soeharto memintanya memimpin ICMI sebagai Ketua, Habibie pada mulanya menolak. Dia merasa sudah tidak punya waktu tersisa lagi. Waktu itu jabatannya sudah sekitar 25. Baru setelah Soeharto menjelaskan apa arti ICMI kepada Habibie yang hingga waktu itu memang tidak banyak tertarik soal politik, jabatan Ketua diterimanya. Begitu cerita orang-orang di sekitar B.J. Habibie kepada saya. Apa sebenarnya yang dibisikkan Soeharto kepada Habibie ketika membujuk Menteri Riset dan Teknologi (Menristek) itu menerima kedudukan Ketua ICMI? Itulah yang menarik.

Menurut seorang petinggi Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), dari sebuah pertemuan tertutup dan terbatas dengan Habibie, dia menyimpulkan, dibentuknya ICMI tidak terlepas dari kecemasan Soeharto terhadap ancaman vokalnya “*Rainbow Coalition*”, yang

merupakan kumpulan kekuatan sekuler dari berbagai golongan minoritas, tokoh-tokoh militer yang berpaling dan menjauh dari Soeharto, dan juga para pengikut Gus Dur.

TENTANG HABIBIE, BENNY JUGA BERCERITA kepada saya apa yang disebutnya sebagai "kebohongan" Menteri Riset dan Teknologi itu kepada Soeharto. Ini mengenai prospek penjualan helikopter Puma rakitan Bandung. Cerita tentang Habibie, dalam versi yang sama, saya dengar juga dari Teddy Rusdy. Menurut cerita Teddy dalam wawancaranya,

> Pada suatu hari dalam suatu sidang kabinet, Habibie melaporkan rencana Iran membeli helikopter Super Puma yang dirakit di Bandung. Waktu itu sedang berkecamuk Perang Iran-Irak. Kami orang intel ingin tahu apakah Iran hanya akan membeli helikopter kosong atau dengan senjata? Kalau dengan senjata, apa senjatanya? Kemudian kami tahu bahwa yang akan djual itu adalah helikopter yang dilengkapi senjata Exocet yang memang dibuat di Indonesia dengan izin Prancis dan Jerman.
>
> Saya diperintahkan Benny terbang ke Prancis mengecek apakah Habibie punya izin menjual Exocet itu ke negara ketiga. Mereka terkejut dan mengancam mengembargo Indonesia jika senjata itu dijual ke negera ketiga. Akhirnya, rencana penjualan senjata itu berhenti di tengah jalan setelah Benny dan saya melapor ke Pak Harto.

Masih mengenai Habibie, menurut seorang purnawirawan yang pernah bertugas di Bais, Benny juga sangat khawatir melihat Menteri Ristek itu bekerja selama tiga bulan di pabrik kapal terbang Jerman, tempat Habibie dulu memulai kariernya pada industri kapal terbang.

Katanya, kegiatan di Jerman itu atas persetujuan Soeharto. Dengan alasan keamanan, Benny berpendapat seorang menteri tidak boleh merangkap jabatan lain di luar negeri.

Habibie memang seorang pejabat tinggi di pabrik kapal terbang MBB (Messerschmitt Bolkow-Blohm) sebelum dipanggil pulang Presiden Soeharto. Terhadap pernyataan serta sikap Benny dan Teddy Rusdy mengenai B.J. Habibie, Presiden Ketiga Republik Indonesia itu, lewat sebuah wawancaranya dengan saya pada 9 Januari 2012, menjelaskan:

> Saya banyak pekerjaan di sini. Begitu banyak jabatan saya. Tidak ada cukup waktu. Bagaimana mungkin saya bisa ke MBB selama tiga bulan ketika saya telah jadi Menteri? Yang benar saja, dong.
>
> Saya ini seorang profesional dan tahu mengenai apa arti embargo. Bagaimana mungkin saya akan menjual helikopter kepada Iran yang waktu itu perang dengan Irak dan sedang diembargo oleh Barat. Saya sampaikan rencana penjualan helikopter di sidang kabinet? *Never*. Silakan periksa semua laporan sidang kabinet di Setneg.
>
> Saya memang pernah diundang ke Iran waktu itu. Tapi, saya tolak. Saya tidak mungkin kerja sama dengan mereka. Saya tidak mau melanggar embargo.
>
> Bisa saja ada orang lain yang menggunakan nama Habibie. Lagi pula kita di Bandung tidak membikin Exocet. Dari mana ceritanya saya mau ekspor Exocet?

Tentang hubungannya dengan Benny Moerdani, kepada saya Habibie memulai ceritanya pada hari-hari pertamanya di Jakarta pada 1974 setelah dipanggil pulang dari Jerman. Menurut penuturannya sendiri, Habibie tiba di Indonesia beberapa saat setelah Malari. "Saya tiba di

Jakarta ketika jam malam baru saja dicabut." Habibie lalu bercerita bagaimana pertemuan pertamanya dengan Kolonel Moerdani yang selalu dipanggilnya dengan "Mas Benny".

> Entah apa alasannya, Pak Harto memutuskan saya harus dijaga. Yang ditugaskan adalah Benny Moerdani. Waktu itu Benny masih Kolonel, baru ditarik dari Seoul. "Kenal Benny?" tanya Pak Harto. "Tidak." Yah, bagaimana saya kenal, siapa orang itu? Pak Harto selanjutnya mengatakan, "Dia akan jadi Kepala Intel Hankam dan saya tugaskan menjaga kamu biar tidak diganggu oleh siapa pun." Ketika saya jumpa di markas intel di Tebet, sekarang Balai Sudirman, dia baru saja naik pangkat menjadi Brigjen. Kami berbahasa Belanda. Semua pembantunya dia kenalkan kepada saya waktu itu.

Untuk waktu yang lama, hubungan Benny dengan Habibie amat dekat. Habibie mengaku sangat hormat kepada Benny yang dipandangnya sebagai seorang pahlawan yang sangat loyal dan penjaga keamanan Soeharto dengan serius dan sepenuh hati. Di Gedung BPPT, Jalan M.H. Thamrin, kantor Habibie, Benny juga mendapat kantor. Seorang teman dekat Moerdani bercerita bagaimana Benny menjaga Habibie layaknya aparat sekuriti Amerika menjaga Wernher von Braun, ahli roket Jerman yang dibawa Amerika dari Jerman setelah Perang Dunia II berakhir.

Menurut penuturan Habibie, hubungan dirinya makin lama makin erat dengan Soeharto, sementara hubungan Bapak Presiden dengan Benny—terutama setelah menjadi Pangab—makin lama makin berjarak. Hubungan

Habibie-Moerdani memuncak buruk ketika Benny tersingkir dari lingkungan Soeharto. Habibie merasa sejak itu Benny cemburu kepadanya. Tersingkirnya Benny digambarkan Habibie sebagai berikut:

> Benny yang sangat profesional sebagai intel melihat gejala kedekatan keluarga Pak Harto dengan kalangan bisnis sebagai bisa merusak kedudukan dan citra Pak Harto. Sebagai orang yang bertanggung jawab atas keselamatan Presiden, Benny menyampaikan kecemasannya tersebut. Ini disalah mengerti dan lalu dimanfaatkan oleh orang-orang banyak di sekitar Soeharto yang memang tidak senang melihat Benny yang amat berkuasa. Benny itu korban saja.

"Soeharto Itu yang Anti-Islam"

Pada wawancara kedua di tempat yang sama, saya mulai memberanikan diri bertanya tentang sikap Moerdani terhadap tuduhan anti-Islam yang diarahkan kepadanya. Benny marah, mukanya merah, terdiam cukup lama. Saya jadi ketakutan. Tiba-tiba dia berkata, "Kok, saya yang dituduh anti-Islam. Soeharto itu yang anti-Islam."

Moerdani tidak memerinci lebih jauh alasannya menuduh Soeharto anti-Islam. Tapi sebagai peneliti peran politik tentara, saya tahu pada awal Orde Baru, Soeharto memang ada menunjukkan sikap alergi pada Islam. Saya sendiri pernah menyaksikan Soeharto melotot kepada seorang santri wanita yang menyarankan agar demonstrasi dukungan kepada ABRI yang berlangsung di halaman Kostrad pada hari-hari pertama pasca-Gestapu itu, ditutup dengan doa.

Harry Tjan Silalahi, Sekretaris Jenderal Partai Katolik

yang bersama Subchan Z.E., Ketua Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (NU), berperan penting pada pengganyangan PKI pasca-Gestapu, sering kali jumpa Pangkostrad/Pangkopkamtib Soeharto. Harry yang kemudian dekat dengan Soeharto bisa cerita banyak mengenai sikap negatif sang Jenderal terhadap Islam.

Bersama Subchan Z.E., Harry suatu hari menemui Soeharto di Markas Kostrad beberapa saat setelah Gestapu. Menjelang akhir pertemuan, Subchan menyampaikan rencana aksi massa berikutnya dengan mengucapkan kata *Insya Allah.* Soeharto amat terganggu. "Mengapa harus pakai Insya Allah?" tanyanya dengan kesal. Ketika sudah berada di luar, Subchan yang berasal dari keluarga santri daerah Kudus, Jawa Tengah, berkomentar kepada Harry, "Wah, Soeharto ini memang abangan tulen."

Cerita lain tentang Soeharto dan Islam dari Harry bisa dibaca pada buku *Tengara Orde Baru: Kisah Harry Tjan Silalahi* yang terbit pada 2004. Pada buku tersebut dikisahkan pertemuan Harry Tjan bersama beberapa tokoh masyarakat dengan Soeharto di Markas Besar Angkatan Darat pada 24 Februari 1966. Tokoh-tokoh anti-Komunis yang menjumpai Soeharto itu, antara lain, Kasimo dari golongan Katolik, Kiai Dahlan dari NU, dan Lukman Harun dari Muhammadiyah. Soeharto didampingi Jenderal Alamsyah, Jenderal Panggabean, Jenderal Sugiarto, dan Jenderal Basuki Rahmat.

Dalam pertemuan tersebut, Soeharto menyempatkan bertanya kepada Kiai Dahlan mengenai kegiatan NU

membicarakan kembali “Piagam Jakarta”. Kiai Dahlan menjelaskan, dalam Piagam tersebut umat Islam diwajibkan menjalankan “syariat Islam”.

> Soeharto menukas dengan bertanya, “Apa itu *sarengat* (*sarengat* [Jawa] = syariat) Islam? Lalu, Kiai itu menjelaskan secukupnya dan Soeharto kembali bertanya, “Bagaimana dengan saya yang abangan ini dan orang-orang Islam abangan lainnya? Apakah akan dipaksa-paksa melakukan sembahyang dan lain-lainnya?” Oleh Kiai Dahlan dijawab, bahwa hal tersebut bergantung pada orangnya. Maka dikatakan oleh Soeharto bahwa persoalan Piagam Jakarta tidak perlu dipersoalkan dan meminta agar persoalan Piagam Jakarta itu tidak diteruskan.

Menurut Harry, Lukman Harun kemudian mengomentari kejadian tersebut dengan menyimpulkan betapa alerginya Soeharto terhadap Islam. Tapi, Harry yang lahir di Yogyakarta dan dibesarkan dalam budaya Jawa, tahu bahwa pendirian Soeharto itu adalah sikap kaum abangan sejati. Menurut Harry,

> Soeharto selalu mengatakan dia Islam, tapi dia Islam *hakekat*, bukan Islam *syariat*. Bersama Sudjono Humardani, Romo Giat, Romo Misran, Romo Budi, semua mereka itu orang kebatinan, penganut Islam *hakekat*, bukan Islam *syariat.*

Inilah yang menyebabkan Harry—bahkan lama setelah Soeharto meninggal—tetap percaya bahwa ber-Islamnya Soeharto (menjalankan syariat) pada masa tuanya, lebih banyak disebabkan pertimbangan politik. “Mencari dukungan Islam,” katanya. Pendapat yang sama juga pernah saya dengar dikemukakan Gus Dur.

Namun, Lukman Harun, tokoh Muhammadiyah yang

berlatar belakang budaya Islam Minangkabau, percaya Soeharto pada masa tuanya mendapat hidayah Allah, bertobat, dan lalu jadi Muslim yang taat. Karena perbedaan pandangan terhadap Soeharto itu, Harry Tjan dan Lukman serta kaum mereka masing-masing berselisih jalan pada 10 tahun terakhir kekuasaan Soeharto.

Padahal, mungkin saja Soeharto memang "mendapat hidayah Allah" secara pribadi. Dalam masyarakat Jawa, hal demikian bukan jarang terjadi. Tapi sebagai politikus, tentu bisa lain lagi ceritanya. Sejarah karier politik Soeharto menunjukkan dengan jelas kecanggihan mantan Presiden itu memanfaatkan siapa saja bagi keutuhan dan kelanggengan kekuasaannya. Soeharto tidak pernah bergantung pada dukungan siapa saja, ABRI, kaum sekuler, maupun Islam. Yang terjadi adalah berkat kecanggihan politiknya, semuanya bergantung pada Bapak Presiden.

Komando Jihad Diciptakan Kemudian Dihancurkan

Pada masa awal kekuasaan Soeharto, setelah membereskan PKI, para pengikut Sukarno, dan para tokoh pelopor Orde Baru (Kemal Idris, H.R. Dharsono, dan Sarwo Edhie), kekuatan Islam politik menjadi target Soeharto berikutnya. Yang mula-mula menjadi operator melaksanakan kebijakan anti-Islam Soeharto adalah Ali Murtopo. Waktu itu Moerdani masih menjabat Konsul Jenderal di Kuala Lumpur sebelum kemudian pindah menjadi Kuasa Usaha di KBRI Seoul.

Dalam rangka itulah, kemudian muncul cerita mengenai Komando Jihad yang diciptakan untuk kemudian dihancurkan. Ini adalah salah satu cara Ali Murtopo "meneror" kekuatan Islam politik, terutama menjelang Pemilihan Umum 1971. Waktu itu kubu Soeharto masih belum yakin pada kesanggupan Golkar—kendaraan politik tentara—mengumpulkan suara secara signifikan dalam pemilihan umum pertama Orde Baru.

Kelompok yang dipakai Murtopo untuk operasinya itu, antara lain, adalah para mantan Darul Islam (DI) dan Tentara Islam Indonesia (TII) yang menurut para perwira Kodam Siliwangi sudah lama mereka "jinakkan". Orang-orang Siliwangi itu amat kesal kepada kegiatan Murtopo "membangkitkan" kembali para mantan DI/TII tersebut. "Komando Jihad" itu menurut Panglima Siliwangi waktu itu, Mayor Jenderal TNI Himawan Sutanto, adalah "jadi-jadian". Tapi, para perwira di Bandung tidak bisa berbuat apa-apa menghadapi pembantu dekat Presiden tersebut.

Memanfaatkan para mantan DI/TII itu adalah taktik Murtopo yang mula-mula dipraktikkannya ketika menghadapi PKI. Dia, antara lain, menggunakan para mantan DI/TII itu untuk menghadapi orang-orang Komunis setelah Gestapu. Jauh sebelumnya, di Sumatra Barat, sebagai perwira intel dalam pasukan yang beroperasi menumpas PRRI, Ali Murtopo melakukan hal yang sebaliknya. Di Sumatra Barat, Murtopo menggunakan anggota-anggota Pemuda Rakyat (PR), organisasi pemuda Komunis yang tergabung dalam Organisasi Pertahanan Rakyat (OPR), dalam mengejar tokoh-tokoh PRRI.

Langkah Ali Murtopo itu mendapat dukungan Kolonel Pranoto Reksosamodra, Panglima Operasi yang memang berkecenderungan kiri.

Menurut sebuah sumber di Padang, Kolonel Dahlan Jambek, seorang tokoh PRRI dan mantan pejabat tinggi di Markas Besar Angkatan Darat, tewas di tangan OPR ketika dia dalam perjalanan menyerahkan diri ke pos pasukan TNI. Sumber tersebut menjelaskan adanya kontak antara Kolonel Jambek dan pimpinan militer mengenai rencananya menyerahkan diri. Untuk itu, sebagai mantan petinggi di Markas Besar Angkatan Darat, dia minta agar dijemput oleh Panglima. Tapi, tempat dan waktu penjemputan bocor atau dibocorkan kepada OPR yang lebih dulu datang "menjemput" sang Kolonel.

DI/TII yang dibangkitkan dan dimanfaatkan Ali Murtopo itu kemudian ternyata tidak seluruhnya bisa dijinakkannya kembali. Ini lebih kurang sama ceritanya dengan menggunakan Gali di Jawa Tengah yang akhirnya berada di luar kontrol Murtopo. Para Gali dihabisi oleh anak buah Letkol Mohammad Hasbi lewat operasi yang kemudian dikenal sebagai Petrus [penembak misterius], sementara kegiatan bekas-bekas DI/TII dalam bentuk Negara Islam Indonesia (NII) masih terus menghantui masyarakat hingga awal abad ke-21.

Salah seorang korban "cuci otak" NII adalah keponakan kami. Bukan cuma kuliahnya berantakan, keponakan kami itu juga "dipaksa" melakukan tindak kriminal yang menjadikan milik orangtuanya sebagai sasaran. Keluarga kami memerlukan waktu lama untuk

"mengobati" anak tersebut sebelum pada akhirnya bisa kembali kuliah, setelah kehilangan waktu enam tahun.

BERBEDA SEDIKIT DENGAN PENGAMATAN HARRY TJAN SILALAHI, Jusuf Wanandi—yang tidak berlatar belakang budaya Jawa—melihat Soeharto pada masa tuanya memang tampak berangsur berubah terhadap Islam. Meski secara politik tetap saja seperti sejak awal Orde Baru. Menurut Jusuf Wanandi,

> Pada awal masa kepresidenannya, hubungan Soeharto lebih dekat kepada mistik Jawa daripada kepada Islam. Tapi pada akhir delapan puluhan, dia menjauhkan diri dari mistik Jawa (demikian juga ingatannya kepada Sudjono Humardani, teman seperguruannya dalam mistik Jawa) demi menaikkan citranya di mata masyarakat Islam. Tapi adalah juga benar bahwa sejak Sudjono meninggal pada 1986, perhatian Soeharto kepada praktik Kejawen menjadi berkurang.

Antonius Paulus

Perubahan pada diri Soeharto mungkin terjadi karena saat umurnya makin tua, muncul keperluan lebih mendekatkan diri kepada Tuhan dengan melaksanakan syariat, bukan melulu melalui jalan kebatinan yang lebih mengutamakan hakikat. Pada dasarnya orang-orang abangan sejatinya memang religius, sehingga tidak sulit bagi mereka berubah menjadi Islam yang serius, Katolik atau Protestan yang taat. Perubahan cara beragama banyak terjadi lewat perkawinan.

Dalam hal ini, Wiratmo Sukito—tergolong cendekiawan anti-Komunis terkemuka pada masa Orde

Lama—adalah contoh bagus yang saya saksikan sendiri. Sebagai orang Jawa abangan kelahiran Solo, pada tahun lima puluhan Wiratmo Sukito, atas kemauan sendiri, memutuskan menganut agama Katolik. Dia lalu dipermandikan dengan nama baptis Antonius Paulus. Sebagai penganut agama Katolik, dia sangat taat, rajin ke gereja, dan tulisan-tulisannya sering mengutip Alkitab.

Pada awal Orde Baru, Wiratmo yang lama membujang memutuskan kawin dengan seorang Hakim Agung yang kebetulan beragama Islam. Wiratmo beralih agama. Sebagai orang Islam, dia menjalankan agama barunya dengan sangat khusyuk dan tulisan-tulisannya juga banyak mengutip ayat-ayat dari Al-Quran. Persis seperti dulu ketika masih beragama Katolik, dia gemar mengutip Alkitab.

Perubahan keberagamaan yang terjadi pada Soeharto kemungkinan besar bisa juga dimengerti jika melihatnya dari segi latar belakangnya yang abangan itu. Tapi dari titik pandang politik, yang saya duga ikut mendorong perubahan itu adalah keberhasilan Soeharto melumpuhkan kekuatan Islam politik. Artinya, kekuatan Islam politik bukan ancaman lagi bagi kekuasaan sang Presiden.

Masih dari sudut politik, seperti saya katakan tadi, perubahan juga kemungkinan muncul dari kecemasan terhadap berbaliknya kekuatan-kekuatan yang dulu dipelihara dan dimanfaatkan Soeharto—antara lain dengan menggunakan Murtopo dan Moerdani—untuk memojokkan kekuatan Islam politik.

Menarik untuk diingat, pada awal tahun sembilan puluhan, kekuatan-kekuatan yang pada awalnya merupakan pendukung penting Soeharto, terutama dalam menghadapi Islam politik, secara perlahan mulai berbalik gagang bersamaan dengan berubahnya sikap Soeharto terhadap Murtopo dan Moerdani. Gejala perubahan politik ini makin mencolok setelah ICMI terbentuk. Sebagai reaksi terhadap ICMI, sejumlah organisasi cendekiawan yang mendasarkan diri pada asas kebangsaan mendadak bermunculan. Mula-mula ada Persatuan Cendekiawan Pembangunan Pancasila (PCPP). Tapi karena sambutan Soeharto dingin terhadap organisasi ini, muncul kemudian Yayasan Kerukunan Persaudaraan Kebangsaan (YKPP) dengan Letjen TNI (Purn.) Bambang Triantoro, orang dekat Moerdani, menduduki posisi Ketua. Selaku Sekretaris Jenderalnya tampil Matori Abdul Djalil (Menteri Pertahanan pada masa kepresidenan Megawati), yang waktu itu dikenal sebagai anak buah Gus Dur. Berbagai organisasi ini muncul sebagai reaksi terhadap ICMI.

Nama Benny, Edi Sudrajat, dan Try Sutrisno disebut-sebut sebagai dekat dengan kekuatan anti-ICMI (baca: anti-Soeharto) tersebut. Harry Tjan menampik adanya kedekatan Benny kepada aktivis-aktivis yang kritis terhadap Soeharto itu. "Benny tidak berani melawan Soeharto," kata Harry. Moerdani memang tidak berani secara frontal melawan Soeharto, juga ketika masih menduduki posisi penting. Kendati demikian, sebagai pengagum Jenderal Sudirman, sebagai seorang patriot,

Moerdani juga tidak bisa tinggal diam ketika Soeharto sudah dipandangnya sebagai telah membahayakan kelangsungan hidup bangsa dan negara. Dengan sikap itulah, saya duga, Moerdani bersedia hadir dalam sebuah diskusi terbatas Yayasan Pembangunan Pemuda Indonesia (YPPI) di rumah Fahmi Idris pada suatu malam pada paruh pertama tahun 1991.

Tua, Pikun, dan Teologi Pemilu 1955

Bersama Presiden Soeharto, Benny adalah Penasihat YPPI (Yayasan Pembangunan Pemuda Indonesia) yang didirikan oleh para mantan tokoh demonstrasi 1966 dengan dukungan Ali Murtopo. Hadir di rumah Fahmi pada malam itu para pemimpin demonstrasi 1966 seperti Cosmas Batubara, dr. Abdul Ghafur, Firdaus Wajdi, Suryadi, Sofjan Wanandi, Husni Thamrin, dan sejumlah tokoh mantan demonstran lainnya. Topik pembicaraan, situasi politik waktu itu. Firdaus Wajdi, Ketua Harian YPPI, ingat malam itu Moerdani bicara mengenai Soeharto yang menurut Menhankam itu, "Sudah tua, bahkan sudah pikun, sehingga tidak bisa lagi mengambil keputusan yang baik. Karena itu sudah waktunya diganti."

Caranya bagaimana? Seorang peserta pertemuan bertanya. Benny menoleh kepada Drs. Suryadi, Ketua Partai Demokrasi Indonesia (PDI) waktu itu, sambil bertanya, bagaimana PDI? "Ah, PDI itu partai kecil, tidak usah diperhitungkan," respons Suryadi merendah. Benny kemudian bertanya kepada Husni Thamrin dari PPP. Jawab Husni, "Ini harus hati-hati. Soeharto itu orang Jawa. Tidak ada yang bisa menerka dia." Benny kemudian bertanya kepada pihak Golkar. Banyak tokoh muda Golkar di majelis itu, tapi tak seorang pun yang berani menjawab. Benny kemudian bicara mengenai gerakan massa sebagai jalan untuk menurunkan Soeharto. Firdaus menanggapi, "Kalau menggunakan massa, yang pertama dikejar adalah orang-orang Cina dan kemudian gereja." Cara yang lebih aman, kata Firdaus, "Kuasai MPR. Lewat MPR, Soeharto bisa dengan lebih aman diturunkan."

Pertemuan di rumah Fahmi itu bocor dan dilaporkan kepada Soeharto. Sebuah sumber menyebutkan laporan mencapai Presiden lewat Azwar Anas, Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat waktu itu. Atas dasar laporan itulah, Soeharto dan para pembantunya, termasuk Siti Hardianti Rukmana (Tutut), putrinya, mempersiapkan daftar calon sebagai antisipasi terhadap daftar calon anggota DPR/MPR dari pimpinan Golkar yang dicurigai Soeharto dan orang sekelilingnya sebagai telah berada di bawah pengaruh Moerdani.

Map yang berisi daftar calon yang disampaikan Ketua Umum Golkar, Wahono, dan Sekjennya, Rahmat Witoelar, diterima Soeharto untuk seterusnya dimasukkan ke laci meja kerjanya di kediaman Jalan Cendana. Dan dari laci itu dikeluarkan map yang berisi daftar yang telah disusun atas petunjuk Bapak Presiden. "Pakai ini saja," kata Soeharto kepada Wahono. Daftar itulah yang kemudian menghasilkan anggota DPR dan MPR yang waktu itu dikenal sebagai "*ijo royo-royo*".

KEMBALI KEPADA SOEHARTO yang berubah sikap terhadap Islam pada sepuluh tahun terakhir kekuasaannya, kita sebaiknya juga harus memperhitungkan dampak gerakan pembaruan Islam yang dilancarkan Nurcholish Madjid dan teman-temannya sejak 1970. Saya melihat gerakan Nurcholish dan teman-temannya itu sebagai suatu usaha pembebasan umat Islam Indonesia dari apa yang sering saya sebut sebagai "teologi Pemilu 1955" yang dulu mewajibkan umat Islam

memilih hanya partai yang berjuang bagi tegaknya negara berdasarkan syariat Islam.

Dengan pembaruan tersebut, umat Islam akhirnya tidak lagi wajib menjadi anggota atau mendukung partai Islam, meski beberapa partai tetap mengaku memperjuangkan terbentuknya negara berdasarkan syariat Islam. Semboyan yang diperkenalkan Nurcholish, "Islam Yes, Partai Islam No," kemudian menjadi pegangan mayoritas masyarakat Islam Indonesia, bahkan hingga masa pasca-Orde Baru sekarang. Salah satu akibat dari populernya pemikiran pembaruan Nurcholish itu adalah berkurangnya kecurigaan tentara dan penguasa kepada Islam, sebagaimana yang tecermin dalam kebijakan Soeharto. Terhadap kalangan Islam sendiri, langkah-langkah Nurcholish dan teman-temannya mengakibatkan lenyapnya hambatan bagi kader-kader Islam (NU maupun Muhammadiyah, dan HMI) untuk masuk Golkar atau bahkan PDI yang kelak menjadi PDI Perjuangan (PDIP). Sulit membayangkan Dr. Ir. Akbar Tanjung, mantan Ketua HMI, menjadi Ketua Golkar tanpa sebelumnya ada usaha pembaruan Nurcholish Madjid dan kawan-kawannya tersebut.

Dengan semua latar belakang itulah, antara lain, kita harus melihat kebijakan Soeharto yang membolehkan jilbab dipakai murid-murid sekolah setelah sebelumnya dilarang Menteri Pendidikan Dr. Daud Jusuf. Soeharto juga memfasilitasi berdirinya Bank Muamalat serta mendukung terbentuknya ICMI.

Daud Jusuf, salah seorang pendiri dan tokoh CSIS,

tidak mendukung kebijakan Soeharto yang "bersahabat" terhadap Islam Syariah, karena itu tidak lagi duduk dalam kabinet. Daud adalah seorang doktor didikan Prancis (Sorbonne) yang sangat kagum pada sekularisme yang dipraktikkan negara tempatnya belajar. Berbeda dengan sekularisme Amerika yang toleran terhadap agama, sekularisme Prancis (*Laïcité/Laicism*) berpangkal pada Revolusi Prancis yang memusuhi agama (*anti-cleric*).

Jenderal Mustafa Kemal Atatürk, pendiri Turki modern adalah tokoh yang juga penganut sekularisme Prancis. Maka setelah berhasil menghapuskan Kesultanan Ottoman, Kemal sebagai Presiden pertama Turki modern menerapkan sekularisme Prancis di negara yang dipimpinnya. Penerapan itu sangat anti-Islam. Segala yang berbau Islam dihapuskan. Orang-orang Turki dipaksa meninggalkan nama-nama berbau Islam dan harus menggunakan apa yang disebut Kemal sebagai "nama asli Turki". Pakaian yang bercorak Islami dilarang dan orang Turki didorong berpakaian seperti orang-orang Eropa. Azan di masjid yang menggunakan bahasa Arab dilarang, digantikan dengan bahasa Turki.

Haji Mohammad Soeharto

Pada 1991, Soeharto sekeluarga melaksanakan ibadah haji. Waktu itu banyak pemerhati politik yang belum melihat langkah Soeharto berhaji sebagai suatu yang serius. Di Jakarta waktu itu sejumlah orang cenderung melihat langkah itu sebagai lebih merupakan tipu daya politik menjelang Pilpres 1993. Menjelang keberangkatannya ke

Tanah Suci, kepada pimpinan NU Jawa Timur, Kiai Haji Misbah dan Dr. Saleh Aljufri, yang menemuinya di Cendana, Soeharto menjelaskan, sebenarnya dia sudah merencanakan berhaji sejak masa Pelita (Pembangunan Lima Tahun) I, tapi batal. Pada Pelita II gagal, masa Pelita III baru sempat melakukan umrah, dan pada masa Pelita IV batal lagi. "Baru pada Pelita V ini saya takut kepada Allah untuk menunda kembali karena saya tahu pergi haji itu wajib hukumnya," kata Soeharto.

Terhadap kepergian Soeharto ke Tanah Suci itu, Benny cemas. Kepada sejumlah sahabatnya yang berkumpul di CSIS, Benny berkata, "Wah, kalau Bapaknya serius, bakal repot kita." Soeharto ternyata kemudian memang tidak main-main ke Makkah. Selain menyempurnakan namanya menjadi Haji Mohammad Soeharto, sikap politiknya terhadap Islam juga kemudian terlihat makin simpatik. Apa pun alasan dan motifnya, Benny dan sejumlah jenderal tidak bisa mengerti, apalagi menerima perubahan sikap dan kebijakan Soeharto tersebut. Raja Intel itu bersama sejumlah golongan anti-Soeharto akhirnya melanjutkan *crusading* mereka terhadap kebijakan baru Bapak Presiden terhadap Islam, terutama terhadap ICMI. Akibatnya, Benny akhirnya yang menerima tuduhan sebagai anti-Islam.

Soeharto dan Ibu Tien di Padang Arafah ketika menjalankan ibadah haji, 1991.

Sehubungan dengan ketegangan hubungan antara Soeharto dan mantan Panglima ABRI itu, menarik untuk memperhatikan satu dari sejumlah cerita dalam memoar Jusuf Wanandi mengenai Moerdani dan Soeharto. Ini mengenai pertemuan Soeharto dengan Moerdani yang lolos dari pengamatan pers dan para musuh Benny. Kepada Wanandi, Moerdani bercerita, atas usaha Tutut, mantan Pangab itu berhasil jumpa Soeharto. Konon itu adalah perjumpaan pertama Benny dengan Soeharto sejak Ibu Tien Soeharto meninggal dunia beberapa tahun sebelumnya.

Sejumlah hal dibicarakan kedua mantan pembesar Republik tersebut. Salah satu hal penting yang disampaikan Benny kepada Soeharto dalam pertemuan di rumah Sigit Harjojudanto—salah seorang putra sang mantan Presiden—adalah informasi mengenai 5 dari 10 Pangdam waktu itu adalah mereka yang disebut Moerdani sebagai jenderal "hijau".

Menurut Jusuf Wanandi—mengaku mendapatkan cerita pertemuan Moerdani dengan Soeharto langsung dari mantan Pangab itu sendiri—Benny menuliskan nama-nama Pangdam yang dinilainya "hijau" itu dan menyerahkannya kepada Soeharto. Soeharto, menurut Wanandi, mengirimkan daftar nama tersebut kepada Wiranto, Panglima ABRI di bawah Presiden B.J. Habibie. Wiranto, menurut Wanandi lagi, memerlukan waktu hanya sebulan melengserkan lima Pangdam yang ada dalam

daftar Moerdani tersebut.

Selain soal pelengseran para Pangdam yang dianggap "hijau" berdasar informasi Moerdani, Jusuf Wanandi juga mencatat kontak Wiranto lainnya dengan Benny. Menurut petinggi CSIS tersebut, beberapa saat setelah dilantik sebagai KSAD pada 10 Juni 1997, Wiranto menemui Moerdani untuk minta bantuan. Respons Benny,

> Jangan bermimpi. Orang tua itu tidak senang kepada saya, tidak percaya kepada saya. Kau harus bertahan di situ karena kau satu-satunya yang kita miliki. Jangan berbuat salah. Jangan dekat dengan saya sebab kau akan dihabisi Soeharto kalau dia tahu.

Presiden Soeharto melantik Jenderal Wiranto sebagai Panglima ABRI.

KEBETULAN SAYA JUMPA JENDERAL TNI WIRANTO di Studio Metro TV pada 22 Oktober 2012. Kami sama-sama menjadi narasumber pada acara *Mata Najwa* yang membicarakan prospek para mantan jenderal yang akan menjadi calon Presiden pada Pemilihan Presiden 2014. "Tidak benar semua cerita itu." Kata Wiranto selanjutnya,

> Demi Allah, saya tidak pernah berhubungan dengan Pak Benny secara pribadi. Saya jumpa hanya pada acara-acara resmi. Dan tidak ada lima Panglima Kodam yang saya ganti waktu itu. Dalam soal ABRI "Hijau" dan "Merah Putih" saya memang selalu kena fitnah.

PADA MULANYA BARANGKALI BENNY memang hanya menjalankan kebijakan Soeharto. Tapi, mengingat sikap dan latar belakangnya yang secara prinsipil dari awal memang kurang bersahabat kepada Islam, maka masyarakat Islam Indonesia akhirnya cenderung melupakan bahwa Soeharto-lah sebenarnya yang mula-mula menggariskan kebijakan sikap keras terhadap Islam. Benny dan Ali Murtopo hanya menafsirkan serta melaksanakannya. Tentu menurut penafsiran dan selera, latar belakang, ambisi pribadi serta kepentingan golongan masing-masing kedua tokoh intel tersebut.

Dalam mencoba mengerti kebijakan Orde Baru terhadap Islam, ketika menjadi mahasiswa di Ohio State University, saya pernah menulis sebuah makalah untuk kelas perkembangan politik di Dunia Ketiga. Yang mengajar waktu itu adalah Prof. Dr. Ali Mazrui, guru besar

tamu dari Kenya, Afrika Timur. Pada makalah tentang Islam di Indonesia tersebut, saya mengemukakan sinyalemen saya mengenai adanya kesinambungan antara kebijakan Islam Snouck Hurgronje (penasihat urusan Islam pemerintah Kolonial Belanda pada awal abad ke-20) dengan kebijakan Islam yang dijalankan Soeharto. Unsur paling penting kebijakan tersebut adalah: Islam sebagai ibadah harus didukung, Islam sebagai kegiatan sosial harus diawasi, sedangkan Islam sebagai kegiatan politik harus dicegah.

Salah Menjabarkan Perintah

Nah, dalam melaksanakan pencegahan itulah tampaknya para pelaksana kebijakan Soeharto membuat penafsiran-penafsiran yang mengacaukan antara Islam sebagai ibadah, aktivitas sosial, dan Islam sebagai gerakan politik. Kesalahan atau kekacauan tersebut tidak harus dilihat melulu sebagai kesalahan tak terencana. Bukan tidak mungkin "kesalahan" itu adalah justru bagian dari sebuah rencana berdasar pandangan dan kepentingan tertentu. Saya secara perlahan mendapat kesan kuat telah terjadinya kesalahan penafsiran atau salah menjabarkan perintah oleh para anak buahnya.

Dan salah menafsirkan yang berujung pada salah implementasi itu kemudian menyulitkan posisi politik Soeharto di mata kaum mayoritas. Mengingat hubungan dekat CSIS dengan Ali Murtopo dan Moerdani, dan doktrin "dua setan" yang dulu diperkenalkan Pater Beek (memandang Islam sebagai musuh potensial yang harus

diwaspadai), maka hubungan Soeharto dengan CSIS juga ikut terseret jadi korban.

TELAH MENJADI KEBIASAAN SAYA MEMBERIKAN TRANSKRIP rekaman wawancara kepada tokoh penting yang saya wawancarai. Maksudnya untuk menghindari keliru catat, dan sekaligus memberi kesempatan kepada narasumber mengoreksi atau bahkan mengubah hasil wawancaranya. Hal yang sama saya lakukan juga kepada Benny Moerdani.

Beberapa hari setelah transkrip terkirim melalui CSIS, saya kebetulan berjumpa dengan mantan Pangab itu di Markas Besar Angkatan Darat (MBAD). Pada hari itu, 10 Juni 1997, diselenggarakan upacara timbang terima KSAD dari Jenderal Hartono ke Jenderal Wiranto. Saya memberi salam. Jawab yang saya peroleh bukan salam, tapi pertanyaan bernada menuduh: "*Whom you are working for?*" [Kau kerja untuk siapa?] Khas pertanyaan seorang intel yang memang selalu hidup penuh curiga terhadap sekelilingnya.

Lho, kok saya dicurigai kaki tangan orang lain. "*General, I am a scholar. I work for nobody*." Saya tidak tahu dari mana saya tiba-tiba mendapat keberanian menantang sang mantan Raja Intel dan mantan Panglima ABRI. Kata saya, "Saya ingin jumpa Pak Benny." Beberapa jam kemudian, tak lama setelah saya tiba di rumah, telepon berbunyi. "Dari CSIS," kata istri saya. Pesannya, "Pak Benny menunggu Pak Salim hari Rabu siang di Tanah Abang." Hari itu Senin, jadi besok lusanya saya akan jumpa

Benny di CSIS.

Rabu tiba. Dalam perjalanan ke CSIS pagi itu segala doa yang pernah diajarkan almarhum Ayah, yang harus dibaca kalau ingin jumpa pembesar, saya baca dengan khusyuk. Doa-doa itu, menurut ayah saya, akan melunakkan hati sang pembesar yang akan kita temui. Harus saya akui hari itu saya masuk ke gedung CSIS dengan rasa takut. Benny resminya memang tidak lagi berkuasa, tapi bagi saya, masih tetap saja menakutkan. Dugaan saya, mantan anak didik serta perwira-perwira binaannya di kalangan intel masih banyak di dalam ABRI.

Ketika pintu saya ketuk, Benny membukakan sendiri pintu bekas kantor Ali Murtopo, tempat wawancara berlangsung. Bisa diduga, dengan wajah datar, tanpa emosi, dan pasti tanpa senyum. Melihat langsung ke matanya, kalimat pertama saya setelah duduk: "Pak Benny, saya itu takut pada Anda." Jawab Moerdani dengan spontan, "Kalau saya tidak percaya pada *you*, tidak akan *you* sampai di tempat ini." Ketakutan saya mendadak sirna. Doa saya dikabulkan Allah. Alhamdulillah.

Dalam suasana yang lebih santai, pertanyaan saya makin berani. "Ada apa sebenarnya yang terjadi antara Anda dan Pak Harto, kok bisa sampai Anda dimusuhi?" Tidak jelas jawaban Benny. Mungkin dia memang tidak suka menjawab pertanyaan tersebut. "Pak Benny tidak ingin membicarakan soal itu," kata seorang mantan anak buahnya. Mungkin juga tidak ingin orang tahu dia ada persoalan dengan mantan bosnya. Harry Tjan, yang sejak beberapa menit lalu bergabung ke majelis wawancara

tersebut, diam sembari terus memperhatikan wajah Benny. Menanti agak lama, saya memberanikan diri menjawab sendiri pertanyaan saya: "Di mata Soeharto Anda sudah sangat kuat, dan itu menakutkan sang Presiden."

Saya lalu cerita kasus-kasus kepala intel yang berhasil menyingkirkan presidennya atau mereka yang disingkirkan bahkan sebelum berbuat apa-apa. Shaari Goma di Mesir disingkirkan dengan cepat oleh Presiden Anwar Sadat—tidak berselang lama setelah menggantikan Presiden Nasser—karena mencium rencana makar sang Kepala Intel. Beria di Uni Soviet yang sangat berkuasa atas KGB dengan cepat disingkirkan oleh Khrushchev setelah orang Ukraina itu sukses menggantikan Stalin. Di Korea Selatan, kepala intel malah berhasil menembak mati Presiden Park Chung Hee.

Benny berusaha membantah penjelasan saya. Tapi Harry Tjan menengahi, "Saya kira Salim benar." Sebenarnya saya masih ingin mengelaborasi jawaban saya, tapi tiba-tiba kehilangan semangat. Yang rencananya ingin saya katakan kepada Benny: "Karena Anda menjadi sangat kuat oleh besarnya wewenang dan kekuasaan yang dilimpahkan Soeharto, Anda makin menguasai ABRI, terutama dengan menggunakan semua jaringan intelijen. Atas dasar kekuasaan yang amat besar itu, di mata Soeharto Anda cukup kuat untuk mengalihkan loyalitas dari dirinya ke lembaga ABRI."

Benny mungkin tidak menyadari akibat dari langkah-langkahnya. Dia "menegur" Soeharto kemungkinan besar

bertolak dari rasa hormat dan cintanya kepada orang yang telah “memungut” dan memercayainya dengan kekuasaan tak terkira besarnya. Saya hampir yakin, Benny justru berusaha menyelamatkan Soeharto, sembari juga mungkin untuk menyelamatkan kekuasaan ABRI. Tapi Soeharto, apa boleh buat, melihatnya dari sudut berbeda.

Soeharto tampaknya menafsirkan langkah-langkah Benny sebagai bagian dari rencana sang Kepala Intel dan Panglima tentara itu menggunakan ABRI mengoreksi, bahkan mengontrol kekuasaan sang Presiden. Inilah, saya yakin, penjelasan mengapa Benny dicopot dari jabatan Panglima ABRI secara mendadak sebelum Sidang MPR 1988 itu. Menurut beberapa sumber, Soeharto waktu itu takut Benny akan memengaruhi jalannya Sidang MPR yang salah satu agendanya mengangkat Sudharmono menjadi Wakil Presiden.

Di kemudian hari, pada memoar Jusuf Wanandi saya mendapatkan informasi baru yang mungkin ikut mendorong Soeharto melengserkan Moerdani secara mendadak. Dikisahkan Wanandi mengenai sejumlah pengikut Benny yang ternyata memang melakukan kegiatan dalam rangka rencana mengusulkan nama Panglima mereka kepada Soeharto agar diangkat menjadi Wakil Presiden. Untuk tujuan tersebut, para loyalis Moerdani sudah memulai langkah mereka dengan menyosialisasikan gagasan tersebut kepada para Atase Pertahanan (Athan) Indonesia dengan mengumpulkan mereka di Bangkok dan Aljir (Aljazair).

Seperti diketahui, perwira yang menduduki posisi

Athan pada waktu itu hampir semuanya orang-orang Bais, perwira intel, yang hanya mungkin menduduki posnya berdasarkan persetujuan Moerdani. Orang-orang Benny seperti Marsekal Muda Teddy Rusdy, menurut Wanandi, cenderung melihat Soeharto sebagai harus memperhatikan kehendak ABRI karena kekuasaannya bergantung pada dukungan ABRI.

Meletakkan Tongkat Biliar

Jusuf dan Harry Tjan berpendapat sebaliknya. Bagi para pembesar CSIS itu, ABRI yang justru bergantung pada Soeharto. Menurut Jusuf, Harry menjelaskan kepada Teddy Rusdy, dia dan teman-temannya tidak akan pernah berhasil memaksakan kemauan ABRI kepada Soeharto, juga seandainya dia bisa menyatukan ABRI untuk melakukan pemaksaan tersebut. Rencana para pengikut Benny—yang mungkin saja tidak diketahui oleh sang Raja Intel—tentulah diketahui Soeharto.

Syahdan, maka pada suatu kesempatan bermain biliar di Cendana, Benny memberanikan diri secara langsung menyampaikan kritiknya terhadap tingkah laku anak-anak Soeharto yang dianggap sang Panglima sebagai "bisa membahayakan keamanan Bapak Presiden". Menurut catatan Julius Pour, penulis biografi L.B. Moerdani, dalam pertemuan di kamar biliar itu Benny meyakinkan dukungan ABRI kepada Soeharto, tapi terhadap anak-anak Soeharto, Benny menjelaskan, "Saya tidak bisa menjamin mereka juga bakal mendukung putra-putri Bapak." Reaksi Soeharto: diam, meletakkan tongkat biliar, meninggalkan

Benny sendirian. Moerdani mengira Soeharto pergi ke kamar kecil. "Ternyata dia meninggalkan saya untuk tidur. Maka, saya sadar dia marah atas kata-kata yang baru saja saya ucapkan," kata Benny kepada Julius Pour.

Soeharto tentu terkejut melihat keberanian Moerdani menegurnya mengenai hal yang amat sensitif bagi sang Presiden. Keterkejutan itu besar kemungkinan juga dilatarbelakangi informasi yang dipunyai Soeharto mengenai adanya rencana memaksakan dirinya menerima Benny sebagai Wakil Presiden.

Di samping itu, Bapak Presiden memang sangat peka jika bisnis anak-anaknya diungkat-ungkit. Soeharto miskin dan menderita pada masa kecilnya. Dia tidak ingin anak-anaknya mengalami penderitaan itu lagi, begitu pendapat sejumlah orang yang kenal sejarah hidup dan sikap Soeharto kepada anak-anaknya. Sikap memanjakan anak yang berlebihan ini konon sering menjadi topik kritik dan debat antara Soeharto dan Ibu Tien, istrinya. Sang Ibu konon tidak terlalu berkenan melihat suaminya secara berlebihan memanjakan anak-anak mereka.

Selain Moerdani, dalam soal anak-anak Bapak Presiden itu kabarnya Menteri Pekerjaan Umum, Radinal Mochtar, juga pernah "kena batunya". Ketika putri sulung sang Presiden, Tutut, bermaksud menjadi pemborong jalan tol Cawang-Priok hingga ke lapangan terbang Cengkareng, Radinal menghadap Bapak Presiden. "Itu pekerjaan sulit, dan Mbak Tutut belum berpengalaman mengerjakan proyek besar demikian," kira-kira begitu kata Radinal. Jawab Soeharto, "Kalau dia tidak tahu,

Saudara ajari anak itu." Dan selesailah cerita. Jawaban Soeharto adalah perintah yang harus dikerjakan Menteri Radinal Mochtar. Dan perintah Bapak Presiden memang tidak mungkin tidak dilaksanakan oleh sang Menteri.

Jauh sebelum Moerdani memberanikan diri menegur Soeharto mengenai bisnis anak-anaknya, Mashuri, S.H.—bekas tetangga Pangkostrad di Jalan Agus Salim, kemudian Menteri Pendidikan dan Menteri Penerangan Orde Baru—pernah mengingatkan Soeharto mengenai adiknya, Probosutejo, mantan guru Taman Siswa di Kota Pematang Siantar, Sumatra Utara. Adik Soeharto ini pada awal Orde Baru mendadak menjadi pebisnis besar dan tentu saja kaya raya. Jawab Soeharto kepada Mashuri, "Kalau saya bisa memperkaya orang lain, mengapa saya tidak boleh memperkaya keluarga saya sendiri."

Mengenai kegiatan bisnis anak-anak Soeharto, Teddy Rusdy, dalam wawancaranya dengan saya pada 10 Agustus 2010, menjelaskan:

> Karena percayanya Pak Harto kepada Pak Benny, Presiden tidak hanya minta Pak Benny sebagai Asisten Intel, tapi juga untuk mengamankan keluarganya. "Mengamankan" itu sebuah kata multitafsir. Pak Harto tidak pernah bilang, "Ben, bisnisnya anak-anak itu dibantu."
>
> Pak Benny kemudian mendiskusikan dengan saya arti kata "mengamankan" itu. Kalau itu menyangkut bisnis, hal demikian bisa memukul balik Pak Harto. Itu yang kami sampaikan kepada anak-anak Pak Harto. Tapi bagi anak-anak, yang mereka kehendaki harus kita turuti dan bantu. Tutut pernah datang dengan 10 proyek. Saya bilang kepadanya, dua boleh, yang delapan, tidak. Tommy datang dengan empat, Pak Benny bilang yang satu bagus, yang tiga tidak bisa.
>
> Nah, ada beberapa jenderal yang kendati tidak dititipi oleh Pak Harto, tapi karena ingin mendekati Cendana, kehendak

> anak-anak itu mereka turuti. Inilah yang menyebabkan timbulnya citra buruk Pak Benny di mata Cendana.

Masih mengenai tingkah laku putra-putri Soeharto, Jusuf Wanandi suatu kali mengungkapkan kepada saya rencana Tutut memberi kuliah mengenai jalan tol di Universitas Diponegoro, Semarang, Jawa Tengah. Sebagai pemborong pembangunan jalan tol waktu itu Tutut sedang menyelesaikan jalan tol dari Cawang, melalui Tanjung Priok ke *airport* Sukarno-Hatta. Berdasarkan pengalaman membangun jalan bebas hambatan itu, Tutut berencana memberi kuliah umum di Universitas Diponegoro, Semarang. Moerdani mencegahnya. "Kalau mau membangun jalan tol, bangun saja. Tidak usah memberi kuliah segala." Menurut Jusuf Wanandi, Benny cemas Tutut akan jadi sasaran demonstrasi mahasiswa jika niatnya memberi kuliah terlaksana.

Membahayakan ABRI

Yang juga makin memperburuk hubungan Soeharto dengan Benny Moerdani adalah sikap Panglima ABRI terhadap Sudharmono sebagai Ketua Golkar, artinya sebelum menjadi Wakil Presiden. Dalam sebuah rapat pimpinan Golkar yang juga dihadiri Moerdani sebagai Ketua golongan ABRI dalam Golkar, Sudharmono mengumumkan tekadnya memenangi 70 persen suara pada Pemilu menjelang Sidang Umum MPR 1988. Benny berpendapat kemenangan demikian tidak akan bisa tercapai tanpa melibatkan usaha paksa dari ABRI. "Ini

tidak benar. Merusak ABRI," kata Benny, menurut penuturan Teddy Rusdi. Benny menuduh Golkar tidak percaya diri, padahal selain Golkar ada ABRI yang juga punya fraksi di MPR. "Yang kita pertahankan itu UUD 45 dan Pancasila. Kalau voting kita pasti menang. Jadi, Golkar menang 60 persen saja cukup. Kita harus bermain cantik saja," tandas Moerdani.

Namun, karena Sudharmono menjalankan kebijakan Presiden Soeharto yang Ketua Dewan Pembina Golkar, "Maka pendapat Pak Benny dinilai sebagai tanda tidak loyal," kata Teddy. Pada masa itu, Benny malah dituduh mendukung Megawati dan PDI.

Mengenai dukungan terhadap Megawati ini, menurut Jusuf Wanandi, dalam ABRI waktu itu memang muncul dua kelompok. Satu yang bersimpati kepada Megawati, yang lainnya tidak ingin melihat putri Sukarno itu memimpin PDI. Termasuk yang bersimpati kepada Megawati adalah Brigjen TNI Agum Gumelar dan Mayjen TNI Abdullah Mahmud Hendropriyono. Moerdani menyarankan kepada Agum dan Hendro agar melindungi Megawati. "Kita tidak boleh membiarkannya tersingkir. Saya tahu orang tua itu ingin terbebas dari Mega. Tapi, itu tidak *fair*," begitu konon kata Benny kepada dua jenderal juniornya tersebut.

Menurut Jenderal Marinir Nono Sampono, pada waktu itu Benny memang amat mendukung Mega menjadi Ketua PDI. "Kalau tidak sekarang, nanti dia terlalu tua untuk jadi Presiden." Nono mengaku terkejut mendengar ucapan Benny yang kemudian menjadi

kenyataan ketika Mega menjadi Presiden menggantikan Gus Dur yang dimakzulkan. Tapi, menurut pengakuan Jenderal Hendropriyono kepada saya,

> Saat Munas [musyawarah nasional] PDI, saya tidak pernah menerima perintah atau pesan apa pun langsung dari Jenderal Benny untuk menyukseskan Megawati, kecuali mungkin secara tidak langsung jika melalui orang-orangnya. Di pos saya di Kodam Jaya, orang-orang tersebut adalah Letjen TNI Ary Sudewo (Waka Bais ABRI) dan Letjen TNI Haryoto P.S. (Kasospol ABRI). Namun anehnya, mereka berdua juga terlihat bingung ketika saya berpendirian keras, bahwa Munas PDI di daerah tanggung jawab saya harus berlangsung secara demokratis. Kedua senior saya itu setuju dengan kesimpulan saya bahwa kalau berlangsung demokratis, Megawati akan menang. Menurut saya mereka berdua adalah simpatisan Megawati. Tapi, saya tidak mendengar dari keduanya ada bisikan dari Benny Moerdani. Saya sendiri memang bersimpati kepada Megawati karena Bung Karno idola saya.
>
> Ketika jumpa Pak Harto di [Pangkalan Udara] Halim Perdanakusuma, saya katakan, Munas PDI saya jamin aman jika pemilihan saya kawal sesuai dengan aspirasi *floor* dan hampir pasti Megawati akan terpilih kembali sebagai Ketua Umum. Pak Harto tersenyum lalu berkata, "PDI itu partai kecil sehingga siapa pun yang menjadi Ketua Umum tidak akan berpengaruh apa-apa terhadap stabilitas nasional."

Cerita tentang Megawati, PDI, dan Moerdani sebenarnya sudah bermula pada 1987, ketika Benny sebagai Pangab dan Pangkopkamtib, membiarkan partai tersebut melakukan kampanye pemilu besar-besaran di Jakarta dengan peserta berpakaian merah sembari membawa gambar-gambar Bung Karno. Pada hari-hari kampanye itu, Jakarta berubah menjadi kota yang "metal", merah total. Para peserta kampanye bukan cuma

orang-orang PDI, anak-anak kelas menengah yang umumnya bukan konstituen PDI juga ikut memanfaatkan kesempatan berhura-hura dengan mobil-mobil mewah mereka.

Saya menonton kampanye itu di beberapa tempat. Kesan saya, selain merupakan hura-hura anak muda, keramaian itu sekaligus juga sebagai semacam pernyataan protes kepada pemerintah lebih dari sekadar dukungan kepada PDI. Menurut catatan Jusuf Wanandi,

> … Kemudian Benny dengan koneksi pribadi di kalangan PDI dan keluarga Sukarno berusaha dengan Agum dan Hendropriyono [membantu Megawati]. Inilah yang disampaikan Benny kepada Harry Tjan dan saya di kemudian hari.

Yang barangkali tidak diceritakan Benny kepada Jusuf adalah mantan Pangab itu pernah "dilamar" oleh Sukarno untuk menjadi suami Megawati tidak lama setelah Moerdani mendapatkan Bintang Sakti. Benny menolaknya dengan alasan sudah punya pacar. Pilihan Benny adalah Hartini, seorang pramugari yang kemudian menjadi istrinya. Juga tidak dijelaskan dalam memoar Wanandi tindakan Moerdani "membantu" Megawati dan PDI sangat membuat Soeharto marah karena Bapak Presiden melihat Megawati sebagai potensi saingan, bahkan ancaman bagi Tutut, putri sulung sang Presiden. Dan seperti yang kita ketahui, nanti pada era Reformasi, Megawati sempat menjadi Presiden (menggantikan Gus Dur), sementara Tutut tersisih.

Yang juga perlu dicatat sehubungan dengan episode

kedekatan Moerdani dengan PDI adalah sikap ABRI kepada Golkar waktu itu yang tidak lagi sekompak masa-masa sebelumnya. Secara terang-terangan menjelang Pemilu 1993, ada 40 purnawirawan ABRI berpangkat kolonel ke atas memutuskan bergabung ke PDI. Tapi dari semua kegiatan Moerdani, tampaknya yang paling mendongkolkan Soeharto adalah saran Benny agar secepatnya sang Presiden memilih orang lain melanjutkan kepemimpinan nasional Indonesia. Sang Presiden mungkin berpikir, "Ini anak yang saya 'pungut' dari ujung utara dunia sana sudah berani mengajari saya."

Penting untuk diketahui, posisi dan nasib Benny memang mendadak berubah menjadi amat penting berdasar keputusan Soeharto menariknya dari jabatan Kuasa Usaha pada KBRI Seoul segera setelah Malari 1974. Benny tiba dari Seoul sebagai Kolonel dan dalam beberapa hari sudah jadi Brigadir Jenderal dengan kekuasaan hampir tak terbatas atas berbagai lembaga intelijen penting. Menurut catatan buku terbitan majalah *Tempo*, Benny waktu itu menduduki pimpinan enam posisi intel terpenting Indonesia. Dia Wakil Kepala Bakin, Asisten Intel Hankam, Asisten Intel Kopkamtib, Kepala Pusat Intel Strategis, Kepala Pusat Screening, dan Kepala Satuan Tugas Intel Kopkamtib.

Minta Waktu 10 Tahun

Keributan di Jakarta pada awal 1974 tersebut mendorong Soeharto memanfaatkan Benny setelah badan-badan intel di Jakarta kacau-balau akibat konflik yang meledak antara

kubu Sumitro (Kopkamtib) dan kubu Ali Murtopo (Opsus). Atas saran Murtopo, Soeharto memerintahkan Moerdani segera meninggalkan Seoul, terbang ke Jakarta. Konon mantan Konjen itu minta waktu 10 tahun untuk membenahi intel militer dan sipil. Permintaan dikabulkan. Ternyata kemudian selama 14 tahun, Benny secara sempurna telah menguasai intel Indonesia yang telah ditatanya. Masa panjang menguasai intel yang demikian itu belum pernah terjadi sebelumnya dan tidak pernah terjadi lagi setelah Benny tersingkir. Masa sepanjang itu menguasai intel membuka kesempatan bagi Moerdani untuk akhirnya juga menguasai ABRI.

Penataan kembali berbagai organisasi intel tersebut dilakukan Moerdani jelas berdasarkan otorisasi Soeharto. Dalam melaksanakan perintah dan kepercayaan Soeharto, Benny juga mempertimbangkan pengalamannya pada masa Konfrontasi. Sebagai Konjen di Malaysia selepas Konfrontasi, Benny antara lain bertugas mengurus pemulangan para sukarelawan Dwikora kita yang tertangkap dan dipenjarakan di negara bagian Johor. Dari para sukarelawan itu, Benny tahu betapa kacaunya intel kita waktu itu. Informasi yang dibekalkan kepada sukarelawan itu banyak yang salah sehingga mereka mudah sekali tertangkap. Pengalaman buruk masa Konfrontasi itu ikut jadi pertimbangan dalam penataan kembali intel yang dilakukan Benny.

Ironisnya, dalam Operasi Seroja menduduki Dili, Timor Timur, terjadi lagi kesalahan yang sama, kalau tidak malah lebih parah. Pasukan yang terjun di Dili pada hari pertama

Operasi Seroja itu mengalami banyak kesulitan dan korban akibat saling tembak karena, antara lain, taklimat intel yang kurang akurat. Disebutkan, misalnya,Sungai Komoro di tengah Kota Dili itu banyak buayanya, padahal di sungai tersebut bukan cuma tidak ada buaya, tapi juga tidak ada air. Alias kering berbatu.

Menurut pandangan Letjen TNI (Purn.) Sayidiman Surjohadiprodjo yang ditulisnya sebagai Pengantar buku Kiki Syahnakri, *Timor Timur The Untold Story* (2012), kecerobohan intel bukan soal tunggal kegagalan penyerbuan TNI ke Timor Timur. Perencanaan operasi juga semrawut. Izin Presiden Soeharto kepada Moerdani sebagai pemimpin dan pengendali Operasi Seroja, menurut yang didengar Sayidiman dari Jenderal TNI Maraden Panggabean, Panglima ABRI waktu itu, adalah Operasi Intel. Izin itu disalahartikan oleh Moerdani. Tulis Sayidiman selanjutnya,

> Pada dasarnya satu operasi intelijen adalah tertutup (*covert*), bukan secara terbuka. Jadi melaksanakan operasi intelijen dengan cara operasi militer konvensional merupakan keganjilan, bahkan kesalahan. Apalagi melakukan operasi konvensional yang begitu spektakuler berupa operasi gabungan antar-angkatan dengan disertai operasi lintas udara (*airborne operations*) pada dasarnya suatu kesalahan.

Jenderal Hendropriyono, perwira Kopassus yang pernah beroperasi di Timor Timur dan kemudian menjabat Panglima Kodam Jaya, mempunyai komentar lain terhadap kegagalan Operasi Seroja di Timor Timur. Katanya,

> Kesalahan strategis dalam kampanye militer di Timor Timur dulu adalah merebut kota-kota besar dengan sangat tergesa-gesa, yaitu menyerbu langsung kota-kota besar tanpa terlebih dahulu mengepungnya dari pedalaman atau desa-desa. Sasaran strategis berupa kota-kota dengan mudah direbut, jika daerah-daerah sekelilingnya telah kita kuasai, sehingga semua fasilitas seperti air, listrik, dan dukungan logistik ke kota lainnya telah kita tutup melalui operasi *interdiksi*.

Kendati kegagalan intel dan kecerobohan perencanaan operasi—semua di bawah pimpinan Moerdani—Soeharto tetap saja mengangkat Benny menjadi Panglima ABRI pada 1983. Yang mencolok tapi ditoleransi Soeharto, Benny yang sudah jadi Panglima ABRI tetap juga memimpin Bais—lembaga intel ABRI yang waktu itu bahkan lebih berkuasa dari Bakin—suatu hal yang bertentangan dengan tradisi dan aturan militer yang memisahkan antara penyedia dan pengguna intelijen.

Nanti ketika Soeharto mulai merasakan Benny sebagai ancaman, Bais dilikuidasi. Bais dibubarkan pada 25 Januari 1994, sebulan setelah Megawati terpilih sebagai Ketua Partai Demokrasi Indonesia (PDI). Mungkin saja pembubaran Bais adalah bagian dari "hukuman" Soeharto kepada Moerdani yang meski bukan lagi Pangab, tapi tetap saja diizinkan Panglima Try Sutrisno berkantor di Bais.

Sebagian kegiatan badan intel ciptaan Moerdani dialihkan ke lembaga intel baru, Badan Intelijen ABRI (BIA) yang tidak lagi seberkuasa Bais. Sebagian sisa kekuasaannya dikembalikan kepada Badan Koordinasi

Intelijen Negara, Bakin (yang sekarang menjadi BIN).

WAKTU DIPANGGIL KEMBALI KE JAKARTA, menurut ceritanya kepada saya, mantan Konjen dan kemudian Kuasa Usaha itu sebenarnya sedang bersiap-siap ditempatkan di Negeri Belanda sebagai Duta Besar setelah sekian tahun bertugas sebagai Konjen di Malaysia dan Kuasa Usaha di KBRI Korea Selatan. "*I was on my way out of the army*," katanya kepada saya. Soeharto mencegatnya di jalan dan memberinya kekuasaan yang nyaris tak terbatas.

Dugaan saya, sang Presiden memberi kepercayaan dan kekuasaan amat besar kepada Benny, berdasarkan asumsi sang mantan Konjen tidak punya akar dalam ABRI. Latar belakang Benny sebagai orang yang berdarah Indo-Jerman dan beragama Katolik tentu juga ikut menambah keyakinan Soeharto melihatnya sebagai bukan potensi ancaman bagi kekuasaan Bapak Presiden.

Ketika Soeharto mengangkatnya memimpin berbagai lembaga intel pada masa pasca-Malari 1974, Benny sudah sembilan tahun berada di luar jajaran militer. Jabatan tertinggi sebagai tentara yang pernah dipegangnya hanya Komandan Batalion, dengan pangkat mayor, pada Resimen Para Komando Angkatan Darat (RPKAD). Di mata Soeharto, barangkali latar belakang demikian akan selalu menempatkan Moerdani pada posisi bergantung pada Presiden.

Membuat pemimpin tentara bergantung pada Presiden sebelumnya telah dilakukan Sukarno terhadap

Omar Dani. Dengan mengendalikan Omar Dani, Sukarno nyaris berhasil memanfaatkan Angkatan Udara menghadapi Angkatan Darat. Berkonflik dengan Soeharto, Sukarno gagal. Akibatnya, Dani kemudian "masuk jurang" bersama sang Presiden. Hubungan Soeharto-Moerdani berakhir lain. Moerdani pintar, tapi Soeharto ternyata tidak kalah cerdik.

Menarik untuk diperhatikan, sebelum Benny, Soeharto juga telah mengangkat Jenderal Jusuf, yang ketika dilantik sebagai Panglima ABRI, sudah 14 tahun berada di luar jajaran militer. Selain bukan orang Jawa, Jusuf juga berasal dari Kodam kecil di luar Jawa, tidak punya kebiasaan mengumpulkan pengikut, dan selama memimpin ABRI selalu sadar diawasi oleh Benny sebagai kepala intel dan Laksamana TNI Sudomo sebagai Pangkopkamtib.

Yang tidak pernah diperhitungkan Soeharto, Benny seorang perwira para komando yang amat cerdas, berpengetahuan luas, gemar membaca, banyak inisiatif, teguh memegang prinsip, berani, selalu bisa memanfaatkan kesempatan yang sulit macam apa pun, dan memiliki kepemimpinan yang mumpuni.

Yang juga tidak dipertimbangkan Soeharto ketika memberi kepercayaan amat besar kepada Benny adalah sifat sang Kepala Intel yang kemudian terbukti tidak loyal kepada orang, siapa pun dia. Benny hanya loyal kepada prinsip yang diyakininya.

Singkat kata, Soeharto tidak betul-betul kenal Benny ketika memercayainya dengan kekuasaan yang amat

besar. Sebagai seorang yang gemar dan terampil mengelola kekuasaan, kesalahan Benny cuma satu, terlambat bertindak (kalau memang pernah ada rencana bertindak). Soeharto dengan tangkas mendahuluinya.

Tidak Kenal Menyerah

Untuk mengenal dengan lebih baik watak perwira komando ini, kita harus tahu siapa jenderal yang dikaguminya, dan mengapa? Benny adalah pengagum berat Panglima Besar Sudirman. Jenderal Sudirman merupakan model militer bagi Benny. Sudirman adalah perwira yang tidak loyal secara kaku kepada Presiden Sukarno. Ketika tentara Belanda menyerbu Yogyakarta pada 19 Desember 1948, Sukarno, berdasarkan perhitungan politik dan diplomatik, memutuskan mendukung keputusan kabinet yang memilih sikap menyerah kepada musuh.

Namun, sebelum menaikkan bendera putih di depan Gedung Agung, Presiden Sukarno masih sempat membujuk Sudirman yang sakit (paru-parunya baru saja dibuang sebelah dalam sebuah operasi medis) agar tinggal saja di dalam kota. Kepada Sudirman, Sukarno berjanji akan meminta dokter tentara Belanda merawatnya.

Berpegang pada sumpah TNI yang "tidak kenal menyerah", Sudirman mengabaikan perintah Panglima Tertingginya. Dia memutuskan masuk hutan memimpin perang gerilya. Dilihat dari segi disiplin militer, Sudirman sebenarnya melakukan insubordinasi. Tapi itu terjadi pada zaman Revolusi dan aturan yang dipakai juga "aturan

Revolusi" dalam suatu negara yang belum lagi mempunyai tradisi pengelolaan hubungan sipil-militer.

Bagi Benny, keputusan Sudirman bergerilya kendati dalam keadaan fisik yang sangat lemah, adalah contoh sikap seorang kesatria sejati. Sudirman di mata Benny lebih mementingkan keselamatan Tanah Air dan Bangsa daripada secara militer tunduk perintah atasan, ketika perintah itu dianggap membahayakan kelanjutan hidup bangsa, negara, dan keselamatan Tanah Air.

Sikap Sudirman itulah yang dijadikan contoh dan model TNI mengenai disiplin hidup untuk membedakannya dengan disiplin mati (*cadaver*). Yang berperan besar dalam menafsirkan dan menghidupkan kembali warisan Sudirman adalah Jenderal TNI Abdul Haris Nasution. Pengalaman serta tingkah laku politik Sudirman ditafsirkan dan dihidupkan kembali oleh Nasution setelah kegagalan pimpinan Angkatan Darat menghadapi Parlemen dan Sukarno pada 17 Oktober 1952.

Yang paling penting dan mendasar dari pengalaman dan tingkah laku politik Sudirman dalam tafsiran Nasution adalah menyebut TNI pertama-tama adalah alat perjuangan. Konsekuensi dari sikap dan persepsi diri seperti ini, dalam keadaan tertentu tentara bisa berbeda pandangan dengan pemerintah.

Dan dengan sikap dan persepsi diri demikian itulah, tentara mempunyai landasan berpolitik sebagaimana dirumuskan Nasution lewat pidato "Jalan Tengah" yang diucapkan di Akademi Militer Nasional (AMN) di Magelang bulan November 1958. Sikap Soeharto kepada Sukarno

pada hari-hari pertama pasca-Gestapu—tidak selalu mengikuti kehendak Presiden—berkiblat kepada model kepemimpinan Sudirman.

Nah, dengan latar belakang inilah kita harus mengerti sikap Benny yang mencoba mengalihkan loyalitasnya dari Soeharto ke lembaga ABRI. Bagi Benny, sang Presiden sudah mulai menunjukkan tanda-tanda membahayakan keselamatan bangsa dan negara. Tapi, Benny bukan Sudirman. Soeharto juga jelas bukan Sukarno. Zamannya bukan zaman Revolusi, juga bukan masa gawat pasca-Gestapu. Faktor-faktor penting ini rupanya tidak begitu diperhitungkan Benny Moerdani. Akibatnya, dengan tangkas, trengginas, dan cepat, Presiden Soeharto "melucutinya".

Anjing Herder

Yang juga tidak diperhitungkan Benny adalah dampak pekerjaan lamanya sebagai apa yang pernah disebutnya sendiri sebagai "anjing herder penjaga Soeharto". Ketika melaksanakan pekerjaan sebagai aparat sekuriti (*bodyguard*) penjaga Soeharto, Benny, mungkin tanpa sadar, telah berhasil menciptakan banyak musuh.

Musuh-musuh itulah yang tampaknya dilihat B.J. Habibie sebagai sejumlah orang yang melancarkan intrik terhadap Moerdani di lingkungan Soeharto. Di luar lingkungan Presiden, musuh besar Benny adalah golongan Islam. Paling sedikit Benny dipersepsikan oleh mayoritas umat Islam Indonesia waktu itu sebagai musuh yang menakutkan. Moerdani bukan tidak sadar akan

posisinya yang sulit karena persepsi golongan Islam yang demikian. Karena itu, sejak lama Benny mendekati Gus Dur untuk melindungi dirinya terhadap tuduhan anti-Islam. Ketika Gus Dur mengadakan Muktamar NU di Situbondo tahun 1984, menurut Jusuf Wanandi, Moerdani membantunya habis-habisan.

Dalam pengamatan Jusuf Wanandi, Benny dan Gus Dur sependapat dalam soal menolak Islam politik. Pada saat yang sama, Gus Dur juga curiga kepada Soeharto yang berada di balik ICMI. Gus Dur memusuhi ICMI karena di mata tokoh NU ini ICMI berbau Masyumi, partai kaum modernis Islam yang di mata Gus Dur merupakan musuh lama NU.

Adalah kelihaian Soeharto merangkul golongan Islam sebagai bagian dari usahanya memperkuat barisan menghadapi apa yang mungkin dipersepsikannya sebagai potensi bahaya dari kelompok sekuler di sekitar Moerdani dan para jenderal pimpinan ABRI lainnya serta para pengikut Gus Dur. Hebatnya Soeharto, dia mendapat dukungan Islam tanpa konsesi signifikan yang mengompromikan kontrolnya terhadap kekuasaan siapa saja.

Senjata untuk Mujahidin Afghanistan

Ketika kita membicarakan para musuh Benny, nama Prabowo Subianto tidak boleh dilupakan. Prabowo yang waktu itu menantu Soeharto, sepertinya menganggap Moerdani sebagai penghalang bagi hari depan kariernya. Untuk waktu yang lama terjadi ketegangan antara dua

perwira berlatar belakang Kopassus itu. Masing-masing membina pengikut. Dan untuk menjaga loyalitas para pengikut, mereka berdua memerlukan dana banyak. Moerdani rajin bagi-bagi hadiah kepada para pengikut atau para perwira yang didekati untuk, paling sedikit, tidak berpihak kepada kekuatan yang tidak loyal kepadanya. Prabowo juga melakukan hal yang sama. Maka, terjadilah kompetisi bagi-bagi duit dan hadiah.

Danjen Kopassus TNI AD Mayjen Prabowo Subianto bertindak selaku komandan upacara pada geladi resik Gelar Pasukan Kopassus 1997 di Batujajar, Bandung.

Selain kompetisi damai, suatu konflik fisik juga nyaris terjadi, yakni ketika Prabowo mencurigai Moerdani merencanakan kudeta penyingkiran Soeharto. Ketegangan antara Moerdani dan Prabowo diselesaikan secara internal oleh Panglima ABRI, Jenderal Jusuf.

"Rencana kudeta" yang tidak pernah terjadi itu terungkap ke masyarakat di kemudian hari, jauh setelah berakhirnya rezim Orde Baru. Drama yang tokoh utamanya Prabowo, sekarang bisa dibaca dalam buku biografi Mayjen TNI Sintong Panjaitan, senior Prabowo di Kopassus. Pada buku *Perjalanan Seorang Prajurit Para Komando*, terdapat bagian yang mengisahkan Prabowo menyiapkan pasukannya menangkap Moerdani dan orang-orangnya yang dicurigai akan melancarkan kudeta kepada Presiden Soeharto, mertuanya.

Rencana aksi Prabowo bermula pada adanya sejumlah senjata yang dicurigai Prabowo dibeli Moerdani dari Taiwan. Berbagai jenis senjata tersebut, menurut sejumlah mantan pembantu Moerdani, rencananya akan disalurkan kepada para Mujahidin yang melancarkan perang gerilya terhadap Uni Soviet di Afghanistan.

Menurut Jenderal Luhut Binsar Panjaitan, atasan Prabowo waktu itu, operasi intelijen Moerdani, (pembelian senjata dan rencana pengirimannya ke Afganistan lewat Pakistan) dilakukan dalam upaya memberi peran Indonesia dalam pergolakan politik di Asia

Selatan. “Jadi, tidak pernah ada rencana kudeta,” kata Luhut sekian belas tahun kemudian. Sayangnya, usaha saya mendapatkan tanggapan Prabowo terhadap pernyataan Luhut ini tidak pernah berhasil. Persoalan masa lalu tampaknya tidak lagi menarik bagi Prabowo. Dia tentu lebih tertarik mengelola kekuasaannya lewat Partai Gerindra yang didirikan dan di-pimpinnya.

Marsekal Muda TNI (Purn.) Teddy Rusdi terlibat dalam urusan senjata untuk Mujahidin di Afganistan tersebut. “Tidak ada pembelian dari Taiwan,” katanya. Senjata itu adalah senjata buatan Uni Soviet, bekas dipakai ABRI pada masa Trikora dan Dwikora. “Kami berikan senjata buatan Soviet itu agar mereka mudah memanfaatkan peluru yang mereka sita dari tentara Soviet di Afghanistan,” kata Rusdi.

Sadar bahwa Kapten Prabowo adalah menantu Presiden Soeharto, Panglima ABRI, Jenderal Jusuf, yang terkenal keras dalam menegakkan disiplin militer, ternyata tidak cukup berani mendisiplinkan Wakil Komandan Detasemen Anti Teror Kopassus tersebut. Selain kedudukannya sebagai menantu Soeharto, Prabowo juga putra Prof. Dr. Sumitro, begawan ekonomi Indonesia, tetangga dan teman lama Jenderal Jusuf. Ketika Prabowo melangsungkan pernikahannya dengan putri Presiden Soeharto, atas permintaan Prof. Sumitro, Jenderal Jusuf tampil sebagai saksi nikah dari pihak Prabowo.

Sumber yang amat dekat dengan Jenderal Jusuf waktu itu menyebutkan aksi Prabowo itu sebenarnya berangkat dari penolakan perwira Kopassus itu kepada

kemungkinan Soeharto mengangkat Moerdani menggantikan Jusuf sebagai Panglima ABRI. Tidak jelas apakah waktu itu sudah terlihat tanda-tanda Soeharto akan mengangkat Moerdani sebagai pengganti Jusuf.

Dalam posisinya sebagai perwira berpangkat Kapten dan baru saja menjadi menantu Presiden Soeharto, tentu Prabowo belum mempunyai akses langsung kepada penguasa tertinggi ABRI. Itulah penjelasannya mengapa dia hanya mungkin berbicara dengan Panglima Jusuf. Mungkin karena teman keluarga Prabowo, Jusuf melindungi putra Prof. Sumitro itu dari kemungkinan tindakan balasan Moerdani. Jenderal Jusuf juga tampaknya tidak melaporkan kasus tersebut kepada Presiden Soeharto.

MASIH TENTANG PRABOWO, Vatiokiotis dalam bukunya *Indonesian Politics Under Suharto*, menulis:

> Prabowo, seorang perwira yang dipandang banyak orang berpotensi mendapatkan posisi militer jika Soeharto bertahan, sangat yakin adanya plot dari kalangan militer tertentu terhadap mertuanya. Bersama sejumlah anggota keluarga Presiden, Prabowo mencoba meyakinkan Soeharto adanya bahaya terhadap sang Presiden dari orang tertentu—terutama Moerdani —dan memberikan saran mengenai siapa yang harus dipromosikan untuk menghadapi ancaman tersebut. Sulit dimengerti seorang yang hanya berpangkat Letnan Kolonel memiliki pengaruh besar dalam militer. Pada 1991, anak muda yang ambisius ini memimpin dua batalion para dari Brigade 17 Kostrad yang Panglimanya ipar Soeharto [Wismoyo]. Dengan sepengetahuan atau tidak sepengetahuan Soeharto, Prabowo mengumpulkan sejumlah perwira yang loyal kepadanya. Dengan menggunakan ancaman Moerdani dan "Klik Kristen"-nya, Prabowo menarik perwira-perwira yang beragama Islam.

Menjadikan Benny Moerdani sebagai tokoh yang dianggap mengancam dan karenanya harus diwaspadai bukan saja dilakukan Prabowo Subianto. Jenderal Alamsyah, pengikut lama Soeharto dan waktu itu menduduki posisi sebagai Menteri Agama, bahkan memobilisasi dukungan umat Islam kepada Soeharto dengan menjadikan Moerdani sebagai ancaman terhadap umat Islam. Menurut Vatiokiotis,

> Alamsyah menyebarkan ketakutan di kalangan ulama dengan menyebut adanya ancaman Moerdani terhadap umat Islam. Dengan menyebut pembantaian brutal orang Islam di Tanjung Priok pada September 1984, Alamsyah berusaha meyakinkan para ulama akan bahaya Kristen terhadap umat Islam dengan Moerdani sebagai tokohnya.

Di seputar pergolakan politik dan militer pada hari-hari berakhirnya rezim Orde Baru, nama Prabowo—Panglima Kostrad dengan pangkat Letnan Jenderal—tampil kembali ke perhatian publik. Kali ini "konfliknya" bukan lagi dengan Moerdani, melainkan dengan Jenderal TNI Wiranto, Pangkostrad, Kepala Staf Angkatan Darat, kemudian Panglima ABRI.

Di kalangan para perwira dan sejumlah pemerhati militer waktu itu sudah lama beredar cerita "rivalitas" Prabowo-Wiranto. Prabowo kabarnya memandang rendah Jenderal Wiranto yang dianggapnya tidak punya cukup pengalaman tempur seperti dirinya yang bolak-balik bertugas di Papua dan Timor Timur. Ketegangan Prabowo-Wiranto mencapai klimaks ketika atas rekomendasi Dewan Kehormatan Perwira (DKP) Panglima

ABRI—dengan persetujuan Presiden Habibie—memecat Pangkostrad dari dinas militer. DKP bersidang memeriksa kasus keterlibatan Prabowo dalam penculikan sejumlah aktivis menjelang Sidang MPR 1998.

Panglima ABRI, Wiranto melepas tanda kepangkatan di pundak Letjen Prabowo Subianto sebagai simbol pemberhentian dari dinas kemiliteran pada 24 Agustus 1998.

Sebelum diperiksa oleh DKP, Prabowo sudah diminta memberi penjelasan kepada pimpinan ABRI. Menurut kesaksian Jenderal Wiranto dalam bukunya, *Wiranto Bersaksi di Tengah Badai*,

> Dalam penjelasan yang disampaikan secara lisan di depan saya, yang juga diketahui oleh Kassospol Letjen TNI Susilo Bambang Yudhoyono, Kasum Letjen TNI Fachrul Razi, dan Ka Bais Mayjen TNI Zacky Anwar Makarim, yang bersangkutan mengakui keterlibatan Kopassus dalam peristiwa tersebut. Saya lalu menanyakan, bagaimana mungkin aksi semacam itu dilakukan tanpa menyampaikan laporan kepada atasan. Jawaban Letjen Prabowo sungguh mengejutkan, operasi intelijen yang berbentuk aksi penculikan tersebut memang sengaja tidak dilaporkan atau dimintakan izin kepada pimpinan ABRI maupun staf agar tidak merepotkan dan tidak melibatkan Mabes ABRI.

Hanya 17 Jam

Ketakutan yang "ditebarkan" oleh Moerdani sejak masa pasca-Malari, 1974, ternyata tidak mudah terhapuskan dari pikiran sejumlah besar orang. Begitu besar dan panjangnya usia ketakutan tersebut, pada hari pertama pasca-Orde Baru, seorang perwira tinggi yang hanya karena dicurigai sebagai "orang Benny" harus dikorbankan secara spektakuler.

Jenderal itu bernama Johny Lumintang. Dia Asisten Operasi di Mabes ABRI ketika malam itu diperintahkan

mengambil alih kursi Pangkostrad dari Letjen TNI Prabowo Subianto. Putra Prof. Sumitro Djojohadikusumo itu secara mendadak dicopot dari jabatannya oleh Presiden Habibie. Konon atas saran mantan Presiden Soeharto, yang waktu itu masih mertua Prabowo.

DOK. TEMPO

Jenderal Johny Lumintang.

Entah dari mana sumbernya, pada malam Lumintang secara mendadak ditugaskan menggantikan Prabowo, beredar dengan cepat informasi yang menyebut Johny orangnya Benny Moerdani. “Bahaya, Benny main lagi.” Timbul kepanikan. Jenderal TNI Wiranto mendapat “tekanan”. Dalam keadaan yang penuh ketidakpastian hari-hari itu, Panglima Wiranto terdesak membatalkan pengangkatan Lumintang setelah menduduki jabatan Pangkostrad selama hanya 17 jam.

Yang tidak diketahui orang banyak, pengangkatan Lumintang dilakukan Wiranto berdasarkan usul Letnan Jenderal TNI Fachrul Razi, Kepala Staf Umum (Kasum) ABRI yang pernah disebut-sebut oleh beberapa pengikut Benny dan Edi Sudrajat sebagai tergolong kelompok “hijau”. Fachrul Razi adalah putra Aceh yang taat menjalankan ibadahnya, bahkan dikenal sebagai khatib

sembahyang Jumat pada masjid-masjid di berbagai markas tentara.

Ketika malam itu saya hubungi lewat telepon genggam menyampaikan beredarnya cerita "Johny orang Benny" itu, komentar Letjen TNI Fachrul Razi dari Mabes ABRI: "Johny itu perwira profesional. Kalaupun Johny memang ternyata orangnya Benny, masa satu orang tidak bisa kita atasi." Kesan saya, Fachrul mencalonkan Johny, teman sekelasnya di Akabri, karena tahu Johny bukan orangnya siapa-siapa.

DI SAMPING UMAT ISLAM DALAM MASYARAKAT LUAS, di kalangan ABRI, seperti sudah saya katakan tadi, sudah lama beredar pandangan, di bawah Benny, mereka yang santri tidak selalu mudah mendapatkan promosi. Kebijakan Benny ini diketahui dengan baik dan dimanfaatkan secara saksama oleh Soeharto yang membersihkan ABRI dari pengaruh Moerdani. Inilah latar belakang dipromosikannya Jenderal TNI Feisal Tanjung menjadi Panglima ABRI dan Jenderal TNI Hartono menjadi KSAD. Ini juga penjelasannya mengapa kemudian Brigadir Jenderal TNI Nyoman Suwisma, beragama Hindu Bali, gagal menjadi Komandan Kopassus meski namanya sudah lolos dari seleksi Dewan Jabatan Tinggi (Wanjakti). Dan sebagai gantinya, Soeharto menarik dari Kalimantan Timur Mayjen TNI Muhdi Priopranyoto, Pangdam Tanjung Pura waktu itu.

Menurut informasi yang saya dapatkan di kemudian hari, pada mulanya Soeharto mengalami kesulitan

mendapatkan calon Panglima yang bisa dipercayainya mendukung kebijakan "de-Benny-isasi" yang sedang dilancarkannya. Sembari menunggu calon yang bisa dipercayainya, mantan KSAD Edi Sudrajat untuk sementara dibiarkan merangkap jabatan Menteri Hankam dan Panglima ABRI, dua jabatan yang berdasarkan undang-undang sebenarnya sudah dipisahkan.

Soeharto memerlukan waktu sebelum menemukan dan memercayai Jenderal TNI Feisal Tanjung menduduki kursi Panglima ABRI. Karena terlalu lama "terpendam" di Bandung sebagai Komandan Seskoad, nama Feisal memang nyaris tak terdengar, dan karena itu lolos dari "radar pengamatan" Soeharto. Atas bantuan beberapa orang dekat Bapak Presiden—disebut antara lain nama Menko Kesra Azwar Anas, Menristek B.J. Habibie, dan Prabowo Subianto—Feisal kemudian ditarik ke Mabes ABRI untuk mula-mula hanya menduduki jabatan Kasum dengan pangkat Letnan Jenderal.

Dari posisi Kasum itulah, Feisal naik ke kursi Panglima menggantikan Edi Sudrajat yang duduk di kursi pimpinan ABRI selama hanya hampir tiga bulan. Sebelum menunjuk Feisal, Soeharto perlu kesaksian sejumlah orang yang dianggap kenal calon Pangab itu secara pribadi. Almarhum Mayjen TNI Zaini Azhar Maulani dan Menko Azwar Anas adalah orang-orang yang diminta bersaksi lewat rekaman yang alat perekamnya dibawakan kepada mereka oleh Kolonel Kivlan Zain dan Kolonel Ismed Yuzeiri. Rekaman itu kemudian diperdengarkan kepada Soeharto. Saya tidak tahu siapa saja tokoh lain yang memberi kesaksian

sebelum akhirnya Bapak Presiden berkeputusan melantik Jenderal TNI Feisal Tanjung menjadi Pangab.

Sembari mempromosikan para perwira berlatar belakang santri tersebut, Soeharto juga melanjutkan kesibukannya membersihkan ABRI dari siapa saja yang dianggap sebagai pengikut Moerdani. Salah seorang yang masuk jaring pembersihan adalah Mayjen TNI Sintong Panjaitan. Kebetulan Sintong menjabat sebagai Pangdam Udayana, bermarkas di Denpasar, ketika peristiwa berdarah Santa Cruz terjadi pada 1991 di Dili.

Timor Timur (sekarang Timor Leste) adalah wilayah tanggung jawab Sintong, dan Peristiwa Santa Cruz dipergunakan Soeharto mengakhiri karier militer mantan Komandan Kopassus tersebut. Kesalahan Sintong? Dia dianggap orangnya Moerdani karena sebagai Pangab Benny kabarnya memang mempersiapkan Sintong (lulusan Akademi Militer Nasional 1963) menduduki jabatan KSAD. Sintong, menurut cerita teman-teman dekatnya, sebenarnya hanya seorang serdadu profesional yang bersahaja dan apolitis.

ABRI “Hijau” dan “Merah Putih”

Dari rentetan cerita yang saya kemukakan tadi, sebenarnya bisa disimpulkan, dengan mempromosikan anak-anak santri tersebut (Feisal, Hartono, Muhdi, dan banyak lagi lainnya), yang dilakukan Presiden Soeharto pada dasarnya adalah memanfaatkan mereka yang tadinya disingkirkan oleh kelompok Benny. Dengan kata lain, kelompok yang “diciptakan” Benny justru

dimanfaatkan oleh Soeharto dalam usaha sang Presiden menyingkirkan para pengikut Moerdani.

Harus dicatat, pada masa inilah juga munculnya cerita tentang "ABRI Hijau", dan "ABRI Merah Putih". Mereka yang disingkirkan Soeharto menyebut diri mereka "ABRI Merah Putih" dan menggelari lawannya, yakni mereka yang dipakai Soeharto, sebagai "ABRI Hijau". Pengamatan saya mendorong kepada kesimpulan, semua mereka adalah Pancasilais dan Saptamargais. Dan label serta isu "ABRI Hijau" versus "ABRI Merah Putih" adalah sesuatu yang mengada-ada, menyesatkan, dan kemudian memang dengan cepat berlalu.

Untuk diketahui lebih jauh, Feisal Tanjung adalah anak dari seorang tokoh Muhammadiyah di Medan, Hartono putra dari seorang ibu yang aktivis Aisyiyah di Madura. Muhdi datang dari keluarga Muhammadiyah di Yogyakarta. Mayor Jenderal TNI Hartono adalah Panglima Brawijaya di Surabaya ketika diminta oleh masyarakat Jawa Timur menjadi Gubernur di provinsi tersebut. "Try Sutrisno malah memindahkan saya ke Bandung menjadi Komandan Sesko Gabungan," kata Hartono dengan kesal.

Sebelum itu, Try Sutrisno sebagai Panglima ABRI juga pernah memerintahkan Hartono sebagai Pangdam Brawijaya di Jawa Timur agar tidak mendukung pembentukan ICMI yang waktu itu kongres pembentukannya akan diadakan di Malang. Tahu Soeharto mendukung ICMI, Hartono mengabaikan perintah Panglima ABRI tersebut. "Saya lebih takut kepada Pak Harto," katanya.

Feisal, lain lagi ceritanya. Mantan salah satu Komandan kompi RPKAD pada masa Gestapu ini menduduki jabatan Komandan Seskoad di Bandung selama hampir empat tahun. Normalnya jabatan tersebut hanya dijabat untuk masa tiga tahun. Begitu lamanya di Seskoad, teman-teman Feisal waktu itu meramalkan dia akan pensiun di sana. "Siapa yang bertanggung jawab menahan saya begitu lama di Seskoad?" Yah, siapa, menurut Pak Feisal, tanya saya. "Teman-teman Pak Benny itulah," jawab Feisal di kantornya sebagai Panglima ABRI pada Agustus 1997.

Dekat dengan Pangab Jenderal TNI Muhammad Jusuf dan salah seorang Komandan Kompi RPKAD kesayangan Kolonel Sarwo Edhie di masa penumpasan Gestapu dan berbagai operasi di Irian Barat, Feisal adalah Brigadir Jenderal pertama dari kelas 1961 AMN. Tapi, pangkat Mayor Jenderal disandangnya selama tujuh tahun. "Alasan kualitas tidak bisa dipakai untuk diskualifikasi atau memperlambat karier anak Medan itu," kata Maulani, teman seangkatan Feisal.

Maulani—pemegang penghargaan Kartika Cendekia pada angkatannya—pernah menjadi anak buah Moerdani di Bais dan dipercayai menduduki pos Atase Pertahanan (Athan) di London. Kedekatan Tanjung kepada Jusuf, menurut kecurigaan Maulani, turut menyebabkan karier Feisal terhambat. Tentang hubungan Feisal dan Jusuf, Atmadji Sumarkidjo dalam buku *Jenderal M. Jusuf: Panglima Para Prajurit*, menulis:

> … [I]a sendiri terang-terangan menyebut bahwa Jusuf adalah

satu-satunya idolanya. Kebanggaan itu konsisten diucapkan kepada berbagai pihak hingga ia menjabat sebagai Panglima ABRI. “Eh, Feisal, aku baca kau mengagumi aku. Terima kasih itu. Tapi, Pak Harto kadang-kadang tidak suka model itu.” Entah karena nasihat itu, setelah telepon Jusuf itu, di suatu media ketika ditanya siapa senior ABRI yang jadi favorit atau teladannya, Feisal Tanjung kini menyebut tiga nama: Soeharto, M. Jusuf, dan Sarwo Edhie Wibowo.

Jenderal Z.A. Maulani dan Jenderal Feisal Tanjung.

Sumber lain menunjuk kedekatan khusus Feisal dengan Sarwo Edhie yang mungkin ikut mempersulit kedudukannya pada masa Kepanglimaan Moerdani. Seperti diketahui, ketika Panglima Angkatan Darat, Letjen TNI Ahmad Yani, menyelesaikan konflik antara Moerdani-Komandan Batalion—dan Kolonel Infantri Mung Parhadimulyo-Komandan RPKAD—keduanya dimutasikan keluar dari korps Baret Merah. Benny ke Kostrad menjadi anak buah Soeharto, dan Mung menjadi Panglima Kodam di Kalimantan Timur. Sarwo Edhie, teman lama Jenderal Yani dan komandan pusat latihan RPKAD di Batujajar sebelum menduduki posisi Kepala Staf RPKAD, ditunjuk menduduki posisi Komandan RPKAD.

Menganggap masih ada perwira RPKAD yang lebih senior dari Sarwo Edhie (disebut nama Wijoyo Suyono), Benny memprotes pengangkatan itu. Juga karena menurutnya, "Sarwo Edhie bukan dari pasukan Komando dan belum pernah mengikuti pendidikan Komando." Padahal, tidak semua Komandan RPKAD pernah mengikuti latihan komando. Tapi sejak itu, Moerdani secara terbuka menunjukkan ketidaksenangannya kepada Sarwo.

Karier militer Maulani sendiri juga mandek di tengah jalan. Untuk beberapa tahun Maulani—sepulang dari London—memang pernah menjadi sekretaris Pangab, Jenderal Jusuf. Lepas dari tugas sekretaris Pangab, KSAD Jenderal TNI Rudini Puspohandoyo, mempromosikan Maulani menjadi Pangdam Tanjung Pura di Kalimantan Timur. Setelah itu, pada masa Try Sutrisno sebagai

Pangab, Maulani dikaryakan sebagai Sekjen Departemen Transmigrasi sampai pensiun.

Presiden Soeharto kemudian menunjuknya menjadi Sekretaris Wakil Presiden B.J. Habibie. Ketika Habibie menjadi Presiden, Maulani dipercayai menduduki jabatan Kepala Bakin (pendahulu BIN). Kesalahan Maulani di mata Moerdani? "Benny akhirnya tahu kalau saya sebelum menjadi tentara adalah aktivis PII [Pelajar Islam Indonesia]."

DOK. PRIBADI

Jenderal Maulani.

Sulit Main Golf

Akhirnya benny bicara juga mengenai akibat pembersihan Soeharto yang dikenal sebagai *de-Benny-isasi* itu. "Orang yang pernah dekat dengan saya sulit mendapat posisi," katanya. "Mereka yang namanya mulai dengan F.X. juga sulit dapat tempat. Tapi, saya harap ini tidak akan berlangsung lama." Untuk diketahui, F.X. (Franciscus Xaverius) adalah nama baptis Katolik.

Sehubungan dengan perwira-perwira intel yang berlatar belakang Katolik ini, saya teringat pada 1987, Athan pada Kedutaan Besar Amerika di Jakarta

menunjukkan kepada saya daftar nama para perwira intelijen Indonesia. “Bagaimana Anda menjelaskan kepada saya bahwa 30 persen dari mereka beragama Katolik?” tanya Athan Amerika tersebut.

Kepada saya, pada wawancara itu, Benny juga mengeluh sulit mendapat teman main golf karena orang takut terlihat bersama dirinya. Saya sendiri juga menyaksikan bagaimana perwira-perwira yang dulu dengan bangga tampil sebagai “orangnya Pak Benny”, kemudian beramai-ramai menghindari mantan Panglima ABRI tersebut. Para bekas anak buah Benny itu pada umumnya membela diri dengan alasan yang bukan tidak masuk akal juga. Dulu mereka dekat kepada Benny karena tugas. “Sekarang Pak Benny sudah pensiun, kami tidak ada hubungan lagi dengan beliau,” kata Kolonel Sudrajat kepada saya di London. Sudrajat—pensiun sebagai Mayjen dengan posisi terakhir Duta Besar di Beijing-—waktu itu menjabat Athan pada KBRI di London. Ketika masih di Bais, Kapten Sudrajat pernah menjadi Sekretaris Moerdani.

Begitu besarnya kekuasaan Benny pada masa berdinasnya dulu, saya mendengar cerita beberapa Panglima Daerah Militer (Pangdam) sangat berhati-hati kepada Kepala Intelnya (Asisten Satu), karena sang Asisten Intel memberi kesan kuat sebagai “orangnya Pak Benny”. Itu berarti ada kontak langsung dengan Bais yang tidak mudah diawasi oleh Pangdam yang membawahinya.

Mengenai cerita banyaknya perwira yang dulu disebut atau mengaku sebagai “orangnya Pak Benny”, Adam

Schwarz, seorang wartawan Amerika yang bertugas di Jakarta selama Benny menjabat Pangab dan kemudian Menhankam, menjelaskan semua itu sebagai akibat kebijakan Benny sendiri. Berbeda dengan panglima-panglima sebelum dan sesudahnya, Benny memang "memelihara" sejumlah orang yang disenanginya. "Mereka itu semacam *golden boys* Benny Moerdani," tulis Schwarz. Kebijakan demikian mungkin tak terhindarkan bagi Moerdani sang Kepala Intel yang salah satu tugasnya adalah penggalangan dan pembinaan.

Luhut dan Prabowo.

Salah satu yang dikenal sebagai “anak emas” itu adalah Luhut Binsar Panjaitan, seorang perwira Kopassus yang dianugerahi pangkat Jenderal kehormatan setelah purnawira. Jabatan teritorial tertinggi yang dicapai Luhut Panjaitan hanyalah Komandan Korem di Madiun. Setelah itu, dia ikut menjadi korban de-Benny-isasi. Sejumlah besar para “anak emas” ini pada mulanya memang berasal dari Kopassus yang punya latar belakang pendidikan intel. Para perwira inilah yang umumnya dipromosikan Benny ke berbagai jabatan penting dalam ABRI, terutama posisi pimpinan intelijen.

BEGITU DIANGKAT MENJADI PEMIMPIN INTEL dan kemudian sebagai Panglima, yang mula-mula direkrut Benny sebagai pembantunya adalah teman-teman lamanya dari zaman awal latihan militernya di Bandung. Perwira seperti Dading Kalbuadi, Gunawan Wibisono, Suweno, C.I. Santoso, dan Sebastian Sukoso adalah orang-orang RPKAD angkatan pertama yang juga teman Benny di Pusat Pendidikan Perwira Angkatan Darat (P3AD) di Bandung pada awal tahun lima puluhan. “Pak Benny itu orang intel. Dia merasa aman berada dan bekerja di sekitar orang yang dikenalnya dengan baik,” kata Teddy Rusdy. Baru di kemudian hari barisan “anak emas” tercipta, yakni ketika para teman lama telah mendapatkan posisi penting di luar kantor Benny.

Carilah di Kalangan Minoritas

Tambahan cerita tentang Moerdani bersumber pada Harry Tjan Silalahi, teman karib Moerdani. Menurut Harry, Benny berprinsip, "Kalau mau mendapatkan orang loyal, carilah di kalangan minoritas." Cara pandang inilah rupanya yang menjelaskan mengapa kaum santri, kaum mayoritas, dijauhi oleh Benny. Maka di sekeliling Benny banyak ditemukan perwira dari etnis tertentu dengan agama yang bukan Islam, atau mereka yang tergolong Islam abangan. Mayjen TNI (Purn.) Syamsuddin, perwira Kopassus yang mantan Panglima Kodam Trikora di Papua, pernah menceritakan kepada saya mengenai posisi asisten intel di berbagai Kodam pada zaman Moerdani. "Memang banyak diduduki oleh para perwira non-Muslim."

Kembali ke cerita "anak emas" itu tadi. Yang juga ditengarai tergolong kelompok "anak emas" itu adalah para anggota Fraksi ABRI di DPR pada awal tahun sembilan puluhan. Mayor Jenderal TNI Raja Kami Sembiring Meliala adalah tokoh menonjol Fraksi ABRI waktu itu. Sembiring yang di kemudian hari, setelah Reformasi, beralih menjadi anggota DPR dari PDI Perjuangan (PDIP), menurut mantan KSAD Jenderal Rudini Puspohandoyo adalah satu dari lulusan pertama (1960) Akademi Militer Nasional yang dibina langsung Moerdani.

Sembiring inilah yang dengan vokal dan secara mencolok pada November 1993 mengecam B.J. Habibie yang tampil ke depan dalam kedudukannya sebagai

anggota Dewan Pembina Golkar. Di samping Sembiring, anggota fraksi lain yang juga vokal waktu itu adalah Rukmini, seorang perwira Polwan (Polisi Wanita). Menurut Adam Schwarz dalam bukunya *Indonesia In Waiting* (1994), Rukmini dan Sembiring adalah bagian dari "Sayap Moerdani di DPR". Karena kesal kepada merosotnya pengaruh mereka terhadap Soeharto, Fraksi ABRI di Parlemen beranjak kritis. Sikap demikian kemudian berperan mendorong munculnya para vokalis dari Fraksi Golkar dan Fraksi PDI serta PPP.

ATAS PETUNJUK KETUA DEWAN PEMBINA, Haji Mohammad Soeharto, Habibie, dan semua anggota Dewan Pembina mendukung Harmoko menduduki posisi Ketua Umum Golkar, menggantikan Letjen TNI (Purn.) Wahono. Tanpa arahan Soeharto, bisa dipastikan Habibie tidak punya kepentingan, apalagi keberanian, menjagokan dan mendukung Harmoko.

Penunjukan Harmoko memimpin Golkar sangat membuat marah sejumlah besar perwira ABRI, terutama Edi Sudrajat dan Benny Moerdani. "Bukan cuma Benny dan Sudrajat, seluruh ABRI marah," kata Jenderal TNI (Purn.) Sumitro menegaskan kepada saya sikap tentara waktu itu.

Apakah Sumitro menolak kepemimpinan sipil di Golkar? Menurut Sayidiman yang dekat dengan Sumitro, "Kami bukan tidak setuju Golkar dipimpin orang sipil, tapi Pak Mitro tidak suka Harmoko secara pribadi yang dinilainya oportunis dan tukang *ngolor* belaka. Kami juga

tidak setuju dengan pimpinan Golkar yang tentara seperti Sudharmono, sebab dia tidak membawa Golkar ke demokrasi yang sehat."

Saya tidak tahu apakah Sumitro, Benny, Edi Sudrajat, Sayidiman, dan para jenderal lainnya waktu itu sadar, Sudharmono, Habibie, maupun Harmoko, semuanya hanya pelaksana kebijakan dan perintah Soeharto. Sebenarnya para jenderal itu sebagian besar juga pernah menduduki jabatan penting dengan tugas menjalankan kehendak Soeharto. Setelah kemudian tersingkir dari posisi menentukan, barulah mereka secara berangsur sadar juga pernah menjadi alat kekuasaan Soeharto. Jenderal Sumitro, misalnya. Sebagai Panglima Kopkamtib, dialah yang ditugasi Soeharto "mengusir" Kemal Idris, Dharsono, dan Sarwo Edhie dari sekitar pusat kekuasaan.

Mengomentari pengangkatan Harmoko ke kursi Ketua Umum Golkar, Harold Crouch, peneliti politik Indonesia dari Australia, waktu itu menjelaskan dalam sebuah tulisannya: Harmoko menjadi Ketua Umum Golkar bukan karena dia seorang sipil, tapi karena dia menjadi pilihan Istana. Dengan demikian, statusnya sebagai seorang sipil bukanlah perkara pokok. Tulis Crouch selanjutnya,

> Dari segi itu, kedudukan Harmoko mungkin ada kesamaan dengan kedudukan salah seorang pendahulunya, yaitu Letjen Sudharmono yang ditunjuk sebagai Ketua Umum Golkar sepuluh tahun sebelumnya. Seperti Harmoko, ciri istimewa Sudharmono bukan statusnya dari segi dikotomi sipil-militer, tapi hubungan akrabnya dengan dengan Kepala Negara.

Sebagai teman lama Harmoko, saya hampir tidak percaya ketika mendapat *inside infos* menjelang Munas yang menyebut senior saya di dunia kewartawanan itu akan menduduki kursi Ketua Umum Golkar. Bagaimana bisa? Untuk jadi Ketua Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Pusat saja, Harmoko perlu "dikatrol" oleh Pangkopkamtib Sumitro.

Dan inilah kisah naiknya Harmoko menjadi Ketua PWI Pusat: Pada tahun 1970, terjadi perpecahan dalam tubuh PWI sebagai akibat kongres Palembang yang kisruh karena diintervensi Opsus. Hasil rekayasa para anak buah Ali Murtopo itu mengakibatkan munculnya dua pengurus. Satu dipimpin Rosihan Anwar, yang lainnya di bawah B.M. Diah. Ali Murtopo mendukung B.M. Diah. Kopkamtib menolak campur tangan Opsus. Pangkopkamtib Sumitro turun tangan mengatasi konflik dengan cara mempromosikan Harmoko dari posisi Ketua PWI Jakarta ke kursi Ketua PWI Pusat.

Alasan Sumitro, Harmoko anak muda, sedangkan Rosihan dan Diah sudah sangat senior. Dari posisi pemimpin organisasi tunggal para wartawan itulah, Harmoko tertangkap "radar" Soeharto.

Maka, ketika dalam sebuah diskusi Sumitro ngomel-ngomel mengenai Harmoko, saya ingatkan mantan Pangkopkamtib itu, dialah yang harus bertanggung jawab terhadap tingkah laku Harmoko. Karena Sumitro-lah yang dulu mengatrolnya. Tapi, lalu apa bedanya penunjukan Harmoko memimpin Golkar dengan pengangkatan Jenderal Jusuf, dan Jenderal Moerdani menjadi Pangab?

Kedua perwira tinggi itu juga terkejut ketika kebagian posisi Pangab. Bukan cuma Jusuf dan Moerdani, kita semua juga terkejut. Ternyata kita tidak punya cukup imajinasi membayangkan betapa berkuasanya Soeharto hingga dengan mudah menjadikan Jusuf dan Moerdani sebagai Pangab, dan Harmoko sebagai Ketua Umum Golkar.

SEPERTI YANG SUDAH SAYA URAIKAN, menjelang Munas Golkar, Edi Sudrajat sebagai Panglima menyebut ABRI punya banyak calon yang disiapkan memimpin Golkar. Tidak lama kemudian, Edi Sudrajat dicopot dari kursi Pangab. Feisal Tanjung yang menggantikannya sangat mafhum kehendak Soeharto. Pangab baru itu dengan segera mengeluarkan ralat. Katanya, "ABRI tidak punya calon. Terserah pada Munas."

Maka, ketika Sembiring Meliala berkata, "Mereka itu bukan apa-apa dan akan hilang setelah Soeharto tidak lagi berkuasa," segera beredar kesan kuat Sembiring Meliala hanya "penyambung lidah" yang menyampaikan pendapat Edi Sudrajat, Benny Moerdani, dan para perwira senior ABRI lainnya.

Mantan Panglima ABRI yang juga mantan pemimpin berbagai lembaga intel itu memang tidak pernah menunjukkan kepercayaannya kepada politisi sipil. Terhadap kepemimpinan sipil, Sembiring berkomentar lebih jauh, "Rakyat masih mengharapkan ABRI sebagai Presiden." Apakah Benny berambisi menjadi Presiden setelah Soeharto? Itu, antara lain, pertanyaan beberapa

wartawan asing di Jakarta hari-hari itu.

"Panglima ABRI. Bukan Panglima Katolik"

Sebagai seorang berlatar belakang Indo dan beragama Katolik, Benny sangat sadar kemungkinannya menjadi Presiden hampir tidak ada. Kiai Yusuf Hasyim, seorang kiai dari Pondok Pesantren Tebu Ireng, Jawa Timur, yang juga paman Presiden Abdurrahman Wahid, pernah menceritakan kepada saya sarannya kepada Benny agar masuk Islam saja supaya bisa jadi Presiden. Jawab Benny, "Apakah masyarakat masih akan percaya seorang yang menjadi murtad hanya karena ingin sebuah jabatan?"

Menurut cerita Bill Morrison, seorang diplomat Australia yang kenal dekat dengan Benny, yang menjadi hambatan bagi Benny untuk jadi Presiden bukan cuma karena agamanya yang Katolik, melainkan juga karena kesadarannya terhadap latar belakangnya sebagai Indo. Sebelum amandemen konstitusi pada zaman Reformasi, UUD 1945 memang mempersyaratkan dipenuhinya syarat warga negara asli sebagai presiden. Sebagai warga negara yang punya darah Jerman, Moerdani tampaknya tidak melihat dirinya sebagai warga negara Indonesia asli.

Masih tentang urusan agama yang dianut Moerdani yang menjadi hambatannya untuk jadi Presiden atau Wakil Presiden, Jusuf Wanandi mencatat dalam memoarnya suatu adegan menarik:

> Sebagai orang Katolik, dia tidak akan pernah menjadi Presiden.

> Dan dia tidak pernah berniat berganti kepercayaan. Itu sudah dikemukakan dengan jelas oleh Benny. Suatu malam, saya ingat, kami semua makan malam bersama: Benny, Harry Tjan, dan saya. Beberapa pemimpin redaksi yang dekat dengan Benny juga ada di sana: Jakob Oetama [*Kompas*] dan Fikri Jufri dari *Tempo*. Tampaknya Fikri sudah minum anggur cukup banyak. Dia menangis, dan lalu menengok kepada Benny. "Mengapa Anda tidak masuk Islam agar kami bisa memilih Anda menjadi Presiden?" Kami semua diam. Kami tahu Benny gampang marah dan sulit diduga. Benny memandang tajam ke arah Fikri. "Apa kau pikir saya begitu murah, mengganti agama saya hanya untuk mendapatkan posisi? Tidak akan."

Mengenai Benny sebagai seorang berdarah Indo, Teddy Rusdy membenarkan pendapat Morrison dan mengenang mantan bosnya sebagai seorang yang sangat sadar sebagai minoritas ganda. "Dia Katolik dan juga Indo. Benny sadar betul pada posisi demikian," kata Teddy. Jenderal Sumitro pernah memarahi Benny yang tidak *sowan* (kunjungan kehormatan) kepada Kiai As'ad, seorang kiai karismatik di Asem Bagus, Jawa Timur, ketika Pangab meninjau latihan militer di sekitar sana. Benny membela diri, "Saya bukan Muslim." Tapi kata Sumitro kepada Moerdani—sebagaimana yang dikisahkannya kepada saya—"Ben, kau Panglima ABRI, bukan Panglima Katolik."

Minoritas Harus Kerja Dua Kali Lebih Keras

Harry Tjan juga ingat Benny pernah berkata kepadanya, "Har, untuk terbilang, kita sebagai minoritas harus kerja

dua kali lebih keras dari mereka yang mayoritas.” Saya sangat menduga, bukan tidak mungkin kondisi dan latar belakang seperti inilah yang membuat Benny lebih melihat prospek dan potensinya sebagai *King Maker*, dan sama sekali tidak berambisi menjadi *King*. Potensi demikian sudah lama menjadi bahan pembicaraan di kalangan elite Jakarta masa itu. Dan seingat saya, selama Moerdani menduduki posisi penting, memang tidak pernah muncul pembicaraan di publik yang mengarah pada adanya kecurigaan Benny berambisi menjadi Presiden atau bahkan Wakil Presiden.

L.B. Moerdani bersama Harry Tjan Silalahi di Jakarta, 1982.

Dalam biografi Teddy Rusdy, *Think Ahead*, diceritakan kesan perwira Angkatan Udara itu mengenai Moerdani pada awal pertemuan mereka pada 1974. Tertulis dalam buku tersebut:

> Teddy Rusdy terkesan dengan pesan dan visualisasi Pak Benny Moerdani yang mengatakan bahwa dalam menjalani kehidupan ini, manusia mempunyai dua pilihan, sebagai seorang aktor atau sutradara. Seorang aktor harus tampil di panggung membawakan peran yang diembannya, memainkan peranan sesuai petunjuk sutradara. Sedangkan sutradara merencanakan dan membuat jalannya cerita, "*making things happen*" yang dilakukannya dari belakang layar.

Dua Kali sebagai Pangab?

Ketika Harsudiono Hartas dan para jenderal pada 1993 nekat mencalonkan Try Sutrisno sebagai Wakil Presiden, tanpa terlebih dahulu berkonsultasi dengan Presiden Soeharto, bahkan juga tidak dengan Jenderal Try Sutrisno sendiri, banyak pengamat politik—tentu juga Soeharto—yang yakin Benny berada di balik punggung Hartas. Bagi orang-orang itu, Benny adalah sutradara yang "*making things happen*", sebab mantan Pangab itu, karena alasan agama dan latar belakang keluarga, memang hanya mungkin berperan sebagai "sutradara".

Seperti yang sudah saya jelaskan, lima tahun sebelumnya, sesaat setelah diturunkan secara mendadak dari posisi Panglima ABRI, Benny menolak dicalonkan menjadi Wapres oleh Fraksi ABRI di MPR. Dia menunjuk

Try Sutrisno, Panglima ABRI yang baru, sebagai tokoh yang harus dicalonkan. Ketika Benny menunjuk Try Sutrisno sebagai calon Wapres, alasannya Try adalah Panglima ABRI—"Ketua Partai ABRI", menurut istilah Benny waktu itu—sedangkan Benny sudah meninggalkan posisi tersebut. Di kemudian hari baru kita ketahui Try Sutrisno memang teman lama Benny, yakni sejak keduanya bersama-sama memulai karier militer di Bandung. Waktu itu Moerdani baru saja menjadi perwira Infantri dengan pangkat Letnan Dua, sedangkan Try masih Sersan Taruna pada Akademi Teknik Angkatan Darat (Atekad).

Ketika meninggalkan jabatan Ajudan Presiden, Try diajak Benny bergabung ke komunitas intelijen yang berada di bawah pimpinannya. Menurut cerita Try kepada saya, Benny mencoba meyakinkannya bahwa dia tidak punya hari depan di Angkatan Darat karena Try perwira Zeni, bukan Infantri. Tapi, kekuatan dan kontrol Soeharto atas ABRI terbukti telah menjadikan apa yang hampir tidak mungkin menjadi sangat mungkin. Sebagai perwira Zeni, Try Sutrisno bukan hanya berhasil memimpin Angkatan Darat, melainkan juga berhasil menduduki kursi Panglima ABRI.

Keputusan Soeharto yang berhasil melambungkan Try Sutrisno ke posisi tertinggi dalam tatanan militer Indonesia justru makin membuka peluang bagi Moerdani memainkan peranannya sebagai tokoh pemikir politik ABRI. Persahabatan lama Try dengan Moerdani itulah yang menjelaskan mengapa Benny diterima dengan

senang hati oleh Panglima penggantinya sebagai semacam supervisor (pembimbing) selama Try duduk di kursi Panglima ABRI. Dari kedekatan itulah, pikiran dan gagasan politik Moerdani mengalir ke dalam ABRI.

Sebagai teman lama, Benny tahu betul siapa Try, kapasitas dan kemampuannya. Dan karena itu memerlukan bimbingan Moerdani. Dalam salah satu wawancara kami, dengan nada setengah memprovokasi saya tanya Benny, "Anda ini dua kali jadi Pangab." Dengan sedikit membelalakkan mata, Benny bertanya, "Bagaimana bisa?" Jawab saya, "Waktu Pak Benny jadi Pangab, itu jelas Pak Benny Pangab. Tapi ketika Pak Try Sutrisno jadi Pangab, menurut banyak jenderal, Pak Benny juga Pangab." Komentar Benny singkat dan dingin, "*Well, in a way*."

Inilah tampaknya penjelasan mengapa sebagian staf yang dipakai Benny sebagai Panglima ABRI dimanfaatkan terus oleh Try Sutrisno. Inilah juga barangkali penjelasannya mengapa Benny menjagokan Try menjadi Wapres ketika usia Soeharto sudah beranjak sepuh. "Kalau terjadi sesuatu dengan Soeharto, orang Benny sudah siap menunggu di samping puncak kekuasaan," kata Jenderal Rudini yang sudah lama bersikap kritis dan waspada kepada Moerdani. Hubungan akrab Moerdani dan Sutrisno ini jugalah yang menjadi penjelasan mengapa hubungan Soeharto dengan ABRI makin tidak mulus pada masa kepanglimaan Try Sutrisno.

"Ah, Kita yang Bodoh"

Saya berada di Melbourne, Australia, ketika Moerdani meninggal dunia setelah sakit berat cukup lama. Media-media Australia hampir semuanya memberitakan wafatnya mantan Pangab tersebut. Beberapa koran malah bercerita lebih jauh tentang tersingkirnya Moerdani dari sisi Soeharto setelah sebelumnya sangat dipercaya dan amat berkuasa.

Kembali ke Jakarta, saya mendengar cerita menarik tentang hari-hari terakhir mantan pemimpin intel itu. Salah satu cerita menyebutkan, dalam keadaan fisik yang sudah amat lemah, Moerdani masih berusaha berdiri dari kursi rodanya dengan sikap sempurna memberi hormat ketika televisi memperdengarkan lagu Indonesia Raya.

Tidak bisa diragukan lagi, Benny Moerdani adalah seorang patriot yang membaktikan seluruh hidupnya kepada negara lewat profesi militer. Dalam pengabdian itu, untuk waktu lama, Moerdani melihat Soeharto sebagai personifikasi negara. Itulah yang menyebabkan Benny mengabdikan waktu, tenaga, dan keahliannya sebagai aparat sekuriti dan *bodyguard*, berperan sebagai "anjing herder" penjaga keamanan Soeharto dan keluarganya.

Di kemudian hari Moerdani sadar, selama bertahun-tahun menyamakan Soeharto dengan negara merupakan kesalahan besar yang telah dilakukannya. "Hebat, ya, Pak Harto? Bisa bertahan begitu lama, sementara Sukarno hanya tahan beberapa tahun," komentar saya tentang Soeharto pada sebuah wawancara dengan Moerdani. "Ah, tidak. Kita yang bodoh," sergah Benny. Kesadaran

akan kebodohan datang terlambat. Bapak Presiden sudah amat berkuasa dan Jenderal Moerdani dan para jenderal lainnya tidak mungkin berbuat apa-apa lagi.

Maka bagi saya, Benny adalah korban dari kekuasaan tak terbatas yang pernah ikut dia bangun, kelola, dan lindungi dengan sepenuh hati, tenaga, dan fanatisme.

Mungkin Benny memang pernah merasa kekuasaan di tangannya hampir tak terbatas. Mula-mula dengan kekuasaan itu seluruh hidupnya diabdikannya kepada Soeharto, orang yang memercayakan kepadanya kekuasaan yang begitu besar. Tapi, dinamika kekuasaan besar itu jugalah yang mendorongnya mengembangkan visi dan misi sebagai perwira yang berprinsip harus mendahulukan kepentingan negara daripada sekadar mengamankan seorang Soeharto dan keluarganya.

Benny pernah merasa dirinya seorang yang amat dekat dan spesial bagi Soeharto. Keamanan Soeharto selalu dalam pantauan dan kontrol Benny. Bahkan, sampai memasuki area Masjidil Haram dilakukan Benny demi keamanan Soeharto dan keluarganya.

Untuk keselamatan salah satu penerbangan Bapak Presiden ke wilayah Timur Tengah, Benny pernah sampai meminta pinjaman roket dari Israel—negara yang tidak punya hubungan diplomatik dengan Indonesia—untuk menangkal kemungkinan serangan kepada pesawat kepresidenan. Apakah memang penerbangan Presiden waktu itu terancam? Siapa yang mengancamnya? Kemungkinan besar yang tahu jawaban pertanyaan tersebut hanya Moerdani sendiri. Lagi pula pertanyaan itu

tidak begitu relevan, sebab yang lebih penting adalah demonstrasi loyalitas dan dedikasi serta kerja keras Moerdani menjaga Soeharto.

Demi keamanan Soeharto dan keluarganya, kaca-kaca jendela ruang depan kediaman Jalan Cendana konon diganti Moerdani dengan kaca tahan peluru. Untuk keselamatan sang Presiden di jalan, Benny memesan khusus mobil yang bukan cuma kebal peluru, tapi juga tahan granat. Mobil berlapis baja istimewa itu akhirnya nongkrong di garasi karena dipandang terlalu berat. Lagi pula Soeharto tampaknya juga yakin tidak ada orang yang akan melemparinya dengan granat. Sebuah sumber malah bercerita tentang tindakan Benny menyadap kediaman Jalan Cendana. Bukan untuk memata-matai Soeharto, melainkan justru untuk tahu apa sebenarnya kemauan Soeharto.

Kok, Begini Jadinya Nasib Kita, Sim?

Pada masa kekuasaan Sukarno, percobaan pembunuhan atas diri Pemimpin Besar Revolusi itu memang beberapa kali terjadi. Tapi hal demikian dialami Sukarno sebelum terbentuknya pasukan pengawal Presiden yang dikenal sebagai Resimen Cakrabirawa. Menarik untuk diketahui, pembentukan Cakrabirawa adalah gagasan Jenderal Nasution setelah beberapa kali terjadi percobaan pembunuhan atas diri Sukarno. Resimen pengawal Presiden itu diresmikan oleh Sukarno pada tanggal 6 Juni 1962. Ironisnya bagi Nasution, pasukan yang digagasnya itulah kemudian yang nyaris membunuhnya dan berhasil

menewaskan putri bungsu Kepala Staf Angkatan Bersenjata tersebut.

Sebagai ganti Cakrabirawa, pada awal kepresiden Soeharto, dibangun Pasukan Pengamanan Presiden (Paspampres) yang jauh lebih hebat dari Resimen Cakrabirawa dulu. Dengan jaringan pengamanan yang lebih canggih, Soeharto jelas tidak lagi memerlukan mobil antigranat atau rumah dengan kaca antipeluru.

KSAD A.H. Nasution dan Asisten KSAD Ahmad Yani.

Juga perlu saya tambahkan bahwa bisa dipastikan bukan Soeharto yang membuat aturan untuk menghindari jumpa Nasution pada berbagai resepsi perkawinan. Adalah Benny—menafsirkan kekesalan Presiden terhadap Nasution yang terus mengkritiknya—yang mengatur agar pertemuan kedua tokoh tidak sampai terjadi. Jenderal

Nasution pernah menceritakan kepada saya beberapa kali undangan resepsi perkawinan yang diterimanya ditarik kembali oleh sang pengundang atas desakan aparat sekuriti kepresidenan. Pasalnya, pada jam yang sama Soeharto juga akan hadir.

Ketika T.B. Simatupang mantu di gedung yang sekarang dikenal sebagai Balai Kartini, Nasution baru bisa datang pada pukul 10 malam, yakni ketika Soeharto sudah meninggalkan gedung. Menurut cerita Mangadang Napitupulu, seorang keponakan Jenderal Simatupang, ketika kedua mantan pendiri dan petinggi TNI itu berangkulan, dalam bahasa Batak, Nasution berkata kepada teman sekolahnya di Akademi Militer Bandung dahulu, "Kok, begini jadinya nasib kita, Sim?"

Demi kenyamanan dan kepuasan Soeharto jugalah suatu kali Moerdani merencanakan penangkapan Nasution yang sibuk ceramah di berbagai tempat. Ceramah-ceramah yang bernada kritis terhadap pemerintah itulah yang mendorong Benny merencanakan bertindak. Hanya campur tangan Jenderal T.B. Simatupang waktu itu yang menyelamatkan teman seperjuangannya.

Untuk itu, Simatupang harus datang sendiri ke kantor Bais membujuk Benny agar jangan membiasakan menangkap seniornya. "Tapi, orang tua itu sudah sangat jengkel," keluh Benny menjelaskan kemarahan Soeharto kepada kritik-kritik Nasution. "Ah, Nas itu sudah sakit-sakitan. Nanti saya sampaikan keluhanmu." Berhasil menenangkan Benny, Simatupang melanjutkan, "Buat

apa pula kau pasang tukang jual rokok di depan rumahnya?" Tukang jual rokok itu adalah anak buah Moerdani yang dipasang di sana untuk mengawasi mantan KSAD yang juga mantan KSAB itu.

Menempatkan intel yang menyamar sebagai tukang rokok yang berjualan di depan rumah orang yang dimusuhi dan diawasi pemerintah rupanya sudah menjadi tradisi intel Indonesia dalam mengintai sasarannya. Penjual rokok juga dipasang di depan rumah Sudjatmoko —cendekiawan terkemuka yang juga mantan orang dekat Perdana Menteri Sjahrir—oleh Kepala Badan Pusat Intelijen (BPI), Dr. Subandrio, pada masa Orde Lama. Dan tentu banyak lagi penjual rokok "jadi-jadian" yang "berjualan" di depan rumah orang-orang yang dimusuhi pemerintah pada zaman Orde Lama maupun Orde Baru kemudian.

Sebagai mantan pejabat tinggi militer, Nasution jelas tahu budaya intel Indonesia. Karena itu, dia sadar dirinya selalu dalam pengawasan. Suatu kali pada November 1984 ketika saya sedang mewawancarai Jenderal itu di depan jendela paviliun yang ditempati putrinya, seseorang sedang memotong rumput di bawah jendela tersebut. Nasution kelihatan gelisah dan terganggu, lalu mengusir si tukang potong rumput. "Wah, di mana-mana kita diikuti intel," keluhnya. Saya terkesima oleh ketakutan Nasution kepada tukang rumput yang mungkin intel, tapi bisa juga bukan. Beginilah akhirnya nasib seorang yang pernah sangat berkuasa di Indonesia, pikir saya. Ternyata kemudian dengan tukang rumput saja dia sudah

ketakutan.

Pikiran demikian muncul juga di kepala saya ketika melihat potret Sukarno dengan muka membengkak—akibat tidak cuci darah meski ginjalnya sudah nyaris tidak berfungsi—ketika menghadiri perkawinan putrinya, Rahmawati. Waktu itu Sukarno memang sudah lama disingkirkan dari Istana Merdeka dan Istana Bogor.

Nasib yang sama kelak dialami juga Soeharto. Meski secara fisik aman dan terjaga di Jalan Cendana setelah mundur dari jabatan Presiden, tapi tidak jauh dari kediaman pribadi mantan Presiden terlama Indonesia itu, selama beberapa hari ribuan mahasiswa berdemonstrasi dan—lewat pengeras suara—memaki-makinya dengan bebas tanpa gangguan aparat keamanan. Betapa tidak langgengnya kekuasaan, pikir saya.

MASIH TENTANG NASIB NASUTION dan sikap serta kebijakan Moerdani yang selalu menjaga keselamatan dan kenyamanan Soeharto. Ketika Nasution melayat jenazah Jenderal T.B. Simatupang, mantan KSAD dan mantan KSAB itu dengan kasar didorong ke luar ruangan jenazah oleh para pengawal Soeharto. Waktu itu, Presiden Soeharto memang akan segera tiba.

Kebijakan demikian jelas bukan karena kehadiran Nasution mengancam keselamatan Soeharto. Ke mana pun Bapak Presiden pergi, pengamanan secara ketat selalu menyertainya bahkan jauh sebelum ketibaannya. Maka, bisa dipastikan perlakuan kasar kepada Nasution merupakan kebijakan Benny melulu demi kenyamanan

Soeharto.

Hal yang sama juga dilakukan oleh Laksamana TNI Sudomo terhadap Ali Sadikin dan teman-temannya para penanda tangan Petisi 50. Berbeda dengan Benny yang intel, Sudomo yang pelaut, secara polos dan terbuka mengumumkan bahwa dialah—sebagai Pangkopkamtib—yang mencekal seniornya agar tidak mempunyai kesempatan berada bersama Soeharto dalam suatu acara. Sudomo selaku Pangkopkamtib juga menjatuhkan hukuman "mati secara perdata" kepada para seniornya.

Akibat hukuman tersebut, Ali Sadikin, keluarganya, dan teman-temannya tidak bisa berbisnis. Pangkopkamtib melarang semua bank melayani mereka. Koran, radio, dan televisi juga dilarang mengumumkan pernyataan dan keterangan kelompok Petisi 50 yang oleh Sudomo dinilai hanya akan mengganggu kenyamanan Presiden Soeharto. Maka, informasi kegiatan Petisi 50 harus kita cari pada media asing, sebab hanya wartawan luar negeri yang bertugas di Jakarta yang sulit dicegah Moerdani dan Sudomo meliput dan memberitakan kegiatan teman-teman Ali Sadikin tersebut.

Sekian tahun setelah Sudomo meninggal, dari seorang mantan pembesar Angkatan Laut, saya mendapat informasi mengenai tindakan Sudomo terhadap Ali Sadikin. "Perintah Soeharto," kata sumber tersebut, "Ali Sadikin harus ditangkap. Tapi, Sudomo berhasil membujuk Soeharto agar Pangkopkamtib itu tidak dipaksa menangkap seniornya. Karena tindakan demikian itu bertentangan dengan tradisi Angkatan Laut." Jalan

tengahnya, pencekalan serta "pembunuhan secara perdata".

Menyembelih Ayam Petelur

Sebagai seorang politisi yang canggih dan jenderal yang berpengalaman, demi keamanan dan kelanggengan kekuasaannya, Soeharto memanfaatkan bukan cuma Benny, melainkan banyak orang lain dengan berbagai macam tugas. Di mata Soeharto, tak seorang pun di antara mereka dekat dan spesial. Mereka semua hanya alat penyangga kekuasaan Soeharto.

Ali Murtopo, misalnya, pada awal Orde Baru dipandang masyarakat luas sebagai tokoh amat penting dan menentukan di pusat kekuasaan. Dari penampilannya, Murtopo dianggap amat berpengaruh kepada Soeharto. Murtopo sebagai perwira yang ikut Soeharto sejak masa kepanglimaan Bapak Presiden di Semarang, niscaya tahu pandangan umum tersebut. Karena itu, dia menciptakan dan menjaga citranya sebagai orang penting di sekitar Soeharto.

Di kemudian hari Murtopo dicampakkan begitu saja ketika masa bergunanya bagi sang Presiden sudah habis. "Saya ini bagaikan ayam petelur. Setelah tidak lagi bertelur, disembelih," keluh Ali Murtopo—pada pesta ulang tahunnya di Hotel New Otani, Tokyo—kepada Jenderal Sayidiman, Duta Besar Indonesia untuk Jepang waktu itu.

Menurut Sayidiman, waktu itu Indonesia sedang menghadapi Pemilu 1983, dan Ali Murtopo yang

menduduki kursi Menteri Penerangan sejak 1978 sudah lebih dahulu memberi nama-nama calon Menteri Muda untuk duduk di kabinet mendatang. Salah satu nama yang diusulkan adalah Jusuf Wanandi, tokoh CSIS dan pembantu dekat Murtopo yang ikut mendampingi Bos Opsus tersebut di Tokyo waktu itu. Semua usul ditolak Soeharto. "Lha, kapan Jusuf Wanandi bisa jadi Menteri?" keluh Murtopo kepada Sayidiman.

Nama-nama yang diusulkan Murtopo untuk menduduki posisi eselon satu di Departemen Penerangan, juga bernasib sama. Usul ini disampaikan Jenderal yang Bos Opsus dengan keyakinan dirinya akan tetap menjadi Menteri Penerangan sambil menduduki kursi Menko yang katanya telah dijanjikan Soeharto kepadanya. Tapi, kemudian Murtopo ternyata hanya kebagian kursi di Dewan Pertimbangan Agung (DPA). Artinya, sama sekali tersingkir dari kabinet dan kekuasaan.

Ali Murtopo dengan Presiden Soeharto.

Yang menggantikannya sebagai Menteri Penerangan adalah Harmoko, pilihan yang kabarnya dianggap sebagai penghinaan yang amat menyakitkan Ali Murtopo. Sebuah sumber di dekat Soeharto mengutip Bapak Presiden berkata, "Tugas sebagai Menteri Penerangan cukup dikerjakan oleh orang seperti Harmoko saja."

Tidak lama setelah menjadi anggota DPA, Murtopo mendadak meninggal di ruang kerjanya di Gedung Dewan Pers, Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat. "Serangan jantung," kata dokter. Itu serangan jantung kedua, yang pertama terjadi di Kuala Lumpur. "Pak Ali memang tidak berhati-hati menjaga kesehatannya. Beliau perokok berat," kata Jusuf Wanandi. Tapi, Murtopo bukan saja tidak hati-hati menjaga kesehatannya, lebih penting dari itu dia juga tidak cukup jeli mempelajari tingkah laku politik Soeharto yang telah didukungnya sejak mereka bersama di Semarang.

Sekian tahun setelah kematian Murtopo, Soeharto menjelaskan hubungannya dengan mantan pembantunya itu dalam memoar sang Presiden yang berjudul, *Soeharto: Pikiran, Ucapan, dan Tindakan Saya*. Menurut Soeharto,

> Sebelum Ali Murtopo meninggal, ada yang suka menilai bahwa Ali Murtopo itulah yang menentukan. Karena apa? Mungkin karena dia pandai bicara, berani, atau dinilainya sebagai Aspri, sehingga merupakan pembantu utama saya yang terdekat dan segala sesuatunya bergantung pada dia. Dengan menilainya seperti ini, orang mengira, bahwa pemerintah tidak bisa mengambil keputusan tanpa dia. Karena Ali Murtopo memimpin CSIS yang di Tanah Abang, maka orang mengira

> bahwa lembaga itulah dapurnya pemerintah. Kalau bergantung pada Ali Murtopo, berarti kalau Ali Murtopo meninggal, pemerintah tidak bisa jalan. Kenyataan menunjukkan bahwa dengan meninggalnya Ali Murtopo, pemerintah tetap bisa berjalan. Dan saya bisa memimpin. Maka tidak benar bahwa segalanya itu bergantung pada dia.

Jenderal Sumitro juga pada awal Orde Baru disebut orang kuat kedua Indonesia di samping Soeharto. Dari posisi "orang kuat" tersebut, Sumitro terlibat bentrok (Malari 1974) dengan Ali Murtopo dan Sudjono Humardani. Keberanian dan ketegasan Sumitro itu tampaknya memicu kecemasan Soeharto. Dengan satu gerakan, karier militer Sumitro dihabisi begitu saja. Sumitro sebagai Jenderal bintang empat "terpaksa" pensiun dini pada usia yang relatif muda. Berhenti sebagai Pangkopkamtib beberapa hari setelah Malari, Sumitro menolak tawaran menjadi Dubes di Washington. Jenderal yang berbadan subur itu memilih berdagang bersama sejumlah mantan anak buahnya dari masa berjuang di Jawa Timur pada zaman Revolusi dahulu.

Pengalaman menyingkirkan dengan gampang orang-orang yang pernah berjasa kepadanya itu kemudian menjadi ciri mencolok kepribadian Soeharto. Bagi Presiden terlama Indonesia ini tidak ada teman baru, teman lama, teman dekat, atau teman jauh. Semuanya sama saja, semuanya hanya alat yang ada masa pakainya. Dalam hal ini Soeharto mungkin bisa diumpamakan sebagai seorang pemeras kelapa yang andal. Dia pandai memilih dan memanfaatkan kelapa yang bersantan

banyak. Setelah santan terperas, ampasnya segera saja dicampakkan.

TIDAK BERLEBIHAN UNTUK MENYIMPULKAN, NASIB BENNY MOERDANI sebenarnya tidak jauh berbeda dengan nasib Jenderal A.H. Nasution, Jenderal Sumitro, Jenderal Kemal Idris, Jenderal H.R. Dharsono, dan Jenderal Sarwo Edhie, beberapa tahun sebelumnya. Dengan dukungan Angkatan Darat pimpinan Nasution pada 1959, Sukarno mendapat kekuasaan amat besar sebagai Presiden lewat sebuah sistem presidensial akibat berlakunya kembali UUD 1945. Adalah Nasution yang telah "memaksakan" berlakunya kembali UUD 45.

Dengan kekuasaan besar yang sudah berada di tangan, Sukarno merasa tugas Nasution sudah selesai. Pada 1962, dengan licik Sukarno menyingkirkan Nasution. Mantan KSAD itu "ditendang ke atas" ke posisi Kepala Staf Angkatan Bersenjata (KSAB) tanpa garis komando ke pasukan dan dengan tugas yang lebih bersifat administratif.

Kemal, Dharsono, dan Sarwo Edhie adalah tiga "*King Maker*" yang memanggul Soeharto naik menggantikan Sukarno pada awal Orde Baru. Setelah mengonsolidasikan kekuasaannya, Kemal, Dharsono, dan Sarwo—dengan memanfaatkan Pangkopkamtib Sumitro—semua disingkirkan Soeharto ke tempat yang tidak penting dan jauh dari pusat kekuasaan.

Seperti Nasution, Kemal, Dharsono, dan Sarwo Edhie sebelumnya, peran Benny juga berakhir setelah Soeharto

—dengan menggunakan tangan besi sang Kepala Intel—sudah berhasil mengonsolidasikan kekuasaannya. Nasution dan Benny Moerdani adalah dua jenderal yang amat menonjol pada masa berkuasa mereka. Keduanya memimpin tentara sebagai kekuatan politik terpenting. Maka, tidak usaha heran jika sang Presiden—Sukarno maupun Soeharto—selalu waspada kepada pemimpin tentaranya masing-masing, sebab memang tidak ada kekuatan sipil yang berposisi sebagai ancaman serius terhadap kekuasaan mereka.

Sukarno maupun Soeharto menaiki takhta kekuasaan karena dukungan tentara. Oleh sebab itu, di mata keduanya hanya tentara pula yang berpotensi menjatuhkan mereka. Pada masa dinas sebagai pemimpin militer, Nasution dan Moerdani mengontrol tentara yang dipersepsikan oleh kedua Presiden sebagai sumber potensi ancaman. Untuk itulah—setelah tugas mereka mengukuhkan kekuasaan sang Presiden selesai—keduanya harus secepatnya disingkirkan dari beranda pusat kekuasaan.[]

Sudomo, Laksamana TNI di Tengah Lautan Jenderal

Sudomo yang meninggal pada 18 April 2012 adalah salah seorang tokoh terkemuka zaman Orde Baru yang bertahan lama di pusat kekuasaan. Berkat hubungan khususnya dengan Presiden Soeharto sejak masa Operasi Trikora Pembebasan Irian Barat, Sudomo menjadi satu-satunya perwira Angkatan Laut yang menduduki posisi penting hampir sepanjang sejarah Orde Baru. Sudomo pernah menduduki jabatan Kepala Staf Angkatan Laut, pernah memimpin Kopkamtib, Wakil Panglima ABRI, Menteri Perburuhan, Menkopolkam, dan akhirnya menduduki kursi Ketua Dewan Pertimbangan Agung (DPA).

Jauh sebelum jabatan-jabatan penting di tingkat pusat itu, Kolonel (waktu itu) Sudomo sudah menjadi komandan operasi yang melibatkan beberapa kapal Motor Torpedo Boat (MTB) Angkatan Laut dalam operasi penyusupan pasukan ke daratan Irian Barat pada 1962. Kisah tentang operasi yang dipimpin Sudomo itu menjadi amat terkenal karena salah sebuah MTB yang dikomandoinya bernama *Macan Tutul*. Ikut berlayar di kapal tersebut adalah

Laksamana Pertama TNI Yos Sudarso. Sang Laksamana tewas bersama sejumlah anak buahnya ketika MTB yang ditumpanginya pada 15 Januari 1962 dipergoki dan akhirnya ditenggelamkan oleh kapal perang Belanda di Laut Arafuru.

Sudomo kemudian ditarik ke Makassar membantu Panglima Mandala, Mayjen TNI Soeharto. Kedudukan Sudomo di Makassar adalah Panglima Angkatan Laut Mandala. Kerja sama Soeharto-Sudomo di Makassar itulah yang menjadi awal sebuah hubungan kerja yang berlangsung puluhan tahun.

Bersama Sudomo, juga ada Laksamana Muda Udara (Marsekal Muda, sekarang) Leo Wattimena. Leo, seorang penerbang tempur, dipercayai menduduki jabatan Panglima Angkatan Udara Komando Mandala. Hubungannya dengan Soeharto waktu itu sangat baik. Kalau Leo terbang, Soeharto menanti di pangkalan udara sampai Leo mendarat kembali.

Hubungan Leo dengan Soeharto mendadak rusak waktu Gestapu. Karier Leo berakhir sebagai Duta Besar Indonesia di Italia, berkedudukan di Roma. Dalam kunjungan saya ke Italia pada 1970, saya jumpa Leo. Waktu itu dia masih berharap dapat ditempatkan di Dephankam kalau pulang ke Jakarta selepas jadi Dubes. Tapi, bagi Soeharto dia sudah selesai.
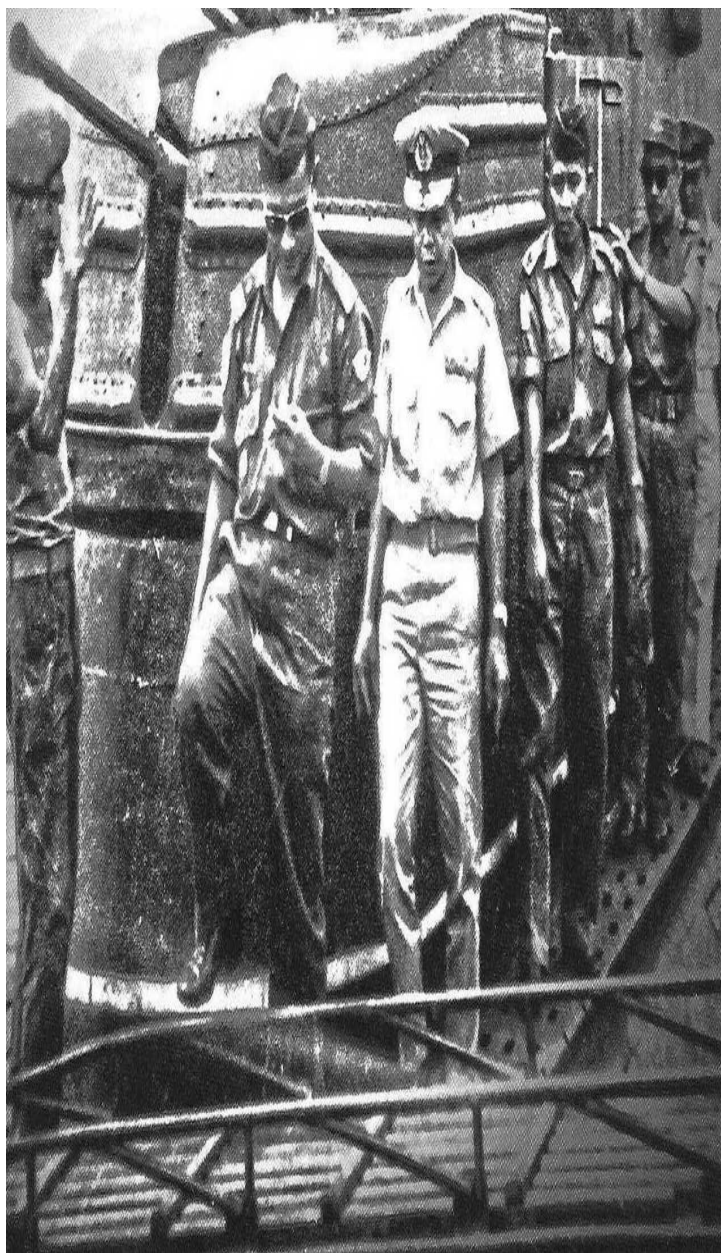
Panglima Mandala, Soeharto dan Kolonel Sudomo memeriksa kesiapan Angkatan Laut menjelang operasi merebut Irian Barat, 1962.

Mendekati rekor Sudomo di sekitar Soeharto—berkuasa selama 32 tahun—hanya ada tiga orang penting Orde Baru lainnya: B.J. Habibie, menduduki jabatan Menteri Riset dan Teknologi dari 1978 sampai akhirnya menjadi Wakil Presiden; Harmoko, menjadi satu-satunya orang Indonesia yang berhasil menduduki jabatan Menteri Penerangan sepanjang lebih dari 10 tahun tanpa henti, dan beberapa tahun terakhir dirangkap pula dengan jabatan Ketua Golkar sebelum menjadi Ketua Parlemen; L.B. Moerdani, adalah Kepala Intel militer terlama (14 tahun) dalam sejarah Indonesia. Sudharmono juga wajib dicatat sebagai Sekretaris Negara terlama, sebelum akhirnya menjadi Wakil Presiden.

MENJELANG SIDANG UMUM MPR bulan Maret 1978, para pimpinan mahasiswa dari Bandung, Jakarta, Surabaya, Yogyakarta, dan Bogor mendatangi Istana Kepresidenan pada tanggal 18 bulan itu. Tujuan kunjungan, mendesak Soeharto agar tidak lagi melanjutkan kekuasaannya sebagai Presiden lewat sidang MPR bulan Maret tahun itu. Soeharto tidak ada di Istana. Tapi dua hari kemudian, Pangkopkamtib Sudomo mulai bertindak.

Sejumlah koran nasional diberangus. Mereka dituduh membesar-besarkan kegiatan mahasiswa. Langkah Sudomo berikutnya, tentara dikerahkan menduduki sejumlah kampus. Aparat Kopkamtib menahan 143 mahasiswa. Banyak di antara mereka dikirim ke penjara

setelah diadili. Dan surat kabar-surat kabar yang terberangus hanya bisa terbit kembali setelah terlebih dahulu setuju dengan syarat—kesediaan menyensor diri sendiri—yang disiapkan oleh Sudharmono, Sekretaris Negara waktu itu.

Dalam kedudukannya sebagai Pangkopkamtib dan Wakil Panglima ABRI, Sudomo juga "ditugaskan mengawasi" Panglima ABRI Jenderal Jusuf. Tahu dirinya terus diamati, Jusuf menikmati kedudukannya sebagai Panglima dengan menyibukkan diri berkeliling meninjau pasukan di hampir seluruh penjuru Indonesia. Jenderal Jusuf adalah Menteri Hankam dan Panglima ABRI yang menghabiskan paling banyak waktu di lapangan. Sebagian besar urusan kantor diserahkan Jusuf kepada Sudomo, wakilnya. Dengan Moerdani, Kepala Intel dan Sudomo sebagai Wapangab dan Pangkopkamtib yang secara bersama "bertugas" mengawasi Pangab, Jusuf memang tidak mungkin menjadi ancaman bagi Soeharto.

Dengan demikian, ketika Jenderal Jusuf mencoba angkat bicara politik dengan menyebut ABRI harus berada di atas semua golongan, dan bahwa para jenderal tidak boleh dagang atau menjadi gubernur, adalah Sudomo yang ditugaskan Soeharto berkeliling ke Kodam-Kodam menyampaikan pesan Bapak Presiden yang menyebut pendapat Pangab itu tidak realistis. Sudomo juga bertugas meyakinkan para petinggi Golkar, ABRI akan tetap mendukung mereka.

MESKI LAMA JADI ORANG PENTING, Sudomo dalam

tahun-tahun terakhir Orde Baru bukan lagi pejabat yang diperhitungkan. Sebagai Ketua DPA tugasnya hanya menasihati pemerintah, dan masukan itu sifatnya rahasia, artinya tidak untuk disebarkan kepada publik. Menurut beberapa mantan anggota di DPA, kebanyakan masukan mereka tidak dihiraukan Soeharto. Karena itu, banyak yang memplesetkan DPA sebagai Dewan Pensiunan Agung.

Mungkin karena pernah lama menjadi pejabat pemerintah yang selalu menjadi sumber berita pers, Sudomo sudah amat terbiasa berurusan dengan wartawan. Dan dalam suasana persaingan pers yang makin ketat, wartawan tentu senang mendapatkan berita dari orang seterkenal Sudomo. Dengan latar belakang seperti inilah, munculnya sejumlah komentar Sudomo yang kadang menimbulkan kebingungan publik menjelang berakhirnya rezim Orde Baru.

Tentu tidak bisa kita menuduh Sudomo sebagai menderita *post-power syndrome*, sebab mantan Laksamana ini kabarnya waktu itu masih mempunyai akses cukup besar ke Presiden Soeharto sampai saat terakhir hidup sang mantan Presiden. Paling-paling kita bisa melihat Sudomo sebagai orang yang sudah pindah kursi, tapi merasa masih duduk di kursi lamanya. Barangkali karena dihinggapi "penyakit" lupa—yang kabarnya sering menyerang pembesar yang telah kehilangan jabatan penting—itulah, maka Sudomo yang tetap bersahabat dengan wartawan, kadang menjadi sumber berita untuk hal-hal yang bukan lagi wewenangnya.

Pada suatu hari menjelang krisis Orde Baru, misalnya, Sudomo mendadak muncul secara dramatis di berbagai media. Waktu itu ada kerusuhan di Tasikmalaya, Jawa Barat, sebagai bagian dari kerusuhan menjelang jatuhnya Orde Baru. Mengulangi kebiasaan lamanya sebagai Pangkopkamtib atau Menkopolkam, Sudomo mengomentari kerusuhan tersebut dan dengan yakin menyebutnya sebagai didalangi oleh DI/TII. Menurut teman yang mendengarkan penjelasan Sudomo itu, gaya penjelasan itu santai tapi meyakinkan, persis seperti ketika Sudomo masih memimpin Kopkamtib dulu. "Jangan-jangan beliau masih merasa berada di kantor Kopkamtib," gurau teman saya itu. Tapi, teman wartawan itu tiba-tiba dengan serius bertanya kepada saya, "Menurut Bung, apakah mungkin masih ada DI/TII yang potensial mengacau dengan menimbulkan kerusuhan seperti di Tasik itu?"

Dari dulu saya tidak yakin ada DI/TII yang mengacau pada masa Orde Baru ini. Bukti yang dikemukakan pemerintah waktu itu kurang meyakinkan saya sebagai peneliti maupun sebagai wartawan. Yang saya dengar sepanjang usia Orde Baru sehubungan dengan soal DI/TII, terutama ketika Ali Murtopo masih hidup, soal tersebut adalah hasil rekayasa Opsus pimpinan Ali Murtopo. Untuk tujuan politiknya, Ali Murtopo memang terkenal menggunakan cara apa saja. Ketika, misalnya, beroperasi memberantas PRRI di Sumatra Barat, Ali Murtopo bahkan menggunakan orang-orang Komunis (terutama Pemuda Rakyat) untuk mengejar tokoh-tokoh PRRI.

Ketika melawan PKI setelah Gestapu, dan kemudian untuk mendiskreditkan kekuatan politik Islam agar tidak menjadi saingan Golkar, Ali Murtopo menggunakan jaringan lama DI/TII yang sebelumnya telah berhasil "dijinakkan" oleh Siliwangi di Jawa Barat. Dan seperti diketahui, dengan menggunakan berbagai nama organisasi, orang-orang DI/TII itu di kemudian hari disikat sendiri oleh Ali Murtopo ketika kegunaan mereka sudah tidak diperlukan lagi.

Namun, seandainya memang benar DI/TII menjadi otak kerusuhan di Tasikmalaya atau di mana saja dan Sudomo memiliki bukti, seyogianya mantan petinggi Kopkamtib itu melaporkan temuannya itu kepada Pangab/Ketua Bakostranas yang bertanggung jawab atas keamanan waktu itu. Artinya, Sudomo yang bukan lagi pejabat keamanan tidak sewajarnya mengumumkannya sendiri, sebab itu bukan wewenangnya. Keamanan dan ketertiban tidak mungkin tercapai jika aturan main kita langgar semau kita saja. Saya yakin Sudomo tentu amat mafhum tata krama itu. Bukankah beliau lama memimpin Kopkamtib yang tujuannya menciptakan keamanan dan ketertiban?

Lagi pula sebagai mantan perwira tinggi, sudah sepatutnya Sudomo memberikan contoh bagaimana menghormati dan mempercayai perwira-perwira ABRI juniornya yang bertugas menangani urusan keamanan. Dengan mengumumkan langsung sinyalemennya kepada masyarakat, Sudomo memberikan kesan kuat dia tidak lagi percaya kepemimpinan ABRI.

Ironisnya pula, ketika aparat keamanan mencoba melacak sinyalemen yang diumumkan Sudomo, hasilnya ternyata berbeda. "Tidak ada itu DI/TII dalam kerusuhan Tasik. Saya ini, kan lurahnya di sini, yang lebih tahu tentang Tasik," kata Mayjen TNI Tayo Tarmadi, Pangdam Siliwangi waktu itu. Pangdam Siliwangi sebelumnya, Mayjen TNI Himawan Sutanto menyebut para mantan DI/TII yang dimanfaatkan oleh Murtopo itu sebagai sesuatu yang "jadi-jadian".

BERITA BERIKUTNYA tentang Sudomo menyangkut keheranannya mengapa mantan Laksamana ini dituduh anti-Islam. Ini kejadian sebelum berakhirnya Orde Baru. Saya sendiri sulit percaya seorang pejabat tinggi Indonesia memiliki sikap anti-Islam. Republik Indonesia adalah negeri dengan penduduk Islam terbesar di dunia, dan persentase umat Islam di Indonesia jauh di atas 80 persen. Dengan data seperti itu bagaimana mungkin seseorang bisa menduduki jabatan pemerintah sembari membenci rakyat banyak di negeri yang dikelola berdasarkan Pancasila dan kedaulatan rakyat? Ini tentu tidak logis. Tapi, yang logis itu juga sudah terbukti tidak selalu benar, bukan?

Makhluk Datang dari Masa lalu

Sekali lagi di sini terjadi proses lupa pada diri Sudomo. *Pertama*, dia lupa bahwa DI/TII pada masa Orde Baru dulu itu pada dasarnya sengaja "dibangkitkan dari kuburnya" oleh Ali Murtopo untuk dipakai menakut-nakuti, memojokkan, dan menekan aspirasi politik Islam. *Kedua*,

Sudomo lupa bahwa Orde Baru pada tahun-tahun terakhirnya tidak lagi melihat Islam sebagai musuh. Buktinya, Soeharto mendukung berdirinya Bank Muamalat dan Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI), bahkan mendorong B.J. Habibie, menteri kesayangannya, menjadi Ketua ICMI. Dalam keadaan begini, maka Sudomo terasa tampil sungguh bagaikan makhluk yang datang dari masa lalu. Dengan latar belakang seperti ini pula tidak mengherankan jika banyak orang marah. Sedemikian marahnya, hingga banyak yang menuduh Sudomo—waktu itu beragama Protestan—sebagai anti-Islam.

BEBERAPA TAHUN SETELAH Soeharto meninggal, pada suatu sore saya kebetulan jumpa Sudomo di kamar kecil Hotel Jakarta Hilton atau The Sultan sekarang. Sebagai wartawan, saya dulu sering mewawancarai Sudomo dalam kedudukan beliau sebagai Pangkopkamtib maupun sebagai Menko Polkam. Yang saya ingat, dalam segala jabatan yang didudukinya, di mana pun saya jumpa, sikapnya selalu sama: ramah, hangat, dan bersahabat. Meski memimpin Kopkamtib, lembaga yang menakutkan masa itu, pada masa tuanya Sudomo tidak pernah bersikap salah tingkah.

Mantan Pangkopkab itu tampaknya masih ingat saya. Tapi, tentu ceritanya kini sudah lain. "*You* umur berapa sekarang?" Setelah mendapat jawaban, dia mulai bercerita tentang kesibukannya sebagai penyelam dan kesenangannya main golf yang masih dilakoninya pada

usia tuanya. Sudomo kelihatannya bangga betul bahwa dalam usianya yang amat lanjut, dia masih sehat dan tetap beraktivitas, termasuk menyelam di laut. "Pak Domo, kenapa Anda tidak menulis memoar?" tanya saya. Jawabnya dengan cepat: "Saya ingin menikmati sisa hidup saya dengan tenang. Saya tidak mau ribut-ribut." Katanya melanjutkan, "Saya tidak ingin terlibat ribut seperti yang terjadi antara Jenderal Sumitro dan Jenderal Maraden Panggabean yang terpicu oleh memoar Sumitro."

Berbeda dengan para mantan pembesar yang dulu kerap "mengorbankan" banyak orang pada masa berkuasanya pada zaman Orde Baru dan karena itu cenderung bertingkah serbasalah pada masa pasca-Orde Baru, Sudomo biasa-biasa saja. Dia seperti orang yang tidak pernah bersalah, meski pernah memimpin Kopkamtib yang dulu menjadi alat kekuasaan otoriter Soeharto. Ketika fenomena Sudomo itu saya bicarakan dengan purnawirawan Angkatan Laut, dia menjelaskan: "Sudomo itu tahu diri. Sebagai perwira Angkatan Laut, dia tahu dirinya hanya alat bagi Soeharto. Jadi, tidak pernah benar-benar merasa berkuasa."

Kendati demikian, Laksamana purnawirawan yang dulu pernah menjadi pembantu Sudomo itu menjelaskan bagaimana Sudomo secara diam-diam menyelamatkan sejumlah aktivis mahasiswa yang semestinya harus ditahan setelah Peristiwa Malari dan Peristiwa Bandung 1978. Bahkan, beberapa tokoh mahasiswa diberinya kesempatan menyelesaikan pendidikan di luar negeri, meski status mereka adalah orang yang masih dicekal.

Konon Dr. Syahrir dan Dr. Rizal Ramli adalah tokoh-tokoh mahasiswa yang diberi kelonggaran menyelesaikan pendidikan tinggi mereka di Amerika.

Rizal Ramli adalah salah seorang tokoh mahasiswa Institut Teknologi Bandung (ITB) yang ditangkap saat pergolakan mahasiswa pada awal 1978. Waktu itu, mahasiswa ITB bersama sejumlah mahasiswa beberapa kampus menolak Soeharto yang akan dilantik kembali menjadi Presiden pada Sidang MPR 1978 itu. ITB diserbu oleh tentara yang tidak berada di bawah komando Siliwangi. Pangdam Siliwangi waktu itu, Mayor Jenderal TNI Himawan Sutanto, memang menolak menggunakan kekerasan terhadap mahasiswa. Di kemudian hari baru diketahui bahwa Pangkopkamtib Sudomo mendapat perintah langsung dari Presiden Soeharto untuk menindak ITB dengan menggunakan pasukan yang tidak berasal dari Siliwangi. Maka, selain sejumlah mahasiswa ditangkap, Rektor ITB, Iskandar Ali Syahbana, juga diberhentikan.

Sebagai orang yang pada dasarnya baik, dan mungkin sadar sebagai hanya alat kekuasaan Soeharto, Sudomo "terpaksa" menunjukkan loyalitasnya kepada Bos dengan bertindak keras kepada para seniornya yang tidak disenangi Soeharto. Kalau Benny Moerdani menghindarkan Jenderal Nasution untuk jumpa Soeharto, Sudomo menindak para penanda tangan Petisi 50 yang tokoh utamanya adalah Letjen Marinir Ali Sadikin. Adalah Sudomo, menurut pengakuannya sendiri, yang mencekal para penanda tangan Petisi 50, menutup jalur bisnis, dan mencegah mereka berhubungan dengan media.

Dengan kata lain, Sudomo-lah yang “menghukum mati secara perdata” para pengkritik Soeharto tersebut. Akibatnya, Ali Sadikin—mantan senior Sudomo di Angkatan Laut—dan teman-temannya tidak bisa berbisnis karena semua bank dilarang memberi kredit kepadanya, teman-temannya, dan keluarganya. Para wartawan juga dicegah memberitakan kegiatan dan pernyataan-pernyataan para penanda tangan Petisi 50 tersebut. Keputusan drastis Sudomo tersebut adalah ongkos yang harus dibayar Laksamana itu untuk tetap bertahan di sekitar Soeharto yang mengendalikan secara terpusat semua kekuasaan di bumi Indonesia masa itu.

SEBENARNYA SUDOMO—yang lewat perkawinan beragama Islam lagi setelah dulu beralih dari Islam ke Protestan, juga karena perkawinan—masih akan lebih berguna di masa tuanya seandainya dia suka menulis memoarnya. Sebab meski hanya jadi alatnya Suharto—seperti hampir semua petinggi tentara waktu itu—Sudomo tahu banyak intrik politik dan kekuasaan yang berkecamuk di sekitar bosnya itu. Sebagai perwira Angkatan Laut yang berada di pusat kekuasaan di tengah lautan jenderal Angkatan Darat, Sudomo bisa bercerita banyak mengenai bagaimana Soeharto menciptakan, mengelola, dan memanfaatkan konflik yang berkembang di kalangan para perwira tinggi Angkatan Darat yang mengelilingi sang Presiden.

Salah satu di antara banyak cerita intrik Istana itu adalah kisah yang dibocorkan Sudomo kepada Kemal Idris.

Menurut mantan Pangkowilhan itu adalah Sudomo yang kemudian memberi tahu Jenderal Kemal Idris bahwa dia terlempar menjadi Duta Besar di Yugoslavia karena Ali Murtopo meyakinkan Soeharto mengenai apa yang disebutnya sebagai bahaya yang mengancam sang Presiden dari Kemal. Yang mungkin kurang disadari Sudomo adalah bahwa Soeharto lebih tahu Kemal daripada Ali.

Seandainya Sudomo berani dan mau jujur dalam menulis memoarnya, niscaya kita akan dapat lebih banyak cerita menarik mengenai sejumlah intrik di sekitar Soeharto. Kita misalnya tidak tahu bagaimana pertimbangan Soeharto di balik pengangkatan L.B. Moerdani menjadi Panglima ABRI, padahal karier tertinggi Moerdani sebagai pemimpin pasukan hanya sebagai Komandan Batalion RPKAD dengan pangkat mayor. Kita juga tidak tahu dengan pasti alasan sebenarnya yang membawa Soeharto kemudian secara mendadak menyingkirkan Benny dengan cara yang dramatis dan kemudian mengangkatnya ke kursi Menhankam. Kita akhirnya hanya bisa menduga-duga saja. Yang saya tahu dari almarhum Letjen TNI (Purn.) Hasnan Habib, adalah Sudomo yang berhasil membujuk Soeharto agar mengangkat L.B. Moerdani ke posisi Menhankam setelah dicopot secara prematur dari jabatan Panglima ABRI.

Dalam melakukan lobi untuk Moerdani, Sudomo kabarnya memulai ceritanya dengan menyebut sejumlah pejabat intel yang karena kecewa kepada presidennya bertindak nekat membunuh sang presiden. Tampaknya

Soeharto ngeri juga membayangkan nasib yang menimpa Jenderal Park Chung Hee yang dihabisi oleh Kepala Intelnya. Dan Benny Moerdani pun kebagian kursi di kabinet. Begitu kesimpulan saya setelah mendengar cerita Hasnan Habib.

Masih banyak intrik dan kerumitan politik pada masa kekuasaan Soeharto yang kita tidak tahu hingga hari ini. Kalau punya sedikit keberanian, jauh setelah Soeharto meninggal dunia, Sudomo sebenarnya bisa berbuat banyak menolong sejarah kita.[]

Versi singkat tulisan ini pernah dimuat Harian *Kompas*,
edisi 19 April 2012.

“Dengan Saya Saja, Tidak”

Pencalonan Jenderal TNI Try Sutrisno sebagai Wakil Presiden (1993) yang tanpa dikonsultasikan dengan Presiden Soeharto jelas melanggar TAP (Ketetapan) MPR No. II, 1973. TAP MPR itu mengatur Cawapres harus “bisa bekerja sama dengan Presiden terpilih”. Untuk tahu seseorang calon bisa atau tidak bisa bekerja sama dengan Presiden, maka harus ditunggu sampai munculnya Presiden terpilih. Nah, waktu ABRI mengumumkan pencalonan Try Sutrisno, Soeharto bukan saja tidak dimintai persetujuan, dia bahkan belum terpilih kembali.

Pencalonan Sutrisno, yang juga mantan Ajudan Presiden (1974-1978), untuk jabatan Wapres itu diumumkan oleh Letjen TNI Harsudiono Hartas, Kepala Staf Sosial Politik (Kasospol) ABRI, tanpa sebelumnya berkonsultasi dengan Soeharto. Harsudiono Hartas bahkan juga tidak meminta persetujuan Jenderal Try Sutrisno. Dalam wawancaranya dengan saya pada 3 Juli 2012, mantan Wapres tersebut menjelaskan, “Jangankan konsultasi dengan Pak Harto, dengan saya saja tidak.”

Try Sutrisno.

Lalu siapa yang memutuskan Try Sutrisno sebagai Calon Wakil Presiden yang diusulkan ABRI? “Saya tidak bisa menunjuk siapa yang memulai, tapi Kepala Staf Sospol ABRI suatu hari lapor kepada saya bahwa rapat staf Mabes ABRI memutuskan saya menjadi calon ABRI untuk jabatan Wakil Presiden,” kata mantan Wapres tersebut. Reaksi Try: “Stop, Wapres itu dipilih oleh Presiden terpilih. Saya minta soal pencalonan itu jangan dibicarakan lagi.” Perintah Pangab ini ternyata tidak dihiraukan Kasospol.

Cerita pencalonan Pangab Try Sutrisno sebagai Cawapres dari ABRI menyebar ke masyarakat lewat Hartas. Menurut Try Sutrisno, Hartas mengaku “keceplosan” bicara kepada wartawan selepas memberi taklimat (*briefing*) di Departemen Dalam Negeri (sekarang Kementerian Dalam Negeri). “Ditanya wartawan, siapa calon ABRI, dia bilang Try Sutrisno. Sudah itu Hartas datang kepada saya minta maaf dan siap dipecat akibat keceplosan itu.” Sebagai orang yang selalu berprasangka baik, Jenderal Try Sutrisno tampaknya percaya saja penjelasan Hartas bahwa Kasospol itu betul-betul “keceplosan”.

Kepada saya, Hartas memberi keterangan lain. Dalam wawancaranya pada 14 Juli 1997 di kantor Dewan Pertimbangan Agung (DPA), kantornya waktu itu, Hartas menjelaskan, ABRI mendorong Try Sutrisno sebagai Calon Wakil Presiden karena dari dua calon menonjol saat itu—B.J. Habibie dan Try Sutrisno—Presiden Suharto telah

memilih Try. “Tempat Habibie di bidang teknologi,” begitu konon kata Pak Harto ketika Hartas dan rombongan bertemu Presiden di kediaman Jalan Cendana, Jakarta Pusat.

Pernyataan Soeharto itu lantas ditafsirkan Hartas sebagai bukti Bapak Presiden telah memilih Try. Atas dasar penafsirannya sendiri itulah, Hartas mengaku yakin dan berani mengumumkan pencalonan Pangab Try Sutrisno tanpa melaporkannya terlebih dahulu kepada yang dicalonkan. Tapi, andai tafsiran Hartas itu memang benar adanya, persetujuan Soeharto secara resmi tentu tetap saja diperlukan, bukan? Meski mungkin hanya sekadar basa-basi saja. Lagi pula, hal demikian itu telah diatur oleh TAP MPR dan sudah berkali-kali dijalankan.

DOK. PRIBADI

Panglima ABRI Jenderal Try Sutrisno dan KSAD Jenderal Edi Sudrajat.

Sekarang bisa disimpulkan pernyataan Hartas itu bukan sikap pribadi dan juga tidak mudah dipercaya sebagai akibat "keceplosan". Pernyataan Hartas adalah keputusan kolektif para pemimpin ABRI dan Hartas hanya juru bicara dan operator lapangan mereka. Ini terbukti dari pernyataan Benny Moerdani dalam wawancaranya dengan Michael R.J. Vatikiotis, wartawan *Far Eastern Economic Review* di Jakarta pada 3 Mei 1993. Kepada wartawan dari media terbitan Hongkong itu Jenderal TNI (Purn.) Benny Moerdani menjelaskan, kesepakatan para jenderal mencalonkan Try Sutrisno diputuskan oleh mereka lima tahun sebelumnya, yakni pada 1988.

> Kami memutuskannya lima tahun silam. Kami putuskan setelah Sudharmono terpilih pada 1988, ABRI harus menduduki jabatan Wakil Presiden berikutnya. Kami putuskan mempersiapkan Try Sutrisno.

Keputusan itu dicapai ketika Try Sutrisno baru beberapa hari menduduki jabatan Pangab menggantikan Moerdani. Apakah Try Sutrisno tahu keputusan yang diungkapkan Moerdani tersebut? Tampaknya tidak. Keputusan dicapai tanpa kehadirannya. Moerdani tampaknya juga tidak merasa penting memberi tahu Try Sutrisno adanya keputusan tersebut.

Tidak Bisa Diramalkan

Pertanyaan berikutnya, mengapa para jenderal

membangkang, melanggar Ketetapan MPR? Jawabannya, para jenderal belum yakin sepenuhnya pada tafsiran Hartas terhadap pernyataan Presiden Soeharto. Lagi pula pengalaman menunjukkan Soeharto adalah penguasa yang tingkah laku politiknya tidak selalu bisa diramalkan. Jadi, sebelum Soeharto berubah sikap—itu kalau tafsiran Hartas memang benar—umumkan saja dulu. Dengan deklarasi pencalonan Try yang demikian itu, Soeharto sulit berubah pendirian. Bapak Presiden akhirnya memang tidak punya pilihan lain, kecuali menerima calon Wapres yang "dipaksakan" ABRI kepadanya.

Ginandjar Kartasasmita, seorang menteri yang waktu itu amat dekat dengan Wakil Presiden Sudharmono, mencatat naiknya Try Sutrisno ke posisi Wakil Presiden dalam bukunya, *Managing Indonesia's Transformation*:

> Pada tahun 1993, Sudharmono mengakhiri tugasnya sebagai Wakil Presiden dan digantikan oleh Jenderal Try Sutrisno, mantan Panglima ABRI. Dari lingkaran dalam di sekitar Pak Harto saya mendapat informasi, Bapak Presiden tidak 100 persen senang kepada pengangkatan Try Sutrisno. Tapi tidak ada pilihan. Lagi pula Try dicalonkan oleh Benny Moerdani ketika Soeharto masih memerlukan dukungan militer.

Lebih tegas adalah penjelasan Jenderal TNI (Purn.) Sumitro. Menurut mantan Pangkopkamtib tersebut, tindakan Hartas bertolak dari kecemasan para jenderal terhadap kemungkinan Soeharto mengangkat Habibie menduduki kursi Wapres.

Sudharmono dan Habibie masa itu adalah orang-orang yang dipercayai Soeharto sebagai pembantu-

pembantunya yang loyal. Kedua tokoh itu—berbeda dengan para jenderal yang duduk pada pimpinan ABRI—tidak punya dukungan politik dan massa yang mungkin mereka mobilisasikan untuk mengancam kekuasaan Soeharto.

Tokoh yang juga diperhitungkan bukan sebagai potensi ancaman bagi kekuasaannya adalah Harmoko. Inilah penjelasannya mengapa Harmoko menjadi Ketua Umum Golkar, meski para jenderal menginginkan salah seorang dari mereka yang menggantikan Jenderal Wahono, orang yang digantikan Harmoko.

Barangkali untuk makin membulatkan dukungan dari Habibie dan Harmoko, keduanya kemudian secara terpisah dijanjikan jabatan Wapres. Harmoko dijanjikan akan menjadi Wapres mengikuti jalan Adam Malik sekian tahun sebelumnya—menaiki kursi Wapres setelah untuk beberapa waktu memimpin DPR dan MPR.

Oleh karena itu, menjelang Pemilu terakhir Orde Baru, sebagai Ketua Umum Golkar Harmoko secara *all out* mendukung Soeharto dan meyakinkan Bapak Presiden masih besarnya dukungan rakyat kepadanya untuk melanjutkan jabatan kepresidenan lewat Sidang MPR 1998.

Soeharto yang sudah bicara mengenai niatnya *lengser keprabon* (mundur dari jabatan Presiden), diyakinkan Harmoko agar tetap mempertahankan singgasananya. Terpilih kembali sebagai Presiden, Soeharto melupakan janjinya kepada Harmoko, seperti dulu melupakan janjinya kepada Ali Murtopo ketika memilih Harmoko menduduki

kursi Menteri Penerangan. Yang ditunjuk Soeharto menduduki kursi Wakil Presiden ternyata adalah B.J. Habibie. Maka, bisa dibayangkan betapa marahnya Harmoko yang merasa dibohongi.

Mengenai janji Soeharto kepada beberapa orang untuk menduduki jabatan Wakil Presiden, pada akhir 2012 saya mendapat cerita menarik dari Ibu Sunarti, istri mendiang Jenderal TNI (Anumerta) Sarwo Edhie. Ternyata menjelang Sidang MPR 1988, selain Sudharmono, Presiden Soeharto diam-diam juga menjanjikan jabatan Wakil Presiden kepada Letjen TNI Sarwo Edhie. Mengikuti jalan Adam Malik yang menjadi Wakil Presiden melalui jabatan Ketua DPR dan MPR, Sarwo Edhie juga dijanjikan untuk terlebih dahulu didudukkan sebagai pimpinan legislatif sebelum akhirnya menjadi Wakil Presiden.

Berbeda dengan Harmoko, Sarwo Edhie kemudian terbukti tidak pernah menjadi Ketua DPR dan MPR. Tapi seperti Harmoko, mantan Komandan RPKAD itu juga tidak pernah sampai tercatat sebagai salah seorang Wakil Presiden. Meski nasibnya lebih baik dari Sarwo Edhie, Harmoko tetap saja kecewa berat. Kekecewaan itulah yang melatarbelakangi dan memberi semangat kepada Ketua DPR dan MPR itu untuk berani mendorong Soeharto mundur menjelang 21 Mei 1998.

KETIKA ABRI—SEJAK MASA KEPANGLIMAAN MOERDANI—sudah secara berangsur menunjukkan sikap tidak ingin terus bergantung kepada Soeharto, sejak itu

pula Bapak Presiden beralih mengandalkan orang-orang yang secara pribadi dikenalnya. Dalam kepemimpinan ABRI, keputusan Soeharto itu terlihat pada pengangkatan ke posisi strategis para mantan ajudan dan mantan pengawal. Para perwira kepercayaan pribadi Presiden Soeharto adalah Subagio Hadisiswoyo (Kepala Staf Angkatan Darat), Sjafrie Sjamsoeddin (Panglima Kodam Jaya/Jakarta), Dibyo Widodo (Kepala Polisi Republik Indonesia), Hamami Nata (Kepala Polisi Jakarta), Soejono (Kepala Staf Umum ABRI), Sugiyono (Kepala Pasukan Pengawal Presiden dan kemudian Panglima Kostrad). Dari kalangan keluarga tercatat nama Wismoyo Arismunandar (Komandan Pasukan Khusus, kemudian Kepala Staf Angkatan Darat) dan Prabowo Subianto (Komandan Pasukan Khusus dan kemudian Panglima Kostrad). Pokoknya semua yang secara pribadi dikenal Soeharto. Yang tidak dikenal Bapak Presiden nyaris sulit mendapat posisi strategis. Melewati perwira-perwira kepercayaan yang mengitarinya itulah, Presiden Soeharto mengatur dan mengontrol ABRI.

Menyembunyikan Kepada Orang Banyak

Jadi, mudah dimengerti jika Bapak Presiden marah kepada Harsudiono Hartas yang dinilainya sebagai "operator" Moerdani, Jenderal yang ditengarai Soeharto sebagai ancaman. Tapi Soeharto memilih tidak menolak pencalonan mantan ajudannya yang "dipaksakan" ABRI kepadanya. Sang Presiden tidak ingin masyarakat tahu

adanya keretakan antara dirinya dan ABRI.

Sebenarnya sikap Soeharto yang demikian, lebih kurang sama dengan usaha Benny Moerdani, yang dengan canggih, dan untuk waktu lama, menyembunyikan kepada orang banyak kenyataan dirinya dan Soeharto sebenarnya sudah tidak akur. Kedua jenderal itu memang berasal dari Jawa Tengah. Mereka berdua tumbuh dalam budaya yang secara saksama melatih mereka menyembunyikan perasaan.

Menurut sahibul hikayat, kesalahan Hartas di mata Soeharto bukan hanya karena melanggar TAP MPR dan karena itu dianggap lancang. Lebih dari itu, Soeharto konon juga sudah lama hilang kepercayaan kepada Try Sutrisno. Soeharto yang merasa sudah berhasil menyingkirkan "orang-orang Benny Moerdani" di dalam ABRI kemudian menyadari, mantan ajudannya itu ternyata sudah berhasil dibina oleh Panglima yang digantikannya. Maka, tidak sulit menduga bahwa Presiden waktu itu melihat Hartas dan Try Sutrisno sebagai bagian dari gerakan para jenderal pimpinan Moerdani yang berencana mengambil kembali kekuasaan yang pada awal Orde Baru dipercayakan ABRI kepada Soeharto.

Meski bukan Panglima ABRI lagi, tapi Moerdani yang terkenal cerdas, pada 1988—terutama lewat Jenderal Try Sutrisno—masih memainkan peran besar dalam merumuskan kebijakan politik ABRI. Strategi para jenderal waktu itu adalah "merebut" kursi Wakil Presiden pada Sidang MPR 1993 setelah sebelumnya gagal mencegah Sudharmono menduduki kursi orang kedua di pusat

kekuasaan Indonesia pada Sidang MPR 1988. Calon Moerdani sejak awal sudah jelas: Try Sutrisno.

Seperti kisah Moerdani sebelumnya, posisi Try di militer menanjak tajam karena Soeharto. Tapi ketika Soeharto sudah “memusuhi” Benny, Try justru malah makin dekat kepada mantan Pangab yang digantikannya. Sebagian staf penting di Mabes ABRI yang ditinggalkan Moerdani terus dipakai Try Sutrisno. Para pengamat politik waktu itu pada umumnya cenderung melihat Benny Moerdani yang terus menguasai intel (bahkan tetap berkantor di Bais) juga dipandang sebagai tetap “mengendalikan” Try Sutrisno. Contoh yang sering dikemukakan untuk membuktikan peranan penting Moerdani atas diri Try Sutrisno waktu itu adalah tetap duduknya Marsekal Muda TNI Teddy Rusdy pada jabatan Asisten Perencanaan Umum (Asrenum) di Mabes ABRI, jauh setelah Benny pensiun.

Selama Moerdani menduduki kursi Pangab, Teddy Rusdy menjabat sebagai Asrenum untuk waktu empat tahun. Pada masa dua tahun pertama kepanglimaan Try, Teddy bertahan pada jabatan penting tersebut. Padahal, kecuali jabatan Panglima ABRI dan Kepala Staf Angkatan, normalnya suatu jabatan diduduki seorang perwira tinggi untuk masa dua atau tiga tahun saja.

Dalam buku biografi Teddy Rusdy, *Think Ahead*, yang ditulis Servas Pandur, dikisahkan sebelum Teddy meninggalkan jabatan Asrenum, Presiden Soeharto sudah tiga kali mengingatkan Pangab Try Sutrisno memberhentikan Teddy. Menurut cerita Try Sutrisno,

desakan Soeharto itu selalu diabaikannya. Selain barangkali untuk menunjukkan independensinya terhadap Soeharto, Pangab tampaknya memang merasa sangat puas dengan pekerjaan Teddy. Tapi, Asrenum yang tahu keadaan sudah berubah—orang-orang Moerdani sudah pada disingkirkan—memutuskan meninggalkan posisinya dan sekaligus pensiun dini dari Angkatan Udara pada usia 53 tahun.

DOK. PRIBADI

Wapres Try Sutrisno, Presiden Soeharto, dan Widjojo Nitisastro pada acara pelantikan Ketua BPK, 1993.

KEPADA SAYA, HARTAS MEMBANTAH kalau pencalonan Try merupakan pengaruh Moerdani. “Kalau sudah pensiun, tak akan perintahnya kita ikuti.” Tapi, pembelaan demikian tampaknya tidak mudah diterima Soeharto. Sebagai seorang jenderal dan politisi amat senior, Soeharto tahu bagaimana orang intel yang juga Panglima ABRI membangun basis kekuatan mengembangkan dan melanggengkan kekuasaan. Kegiatan demikian telah dipraktikkan sendiri Bapak Presiden selama bertahun-tahun dengan hasil yang luar biasa.

Atas dasar pengalaman panjang yang disempurnakan oleh kecanggihan berpolitik yang begitu tinggi, alasan apa saja yang dikemukakan Hartas, tidak tecerna nalar Soeharto. Di mata sang Presiden, Hartas telah “bersekongkol” dengan sesama jenderal mengalihkan kekuasaan dari Soeharto ke Markas Besar ABRI. Soeharto sangat marah.

Akibatnya, Hartas yang tadinya dikabarkan bakal menduduki kursi Menteri Dalam Negeri, akhirnya terpaksa harus cukup puas berkantor di Dewan Pertimbangan Agung (DPA) saja. Tugas DPA memberi nasihat—diminta atau tidak—kepada Presiden. Tapi, Soeharto tidak pernah minta nasihat DPA, dan jika DPA secara sukarela memberi nasihat, Soeharto juga nyaris tidak pernah memperhatikannya.

Nah, sekarang tentang Try sebagai Wapres. Terhadap wakilnya itu, secara mencolok Soeharto

mempertontonkan ketidaksenangan dan ketidakpercayaannya. Selama menjadi Wapres, Try Sutrisno tidak pernah dipercaya mewakili Indonesia pada acara-acara penting di dalam maupun di luar negeri. Contoh men-colok, ketika Soeharto sedang sakit tatkala ada Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ASEAN di Kuala Lumpur, yang ditunjuk mewakili Presiden adalah Menteri Luar Negeri Ali Alatas, bukan Wapres Try Sutrisno.

Pengamatan saya ini dikoreksi oleh Try, "Saya mewakili Presiden ke Australia untuk membalas kunjungan Perdana Menteri Keating," katanya kepada saya. KTT ASEAN jelas jauh lebih penting dari sekadar acara protokoler membalas kunjungan Keating yang memang berkali-kali datang ke Indonesia. Satu sumber di kalangan intel mengisahkan kepada saya mengenai sering hilangnya file agenda Wapres yang, antara lain, mencatat siapa saja yang menjadi tamu Try Sutrisno dan apa saja pembicaraannya. Dari file yang hilang, Soeharto ditengarai berusaha tahu lebih jauh Try Sutrisno berbicara apa kepada siapa.

Mengajarkan Doa-Doa

Secara pribadi, saya sendiri baru kenal Try Sutrisno dari dekat pada tahun-tahun awal Reformasi. Orangnya sangat hangat, bersahaja, dan rendah hati. Dan yang istimewa, kalau kita mengeluh sakit, beliau akan dengan spontan mengajarkan doa-doa untuk menetralisasi penyakit tersebut. Try bukan saja sanggup mengajarkan banyak doa, mantan Wapres itu, menurut seorang bekas Ajudan

Presiden, juga punya ilmu menangkal hujan. Kebolehan demikian kabarnya pernah dipraktikkannya ketika Try bertugas sebagai Ajudan Presiden.

DALAM SEBUAH PERJALANAN KERJA ke Jakarta sebagai Duta Besar, saya mengadakan kunjungan kehormatan kepada mantan Wapres itu di kediamannya yang sederhana di Jalan Purwakarta, daerah Menteng, Jakarta Pusat. Ketika staf di rumah jaga melaporkan kedatangan saya dan istri, mantan Pangab dan mantan Wakil Presiden itu dengan segera membukakan pintu dan menerima tamunya dengan memberi hormat militer dalam sikap sempurna.

Tidak banyak hal serius yang kami bicarakan, saya hanya menyatakan akan datang lagi suatu kali sebagai peneliti peran politik tentara untuk melakukan wawancara dengan beliau. Tentu saja Pak Try berjanji akan menerima saya. Jenderal TNI (Purn.) Try Sutrisno menepati janji dan saya mewawancarainya pada 3 Juli 2012.

Ketika meninggalkan kediamannya pada kunjungan pertama dua tahun sebelumnya, kami disuguhi buah jambu dari pohon yang tumbuh subur di halaman depan kediaman mantan jenderal itu. “Manis, sekali,” kata saya. Secara spontan kami dihadiahi setangkai pohon jambu yang telah dicangkok dalam sebuah pot kecil. Kami tanam pohon jambu yang masih kecil itu di halaman rumah Cipinang Muara. Tapi karena kami harus kembali ke Praha dan tidak ada yang mengurus tanaman di halaman, pohon jambu itu akhirnya gagal memberi kami buah manis,

seperti yang kami nikmati di kediaman Try Sutrisno hari itu.

Dalam kunjungan pertama tersebut, satu soal sempat saya tanyakan. Bagaimana mantan Wapres itu melihat Jenderal Benny Moerdani? Jawabannya tidak singkat. Kisah bermula dari sejarah perkenalan ketika mereka berdua masih remaja di Bandung. Benny waktu itu sudah perwira berpangkat Letnan Dua, sementara Try masih taruna Akademi Teknik Angkatan Darat (Atekad).

Mereka jumpa kembali di satu lapangan terbang kecil pada sebuah pulau yang menjadi salah satu pangkalan Operasi Trikora pada masa perjuangan pengembalian Irian Barat (sekarang Papua). Di sana, Try sebagai perwira Zeni bertugas membangun landasan terbang, sedangkan Moerdani yang perwira Resimen Para Komando Angkatan Darat (RPKAD) bersiap-siap diterjunkan ke belantara Irian Barat.

Bagi Try Sutrisno hanya ada dua Jenderal Indonesia yang amat dihormatinya, Panglima Besar Sudirman dan Jenderal L.B. Moerdani. Tadinya saya kira nama Soeharto akan disebutkannya juga. Bukankah Soeharto telah mengangkatnya dari posisi Ajudan menjadi Panglima Kodam, KSAD, Panglima ABRI, dan akhirnya Wapres? Bukankah Presiden Soeharto telah menjadikannya Kepala Staf Angkatan Darat dan Panglima ABRI, padahal Try bukan berasal dari korps Infantri? Bukan cuma orang Zeni pertama yang menjadi KSAD, Try Sutrisno—sampai saat ini—adalah perwira Zeni satu-satunya yang berhasil menduduki jabatan Panglima tentara Indonesia. Kendati

demikian, ternyata Soeharto tidak tergolong jenderal Indonesia yang diidolakannya. Agak mengherankan bagi saya.

Namun, kemudian saya lebih mengerti sikap Try Sutrisno yang demikian setelah membaca memoar Jusuf Wanandi, *Shades of Grey*. Pada buku itu diceritakan bagaimana Moerdani menyelamatkan karier Try ketika terjadi peristiwa pembantaian massa Islam di Tanjung Priok (Jakarta Utara) pada September 1984. Sebagai Panglima Militer Jakarta, menurut Wanandi, yang harus bertanggung jawab atas pembantaian itu sebenarnya adalah Try Sutrisno. Tapi atas perintah Presiden Soeharto, Benny sebagai Pangab dan Pangkopkamtib mengambil alih tanggung jawab. Penjelasan Wanandi,

> Benny bukannya tanpa agenda dan rencana sendiri. Sembari mengikuti perintah Soeharto menjaga agar pembantaian di Tanjung Priok tidak merusak karier Try Sutrisno, Moerdani punya agenda sendiri. Sejak lama dia dekat dengan Try Sutrisno dan berharap jika Try menjadi Panglima, Benny masih tetap bisa mengontrol dari balik singgasana yang dipercayakan Soeharto kepada Try.

Agenda Moerdani itu berhasil terlaksana. Pada masa Try Sutrisno menduduki kursi Panglima, Moerdani secara nyaris saksama "mengendalikan" sang Pangab.

Adapun Jenderal Harsudiono Hartas, kemarahannya kepada Soeharto tidak disembunyikannya kepada saya. "Pak Salim mau tahu siapa yang merusak ABRI?" Saya masih berpikir ketika Hartas menjawab sendiri pertanyaannya. Sambil menengok ke arah foto Presiden

yang tergantung pada dinding kantornya di gedung DPA, Hartas berkata dengan nada tinggi, "Soeharto!".

YANG MEMBUAT KEDUDUKAN TRY amat penting sebagai Pangab dan kemudian Wakil Presiden adalah karena perwira tinggi kelahiran Surabaya itu menjabat posisi sangat strategis tersebut ketika usia Soeharto sudah beranjak sepuh. Dan karena ada Fraksi ABRI di DPR dan MPR—sebagai salah satu kekuatan sospol—tentu para jenderal di Mabes ABRI merasa berhak juga mengirimkan jagonya ke gelanggang.

Tokoh yang mereka sepakati tentulah yang tersenior di antara mereka. Tadinya Moerdani yang mereka ingin promosikan. Moerdani menolak. Mantan Pangab itu menunjuk teman lamanya, Try Sutrisno.

Keputusan yang dipelopori Moerdani itu dicatat oleh Michael R.J. Vatikiotis dalam bukunya *Indonesian Politics Under Suharto* (1993). Menurut Vatikiotis,

> Dengan mendudukkan Try di samping Soeharto, ABRI—lebih khusus kelompok Moerdani—merencanakan mengelola suksesi dan mencegah munculnya pengaruh politik antimiliter. Soeharto menyadari skenario Moerdani tersebut dan karena itu merendahkan Try Sutrisno dengan lebih memperlakukannya sebagai mantan Ajudan daripada sebagai mantan Panglima.

Bagaimanakah seharusnya kita membaca langkah dan strategi ABRI tersebut? Sulit bagi saya untuk tidak berkesimpulan, dengan "memaksakan" Try menjadi Wapres tanpa konsultasi dengan Soeharto, yang dilakukan ABRI waktu itu sebenarnya adalah sebuah

“pemberontakan” kepada Bapak Presiden.

Tanda-tanda mulai “berontak” itu sebenarnya sudah terlihat ketika para jenderal berusaha menghalangi pengangkatan Sudharmono menjadi Wapres, dan pengangkatan Harmoko sebagai Ketua Umum Golkar. Bahkan, ada yang menyebut tahun 1978 sebagai awal munculnya sikap kritis ABRI kepada Soeharto.

Akan tetapi, kalau kita menengok lebih saksama ke belakang, sebenarnya esensi konflik yang meledak menjadi Peristiwa Malari 1974 adalah “pemberontakan” ABRI secara tidak langsung kepada kekuasaan Soeharto yang sudah beranjak berkuasa mutlak. Ali Murtopo dan Sujono Humardani yang waktu itu berkonfrontasi dengan Pangkopkamtib Sumitro sesungguhnya hanyalah sasaran antara. Murtopo dan Humardani adalah dua jenderal Istana yang amat berpengaruh di sekitar Soeharto, sementara Sumitro merupakan representasi para perwira profesional di lapangan. Di kemudian hari, posisi Murtopo dan Sujono Humardani—sebagai sasaran antara—diperankan oleh Sudharmono, Harmoko, dan Habibie.

Pada 1978, ketika kontrol Soeharto makin ketat terhadap politik dan militer, dalam satu rapat para jenderal, muncul sikap kritis terhadap kebijakan pemerintah kepada para mahasiswa. Waktu itu sejumlah tokoh mahasiswa ditangkap setelah kampus ITB di Bandung diserang tentara. Para mahasiswa waktu itu mendesak Soeharto agar tidak lagi mencalonkan diri sebagai Presiden lewat Sidang MPR berikutnya. Adalah Jenderal Muhammad Jusuf, Menteri Perindustrian waktu

itu, yang tampil dengan bersemangat membela Soeharto pada rapat yang dihadiri banyak jenderal. Tak lama kemudian, Jusuf diangkat menduduki jabatan Panglima ABRI.

KEJADIAN PENTING berikutnya terlihat pada saat-saat menjelang terpilihnya Sudharmono menjadi Wakil Presiden. Meski tahu keputusan Soeharto mempersiapkan Sudharmono, Moerdani ternyata masih tetap berusaha "menggelindingkan" nama Try Sutrisno sebagai calon Wapres pada Sidang Umum MPR 1988 itu. Try mencium gelagat Benny yang terlihat sulit beranjak dari tekad mengganjal promosi Sudharmono. Sebelum sidang pemilihan Wapres dimulai, Try Sutrisno mencegat Moerdani di depan ruang sidang. Menurut biografi Try Sutrisno, *Pengabdian Tiada Akhir*, pada saat itu terjadilah adegan sebagai berikut:

> "Pak, sini Pak, ngomong dulu sebelum masuk."
> "Kenapa, Try?" tanya Benny heran.
> "Saya mau tanya, sekarang siapa lurahnya ABRI?"
> "Ya, kamu …," jawab Benny.
> "Nah, kalau saya … Pak Benny harus nurut saya. Nanti kalau sidang, jangan bikin ulah macam-macam. Jangan memunculkan nama calon Wapres baru."

Wapres Try Sutrisno dan mantan Wapres Sudharmono.

Sebagai tentara yang taat disiplin, Moerdani mengikuti perintah panglimanya. Inilah penjelasannya mengapa lima tahun kemudian, tanpa izin Try Sutrisno, ABRI "menggelindingkan" nama Pangab tersebut untuk jabatan Wapres. Dengan cara demikian, yang sebenarnya dilakukan para jenderal adalah mencoba "memaksakan" kehendak mereka kepada Soeharto.

Mereka tidak ingin gagal lagi mendudukkan wakil ABRI pada kursi Wapres. Untuk itulah, mereka menghindari konsultasi dengan Soeharto, juga tidak dengan persetujuan Try Sutrisno. Jadi, yang "dipaksa" menerima kehendak dan keputusan para Jenderal bukan cuma Soeharto, tapi juga Try Sutrisno.

Apakah ini berarti ABRI secara kelembagaan akan kembali memainkan peranan langsung dalam politik seperti pada awal Orde Baru? Pertanyaan ini menjadi amat menarik karena sejak lama para pengamat secara diam-diam sepakat berkesimpulan, ABRI sudah digiring Soeharto ke arah lebih menekankan peranan militernya dan berangsur mengurangi peran politiknya. Waktu itu pelaksanaan Dwifungsi memang nyaris semuanya sudah dikendalikan Soeharto.

Moerdani sebagai Pangab pada mulanya ikut menari mengikuti irama gendang yang ditabuh Soeharto. Benny adalah Pangab yang mengubah kurikulum Akademi Angkatan Bersenjata (Akabri) yang tadinya sarat dengan kuliah nonmiliter—maksudnya sospol—menjadi lebih berkonsentrasi pada mata kuliah militer. Pengalaman operasi militer di Timor Timur yang kurang menyenangkan karena mutu tentara dan perencanaan yang tidak memadai sehingga banyak korban, ikut mendorong Moerdani lebih memiliterkan TNI.

Namun, dalam perjalanan kariernya sebagai Panglima, sikap Benny kepada Soeharto kemudian berubah. Di mata Moerdani dan para jenderal, Bapak Presiden secara perlahan makin lama makin lebih sibuk mengurus

kepentingan diri, keluarga, dan kroninya daripada mengurus negara. Dari kontrolnya yang ketat atas ABRI, Moerdani dan para jenderal di sekitarnya berangsur mengalihkan loyalitas mereka dari pribadi Soeharto ke lembaga ABRI. Bersama para pimpinan ABRI lainnya, Moerdani "bersepakat" mengambil kembali kekuasaan yang pada awal Orde Baru mereka percayakan kepada Soeharto.

Itulah latar belakang "dipaksakannya" Try Sutrisno menjadi Wakil Presiden.

Apakah Try kira-kira menyadari peran yang "dipaksakan" kepadanya oleh para koleganya sesama jenderal? Kesan saya dari dua kali pertemuan dengan mantan Wapres tersebut, pemaksaan itu tidak disadarinya. Try Sutrisno percaya jabatan Wapres didudukinya atas keputusan Bapak Presiden, tanpa campur tangan, apalagi tekanan siapa-siapa. Yang menarik, Try Sutrisno juga sama sekali tidak percaya ada konflik antara Soeharto dan Moerdani. Ketidakpercayaan itu dengan teguh dipertahankan mantan Wapres itu meski saya telah berusaha meyakinkannya, cerita ketegangan antara Soeharto dan Moerdani adalah informasi yang saya dengar langsung dari mulut Jenderal Benny.

MENGINGAT MAKIN KETATNYA KONTROL Soeharto atas ABRI pasca-Benny tersingkir, dugaan saya waktu itu, tidak akan terjadi perubahan drastis ketika Try didudukkan pada kursi Pangab. Tapi, dengan berlatar belakang rencana para jenderal mengambil kembali kekuasaan setelah Soeharto

tidak di singgasana kekuasaan lagi, maka mereka kemudian mendorong Sutrisno duduk di samping penguasa tertinggi Indonesia. Dengan demikian, ABRI jelas merencanakan berkuasa kembali setelah Soeharto meninggalkan kursi kepresidenan.

Di kemudian hari terbukti bahwa Soeharto tidak ingin lagi digantikan oleh seorang tentara. Rencana Soeharto adalah "mengembalikan ABRI ke tangsi". Tapi ini bukan karena sang Presiden merencanakan membangun suatu Indonesia yang demokratis, dengan kedaulatan di tangan rakyat lewat pemilihan umum yang betul-betul bebas dan rahasia. Soeharto punya rencana lain.

Memang diperlukan waktu cukup lama untuk menyadari rencana Pangkostrad pertama itu dalam proses mempersiapkan pembangunan sebuah dinasti. Tanda-tanda nyata ke arah itu mulai tampak ketika putri sulungnya, Siti Hardianti Rukmana (Mbak Tutut) secara mencolok menjadi orang penting dalam Golkar, bahkan kemudian menjadi Menteri dalam kabinet terakhir ayahandanya.

Seandainya saja Reformasi terlambat beberapa tahun, hampir bisa dipastikan Tutut akan menjadi Ketua Umum Golkar, menggantikan Harmoko. Dari posisi ketua "organisasi politik terbesar" itulah, putri sulung Bapak Soeharto akan menggantikan ayahandanya yang akan mengundurkan diri dengan alasan sudah amat sepuh (*lengser keprabon madeg pandito*).

Skenario dan rencana Soeharto ini tampaknya disadari Moerdani dan Hartas serta para jenderal lainnya. Karena

itu, Try Sutrisno mereka "paksakan" naik menduduki kursi Wakil Presiden untuk berjaga-jaga agar ABRI siap menguasai kembali Indonesia jika terjadi sesuatu pada diri Soeharto yang waktu itu memang sudah sakit-sakitan. Sebagai politisi yang canggih, Soeharto niscaya mencium rencana para jenderalnya tersebut.

Rencana Soeharto membangun dinasti itu tampaknya juga mulai tercium oleh para jenderal ketika Sudharmono menduduki kursi Ketua Umum Golkar. Seperti kita ketahui, tugas terpenting Sudharmono sebagai pemimpin Golkar adalah mensipilkan para pimpinan kelompok politik terbesar itu sembari secara berangsur mengurangi ketergantungan Golkar kepada ABRI. Sudharmono mendapat perlawanan keras dari para jenderal waktu itu. Apakah para jenderal sudah curiga terhadap pengangkatan Sudharmono menjadi Ketua Umum Golkar dan kemudian Wakil Presiden sebagai salah satu bagian dari langkah awal Soeharto dalam perjalanan ke arah pembangunan dinasti?

KEMUDIAN, TERNYATA TIDAK TERJADI SESUATU selama Try menjabat Wapres. Soeharto memang pernah dikabarkan sakit, tapi tetap masih mampu mengendalikan kekuasaannya. Sampai berakhirnya masa jabatan Try, Soeharto tetap mengontrol keadaan. Try kehilangan kesempatan menggantikan Soeharto. Krisis moneter yang dahsyat mendadak menerpa ketika Dr. B.J. Habibie menjabat Wapres.

Sejarah kemudian mencatat, bukan ABRI dan bukan

turunan Soeharto yang menjadi Presiden. Habibie yang tadinya mungkin direncanakan hanya sebagai semacam "pejabat penghangat kursi" dalam kedudukan Wapres, malah jadi Presiden mendadak. Meski untuk waktu sedikit lebih dari 500 hari saja.

JAUH SETELAH SOEHARTO TERPAKSA MUNDUR, ketika mantan Presiden yang berkuasa paling lama itu sakit menjelang akhir hidupnya, B.J. Habibie heran dia ditolak menengok mantan atasannya. "Saya salah apa?" tanya Habibie kepada hampir setiap orang yang membicarakan hubungan buruknya dengan mantan atasannya. Dr. A.M. Fatwa—seorang politikus yang dulu lama menghuni penjara Orde Baru—sempat jumpa Tutut di rumah sakit ketika Soeharto dirawat. Dari Fatwa-lah Dr. Habibie tahu, oleh keluarga Soeharto dia dianggap pengkhianat. Soalnya dia tidak solider ikut mundur bersama orang yang diakuinya sebagai "Guru Besar"-nya itu.

Ketika saya berkunjung ke rumahnya pada awal tahun 2011, Habibie memulai percakapan kami dengan pertanyaan berikut: "Menurut Saudara, mengapa Pak Harto memusuhi saya? Tidak mau menemui saya?" Jawab saya: "Suharto sudah merasa gagal. Rencananya membangun dinasti berantakan. Anda sebagai 'bagian dari keluarganya' diharapkan solider mundur bersamanya. Tapi, Anda ternyata memilih bertahan."

Meski berkali-kali mengaku dan mengumumkan dirinya sebagai murid "Profesor Soeharto", Habibie ternyata masih tetap seorang modern hasil didikan Barat.

Sebagai orang rasional, Doktor lulusan Achen, Jerman, itu lebih memilih menghormati konstitusi (Pasal 8 UUD 45) daripada loyal buta kepada Soeharto. Dalam hal ini, sikap Habibie terhadap Soeharto sebenarnya lebih kurang sama dengan sikap Moerdani yang mengalihkan loyalitasnya dari Soeharto pribadi kepada lembaga ABRI.

Bagi Moerdani, pada akhirnya, keselamatan negara lebih penting dari sekadar keselamatan Soeharto. Bagi Habibie, keselamatan dan kelanjutan hidup Republik Indonesia lebih penting daripada setia buta kepada Soeharto. Akibatnya, kedua tokoh ini mendapat "hukuman" dari Soeharto. Benny dicopot mendadak dari jabatan Pangab disusul pembersihan ABRI dan para pengikutnya, sedangkan Habibie ditolak berjumpa mantan "Profesor"-nya hingga akhir hayat Haji Mohammad Soeharto.

DALAM KEADAAN KRISIS PASCA-SOEHARTO, ABRI ternyata sudah tidak cukup punya pemimpin yang berani, bersemangat, dan yakin bisa mendapat dukungan publik dalam melanjutkan kepemimpinan nasional. Ini adalah akibat kebijakan Soeharto yang telah bertahun-tahun memecah belah ABRI, terutama setelah menyingkirkan Benny Moerdani. ABRI pasca-Moerdani adalah tentara yang dibikin makin tidak bersatu. ABRI atau tentara yang kompak di mana-mana memang merupakan potensi ancaman utama kepada kepemimpinan otoriter.

Di bawah Panglima Moerdani, dengan menggunakan kekuasaannya atas jaringan intelijen, Benny berhasil

mempersatukan dan mengontrol ABRI. Kekuatan Moerdani berdasar kontrolnya atas ABRI ternyata kemudian dilihat Soeharto sebagai ancaman. Sejak Benny disingkirkan dan para pengikutnya dibersihkan dari sejumlah posisi penting dalam tubuh tentara, praktis Soeharto-lah yang menjadi Panglima ABRI.

Cara Soeharto mengontrol tentara dan politik adalah mengusahakan dengan saksama agar mereka yang ada di bawahnya sedapat mungkin tidak akur satu dengan yang lainnya. Inilah alasan saya untuk selalu mengatakan bahwa ABRI adalah korban tragis Orde Baru. Mendirikan Orde Baru dan resminya berkuasa serta kelihatan utuh, nyatanya ABRI berhasil dibikin tidak kompak dan praktiknya hanya jadi alat Soeharto, keluarga, dan kroninya.[]

Menyiapkan Tutut Menggantikan Soeharto

Pada suatu hari di pekan pertama bulan Agustus 1997, atas bantuan Kasospol ABRI, Letjen TNI Syarwan Hamid, saya bisa mewawancarai Jenderal TNI Feisal Tanjung, Panglima ABRI waktu itu. Wawancara tersebut merupakan bagian dari kegiatan saya mengumpulkan bahan bagi penulisan sebuah makalah mengenai hubungan Presiden Soeharto dan ABRI masa pasca-Panglima ABRI L.B. Moerdani dan Try Sutrisno. Secara tak tersangka, pada akhir wawancara itu Jenderal Feisal bertanya, "Menurut Pak Said, ke mana arah Mbak Tutut?"

Tutut dan anaknya menyambut kepulangan Pak Harto dari perjalanan ke luar negeri.

Atas nasihat Letjen TNI Syarwan Hamid dan Letjen TNI Zain A. Maulani, saya kemudian menjawab pertanyaan Jenderal Feisal Tanjung lewat sebuah analisis tertulis. Analisis tersebut bisa Anda baca sekarang sebagai yang tercantum di bawah ini. Pada waktu ditulis dulu sifatnya sangat *confidential.* Tapi yang jelas pada waktu itu, saya telah dengan yakin mengatakan bahwa Soeharto sedang mempersiapkan putrinya, Siti Hardianti Indra Rukmana (Tutut), untuk kelak menggantikan ayahandanya.

Di kemudian hari, yakni pada Sidang Badan Pekerja-MPR (BP-MPR) 1997/1998, saya dan Prof. Dr. Ryaas Rasyid diangkat menjadi penasihat Fraksi Golkar dalam Badan Pekerja-MPR tersebut. Menurut Ryaas, adalah Tutut yang meminta kami berdua. Saya sendiri sudah lupa siapa yang menghubungi saya waktu itu.

Ketua Fraksi Golkar di BP-MPR adalah Tutut. Luar biasa berkuasanya. Sebaliknya juga, luar biasa takzimnya anggota Fraksi Golkar kepada pimpinan mereka.

Lucunya, justru dalam situasi demikian saya bisa berbuat banyak dalam menyarankan koreksi dan perubahan draf GBHN yang dibahas dalam rapat-rapat BP-MPR tersebut. Saya duduk di samping sang Ketua Fraksi, sehingga cukup banyak usul saya yang berhasil dia adopsi. Padahal, ketika gagasan perubahan saya sampaikan kepada sejumlah anggota fraksi, mereka semua enggan menyampaikannya kepada Ibu Ketua. Kesan saya mereka semua takut

Ryaas Rasyid tidak begitu aktif. Kesan saya, dia risi melihat permainan politik tersebut. Saya, sebaliknya, bersemangat dan selalu hadir di sidang maupun pertemuan di markas Fraksi di Kebayoran Baru. “Sebagai wartawan dan pemerhati politik, ini kesempatan buat saya melihat proses politik dari dalam,” kata saya kepada Ryaas.

Pengalaman berada di sekitar Tutut selama beberapa hari itu makin meyakinkan saya, putri sulung sang Presiden sedang dalam proses berjalan ke tempat tertinggi Golkar sebagai bagian dari usaha sang Bapak menyiapkan putrinya menduduki jabatan tertinggi di Indonesia. Langkah pertama ke arah puncak kekuasaan itu adalah menjadi anggota kabinet. “Anda lihat nanti dalam kabinet mendatang, Tutut akan jadi Menteri Sosial atau Urusan Wanita,” kata saya kepada Ryaas. Ramalan saya tidak meleset. Tutut jadi Menteri Sosial pada kabinet terakhir Presiden Soeharto.

Soeharto ditemani Tutut memeriksa hasil kerajinan rakyat.

Saya juga meramalkan, lewat Musyawarah Nasional (Munas) Golkar setelah sidang MPR, Tutut akan jadi Ketua Umum menggantikan Harmoko. Ramalan ini tidak jadi kenyataan karena Reformasi, secara mendadak dan tak terduga, telah menggusur kekuasaan Soeharto. Seandainya tidak terjadi Reformasi, maka menjelang, atau bahkan sebelum, Sidang MPR lima tahun berikutnya Soeharto akan melengserkan diri dan mengarahkan agar penggantinya adalah pimpinan partai atau "golongan politik yang paling besar pendukungnya". Pada saat itu putri tertuanya, Tutut sudah dengan kukuh menduduki jabatan Ketua Umum Golkar. Jadilah putri sulung itu pewaris takhta kekuasaan ayahandanya. ABRI waktu itu akan mendukung Tutut sebab pemimpin mereka sudah sejak lama dipersiapkan Soeharto lewat seleksi ketat dan secara pribadi semua perwira tinggi dikenal oleh Bapak Presiden.

Berikut ini makalah saya untuk Jenderal TNI Feisal Tanjung tersebut.

Pada masa penyusunan anggota MPR 1993-1998 dan pembentukan kabinet selepas sidang tersebut, B.J. Habibie memainkan peranan yang amat besar. Salah satu hasil peranan Habibie itulah yang secara sinis dulu ditanggapi oleh sebuah harian ibu kota sebagai "ijo loyo-loyo". Kemudian terbukti bahwa orang-orang pilihan Habibie dalam kabinet (Wardiman, Haryanto Danutirto,

dan Billy Yudhono) bagi Presiden Soeharto kurang memenuhi persyaratan untuk kedudukan mereka. Beberapa di antara mereka bahkan ditengarai Soeharto sebagai mempunyai agenda politik sendiri.

Soeharto memancing bersama B.J. Habibie dan Kanselir Jerman Barat, Helmut Kohl, di Teluk Jakarta.

Yang terakhir ini—mempunyai agenda politik sendiri—tentu saja membuat kesal Presiden Soeharto. Tidak sulit dimengerti, bagi Soeharto yang boleh punya agenda politik hanya Bapak Presiden, Pangti ABRI, dan Mandataris MPR.

Habibie, dan siapa saja yang diangkat olehnya (termasuk para pimpinan ABRI) hanya pelaksana agenda dan rencana-rencana politik Bapak Presiden. Inilah latar belakang mengapa kemudian Habibie tidak lagi memainkan peranan sebagai *political recruiter*. "Habibie terkenal dan dikenal oleh orang banyak, tapi Habibie tidak kenal orang," begitu konon keluhan Soeharto mengenai B.J. Habibie.

Penjelasan tambahan, kendati tidak kurang penting, terhadap tergesernya Habibie sebagai *political recruiter* adalah ketidakpekaan Habibie kepada peranan politik Tutut. Tampaknya Habibie masih melihat Tutut sebagai anak kecil yang dikenalnya ketika Menristek itu baru saja pulang dari Jerman (1974). Habibie barangkali melihat dirinya sebagai salah seorang "anak" Soeharto yang akan melanjutkan *legacy* (warisan kekuasaan dan format politik) Soeharto kelak, dan karena itu melihat Tutut hanya sebagai anak kecil yang "mengganggu".

Karena tidak mengerti peranan politik yang digariskan dan diproyeksikan Soeharto untuk putri sulungnya (peranan Tutut dalam Golkar, sebagai salah satu contohnya) atau barangkali juga karena menganggap

enteng Tutut, Habibie tidak sempat menyadari posisi serta kebolehan putri sulung sang Presiden dalam mewarisi kecanggihan berpolitik bapaknya.

ABRI dan Hari Depan Politik Indonesia

Bagi yang mengamati tingkah laku politik Soeharto akhir-akhir ini sulit menghindari kesan bahwa yang mempunyai peluang besar menggantikan Soeharto adalah Tutut. Dalam rangka itulah, orang harus melihat langkah-langkah Pak Harto mendorong putri sulungnya terlibat dalam kepemimpinan Golkar.

Bisa dikatakan, lewat Golkar Tutut "dilatih menjadi pemimpin" dalam rangka mempersiapkannya menjadi pengganti ayahandanya. Sekarang Tutut adalah hanya salah satu ketua, tapi tahun depan hampir pasti, lewat Munas, dia akan menjadi Ketua Umum Golkar.

Sebagai bagian dan langkah awal dalam perjalanannya ke puncak kekuasaan pada masa pasca-Soeharto, dalam penyusunan pimpinan ABRI pun kabarnya perlahan-lahan Tutut ikut berperan, meski sekarang kontrol ayahandanya masih cukup ketat. Lewat kontrol ketat itulah kelihatannya mantan Pangkostrad itu menempatkan pada posisi kunci para perwira yang diperhitungkannya tidak akan menimbulkan soal terhadap perjalanan kepemimpinan Tutut ke puncak piramida kekuasaan Indonesia.

Tutut memimpin apel barisan Kirab Pemuda.

Dalam rangka inilah juga, orang banyak harus mengerti pidato Soeharto di depan Ulang Tahun Golkar Oktober 1997 lalu. Lewat pidato itu untuk pertama kalinya Presiden Soeharto mengungkapkan kemungkinan suksesi yang masih memberikan tempat (sebagai *pandito*) kepada pemimpin yang mengundurkan diri. Konsep "kependetaan" ini mengingatkan kita kepada peran Lee Kuan Yew sebagai Menteri Senior di Singapura setelah meninggalkan kedudukannya sebagai Perdana Menteri.

Belajar dari pengalaman pahit memercayai nyaris hanya satu orang (L.B. Moerdani) dengan memberinya kekuasaan yang begitu besar, komposisi pimpinan ABRI selanjutnya diatur Soeharto sedemikian rupa, sehingga tidak ada jenderal yang dominan. Dengan cara ini tidak akan ada lagi orang seperti L.B. Moerdani yang sangat berkuasa dan mengontrol ABRI secara ketat, sehingga bisa menjadikan lembaga militer itu basis kekuatan sang Jenderal sendiri.

Jenderal Hartono

Posisi Jenderal TNI Raden Hartono unik. Presiden Soeharto melihatnya sebagai seorang yang loyal dan berani, tapi juga seorang santri yang tak menyembunyikan keislamannya. Soeharto tentu tidak pernah lupa keberanian Hartono, waktu itu Pangdam Brawijaya, menolak perintah Pangab, Jenderal Try Sutrisno, yang melarangnya membantu ICMI yang didirikan di Malang.

Inilah konon latar belakang bakal didorongnya Jenderal Hartono masuk ke ICMI. Menurut perkiraan beberapa pengurus ICMI, dalam waktu dekat—setelah pensiun—Hartono mungkin akan menggantikan Habibie sebagai Ketua ICMI. Dengan Hartono sebagai pemimpin ICMI, Pak Harto jelas ingin mantan KSAD itu mewarnai ICMI agar bisa tetap berada dalam *grand strategy* sang Presiden. Strategi seperti ini sejak awal dijalankan Soeharto, itu sebabnya Habibie yang jadi Ketua ICMI dan sebagian besar pembesar ICMI adalah anggota Korpri (Korps Pegawai Republik Indonesia).

DOK. PRIBADI

Soeharto dan Hartono.

Menguasai dan mengontrol ICMI bukan pekerjaan yang mudah, karena dari sejak kebangkitan Islam di Indonesia pada permulaan abad ke-20, Islam memang tidak pernah bersatu. Perbedaan, bahkan pertentangan antara kubu tradisional melawan kubu modernis mempunyai sifat mendasar. Tapi, R. Hartono sebagai Jenderal TNI, dan santri, berada dalam posisi yang unik

dan kuat bagi kemungkinan—dengan dukungan Soeharto, tentu saja—menjadi pemimpin politik Islam Orde Baru.

Posisi demikian memang belum pernah ada selama ini di Indonesia. Sampai saat sekarang yang ada hanya pimpinan kaum modernis atau kaum tradisional. Amien Rais (Muhammadiyah) paling-paling hanya didukung oleh kaum modernis, sedangkan Abdurrahman Wahid terutama hanya didukung jamaah NU.

Sementara itu, peranan Islam—sebagai mayoritas—amat penting dalam masa transisi pasca-Soeharto kelak. Pada saat itu nanti hanya ada dua kekuatan besar, ABRI yang terorganisasikan dengan rapi, dan Islam yang tidak terorganisasikan (kecuali kalau R. Hartono, buat sementara lewat ICMI, berhasil menjadi pemimpin politik Islam yang bersatu).

Harus disadari, tidak ada jaminan pada masa transisi pasca-Soeharto, ABRI bisa kompak, bersatu, dan siap secara utuh mengambil alih kontrol negeri ini. Kebijakan Soeharto yang menghindarkan adanya pemimpin ABRI yang kuat seperti Moerdani, telah berhasil membuat lembaga militer itu seluruhnya dikontrol Soeharto lewat sejumlah perwira yang secara pribadi dikenal dan dipercayainya.

Para perwira itu tidak selalu akur antara yang satu dan yang lainnya. Potensi saling bertentangan itu sangat menguntungkan Soeharto. Tentara yang bersatu adalah potensi ancaman bagi kekuasaan otoriter.

Tutut sebagai pemimpin memerlukan tambahan

dukungan dari luar ABRI. Di sana Hartono sebagai "pemimpin" Islam tampaknya diharapkan Presiden Soeharto bisa menjadi pemain penting.

Yang menguntungkan bagi konstelasi politik jika Islam politik dipimpin oleh R. Hartono adalah, kecurigaan dari dalam ABRI kepada Islam kemungkinan besar bisa beranjak minim. Sebab, mereka tahu Jenderal R. Hartono adalah salah seorang dari kalangan mereka juga. Lebih jauh dari itu adalah lebih menguntungkan bagi ABRI jika yang menjadi pemimpin Islam adalah mantan KSAD daripada orang yang mereka tidak tahu tujuan dan konsepsi politiknya. Mungkin begitulah jalan pikiran Bapak Presiden.

Namun, jika kita berbicara dari segi politik, seandainya pada masa transisi pasca-Soeharto ternyata ABRI yang menang mutlak (suatu hal yang tampaknya hampir mustahil) dalam kontes kekuasaan, bukan tidak mungkin akan terjadi perseteruan antara ABRI melawan umat Islam. Hal seperti ini dulu dialami Indonesia pada masa awal pemerintahan Orde Baru dan masa L.B. Moerdani memimpin militer.

Keadaan seperti ini dimungkinkan terjadi kalau keduanya tidak bisa menemukan modus kerja sama. Dalam keadaan demikian, ABRI tentu akan mendapat dukungan kaum sekuler dan golongan non-Muslim yang sekarang ini bersatu dalam kelompok yang dikenal sebagai *Rainbow Coalition* (Koalisi berbagai golongan anti-Soeharto). Akibatnya, Islam akan terpuruk kembali menjadi golongan yang selalu dicurigai, atau terjadi konflik

politik berkepanjangan seperti di Turki akhir-akhir ini. Ini suatu keadaan yang pasti akan terus mengganggu stabilitas politik.

Sebagai mantan KSAD, peranan politik Hartono hanya akan berhasil jika ABRI menyadari pentingnya skenario politik yang akan dimainkan R. Hartono sebagaimana yang direncanakan Soeharto. Skenario politik ini juga barangkali merupakan jalan satu-satunya yang tersedia bagi ABRI dan Tutut untuk memasuki masa pasca-Soeharto tanpa gonjang-ganjing politik yang pada akhirnya hanya akan memperhadapkan militer dengan sipil di satu pihak, dan pembersihan (*purge*) berkepanjangan di dalam tubuh ABRI sendiri, di pihak lain. Yang terakhir ini, pembersihan, kita alami pada masa pasca-Gestapu dengan korban yang cukup banyak.

Dengan terciptanya hubungan kemitraan antara Islam dan ABRI, maka kedua kekuatan utama ini diharapkan oleh Bapak Presiden menjadi soko guru pendukung kepemimpinan Tutut, sebagai pelanjut kekuasaan ayahandanya.

Gus Dur tampaknya mengerti strategi Presiden Soeharto itu. Pada kampanye Pemilihan Umum 1977, Gus Dur bersama Tutut sibuk berkampanye untuk Golkar. Adalah Gus Dur yang menyertai Tutut berkunjung ke berbagai pondok pesantren di Jawa Tengah dan Jawa Timur. Menurut catatan sejarahwan M.C. Ricklefs, dari pertemuannya dengan Gus Dur di Jakarta pada 5 Juli 1997,

> Saat itu, dia [Gus Dur] mengatakan kepada saya bahwa dia bisa membayangkan beberapa skenario yang mungkin bagi masa

> depan Indonesia, dan di hampir semua skenario itu Tutut akan memainkan peranan yang penting. Tutut bukanlah, demikian pernyataan Gus Dur, pribadi yang suka foya-foya seperti dianggap oleh beberapa kalangan, tapi alih-alih seorang yang serius, berkemampuan, dan konstruktif yang mampu berkomunikasi dengan baik dengan para kiai serta merebut hati mereka.

Dengan strategi mempersiapkan putrinya, tampaknya Soeharto berharap mencapai beberapa tujuan sekaligus: Presiden Soeharto merasa aman (ancaman terhadap kepentingan politik dan bisnis keluarganya terhindarkan), gejolak politik pasca-Soeharto bisa dihindari (stabilitas politik dan ekonomi bisa dipelihara), peranan politik ABRI (dengan cara yang lebih canggih, meski terbatas) juga tetap bisa berlangsung. Di atas stabilitas politik seperti itulah, menurut ramalan saya, Presiden Soeharto mengharapkan putrinya kelak bertakhta.[]

Telepon dari Sarwo Edhie

Telepon rumah berdering pada suatu sore pada tahun 1988, istri saya mengangkatnya. "Dari Pak Sarwo," katanya. Saya belum sempat bertanya apa pun, dari rumahnya di Cijantung, Letjen TNI (Purn.) Sarwo Edhie Wibowo sudah langsung bicara. Katanya, "Dik Salim, saya akan kirim Bambang dan beberapa temannya ke rumah Dik Salim. Tolong diajak bicara anak-anak muda itu." Waktu itu Jenderal Sarwo sudah lama meninggalkan profesi militer.

Tidak dijelaskan apa saja yang harus kita bicarakan. Malam harinya, tiga orang perwira muda, semua berpangkat Mayor—siswa Sekolah Staf dan Komando Angkatan Darat (Seskoad)—memasuki halaman rumah saya. Mereka adalah Mayor Infantri Susilo Bambang Yudhoyono (SBY)—yang juga menantu Jenderal Sarwo Edhie—Mayor Infantri Syamsul Maarif, dan Mayor Infantri Edi Budianto. Di ruang tamu yang sempit, selama sekitar dua jam kami bertukar pikiran.

Menurut penuturan SBY kepada saya pada 11 Januari 2013, Pak Sarwo Edhie memang sering berdiskusi dengan menantunya serta kawan-kawan segenerasinya, semua taruna didikan Sarwo Edhie di Akabri.

> Yang dibicarakan utamanya adalah urusan militer dan pertahanan, meskipun terkadang juga berkaitan dengan persoalan negara dan politik. Sesekali teman-teman seperti Syamsul Maarif juga ikut diskusi itu. Nah, dalam salah satu pembicaraan kami, beliau bilang punya sahabat muda yang sering bersama pada masa perubahan politik di awal Orde Baru. Beliau lalu minta kami mendatangi Mas Salim. Almarhum berpendapat perwira masa kini perlu memiliki wawasan lebih luas, bukan melulu mendalami ilmu militer dan pertahanan.

Begitu cerita SBY kepada saya di kantornya di lingkungan Istana Kepresidenan.

Salim Haji Said dan Presiden SBY di Istana.

Pada kesempatan lain, Syamsul Maarif—teman sekelas SBY—menceritakan aktivitas mereka ketika masih menjadi taruna di Akademi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (Akabri) di Magelang dan ketika sudah menjadi perwira muda. Menurut Mayjen TNI Dr. Syamsul,

> Sejak masa taruna pada 1972, kami sering melakukan diskusi-diskusi dengan SBY, Prabowo, dan Agus Wirahadikusuma. Ketika teman-teman pesiar pada hari Minggu, kami sering tetap berada di kampus berdiskusi. SBY dan Prabowo adalah sumber inspirasi kami. Saya hanya pengikut mereka.

SBY membenarkan pernyataan Syamsul. Katanya,

> Kami adalah taruna yang tidak puas dengan keadaan waktu itu. Kami ingin melakukan perubahan ke arah keadaan yang lebih baik. Waktu itu kami masih muda, tapi sudah memikirkan perlunya tentara yang lebih modern dari segi pelatihan, persenjataan, dan doktrin. Nanti waktu berpangkat Kolonel dan kemudian Jenderal, kritik saya adalah Dwifungsi ABRI sudah berjalan terlalu jauh. Dalam sebuah seminar di Seskoad ketika saya sudah menjadi Panglima Daerah Militer di Palembang [Sriwijaya], saya menulis makalah yang berisi koreksi atas implementasi Dwifungsi.

Cerita Syamsul selanjutnya,

> Lewat berbagai diskusi, kami melihat bagaimana hari depan negara dan kemungkinan peran kami di sana. Sebagai taruna, waktu itu saya telah memproyeksikan akan jadi apa kelak. Pada 1998 terjadi diskontinuitas [Reformasi]. Tapi, setidaknya kami waktu itu sudah ada di puncak. SBY, Prabowo, dan Agus Wirahadikusuma, semua sudah bintang tiga. Saya bintang dua. Yang kami capai pada 1998 merupakan usaha yang kami mulai

sejak masa taruna.

Yang tidak kurang menarik dari pengalaman Syamsul adalah perhatian Jenderal Sarwo Edhie kepada para mantan anak didiknya di Akabri. Tutur Syamsul,

> Suatu ketika, saya menjabat posisi Kepala Operasi Detasemen di Bali dengan pangkat Kapten, Pak Sarwo suatu malam menghubungi saya lewat telepon. Perang Teluk sedang berkecamuk di Timur Tengah masa itu. Beliau tanya pendapat saya mengenai perang tersebut. Waktu itu belum ada internet, jadi saya mencari koran dan membaca sebanyak mungkin mengenai Perang Teluk. Pertanyaan mengenai keadaan di Timur Tengah itu menyangkut soal strategis dan politik internasional. Almarhum memang selalu berusaha agar mantan anak didiknya tidak terkungkung dalam suatu kotak perhatian saja.

Pada pertemuan pertama saya dengan tiga anak muda berpangkat Mayor itu, saya tidak lagi ingat apa persisnya yang kami bicarakan. Tapi, menurut SBY,

DOK PRIBADI

Mayjen Dr. Syamsul Maarif, Ketua Badan Nasional Penanggulangan Bencana, bersama KSAD Jenderal Pramono Edhie Wibowo.

> Waktu itu kita bicara banyak hal, antara lain mengenai Dwifungsi. Mas Salim menjelaskan mengenai doktrin Dwifungsi dan sejarahnya. Sebagai militer profesional, saya berpendapat fungsi militer harusnya berkaitan dengan bidang pertahanan dan keamanan. Tapi, bisa saja TNI ikut memikirkan urusan negaranya jika keadaan mengharuskan, meski tidak boleh menghilangkan fungsi utamanya sebagai kekuatan pertahanan dan keamanan.

SBY kemudian bicara mengenai konsep dan kegiatannya pada saat Reformasi. Waktu itu posisinya adalah Kepala Staf Sosial Politik (posisi itu kemudian berubah nama menjadi Kepala Staf Teritorial).

> Sebagai *drafter* konsep Reformasi militer dan Ketua Fraksi ABRI di MPR, dari sekian puluh orang yang bertemu dengan saya, hanya ada dua orang yang sebenarnya bisa saya ajak bicara secara intensif, Cak Nur [Nurcholish Madjid] dan Mas Salim. Waktu itu, kita bertemu berkali-kali. Kadang bertemu bertiga dengan Cak Nur, tapi sering juga berdua saja. Yang Mas Salim sampaikan waktu itu turut menjadi bagian yang mengubah negara. Kita berbicara banyak waktu itu mengenai perlunya perubahan.

Apa saja pengalaman menarik SBY sebagai tokoh Reformasi ABRI?

> Suatu kali saya hadir dalam sebuah pertemuan para jenderal purnawirawan. Mereka semua dari generasi Angkatan 45, beliau-beliau yang dulu berhasil mencapai pangkat bintang tiga dan bintang empat. Salah seorang di antara para pinisepuh itu bertanya kepada saya, "Kamu yang namanya Bambang Yudhoyono?" Jawab saya, "Siap." Mantan Jenderal itu melanjutkan bicaranya. Katanya, "Kamu harus mengerti sejarah.

Tidak ada itu namanya Dwifungsi mau diganti dan ditinggalkan. Itu bagian hidup dari TNI."

Saya jelaskan kepada para senior itu secara persuasif. Intinya, peranan politik tentara dihapuskan, dan itu berarti Dwifungsi berakhir.

Apakah ada Jenderal aktif yang menolak kebijakan meninggalkan Dwifungsi waktu itu?

Ada. Tidak usah saya sebutkan nama mereka. Ketika saya menyusun draf Reformasi ABRI pada awal 1998, saya siapkan daftar pertanyaan tertulis kepada sejumlah perwira tinggi TNI dan Polri. Ada 15 pertanyaan yang saya minta mereka jawab. Saya ingin tahu sikap mereka mengenai hari depan Dwifungsi. Hasilnya, 60 persen setuju perubahan dengan syarat tidak terlalu dramatis. Lima belas persen ingin perubahan yang lebih radikal. Sisanya yang 25 persen mengatakan tidak setuju perubahan. Mereka berpendapat Dwifungsi sudah benar, yang salah adalah implementasinya. Jadi, yang ingin mempertahankan Dwifungsi tetap ada. Tapi, mereka minoritas.

Begitulah, lebih kurang, cerita Doktor Haji Susilo Bambang Yudhoyono dan Dr. Syamsul Maarif mengenai pertemuan pertama kami pada suatu malam di tahun 1988. Ketika catatan ini saya tulis, Mayjen TNI (Purn.) Edi Budianto sudah lama meninggalkan kami semua. Yang saya ingat dari cerita Jenderal Budianto, dia ke rumah saya karena diajak SBY. Katanya, "Untuk belajar politik."

Satu cerita lucu yang tersisa dari pertemuan pertama kami itu bersumber pada Syamsul Maarif. Harapan Syamsul yang dikemukakannya malam itu adalah keinginannya menjadi bupati di kampungnya di sebuah kota kecil di Jawa Timur. Menurut ceritanya, ayah Syamsul adalah seorang Pembantu Letnan Satu (Peltu) dengan kedudukan sebagai Komandan Komando Rayon Militer

(Koramil) di kampungnya. Di mata putra seorang Komandan Koramil, jabatan bupati tentu sudah amat tinggi. Pada masa awal kemiliterannya, tentulah Syamsul belum sanggup membayangkan bakal terjadinya *social upward mobility* yang kelak membuka kesempatan bagi dirinya mencapai pangkat Mayor Jenderal, memegang jabatan Kepala Staf Komando Daerah Militer (Kasdam) Brawijaya di Surabaya, Gubernur Akademi Militer di Magelang, dan akhirnya posisi setingkat menteri dalam urusan penanggulangan bencana (BNPB). "Sebagai anak seorang Peltu, di mata saya waktu itu jabatan Komandan Komando Distrik Militer (Kodim) saja sudah amat tinggi. Apalagi Bupati," kenang Dr. Syamsul Maarif sekian puluh tahun kemudian.[]

“Saya Akan Kembali ke Induk Saya”

Sebagai mahasiswa program doktor pada Ohio State University (OSU), pada Oktober dan November 1984 saya berada di Indonesia mengumpulkan bahan bagi penulisan disertasi saya. Selain harus ke sebuah perpustakaan di Yogyakarta yang menyimpan koran-koran Yogyakarta terbitan zaman Revolusi, saya juga harus mencari bahan di Arsip Nasional, Jalan Ampera Raya, di daerah Kemang, Jakarta Selatan.

Yang tidak kurang penting adalah mewawancarai sejumlah besar mantan jenderal yang berperan pada masa Revolusi dahulu. Paling penting tentulah Jenderal A.H. Nasution, Jenderal T.B. Simatupang di samping Jenderal Soeharto (Presiden waktu itu), Jenderal Kemal Idris, Jenderal Suprayogi, Jenderal Azis Saleh, Jenderal Sumitro, dan banyak lagi lainnya. Karena waktu itu, Jenderal Benny Moerdani berkedudukan sebagai Panglima ABRI, maka dia juga saya wawancarai.

Jenderal (Purn.) A.H. Nasution dan Jenderal (Purn.) T.B. Simatupang.

Sejumlah politisi yang berperan masa itu juga saya mintai keterangan. Mohammad Natsir yang menjabat Menteri Penerangan pada masa kudeta 3 Juli 1946 juga berhasil saya wawancarai. Subadio Sastrosatomo dan Dayino, keduanya orang dekat Sutan Syahrir, juga saya datangi. Demikian juga Sri Sultan Hamengkubuwono IX yang bertahan di Keraton ketika Yogyakarta diduduki Belanda. Pokoknya semua yang bisa menolong saya merekonstruksi cerita hubungan sipil dengan militer dan peranan Panglima Besar Sudirman waktu itu, saya wawancarai. Tentu termasuk pula Jenderal Supardjo Rustam, ajudan Panglima Besar yang sedang menduduki posisi Menteri Dalam Negeri ketika saya mengumpulkan bahan. Tidak ketinggalan Harsono Cokroaminoto yang pernah menjadi penasihat Jenderal Sudirman.

Berbeda dengan kecemasan saya sebelumnya, ternyata tidak sulit mendapatkan keterangan dari para pelaku sejarah tersebut. Bahkan, beberapa di antara mereka bercerita lebih panjang daripada yang saya butuhkan. Mereka seperti ketakutan, pengalaman masa lalu mereka akan hilang begitu saja tak tercatat dan dilupakan. Dari semua janji wawancara yang sudah saya dapat, yang tidak berhasil saya temui langsung adalah Presiden Soeharto. Kegagalan jumpa disebabkan terjadinya kecelakaan motor boat yang menimpa putra bungsunya, Hutomo Mandala Putra (Tommy). Tapi, Pak Harto mengirim pesan agar saya menyampaikan saja

pertanyaan tertulis.

Jawaban terketik rapi saya terima dari pejabat pada Sekretariat Negara (Sekneg) bagian *mass media*, Brigjen TNI Gufron Dwipayana (Dipo). Jelas sekali jawaban yang saya peroleh bersumber pada jawaban lisan yang direkam dan ditranskripsi dengan setia dari ucapan Bapak Presiden. Jawaban itu penting (mengenai Letkol Soeharto sebagai utusan Panglima Besar Sudirman jumpa Muso, pemimpin Partai Komunis Indonesia, PKI, di Madiun, September 1948) pada awal peristiwa Pemberontakan Komunis di kota itu. Sayang tidak bisa saya kutip verbatim karena bahasanya amat rumit. Pokoknya saya mengerti maksudnya. Itu yang penting.

Yang paling menarik dari semua pengalaman mendapatkan informasi para mantan jenderal pejuang itu adalah wawancara dengan Letjen TNI (Purn.) G.P.H. Djatikusumo. Ketika mencoba membuat janji lewat telepon tentang maksud dan topik wawancara, Jenderal Djatikusumo sudah langsung saja memberi penjelasan. "Begini, ya, Saudara, TNI itu organisasi perjuangan. Berbeda dengan ABRI. Kalau ABRI itu alat negara. Saya ini sudah pensiun dari ABRI, tapi tetap anggota TNI. Ini penjelasannya mengapa saya masih ikut memikirkan TNI, ikut bicara mengenai peran politik TNI, berbicara mengenai TNI sebagai milik seluruh rakyat dan bukan milik golongan tertentu."

G.P.H. Djatikusumo ketika masih Kolonel.

Saya tidak bisa memotong beliau yang terus bicara bersemangat tentang TNI dan aktivitas beliau sebagai anggota TNI yang "tidak akan pernah pensiun".

Akibatnya ... saya tidak pernah berhasil bertatap muka dengan Jenderal Djatikusumo, karena sampai beliau selesai melakukan monolog, saya tidak pernah sempat membicarakan waktu dan tempat untuk jumpa. Tapi, pesan dari cerita dan pengalaman saya dengan Jenderal Djati ini menunjukkan sesuatu yang sangat penting, suatu hal yang dalam berbagai cara saya dapatkan juga dari

hampir semua perwira TNI generasi awal itu.

Penjelasan Jenderal Djatikusumo mengandung persepsi generasi Angkatan 45 dalam militer Indonesia terhadap TNI dan masyarakat sekaligus. Bagi tentara dari generasi itu, TNI adalah segala-segalanya. "TNI semua bisa", adalah ucapan populer di kalangan perwira itu ketika secara resmi TNI mendapat peran politik menjelang akhir tahun lima puluhan. Pada 1984, Jenderal L.B. Moerdani pernah mengatakan kepada saya, "Dari perwira TNI Generasi 45 kita bisa dapat apa saja, dari lurah hingga presiden."

Moerdani membedakan antara tentara Generasi 45 dengan mereka yang lulusan Akademi Militer pasca-Revolusi. Yang terakhir ini disebut Benny sebagai *peace time army*, tentara masa damai. Moerdani dipandang dan memandang dirinya sebagai penghubung dua generasi TNI itu.

Sebagai organisasi perjuangan yang menggunakan senjata, TNI bagi mereka adalah kelompok yang konsisten berjuang mempertahankan Indonesia dengan loyalitas tunggal. Suatu hal yang pada zaman Revolusi, masa muda mereka, berbeda dengan partai politik dengan macam-macam ideologi dan kepentingan. Bagi generasi ini, TNI adalah juga organisasi perjuangan yang tidak kenal menyerah dan memang tidak menyerah meski Panglima Tertingginya, Sukarno, seorang sipil, menyerah kepada tentara Belanda di Yogyakarta pada 19 Desember 1948.

Pengalaman melihat pimpinan sipil menyerah sementara mereka masuk hutan bergerilya mewarnai

dengan kental sikap dan cara pandang tentara generasi itu kepada politisi sipil.

Ikatan mereka dengan TNI pasti jauh lebih fanatik dibanding ikatan yang sama antara mereka yang berjuang dalam partai politik dan partai mereka masing-masing. Bagi mereka, TNI adalah *the only game in town.* Inilah latar belakang mengapa Djatikusumo aktif dalam Forum Studi dan Komunikasi Angkatan Darat (Fosko) pada masa Angkatan Darat berada di bawah pimpinan Jenderal TNI Wododo, lama setelah Jenderal Djati pensiun dari dinas militer. Kegiatan Fosko tidak mudah dicegah oleh KSAD. Dengan cara pandang dan dasar pemikiran yang sama, sebagai pejuang, sejumlah mantan perwira TNI juga ikut menjadi penanda tangan Petisi 50, suatu pernyataan kritis terhadap Presiden Soeharto.

Fosko merupakan lembaga yang dimanfaatkan oleh para purnawirawan Angkatan Darat untuk terus memberi masukan dan koreksi kepada Presiden Soeharto, sesama anggota TNI. Sang Presiden tampaknya lama-kelamaan capek menghadapi "kerewelan" teman-teman segenerasinya. Soeharto akhirnya memerintahkan pembubaran Fosko. Dan salah satu akibatnya, usia jabatan KSAD Jenderal Widodo menjadi pendek. Adapun para penanda tangan Petisi 50, lewat tangan Pangkopkamtib Sudomo, mereka "dibunuh secara perdata".

Sebagai ilustrasi guna memperjelas cara pandang TNI terhadap diri serta tempat mereka dalam masyarakat, berikut ini pengalaman saya dengan Mayjen TNI (Purn.) TNI Slamet Danusudirjo. Pernah menduduki macam-

macam jabatan sipil di lingkungan pemerintahan, setelah pensiun Slamet sibuk menulis novel. Sebagai bukan sastrawan profesional, novel yang ditulisnya dengan nama samaran Pandir Kelana, tidak jelek. Jenderal yang novelis ini memang hanya menulis tentang pengalamannya selama masa Revolusi. Dia kenal baik tokoh-tokohnya, lingkungannya, dan persoalan-persoalannya. Karena sumber cerita hanya pengalaman konkretnya, maka suatu kali tidak ada lagi yang masih tersisa untuk diceritakannya. Peran dan kegiatannya sebagai novelis berakhir begitu saja. Ini berbeda dengan "keanggotaannya" dalam TNI yang tidak pernah berakhir.

Yang menarik, meski beberapa novelnya sempat difilmkan (tidak semua penulis beruntung mendapat honor dari penjualan hak film dari novelnya), Jenderal Slamet tidak pernah merasa sebagai sastrawan. Kepada saya, dia pernah mengaku menolak hadir dalam sebuah pertemuan para sastrawan. "Saya ini tentara yang menulis pengalaman zaman perang saja," katanya.

Suatu kali Jenderal Slamet diminta jadi Rektor Institut Kesenian Jakarta (IKJ). Tentu salah satu alasan meminta beliau menjadi kepala sekolah para calon seniman tersebut adalah karena selain kewibawaan beliau sebagi Jenderal diharapkan membantu lebih menegakkan disiplin pada sebuah sekolah seni (pada umumnya seniman memang sulit diajak disiplin), Jenderal Slamet juga seniman (pengarang novel). Ringkas cerita, IKJ diurusnya dengan baik. Dia cukup tahu seniman tidak bisa diatur seperti tentara. Dan sampai beliau pensiun semua berjalan

lancar-lancar saja di IKJ.

Nah, beberapa saat setelah pensiun sebagai kepala sekolah para calon seniman itulah, saya jumpa Pak Slamet di lapangan parkir Taman Ismail Marzuki (TIM). Waktu itu, saya menduduki posisi Ketua Dewan Kesenian Jakarta (DKJ) yang berkantor di kompleks yang sama dengan IKJ. "Apa rencana berikutnya, Pak Slamet?" Jawabnya singkat, "Saya akan kembali ke induk saya." Anda tahu apa yang dimaksud Pak Slamet dengan "induk"? Yah, TNI Angkatan Darat. Persis sama dengan Djatikusumo yang pensiun dari ABRI, tapi tetap merasa anggota aktif TNI.

YANG MENJADI PERTANYAAN dalam kepala saya waktu itu, ke bagian mana di Angkatan Darat Jenderal Slamet kiranya membayangkan dirinya akan kembali? Kalau gambarannya tentang Angkatan Darat itu adalah organisasi perjuangan, keadaan sudah lama berubah. Waktu Jenderal Slamet pensiun dari IKJ, penanggalan sudah menunjukkan penghujung tahun sembilan puluhan. Masa itu TNI sudah nyaris sempurna menjadi alat kekuasaan Presiden Soeharto. Pada 1984, ketika Djatikusumo menyebut TNI organisasi perjuangan, "perlawanan" masih mungkin terdengar suara dari para anggota "organisasi perjuangan" tersebut. Dalam bentuk Fosko, misalnya. Tapi, menjelang tahun sembilan puluhan?

Saya tidak pernah jumpa lagi dengan Jenderal Slamet sejak beliau pensiun dari IKJ. Jadi, saya tidak tahu bagaimana jadinya dengan rencana beliau kembali ke "induk"-nya. Sebagai pengajar pada berbagai sekolah

militer, dan karena itu kenal perwira-perwira TNI waktu itu, saya bisa membayangkan betapa bingungnya perwira dari generasi muda itu menghadapi Jenderal Slamet Danusudirjo yang ingin kembali ke kalangan mereka. Latar belakang mereka berbeda, etos dan motivasi jadi tentara juga lain sama sekali.

DOK. PRIBADI

Mayjen TNI (Purn.) Slamet Danusudirdjo.

Sebagai ilustrasi perbedaan etos tersebut, izinkanlah saya menyampaikan pengalaman saya sebagai Guru Besar pada Universitas Pertahanan Indonesia dalam berhubungan dengan para perwira TNI generasi muda tersebut. Salah seorang di antara mahasiswa kami, seorang kolonel, menulis tesis mengenai orientasi serta pilihan kejuruan di kalangan para taruna Akademi Militer Magelang (Akmil). Temuan dia, mayoritas taruna di Akademi Militer menghindar dari memilih jurusan tempur sebagai karier selepas mengikuti pendidikan di Akademi.

Pada umumnya mereka lebih memilih jurusan bantuan tempur. ”Mereka melihat jurusan tempur bukan profesi

yang memberi harapan hidup di masa depan," kata Kolonel itu menjelaskan tesisnya di depan para penguji. Masa bagi Kopassus sebagai pilihan para taruna, pada era pasca-Reformasi ini sudah hampir tak berbekas, kata sang Kolonel menjelaskan tesisnya lebih jauh. Dalam hati saya, alangkah drastisnya perubahan sikap para calon perwira kita sekarang ini. Saya teringat cerita Letjen TNI (Purn.) Sjafrie Sjamsoeddin yang hanya menulis "Kopasanda" untuk tiga pilihan yang dihadapkan kepadanya ketika masih Taruna Akademi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (Akabri). Pada akhir enam puluhan dan tujuh puluhan, Kopasanda (sekarang Kopassus) memang pilihan utama calon perwira Angkatan Darat.

SEMENTARA ITU, rekan-rekan seangkatan Pak Slamet juga sudah pula berangsur habis dimakan usia. Yang tersisa pun sudah tidak ada waktu untuk memikirkan balik ke "induk". Induk yang lama, rumah yang mereka bangun dan tempat bernaung sejak zaman Revolusi sudah berangsur hilang sejak generasi itu tiba pada puncak kekuasaan setelah runtuhnya kekuasaan Sukarno dan bangkitnya rezim Soeharto yang bertahan hingga 30 tahun.

Pengalaman Jenderal Djatikusumo dan Jenderal Slamet adalah pengalaman para perwira TNI Angkatan 45, terutama yang memelihara cita-cita dan kemurnian semangat lama yang bersemi ketika mereka masih berusia muda di bawah pimpinan Panglima Besar Sudirman serta bertahun-tahun di bawah Jenderal Nasution di tahun lima

puluhan.

Djatikusumo maupun Slamet adalah dua dari sejumlah Jenderal yang setia hingga terakhir terhadap semangat dan sikap masa muda sebagai pejuang yang memilih TNI sebagai organ perjuangannya. Inilah penjelasannya mengapa orang-orang ini mengalami alienasi dari "induk"-nya secara perlahan-lahan. Hingga akhirnya mereka tampil seakan makhluk yang agak aneh pada masa tuanya.

Sebagai seorang peneliti peran politik tentara yang berkenalan dengan banyak perwira TNI sejak 1965, dan kemudian mengajar banyak perwira generasi muda sejak awal tahun sembilan puluhan, saya dengan mudah melihat perbedaan para perwira dua generasi ini. Bagi Generasi 45, TNI adalah rumah tunggal yang mereka bangun bersama, sehingga ketika harus meninggalkan dinas militer pada umumnya mengalami rasa kehilangan yang amat besar.

Bagi generasi muda, TNI adalah sebuah pilihan di antara banyak kemungkinan pilihan lainnya. Dan pada umumnya selama berada dalam "induk" pilihan itu, mereka menyiapkan diri untuk berpindah ke "induk" lain setelah purnatugas nantinya.

Tidak banyak di antara anggota Generasi 45 itu pada masa pensiun dari dinas militer menyadari bahwa secara perlahan lembaga yang mereka tinggalkan telah mengalami modifikasi, baik oleh teman mereka yang berkuasa lama maupun oleh penghuni baru, generasi adik dan anak-anak mereka. Dan "induk" masa lalu itu pun berangsur menyelinap ke dalam ingatan dan tinggal di

sana sebagai kenangan yang wujudnya di lapangan menghilang secara cepat.

Dengan latar belakang seperti itulah, Jenderal Slamet pada masa tuanya merindukan kembali "induknya" yang sebenarnya telah hilang. Sedihnya pula, kesempatan punya dunia lain, "induk lain", sastrawan misalnya, tidak pula berkenan buat perasaannya. Dalam keadaan demikian, risikonya memang kesepian.

Ikatan dengan "induk" bagi para generasi awal TNI ini memang luar biasa kuatnya. Saya masih punya kisah lain tentang itu. Ketika berada di Negeri Belanda pada 1969-1970, saya mendengar cerita menarik tentang Letjen (kehormatan) Dr. T.B. Simatupang yang pernah diundang ke Holland dalam kedudukannya sebagai salah seorang pemimpin gereja sedunia. "Simatupang datang sebagai tokoh gereja, tapi ternyata dia lebih banyak bicara mengenai TNI dan peran TNI yang penting dalam menyelamatkan Indonesia," kata seorang petinggi gereja Belanda kepada kami, beberapa wartawan Indonesia yang sedang *training* di Amsterdam waktu itu.

Ketika berada dan berbicara di Negeri Belanda itu, Simatupang sudah keluar dari dinas militer selama sekitar 17 tahun. Simatupang adalah Jenderal Mayor (setingkat Brigjen sekarang) pertama TNI selepas Belanda meninggalkan Indonesia pada 1950. Pangkat itu diperolehnya karena kedudukannya sebagai Kepala Staf Angkatan Perang (KSAP). Berada dalam Angkatan Bersenjata selama tidak lebih dari 9 tahun, Simatupang pensiun dini setelah jabatannya sebagai KSAP dihapuskan

Menteri Pertahanan Iwa Kusuma Sumantri pada 1953. Bayangkan mereka yang sepanjang hidup, dari zaman Revolusi hingga pensiun, terus menerus berada dalam TNI.

Sekian tahun setelah pensiun dari tentara, Jenderal Nasution pernah ditawari memimpin sebuah organisasi Islam. Mungkin karena pimpinan organisasi itu melihat Simatupang yang Kristen menjadi tokoh gereja, lalu juga berharap Nasution—yang terkenal saleh dan taat menjalankan ibadah—bersedia juga menjadi tokoh pemimpin organisasi Islam. "Kenapa Pak Nas menolak?" tanya saya kepada jenderal Indonesia pertama yang mencapai pangkat bintang empat itu. "Saya ini dari dulu TNI saja. Seluruh hidup saya di sana. Susah berganti organisasi."

MESKI PERBEDAAN MEREKA tidak sebesar dengan perbedaan antargenerasi, Angkatan 45 dengan generasi muda pasca-Revolusi, tapi menarik juga melihat perbedaan yang ada antara generasi muda senior dan yang junior. Tergolong senior adalah mereka yang generasi Akademi Militer Magelang, tapi berkesempatan menjadi bawahan perwira Generasi 45, sedangkan yang junior adalah sisanya yang lebih muda. Pengaruh "semangat" yang diwariskan oleh senior mereka masih sering terlihat. "Semangat" yang ditanamkan Jepang kepada mereka yang berlatih dalam Peta (Pembela Tanah Air) mempunyai "mistik" yang tidak dikenal oleh tentara profesional yang tumbuh dan terdidik secara rasional dan

profesional seperti para perwira TNI generasi baru.

Inilah yang menjelaskan mengapa makin lama makin susah membedakan perwira-perwira Indonesia masa kini dengan perwira-perwira negara lain. Tentara profesional mempunyai standar internasional, dan tentara semua bangsa mengacu ke sana. Ini juga berarti bahwa TNI makin lama makin tidak unik sebagaimana yang suka dikampanyekan oleh perwira Angkatan 45 ketika masih berkuasa dulu. Mereka yang Generasi 45 dulu itu memang unik, tapi keunikan itu tidak mungkin seluruhnya diwariskan kepada generasi berikutnya. Tantangan yang dihadapi setiap generasi berbeda, jawabannya juga berlainan. Tapi, para senior itu tetap saja bertekad mewariskan pengalaman dan nilai-nilai mereka kepada generasi muda TNI.

Dalam rangka pewarisan nilai-nilai tersebut, suatu kali saya diundang hadir dalam sebuah pertemuan kecil di Lemhannas. Di sana hadir para perwira Angkatan 45, waktu itu sebagian besar sudah purnawirawan meski beberapa di antara mereka masih menduduki jabatan-jabatan pemerintahan. Di antara mereka saya ingat hadir Jenderal Cokropranolo, Jenderal Ahmad Tahir, dan Jenderal Hasnan Habib. Juga hadir sejumlah perwira lulusan Akademi Militer Magelang. Para Pejuang 45 itu bicara banyak dalam mengarahkan para junior mereka berdasarkan semangat dan pengalaman masa lalu.

Di tengah-tengah wejangan para tetua itu, saya memberanikan diri angkat tangan. Ketika saya diizinkan bicara, inilah yang saya katakan: “Apakah Bapak-Bapak ini

tidak meminta terlalu banyak dari para perwira generasi muda ini? Nilai-nilai yang membentuk Bapak-Bapak semua adalah hasil dari sebuah proses menjawab tantangan-tantangan yang Bapak semua hadapi secara pribadi maupun secara kelompok di zaman Jepang serta masa Revolusi dulu. Zaman itu sudah lewat dan tantangan yang dihadapi para junior ini juga lain sama sekali."

Saya sudah lupa apa jawaban para senior tersebut. Tapi di luar ruangan, seorang perwira generasi muda, seorang berpangkat Brigjen, menyalami saya sambil berkata, "Anda bebas mengucapkan itu, kami tidak bisa," katanya sambil senyum.

Satu lagi yang membedakan para perwira Generasi 45 dengan generasi perwira TNI masa kini. Ketika para senior itu dulu mulai memasuki masa purnawira (pensiun), mereka masih potensial menjadi kekuatan yang kadang merisaukan Soeharto. Lewat Fosko, misalnya, G.P.H. Djatikusumo—dan teman-temannya yang sudah lama memasuki masa purnawira—masih faktor yang harus diperhitungkan Soeharto. Djatikusumo dan para jenderal segenerasinya masih punya hubungan dan bahkan pengaruh kepada mantan anak buah yang masih ada dalam jajaran militer aktif. Ini adalah akibat hubungan antara anak buah dan bapak buah yang khas dan hanya berkembang pada masa Revolusi.

Tentara yang menciptakan dirinya sendiri (*self-created army*) seperti TNI, mencari senjata dan logistiknya sendiri dan para perwiranya mencari bintara dan tamtamanya sendiri juga. Akibatnya adalah berkembangnya hubungan

patron-client yang erat dan berlangsung lama antara pimpinan dan bawahan (anak buah dengan bapak buah). Hubungan dan ikatan seperti ini pada umumnya berlangsung sampai jauh memasuki masa pensiun mereka semua. Saya teringat pada para pegawai di perusahaan dagang Jenderal TNI (Purn.) Sumitro yang umumnya terdiri dari para mantan anak buahnya pada zaman bergerilya di Jawa Timur pada masa Revolusi.

Sebaliknya dengan generasi perwira masa kini, semua sudah disediakan negara, dari pendidikan, peralatan, logistik, dan anak buah. Sehingga setelah mereka pensiun, urus diri sendiri masing-masing saja. Keadaan seperti inilah yang tidak memudahkan tampilnya "orang kuat" dalam militer Indonesia pascapensiunnya Angkatan 45.

SEKIAN TAHUN KEMUDIAN, saya membaca buku *Lee Kuan Yew: The Hard Truths, To Keep Singapore Going*. Ini adalah kumpulan wawancara mantan Perdana Menteri dan Bapak pendiri Republik Singapura itu mengenai bagaimana mengelola negara kota tersebut. Lee Kuan Yew adalah penggagas pembayaran gaji mahal bagi pejabat tinggi Singapura. Negara kota itu memang tercatat sebagai membayar paling tinggi pejabat pemerintahannya, sehingga gaji Perdana Menteri Singapura tergolong paling tinggi di antara pemimpin pemerintahan di seluruh dunia. Formulanya adalah membayar para eksekutif pemerintahan setinggi gaji pemimpin perusahaan swasta. Dengan cara ini, Singapura

bisa bersaing dengan perusahaan swasta dalam mendapatkan kader terbaik untuk mengelola negara.

Pada awal kebangkitan Singapura sebagai negara, generasi Lee mempertaruhkan jiwa mereka bagi survival negeri yang menghadapi dua tantangan: terusir dari Federasi Malaysia dan ancaman Komunis di dalam negeri. Pengalaman para pendiri Singapura itu tidak banyak berbeda dengan tantangan generasi Angkatan 45 kita. Mereka semua tidak punya banyak pilihan. "Apakah generasi penerus akan berbuat sama seperti kami dulu?" tanya Lee. "Tidak. Mereka sekarang punya banyak pilihan. Anda memerlukan sebuah revolusi untuk mendapatkan pemimpin seperti generasi saya dulu," kata Lee menjelaskan. "Anda tidak mungkin mereproduksi motivasi yang sama pada generasi berikut. Kondisi sudah berbeda. Tiap generasi berbeda."

Maka, agar Singapura bisa bertahan di tengah berkembangnya bisnis besar di pulau itu, para pembesarnya harus mereka bayar mahal. Kalau tidak, tenaga-tenaga terampil sebagian besar akan memilih jadi pejabat tinggi di berbagai usaha bisnis, dan besar kemungkinan hanya mereka yang bermutu rendah yang akan bekerja di kantor pemerintah.

Memang tidak rasional dan juga tidak *fair* mengharapkan anak-anak generasi sekarang berkorban secara tanpa pamrih membaktikan diri kepada negara seperti Generasi 45 dulu.[]

ABRI Menjelang Perubahan: Sekadar Masukan

Kesempatan secara teratur mengajar di Sekolah Staf Gabungan ABRI (Seskogab, sekarang Sesko TNI), Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas), Sekolah Staf dan Komando Angkatan Laut (Seskoal), serta sering memberi ceramah atau berseminar di Sekolah Staf dan Komando Angkatan Darat (Seskoad), memberi banyak kesempatan kepada saya berkenalan dan bertukar pikiran dengan para perwira menengah dan para Jenderal TNI mengenai perkembangan politik Indonesia dan prospeknya serta peranan politik tentara.

Naskah di bawah ini ditulis atas dorongan beberapa jenderal selepas saya berdiskusi dengan mereka. Saya tulis naskah ini pada pertengahan 1997 dan disampaikan kepada Jenderal Feisal Tanjung, Panglima ABRI, oleh Kolonel Syarifuddin Tippe, staf pribadi Panglima, yang kebetulan menjadi mahasiswa saya di Universitas Jayabaya masa itu. Di kemudian hari, Letjen TNI Dr. Syarifuddin Tippe menjadi Rektor di Universitas Pertahanan (Unhan) Indonesia, tempat saya mengajar Ilmu Politik.

Beberapa jenderal kemudian mengaku membaca

naskah saya itu. "Ini kalian baca," konon kata Feisal Tanjung kepada sejumlah jenderal setelah naskah itu diperbanyak di Mabes ABRI. Letnan Jenderal TNI (Purn.) Sjafrie Sjamsoeddin bahkan mengaku masih menyimpan naskah tersebut sampai sekarang.

Dengan sedih harus saya katakan bahwa Panglima Feisal Tanjung maupun Panglima Wiranto, yang menggantikannya, tidak pernah dimungkinkan berbuat sesuatu bagi perbaikan posisi dan kebijakan ABRI hingga datangnya Reformasi.

Seperti telah saya uraikan di berbagai tempat dan di berbagai kesempatan, sejak mencopot Jenderal TNI L.B. Moerdani secara mendadak dan melakukan de-Benny-isasi setelah itu, Soeharto tidak lagi percaya sepenuhnya kepada siapa saja yang ditunjuknya menjadi Panglima ABRI. Panglima ABRI yang sebenarnya sejak Benny dicopot adalah Soeharto sendiri. Keadaan ini banyak persamaannya dengan tahun-tahun terakhir kekuasaan Presiden Sukarno.

Setelah Jenderal Nasution "ditendang ke atas", pimpinan ABRI pada masa Orde Lama itu "dijabat" oleh Panglima Tertinggi in function. Sukarno menggunakan istilah itu untuk menguasai tentara. Soeharto yang memang seorang Jenderal, mengontrol tentara tanpa istilah. Sukarno, seorang sipil yang gemar berseragam militer, memerlukan pembenaran untuk menguasai tentara. Tapi pada akhirnya praktik mereka sama, menguasai atau berusaha menguasai tentara. Soeharto berhasil, karena itu bertahan lama. Sukarno gagal, karena itu cepat terjungkir.

Inilah naskah untuk Panglima Feisal Tanjung tersebut.

DOK. KOMPAS

Panglima ABRI
Jenderal TNI Feisal Tanjung, 1987.

SIAPA SAJA YANG DENGAN SAKSAMA mengamati politik Indonesia sekarang pastilah sulit untuk tidak setuju bahwa sebuah perubahan politik bakal terjadi dalam waktu yang tidak terlalu lama lagi. Ada dua gejala yang menjadi tanda makin dekatnya perubahan itu. **Pertama,** usia kepala negara yang sudah di atas 70 tahun, suatu usia yang berada jauh di atas umur rata-rata yang bisa dicapai manusia Indonesia. Dan kekuasaan sang Presiden tersebut selama ini lebih banyak ditentukan oleh karisma pribadinya, kontrolnya atas militer serta kecanggihan politiknya dalam memanfaatkan berbagai institusi yang mendukungnya.

Kedua, maraknya gejolak masyarakat sebagai akibat makin dirasakannya ketidakpastian hukum, kesenjangan sosial-ekonomi, serta terasa terus menyempitnya ruang gerak masyarakat dalam ikut menentukan hari depan

mereka sebagai warga negara. Gejala kedua ini makin mengemuka oleh makin vokalnya masyarakat—terutama generasi mudanya—dalam hampir semua sektor kehidupan.

Generasi muda adalah mereka yang menikmati perbaikan kualitas hidup sebagai akibat pembangunan yang dilakukan Orde Baru 30 tahun terakhir ini. Sebagai akibat dari suksesnya Orde Baru meningkatkan kualitas hidup sebagian besar anggota masyarakat, mereka kini berada dalam era *revolution of rising demand*. Kemakmuran menaik yang mereka nikmati justru membuat mereka menuntut lebih banyak lagi.

Keadaan inilah yang menyebabkan stabilitas yang selama ini kita bangga-banggakan menjadi hal yang tidak lagi bisa dipertahankan. Stabilitas yang dulu menjadi landasan pembangunan kini telah kelihatan hasilnya dengan baik, tapi justru karena itu diperlukan suatu stabilitas baru, lantaran stabilitas lama sudah berhasil menyelesaikan tugasnya dan kini terasa dan terlihat tidak memadai lagi.

Secara garis besar dapat disimpulkan, stabilitas yang dulu dibangga-banggakan itu kini telah berangsur luntur oleh merajalelanya tiga hal yang berlangsung di atas landasan stabilitas tersebut:

- penyalahgunaan kekuasaan,
- iklim yang korup,
- kebijakan (*policy*) yang buruk.

Penyalahgunaan kekuasaan terjadi karena kekuasaan

negara yang terlalu besar, sementara perkembangan kekuatan masyarakat sangat lambat. Dua faktor penyebab keadaan ini: **pertama**, secara kultural kita mewarisi tradisi negara tradisional yang kuat terhadap kawulanya dan negara kolonial yang amat perkasa terhadap anak jajahannya; **kedua**, pembangunan kita selama ini memang masih lebih menekankan pertumbuhan dan belum serius dengan pemerataan. Padahal tanpa pemerataan, yang terjadi adalah konsentrasi kekayaan pada sejumlah kecil orang yang menjadi kaya oleh koneksi, bahkan kolusi dengan penyelenggara negara.

Orang yang menjadi kaya oleh koneksi dan kolusi itu akan selalu sangat bergantung kepada negara. Orang-orang seperti inilah yang secara mati-matian mempertahankan *status quo*.

Iklim yang korup adalah akibat kekuasaan yang amat besar, terpusat, dan tak terkontrol oleh masyarakat yang masih lemah. Dalam keadaan demikian, mereka yang dipercayai mengelola negara mempergunakan kesempatan seluas-seluasnya untuk mendapatkan keuntungan sebesar-besarnya bagi kepentingan diri dan kelompok mereka sendiri. Mereka yang mestinya bekerja sebagai abdi masyarakat akhirnya hanya menjadi abdi negara (Korpri adalah "Abdi Negara", bukan abdi masyarakat) dan kepentingan negara adalah apa yang pada umumnya mereka tafsirkan sesuai dengan *interest* mereka yang berkuasa.

Kebijaksanaan yang buruk terkait langsung kepada kekuasaan yang sangat terpusat (tak terkontrol dengan

semestinya) pada negara yang dilaksanakan oleh aparatnya. Dalam keadaan demikian, aparat pemerintah bisa dengan gampang membuat aturan (*policy*) tanpa harus berpikir berkali-kali mengenai dampaknya kepada masyarakat, sebab masyarakat toh tidak mempunyai kekuatan menentangnya.

Iklim yang korup adalah akibat langsung dari kekuasaan terkonsentrasi di tangan negara. Mereka yang mengelola negara bukan saja punya banyak peluang membuat kebijakan yang buruk, melainkan bahkan juga mendapat kesempatan memperkaya diri dan pengikut-pengikutnya karena mereka memiliki kewenangan besar yang didapatkannya sebagai pengelola negara yang amat kuat dan lalu membuat kebijakan yang menguntungkan diri dan kelompok mereka.

Penyalahgunaan kekuasaan, kebijakan yang buruk, serta iklim yang korup, secara bersama menciptakan keresahan dalam masyarakat. Keresahan itu timbul oleh makin meluasnya di dalam masyarakat perasaan tidak diperlakukan dengan adil secara **ekonomis** (monopoli dan kesempatan luas bagi pengusaha keturunan Cina), **politis** (suara rakyat tak diperhatikan), maupun secara **legal** (pengadilan yang selalu menguntungkan yang kuat).

Masyarakat Indonesia yang makin sadar politik, makin lama makin tahu bahwa penderitaan yang mereka alami—diperlakukan secara tidak adil—adalah pertanda telah terjadinya pelanggaran terhadap kedaulatan rakyat oleh pemerintah dan aparatnya. Keresahan itulah yang merupakan lahan subur bagi terjadinya berbagai

kerusuhan yang akhir-akhir ini melanda Indonesia (27 Juli 1996 di Jakarta, Peristiwa Situbondo dan Huru-Hara Tasikmalaya).

ABRI dan Stabilitas

Semua orang yang secara saksama mengamati politik Indonesia dewasa ini tahu bahwa stabilitas yang menjadi tumpuan pembangunan Indonesia selama ini tercapai oleh kerja keras ABRI. Adalah ABRI yang menciptakan dan memelihara stabilitas itu. Kalau analisis di atas bisa diterima, maka ABRI sebenarnya kini dituntut lagi menciptakan stabilitas baru untuk menjadi landasan pembangunan dalam Pembangunan Jangka Panjang (PJP) II. Berbeda dengan keadaan pada awal PJP I (awal Orde Baru) tatkala peranan ABRI sangat menonjol pada periode pasca-Gestapu/PKI, sementara peranan masyarakat masih sangat rendah, kini masyarakat Indonesia mempunyai potensi yang jauh lebih meningkat.

Seperti dikatakan pada awal dokumen ini, pembangunan Orde Baru telah menciptakan sejumlah orang yang kritis dan selalu mempertanyakan haknya dalam negara yang berdasarkan kedaulatan rakyat ini. Jumlah orang kritis ini terus berkembang dan makin tidak mudah diabaikan. Golongan ini harus diperhitungkan oleh ABRI dalam usahanya menciptakan stabilitas baru tersebut.

Yang juga membedakan keadaan sekarang dengan keadaan pada awal Orde Baru ialah faktor ekonomi. Orde Baru mewarisi dari rezim Presiden Sukarno ekonomi yang

nyaris lumpuh . Kini Indonesia mempunyai ekonomi dengan *magnitude* yang besar (bahkan, dilengkapi dengan pasar modal). Faktor ekonomi ini mempunyai dinamikanya sendiri dalam rangka perubahan politik nanti. Dinamika itu haruslah diperhitungkan ABRI dalam usahanya menciptakan stabilitas baru tersebut. Tanpa dengan saksama memperhitungkan faktor ekonomi ini, pembangunan bukan tak mungkin terkorbankan, lalu kita harus mulai dari bawah lagi.

Namun, ABRI juga harus waspada agar dimensi ekonomi ini tidak mendikte ABRI. Perlu diingat bahwa kita sebagai bangsa belum pernah mengalami perubahan politik dengan faktor ekonomi yang begitu menonjol seperti sekarang. Kalau ABRI kurang waspada, maka bisa terjadi stabilitas yang diciptakannya bukan stabilitas sejati, melainkan stabilitas semu yang hanya menguntungkan para pemilik modal yang memperalat ABRI untuk kepentingan mereka sendiri.

Perbedaan lain antara awal Orde Baru dan sekarang adalah pada lingkungan strategis. Pada awal Orde Baru, Indonesia masih berada dalam era Perang Dingin. Waktu itu cerita tentang HAM belum lagi terdengar, bahkan kubu Barat maupun Timur sama-sama mendukung rezim otoriter dan campur tangan militer dalam politik dengan alasan dan kepentingan masing-masing. Perang Dingin kini telah jadi objek tontonan dalam museum. Dunia tidak lagi menoleransi otoritarianisme, bahkan keterlibatan militer dalam politik makin lama makin dianggap sebagai suatu barang kuno sisa masa Perang Dingin yang harus

secepatnya disingkirkan.

Kenyataan internasional ini mempunyai gaung yang makin kuat di dalam negeri. Di kampus-kampus kita sekarang para aktivis sering terdengar mempersoalkan Dwifungsi, dan militer mereka anggap tidak pantas menjamah politik. Keadaan ini semua tidak bisa dianggap sepi begitu saja oleh ABRI. Di sini ABRI ditantang membuktikan kehadirannya selaku kekuatan sosial politik sebagai betul-betul diperlukan untuk mengamankan dan memperlancar perubahan politik ke arah terciptanya sebuah stabilitas baru bagi kelanjutan pembangunan bangsa. Dengan kata lain, ABRI tidak bisa lagi terus-menerus hanya menggunakan pembenaran sejarah, legitimasi filosofis, dan legitimasi hukum sebagai pembenaran keterlibatan sosial politiknya.

Hari Depan Dwifungsi

Sementara itu, bagaimanapun tajamnya kritik terhadap peranan sosial politik ABRI, dalam waktu dekat ini belum begitu terlihat kemungkinan ABRI melepas peranan sosial politiknya. Bahkan kritik terhadap peranan sosial politik ABRI dalam konteks Indonesia akhir-akhir ini justru harus dilihat sebagai cambuk yang melecut perlunya penyesuaian implementasi Dwifungsi terhadap perkembangan masyarakat Indonesia.

Menyadari perkembangan dan perubahan masyarakat Indonesia serta perubahan lingkungan strategis pasca-Perang Dingin, maka ABRI yang mungkin akan tetap mempunyai peranan dalam proses perubahan politik yang

aman dan penciptaan stabilitas baru, seharusnya segera memikirkan sikap dan serangkaian kebijakan yang diperkirakan bisa menjamin peranan sosial politik ABRI agar ABRI nanti bisa tampil secara elegan, terhormat, terencana, dan akseptabel. Terencana di sini harus berarti mempunyai strategi yang bertolak dari realitas sosial politik dan tidak menempatkan ABRI sekadar sebagai lembaga pemadam kebakaran.[]

Tentang Tiga Jenderal Besar

Pada waktu Jenderal (TNI) Wiranto menerima pimpinan Angkatan Darat dari tangan Jenderal (TNI) Hartono lewat suatu upacara timbang terima di halaman Markas Besar Angkatan Darat, saya duduk di barisan kedua para tamu VIP. Di depan saya duduk Jenderal TNI (Purn.) AH Nasution, sementara di samping saya ada Mayor Jenderal TNI Fachrul Razie, waktu itu Gubernur Akademi Militer di Magelang.

Selesai upacara resmi, Wiranto dan istrinya mendatangi Nasution untuk memberi salam. Ketika Wiranto membungkukkan badan mencium tangan Nasution, saya tiba-tiba melihat suatu kesinambungan yang menarik. Menurut catatan, Wiranto lahir pada 1948, tahun ketika Nasution sebagai Panglima Komando Jawa sedang memimpin perang gerilya di Pulau Jawa. Sebagai seorang peneliti politik militer, kenyataan yang menarik itu merangsang perasaan dan pergolakan pemikiran dalam diri saya. Dari pergolakan itu gagasan yang lahir adalah pantasnya Nasution menjadi Jenderal bintang lima [Jenderal Besar]. Memang aneh, dan tidak bisa saya jelaskan sampai sekarang mengapa lahir pemikiran dan gagasan demikian pada saat itu. Muncul begitu saja.

Mungkin tidak terlalu salah untuk mengatakan bahwa waktu itu saya lebih menjadi seorang seniman dan sejarahwan tinimbang seorang ilmuwan politik yang mempelajari peran politik militer Indonesia.

Ketika tiba acara ramah tamah, saya membicarakan gagasan mendadak saya itu dengan dua jenderal, Sayidiman Suryohadiprojo dan Zaini Azhar Maulani. Keduanya bersimpati kepada gagasan tersebut. Sayidiman menyarankan menuliskannya di media, tapi Maulani meyakinkan saya bahwa kalau dipublikasikan sebelumnya, Soeharto pasti tidak akan setuju. Saya kemudian berpikir, Soeharto jelas akan menolak juga kalau Nasution dihargai lebih tinggi daripada sang Presiden. Akhirnya saya sampai pada kesimpulan. Gagasan orisinal saya itu hanya bisa terwujud kalau Soeharto juga mendapat bintang lima. Tapi, lalu apa dasar pemberian itu? Setelah berhari-hari berpikir, saya menemukan jalan keluar. Untuk itu, Panglima Besar Sudirman juga harus dianugerahi bintang lima. Alasan yang dipakai adalah peran mereka bertiga dalam Dwifungsi. Tapi, kepada siapa gagasan itu harus saya jual supaya bisa menjadi kenyataan?

Teman baik saya, Letnan Jenderal TNI Syarwan Hamid, Kepala Staf Sosial Politik ABRI waktu itu, menawarkan bantuan mempertemukan saya dengan Jenderal TNI Feisal Tanjung, Panglima ABRI. "Ya, talk to him,*" kata Maulani. Ketika gagasan tersebut saya sampaikan kepada Feisal pada awal Agustus 1997, beliau ternyata tertarik. "Tolong tuliskan dasar*

pertimbangannya," kata Jenderal Tanjung. Pada 6 Agustus, saya kirimkan dasar pertimbangan untuk gagasan saya itu. Sore harinya saya berangkat ke Nigeria membawa rombongan Dewan Kesenian Jakarta. Kami mampir dan mengadakan pertunjukan di Kairo sebelum melanjutkan perjalanan ke Lagos.

Ketika balik ke Jakarta, beberapa hari kemudian, saya kebetulan jumpa Akbar Tanjung, salah seorang tokoh Golkar. "Eh, kabarnya nanti Pak Harto dan beberapa Jenderal akan menjadi Jenderal bintang lima," katanya kepada saya. Berita itu tidak saya komentari. Saya kemudian menelepon Nurdin, mantu Jenderal A.H. Nasution. "Kami juga mendengar kabar itu. Tapi, kita lihat saja nanti," katanya.

Singkat cerita, pada Hari Angkatan Bersenjata, 5 Oktober 1997, Soeharto dan Nasution sudah memakai bintang lima di pundak masing-masing. Saya berada di Hanoi waktu itu. Tapi, Jenderal Maulani menceritakan kemudian bagaimana bintang lima itu telah menimbulkan keakraban serta rasa sukacita pada Nasution dan Soeharto. "Seperti tidak pernah terjadi apa-apa di antara keduanya," kata Maulani.

Nah, naskah di bawah ini adalah dasar pertimbangan yang saya tulis atas permintaan Pangab, Jenderal TNI Feisal Tanjung waktu itu.

PADA SUATU hari di bulan Agustus tahun 1945, sebuah negara lahir di Kepulauan Nusantara. Tapi, diperlukan waktu hampir dua bulan sebelum pada akhirnya kabinet

negara baru itu pada 5 Oktober memutuskan untuk membentuk tentara. Dalam masa antara lahirnya negara dan terbentuknya tentara itulah para pemuda di berbagai penjuru Indonesia bangkit merebut senjata dari musuh, mempersenjatai diri, dan membentuk pasukan-pasukan guna mempertahankan negara yang baru lahir itu.

Ketika kumpulan pemuda bersenjata itu memilih sendiri pemimpinnya pada November 1945 di Yogyakarta, yang mereka pilih adalah seorang mantan Daidancho (Komandan Batalion) yang sebelumnya adalah salah seorang pimpinan Pemuda Muhammadiyah Karesidenan Banyumas, Jawa Tengah. Orang itu bernama Sudirman, dan nama kedudukan yang diberikan oleh para pemuda yang memilihnya adalah Panglima Besar Tentara.

Boleh jadi karena komunikasi antara Jakarta—pusat pemerintahan—dan Yogyakarta—tempat kedudukan pimpinan tentara—begitu buruk pada awal masa Revolusi itu, mungkin juga karena para politisi di Jakarta tidak senang dipaksa pemuda menerima Sudirman sebagai pemimpin tentara, maka diperlukan waktu lebih sebulan sebelum akhirnya Kabinet Sutan Syahrir mengakui Sudirman sebagai Panglima Besar Tentara pada Desember 1945.

Sebagai Panglima Besar yang dipilih oleh anak buahnya, dan tahu bahwa pemerintah tidak terlalu bahagia dengan dirinya sebagai pemimpin tentara, mantan Daidancho Sudirman ini melihat kepada anak buahnya sebagai *constituent* bagi peranannya dalam perjuangan mempertahankan Republik Indonesia.

Dengan sikap seperti inilah, Sudirman dan pasukannya—yang kemudian dikenal sebagai Tentara Nasional Indonesia (TNI)—mengembangkan sikap politiknya tersendiri. Sikap politik ini menjadi makin mendapatkan bentuk di tengah-tengah pertikaian seru antara partai oposisi melawan partai pemerintah dalam sebuah sistem yang kini sering dikenang dengan pahit sebagai zaman liberal.

Sudirman dan para pemimpin tentara yang lebih mengutamakan keselamatan negara dari ancaman tentara kolonial Belanda, menganggap terlalu mewah pertikaian politik yang melanda kaum sipil ketika musuh sudah berdiri di ambang pintu dan setiap saat siap menyerbu. Sikap pemerintah yang cenderung mencoba jalan damai dengan cara berunding dengan musuh, juga menjadi pokok masalah yang menciptakan jarak antara tentara dan kabinet.

Namun, Sudirman tidak selalu menarik garis batas pemisah antara tentara dan pemerintah, meski ada masa ketika Panglima Besar ikut bersama pemimpin oposisi, Tan Malaka, dalam rapat yang mengecam pemerintah. Ketika Jenderal Darsono, misalnya, melakukan percobaan perampasan kekuasaan di Istana Yogya pada 3 Juli 1947, Sudirman menolak mendukung anak buahnya itu. Tapi, ketika Komunis berontak pada 1948, Sudirman segera melaksanakan perintah Perdana Menteri Hatta menyerang Madiun.

Sebelum orang-orang Komunis bikin negara sendiri di Madiun, Mohammad Hatta merasionalisasikan tentara

sebagai konsekuensi Perjanjian *Renville,* yang sebelumnya telah ditandatangani oleh Perdana Menteri Amir Syarifuddin. Belajar dari sejarah penipuan dan pengkhianatan Belanda terhadap Pangeran Diponegoro, Sudirman tidak ingin tentaranya diperkecil ketika Belanda makin menjepit wilayah Republik yang terus mengecil hingga tinggal bagaikan selembar "daun kelor". Sudirman menolak rasionalisasi tentara. Dan Hatta tidak bisa berbuat banyak.

Firasat Panglima Besar ternyata tidak meleset, Belanda kemudian menyerang dan menduduki wilayah Republik pada 19 Desember 1948. Pada jam-jam terakhir sebelum jatuhnya Yogyakarta, Sudirman yang berparu-paru sebelah, menolak tawaran Presiden Sukarno untuk tinggal di Yogyakarta agar bisa dirawat oleh dokter pasukan Belanda. Setelah itu, Panglima Besar meninggalkan ibu kota, memimpin perang gerilya.

Kelak ketika perang gerilya berakhir di penghujung 1949, diperlukan usaha khusus membujuk Sudirman untuk masuk kota. Pasalnya sederhana, Panglima Besar sudah berjanji kepada anak buahnya tidak akan meninggalkan wilayah gerilya sebelum perang berakhir dengan kemenangan. Setelah dengan enggan kembali ke Yogyakarta, muncullah soal yang paling berat bagi Sudirman. Panglima Besar diminta Sukarno menghentikan tembak-menembak dan memerintahkan anak buahnya meninggalkan semua basis gerilya sebelum perundingan dengan Belanda dimulai di Den Haag. Sudirman menolak, bahkan minta berhenti dari ketentaraan. Sukarno

mengancam meletakkan jabatan. Ancam-mengancam berakhir ketika Kolonel Abdul Haris Nasution berhasil meyakinkan Sudirman untuk memilih keutuhan bangsa daripada hanya kepentingan TNI.

DOK PRIBADI
Jenderal Sudirman.

Sikap Sudirman sebagai Bapak Tentara yang terus-menerus sebisa mungkin menjaga keutuhan dan otonomi tentara dari berbagai usaha sipil—pemerintah maupun oposisi—untuk mengontrol atau memengaruhinya, berhasil membawa TNI melewati masa Revolusi bebas dari kendali kaum oposisi—Tan Malaka maupun Front Demokrasi Rakyat/PKI—ataupun dari kontrol penuh pemerintah. Kepemimpinan Sudirman juga membawa TNI keluar dari masa Revolusi dengan persepsi diri sebagai suatu kekuatan politik yang berjuang bersama dengan kekuatan politik lainnya dalam menjaga kelangsungan dan perkembangan Republik Indonesia.

Bebas dari ancaman kolonial Belanda, hidup dalam masa demokrasi parlementer, Abdul Haris Nasution

sebagai pemimpin tentara pada tahun lima puluhan harus bekerja keras menjaga keutuhan dan otonomi tentara. Bukan saja menghadapi tekanan dari kekuatan politik di luar, dari dalam diri tentara sendiri juga muncul ancaman —PRRI/Permesta, DI/TII, Gestapu/PKI—yang bukan saja membahayakan keutuhan tentara, melainkan juga keutuhan Republik. Semua itu secara berangsur-angsur diatasi Nasution.

Jenderal Besar Nasution bersama Jenderal Besar Soeharto.

Sejak penghujung tahun lima puluhan hingga 1965, soal serius yang dihadapi oleh Nasution adalah kekuatan Komunis yang makin marak, dan Sukarno yang makin ingin menentukan. Kalau pada masa Revolusi, Sukarno sering kali bersimpati kepada Sudirman, pada masa kepemimpinan Nasution, TNI sulit mendapatkan simpati Sukarno. Presiden pertama Indonesia waktu itu adalah

juga seorang pemain politik yang terus mencoba memperluas dukungan. Karena tidak bisa mengandalkan dukungan tentara untuk tujuan-tujuan politiknya, Sukarno akhirnya memanfaatkan golongan kiri, terutama PKI. Dan makin sulitlah posisi Nasution khususnya, TNI umumnya.

Dalam periode yang sekarang dikenang sebagai zaman Orde Lama itu, posisi TNI pada dasarnya amat defensif menghadapi aksi ofensif PKI dan Sukarno. Pada keadaan seperti itu yang tampaknya mungkin dilakukan Nasution adalah menciptakan teori-teori untuk membela peranan dan partisipasi politik tentara. Dalam rangka inilah kita harus mengerti lahirnya doktrin "Jalan Tengah" yang dicetuskan Nasution pada November 1958 pada sebuah pidato di Akademi Militer Nasional Magelang. Layaknya teori-teori yang lahir pada masa defensif, "Jalan Tengah" adalah sekadar pernyataan posisi tentara yang di satu pihak bukan tanpa peran politik. Tapi, di lain pihak bukan tentara yang berencana berkuasa seperti di negeri-negeri Latin Amerika yang masa itu memang banyak didominasi oleh pemerintahan militer.

Pada suatu hari di awal Oktober 1965, akibat tindakan makar Gestapu, pemerintahan Sukarno ikut terperosok ke jurang kehancuran. Sebagai kekuatan terdepan barisan anti-Komunis pada masa itu, Angkatan Darat adalah kekuatan politik yang paling siap mengambil alih kekuasaan. Yang tidak dipunyai Jenderal Soeharto waktu itu adalah teori atau doktrin yang membenarkan peran dominan tentara dalam politik.

Dengan demikian, setelah menguasai keadaan,

mengonsolidasi kekuatan, langkah penting Jenderal Soeharto berikutnya adalah menciptakan teori untuk landasan peranan tentara sebagai pengelola negara. Teori-teori peranan sosial politik yang dikembangkan Nasution pada zaman Orde Lama belum lagi memperhitungkan kemungkinan datangnya suatu masa ketika TNI berdiri tegak di atas panggung politik Indonesia sebagai kekuatan utama. Kekosongan teori seperti itulah yang diisi Jendral Soeharto lewat Seminar Angkatan Darat II pada Agustus 1966 di Bandung.

Pada seminar di Bandung itu, Angkatan Darat menyadari dan menyimpulkan bahwa ABRI umumnya, dan TNI Angkatan Darat khususnya, menjadi tumpuan harapan masyarakat. Karena itu yang tersedia bagi TNI hanya satu pilihan, memenuhi harapan rakyat dalam bentuk membangun pemerintahan yang kuat dan progresif. Di atas landasan harapan rakyat yang dipersepsikan Angkatan Darat pada 1966 itulah tegaknya pemerintahan Orde Baru. Lewat Orde Baru pimpinan Jenderal Soeharto itulah TNI memelopori pembangunan Indonesia.

Berdiri pada bulan Oktober 1997 sembari memandang ke belakang perjalanan sejarah TNI, terlihat garis menaik keterlibatan politik tentara di Indonesia. Pada masa kepemimpinan Jenderal Sudirman, keterlibatan awal tentara ke dalam politik bermula pada keterlambatan pemerintah membentuk tentara. Adalah suatu keputusan politik ketika para pemuda merebut senjata dari tentara Jepang, mempersenjatai diri, membentuk barisan

pertahanan, dan memilih Sudirman sebagai Panglima Besar mereka. Tentara makin terlibat saja dalam politik ketika konflik pemerintah versus opisisi mewarnai politik Indonesia masa Revolusi. Tokoh utama dalam peran politik tentara ini adalah Sudirman sendiri. Mempersepsikan diri dan pasukannya lebih sebagai pejuang daripada tentara pemerintah, dia tidak merasa selalu harus terikat dengan aturan-aturan baku hubungan sipil-militer yang memang tidak dikenalnya.

Tingkah laku politik Sudirman itu tidak sepenuhnya bisa dilanjutkan Nasution. Tapi, peran politik tentara tidak bisa dihindarkan pimpinan tentara pasca-Revolusi. Untuk itulah lahirnya teori yang kemudian dikenal sebagai Dwifungsi. Lewat "Jalan Tengah", Nasution melembagakan peranan sosial politik tentara. Tapi, yang akhirnya menggunakan peran politik tentara untuk memerintah adalah Jenderal Suharto.

Oleh karena itu, tidak salah untuk menyebut Sudirman sebagai peletak dasar peran politik tentara, Nasution melembagakan peran tersebut, sementara Soeharto memanfaatkannya untuk berkuasa. Maka dalam konteks ini, jika kita meninjau sejarah ABRI sebagai kekuatan politik, niscaya terlihat adanya tiga jenderal terpenting: Sudirman, Abdul Haris Nasution, dan Soeharto.

Pada negara-negara yang tentaranya tidak memainkan peranan politik, ukuran keberhasilan seorang jenderal terletak pada prestasinya di medan tempur. Eisenhower, Omar Bradley, Marshall, dan MacArthur adalah Jenderal-Jenderal Amerika Serikat dengan bintang

lima karena sukses mereka pada Perang Dunia II. Tapi, bagi Indonesia dengan tentara yang berperan politik, kepiawaian dalam memainkan peranan politik tentara dalam pembangunan bangsa adalah kriteria penting. Kebetulan juga bahwa baik Sudirman, maupun Nasution dan Soeharto, semuanya adalah Jenderal-Jenderal yang punya reputasi di medan tempur.

Sudirman adalah Panglima Besar dengan reputasi gemilang sebagai pemimpin dan komandan tempur di Palagan Ambarawa serta pemimpin perang gerilya yang legendaris. Nasution adalah konseptor perang gerilya, Panglima Komando Jawa pada masa perang gerilya, dan KSAD yang memimpin dengan berhasil penumpasan pemberontakan PRRI/Permesta. Soeharto terkenal sebagai komandan yang memimpin Serangan Umum Satu Maret 1949 ke Kota Yogyakarta, Panglima Mandala pembebasan Irian Barat, dan Panglima Kostrad yang berhasil menyelamatkan negara dari ancaman bahaya Komunis.

Dalam perspektif inilah—terutama perspektif peranan politik tentara—sebaiknya kita semua harus melihat perlunya menghargai jasa-jasa tiga Jenderal terpenting TNI dengan menjadikan ketiganya Jenderal Bintang Lima. []

Emil Salim Menantang Soeharto

Jatuhnya Presiden Soeharto pada 21 Mei 1988, bukanlah sesuatu yang amat mengejutkan. Ada banyak tanda yang mengisyaratkan segera berakhirnya rezim Orde Baru sekian bulan, bahkan sekian tahun, sebelum Soeharto terpaksa turun panggung. Salah satu yang mencolok yang sudah hampir dilupakan oleh banyak orang adalah tantangan secara terbuka kepada rencana Soeharto mengangkat Prof. Dr. B.J. Habibie menjadi Wakil Presiden pada Sidang MPR 1998. Sepanjang sejarah kekuasaan Soeharto, masa menjelang Sidang MPR 1998 itulah munculnya secara terbuka tantangan terhadap kekuasaan Bapak Presiden. Pada Sidang MPR 1988, rencana Soeharto mengangkat Ketua Umum Golkar Sudharmono memang mendapatkan "tantangan" dari dalam ABRI. Tapi, ribut di sekitar keputusan Soeharto mengangkat Mensesneg terlama Orde Baru waktu itu terbatas di kalangan elite ABRI dan mereka yang berada di sekitar Bapak Presiden saja. Artinya, tidak melibatkan publik.

Seperti diketahui, salah satu Ketetapan MPR pada masa Orde Baru mengatur dengan jelas bahwa seorang hanya akan menjadi Wakil Presiden (Wapres) kalau bisa bekerja sama dengan Presiden terpilih. Ketetapan MPR ini

jelas dibuat dengan niat agar Presiden Soeharto sendirilah yang menentukan siapa yang berkenan dipilihnya menjadi Wapres. Dengan kata lain, bukan MPR yang memilih Wapres, melainkan Presiden Soeharto sendiri.

Ketika menjelang Sidang MPR 1983, pihak ABRI—diwakili oleh Letjen Harsudiono Hartas—mencalonkan Panglima ABRI, Try Sutrisno, Soeharto sangat marah dan lalu menghukum Hartas dengan menempatkannya sebagai anggota Dewan Pertimbangan Agung (DPA). Padahal, tadinya Kepala Staf Sosial Politik ABRI itu disebut-sebut sebagai calon Menteri Dalam Negeri.

Nah, keberanian menantang Soeharto menjadi makin tampak menjelang Sidang MPR 1998. Waktu itu sejumlah nama muncul sebagai calon meski yang paling menarik adalah nama Prof. Dr. Emil Salim. Ekonom ini, seperti kita ketahui, adalah salah seorang yang bersama Prof. Wijoyo Nitisastro merupakan arsitek ekonomi Orde Baru.

Peristiwa yang amat penting ini—serangan dan tantangan terbuka untuk pertama kalinya kepada rencana Soeharto—waktu itu saya komentari lewat sebuah tulisan. Entah mengapa, tidak ada media yang berani memuatnya. Untuk kepentingan historis, komentar itu saya cantumkan di bawah ini.

PROF. DR. EMIL SALIM adalah satu dari beberapa orang yang dicalonkan atau mencalonkan diri untuk dipilih sebagai Presiden atau Wakil Presiden oleh MPR pada sidangnya awal Maret saat itu. Yang menarik dan membedakan pencalonan Emil Salim dari sejumlah calon

lainnya, adalah *timing* pencalonannya, kelompok yang mencalonkannya, dan alasan yang mendorong pencalonan itu.

Pencalonan Emil diluncurkan oleh sejumlah tokoh terkemuka yang menyebut diri kelompok Gema Madani. Pencalonan mereka umumkan pada 16 Februari 1998, yakni hanya dua hari sebelum ABRI membulatkan dan mengumumkan dukungan kepada Prof. Dr. B.J. Habibie sebagai calon Wapres setelah sebelumnya semua fraksi menyebut Habibie sebagai calon mereka.

Memunculkan nama Emil Salim sebagai calon pada saat demikian, tidak bisa dibaca lain kecuali berarti penolakan Emil dan para pendukungnya kepada B.J. Habibie. Kejadian seperti ini, dengan cara yang lebih halus, terjadi juga pada 1988 ketika ABRI menolak pencalonan Sudharmono untuk jabatan Wakil Presiden. Waktu itu, Soeharto masih sangat kuat, bukan saja berhasil menjadikan Sudharmono sebagai Wapres, melainkan juga menghukum para jenderal yang "membangkang".

Salim Haji Said bersama Prof. Emil Salim.

Tentu saja tidak ada yang salah dari langkah menolak Habibie dan mencalonkan Emil, atau siapa saja untuk jabatan apa saja di negara yang didambakan sebagai negara demokrasi ini. Tapi, perlu diingat bahwa mereka yang berada dalam kelompok Gema Madani adalah orang pintar-pintar—karena itu tahu jago mereka tidak bakal mengalahkan Habibie yang dicalonkan Soeharto, orang yang menentukan siapa yang bisa bekerja sama dengannya nanti.

Oleh karena itu, bisa dipastikan mereka tahu bahwa tidak terlalu banyak manfaatnya jika yang mereka tuju hanya sekadar menyatakan penolakan kepada Habibie, sebab hal demikian sudah pula dilakukan banyak orang, bahkan termasuk Lee Kuan Yew dari Singapura. Oleh sebab itu, saya yakin ada pesan lain yang ingin mereka sampaikan kepada Habibie dan Haji Mohammad Soeharto, yang secara bersama hampir bisa dipastikan akan terpilih oleh MPR. Apa pesan atau pesan-pesan tersebut?

Untuk menjawab pertanyaan itu, marilah kita melihat penjelasan Emil Salim dan para pendukungnya. Rahmi Hatta, janda Bung Hatta, menjelaskan dukungannya kepada Emil sebagai usaha untuk "Mengingatkan masyarakat bahwa kita memerlukan orang-orang dalam pemerintahan yang bersih, punya perhatian pada masyarakat yang berlapis-lapis, terutama rakyat kecil".

Agus Purnomo, juru bicara kelompok Gema Madani menjelaskan kegiatan kelompoknya mencalonkan Emil

karena Emil mereka nilai sebagai "Seorang yang bersih dari berbagai bentuk kolusi, korupsi, dan nepotisme". Pada koran dengan tanggal penerbitan yang sama, Zoemrotin, seorang tokoh Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang mendukung Emil Salim, menyebut kegiatan pencalonan Emil sebagai lebih kepada kegiatan "*moral force* dan pemberdayaan *civil society*".

Pernyataan Zoemrotin sejalan dengan pernyataan Emil Salim sendiri. Kata Guru Besar Ekonomi itu: "Kursi bukan tujuan utama. Tetapi, motivasi utamanya adalah pendidikan politik." (*Kompas*, 18 Februari 1998)

Menteri Lingkungan Hidup, Ir. Sarwono bukanlah orang yang secara resmi mendukung Emil Salim, tapi pernyataannya kepada pers mengenai kegiatan pencalonan itu menunjukkan simpati dan pengertiannya mengenai latar belakang pencalonan tersebut. Kata Sarwono: "Di balik ini semua saya pikir ada kerinduan akan nilai-nilai tertentu yang dipersepsikan mulai hilang di Indonesia, seperti sifat-sifat jujur, apa adanya, dan kesederhanaan."

Yang paling jelas mengungkapkan pentingnya masalah konsep dan gagasan di balik pencalonan Emil adalah Herawati Diah. Wartawati senior ini menjelaskan, "Kita tidak mendukung semata sosok Emil sendiri, tetapi juga konsep dan programnya. Kami harapkan kalaupun orangnya tidak terpilih, programnya bisa diteruskan."

Tampaknya karena mempunyai konsep dan program itulah, maka Emil Salim menantang B.J. Habibie untuk berdebat demi menguji konsep dan program masing-

masing. Tujuan perdebatan itu, menurut Emil Salim, "Agar dengan begitu Wapres yang dipilih nantinya memang benar-benar memberikan tekanan, nuansa, dan akses ke dalam upaya pemulihan ekonomi pada masa lima tahun mendatang."

Tantangan berdebat ini mengubah kedudukan Emil dari posisi orang yang didorong menjadi orang yang terkesan berambisi menduduki kursi Wapres. Perdebatan para calon adalah tradisi yang lazim di negara yang memilih tokoh berdasarkan program, seperti di Amerika Serikat, misalnya. Tapi di Indonesia, program (GBHN) dibikin terlebih dahulu oleh MPR, dan baru setelah itu MPR memilih orang yang dianggap pantas dan memenuhi syarat melaksanakan program (GBHN) tersebut.

Emil Salim yang lama menjadi orang penting Orde Baru tentulah mengerti konstitusi dan aturan main politik Indonesia itu. Ataukah dengan tantangan berdebat itu, Emil ingin mengatakan bahwa konstitusi dan aturan main itu sudah kuno dan sudah harus dicampakkan? Tentu saja dia boleh berpendapat demikian, tapi untuk pemilihan Presiden dan Wakil Presiden bulan Maret saat itu, konstitusi dan aturan main yang ada masih belum diubah dan karena itu masih harus dihormati.

Yang juga terasa aneh dari ajakan berdebat Emil kepada Habibie itu adalah adanya kesan kuat bahwa Emil Salim mengabaikan kenyataan konstitusional dan sejarah politik Orde Baru. Konstitusi kita yang lebih dikenal sebagai UUD 45 memberikan kekuasaan yang luar biasa besarnya kepada Presiden, dan Wakil Presiden hanyalah

pembantu Presiden.

Wapres bekerja sesuai dengan petunjuk sang Presiden. Kalau Presidennya merasa bisa bekerja sendiri, sebagaimana yang selama ini ditunjukkan oleh Presiden Soeharto, maka Wapres hadir tidak lebih dari sekadar memenuhi persyaratan konstitusi. Dan sejarah Orde Baru adalah juga sejarah Wapres yang hadir terutama karena konstitusi mempersyaratkan demikian. Karena itu, fungsinya tidak lebih dari ban cadangan saja.

Dengan demikian, terlepas dari sistem kita yang memberi hak kepada MPR membuat GBHN dan memilih Presiden dan Wakil Presiden untuk melaksanakannya, jika Emil Salim memang punya gagasan dan konsep pembenahan ekonomi yang sedang dilanda krisis ini, yang sebenarnya lebih masuk akal ditantangnya berdebat bukanlah Habibie, melainkan Haji Mohammad Soeharto, orang yang hampir dipastikan akan menjadi Presiden kita untuk yang ketujuh kalinya.

Sebab, meski Habibie akan berperan lebih besar sebagai Wapres—lebih daripada para pendahulunya, saya kira—tapi dia toh hanya akan menjalankan petunjuk Presiden dalam mengimplementasikan GBHN. Sebagai Wapres, Habibie saya kira hampir bisa dipastikan tidak akan pernah berada dalam posisi membuat kebijakan sendiri.

Dengan kata lain, meski Emil formalnya terkesan berambisi menjadi Wakil Presiden, dengan menonjolkan pentingnya program dan konsep yang dimilikinya itu, sulit menyingkirkan kesan bahwa Emil Salim justru berambisi

menjadi Presiden. Sekali lagi ini boleh-boleh saja dan sama sekali tidak melanggar konstitusi dan peraturan apa pun di negeri ini. Tapi untuk tujuan itu, Emil tentu tahu syaratnya jauh lebih berat.

Apa pun yang dilakukan oleh Gema Madani dalam menjagokan Emil, dan bagaimanapun tingkah laku politik Emil Salim sebagai akibat adanya dukungan tersebut, satu hal yang niscaya jelas bagi pemerintah—yang sekarang maupun yang akan dihasilkan oleh Sidang MPR bulan depan—masyarakat Indonesia makin kritis, makin berani, dan telah berada pada tingkatan sanggup menampilkan tokoh alternatif. Dengan memperhatikan alasan pencalonan Emil oleh Gema Madani, Habibie yang akan jadi Wapres nanti tentulah bisa menimba masukan mengenai apa yang dicemaskan sejumlah orang terkemuka Indonesia terhadap dirinya.

Terhadap gejolak akibat munculnya nama Emil Salim sebagai penantang Habibie ini, kita tidak boleh lupa bahwa Emil Salim adalah salah seorang yang ikut meletakkan dasar-dasar pembangunan Orde Baru. Peran penting Emil sebagai salah seorang arsitek pembangunan Orde Baru itulah rupanya yang mendorong Dr. Afan Gaffar dari Universitas Gadjah Mada menyebut *post-power syndrome* sebagai hal yang melatarbelakangi bersemangatnya Emil menerima dukungan sebagai calon Wakil Presiden.

Menurut Afan Gaffar, Emil Salim, "Seharusnya ikut bertanggung jawab terhadap keadaan [krisis ekonomi] sekarang ini." Apakah justru karena merasa ikut bertanggung jawab itulah, maka Emil menjadi

bersemangat tampil kembali ke dalam kancah pemerintahan Republik ini demi mengoreksi kesalahan-kesalahan masa lalunya? *Wallahu a'lam*.[]

Yang Keluar dari Saku Jenderal Wiranto

Ketika Jakarta terbakar pada 14 Mei 1998, saya sedang berada di Mabes ABRI Cilangkap, Jakarta Timur. Bersama dengan beberapa pimpinan ABRI dan sejumlah kecil kaum cendekiawan—antara lain Dr. Nurcholish Madjid, Eep Saifullah, Dr. Indria Samego, dan Prof. Dr. Ryaas Rasyid—kami diajak berdiskusi mengenai bagaimana sebaiknya mengatasi krisis yang sedang melanda Indonesia hari-hari itu.

Diskusi tidak bisa dilanjutkan karena telepon genggam Letnan Jenderal TNI Hari Sabarno, Ketua Fraksi ABRI di Majelis Permusyawarahan Rakyat (MPR), terus-menerus berdering mengabarkan makin meluasnya kebakaran yang melanda Jakarta. Huru-hara sebenarnya sudah bermula secara terbatas sehari sebelumnya, beberapa saat setelah empat korban penembakan mahasiswa di Universitas Tri Sakti dimakamkan.

Setelah Letnan Jenderal TNI Susilo Bambang Yudhoyono, Kepala Staf Sospol yang jadi tuan rumah rapat itu, meninggalkan sidang secara mendadak, kami semua sepakat mengakhiri pertemuan. Agenda kami berikutnya adalah masuk kembali ke Jakarta. Ternyata tidak mudah. Huru-hara sudah mendekati dua pintu tol di

pinggir timur Jakarta yang harus saya lewati untuk masuk kota. Hanya dengan susah payah, melewati jalan-jalan tikus dari arah Bekasi, akhirnya saya bisa tiba di rumah saya yang terletak di Cipinang Muara, Jakarta Timur. Selanjutnya, saya hanya sanggup mengikuti berita terbakarnya Jakarta lewat sejumlah saluran televisi yang secara bebas menyiarkan huru-hara hari itu.

Waktu itu, saya sudah sekitar 50 tahun menetap di Jakarta dan mengalami semua huru-hara yang pernah melanda Jakarta sejak menetap di ibu kota. Huru-hara yang akhirnya menjatuhkan Soeharto ini paling luar biasa seru dan mengerikannya. Kebakaran dan penjarahan melanda semua penjuru dan kematian ratusan manusia tak terelakkan. Saya kira ini adalah ledakan kemarahan yang sudah terpendam bertahun-tahun sehingga tidak lagi mudah menuding siapa pencetusnya, siapa yang menunggangi, dan apa targetnya.

Sebelum meninggalkan Mabes ABRI, seorang laksamana dengan cemas mendekati saya bertanya, bagaimana menghubungi para pimpinan mahasiswa. "Tidak ada lagi tokoh mahasiswa seperti zaman dulu ketika terjadi pergolakan melawan rezim Orde Lama. Organisasi mahasiswa telah diporakporandakan oleh pemerintah, khususnya pada masa Daud Jusuf menjadi Menteri Pendidikan. Yang ada sekarang adalah sejumlah grup-grup studi yang entah siapa pemimpinnya dan di mana alamatnya." Begitu saya menjelaskan kepada perwira tinggi yang mungkin seorang dari kantor sospol atau intelijen.

SAYA SEDANG BERTAMU di rumah Letnan Jenderal TNI Mohammad Yunus Yosfiah ketika berita terbunuhnya empat mahasiswa Universitas Tri Sakti masuk lewat telepon genggam saya. Yang menelepon adalah sutradara film Chairul Umam, teman lama yang seorang anggota keluarganya adalah mahasiswa yang tewas sore hari itu. Terbunuhnya empat mahasiswa itu mengingatkan saya pada tewasnya Arief Rahman Hakim di depan Istana Merdeka pada hari-hari demonstrasi tahun 1966.

Entah Arief terkena peluru nyasar dari pasukan Cakrabirawa yang mengawal Istana atau peluru dari senjata mereka yang merencanakan penciptaan seorang martir, tidak pernah jelas sampai hari ini. Yang jelas hari tertembaknya seorang mahasiswa itu adalah titik berangkat jatuhnya Presiden Sukarno. Secara spontan, setelah menerima berita kematian mahasiswa Tri Sakti itu saya berkata kepada Jenderal Yunus, "Kita sedang berada pada hari-hari terakhir rezim Orde Baru."

Presiden Soeharto berada di Kairo tatkala huru-hara itu terjadi. Bahkan, sebelum Presiden mendarat di pangkalan udara Halim Perdanakusuma menjelang subuh pada 15 Mei, tidak seorang pun di antara kami yang masih yakin rezim Orde Baru akan bertahan. Tapi, bagaimana akan berakhirnya rezim yang berkuasa paling lama dalam sejarah modern Indonesia itu?

Tekanan terus meningkat agar Soeharto mundur secepatnya. Di jalanan maupun di Gedung DPR/MPR, suara tuntutan itu makin nyaring. Menjelang 20 Mei, Amien Rais, tokoh terpenting gerakan Reformasi dan

tuntutan penurunan Soeharto waktu itu, mengumumkan agar pada 20 Mei seluruh rakyat membanjiri lapangan Monumen Nasional (Monas) untuk secara bersama meneriakkan agar Soeharto mundur.

Aparat keamanan mempunyai alasan kuat ketika memutuskan mencegah pengumpulan massa di Monas. Yang ditakutkan, massa akan merangsek ke mana-mana. Padahal, di sekitar Monumen Nasional (Monas) terletak sejumlah gedung vital: Istana Kepresidenan, Markas Besar Angkatan Darat, Departemen Pertahanan, Gedung Telkom, Studio Pusat RRI, Kedutaan Besar Amerika Serikat, dan pasar bursa efek serta sejumlah kantor kementerian lainnya.

Untuk mencegah berkumpulnya massa itulah, militer memasang barikade di semua jalan menuju lapangan Monas dengan cara mengerahkan tank, panser, berbagai kendaraan militer lainnya, serta barikade kawat berduri. Dan tentu saja disertai sejumlah besar prajurit siap tempur.

Atas bujukan sejumlah teman serta para perwira militer, Amien Rais akhirnya membatalkan rencana pengumpulan massa itu. Kendati demikian, tentara tidak ingin mengambil risiko, dan Monas tetap ditutup dari segala penjuru.

Dalam keadaan tertutup itulah, saya mendapat telepon dari staf Jenderal Susilo Bambang Yudhoyono untuk hadir pada 20 Mei, pukul 19.00 pada sebuah rapat di Gedung Urip Sumohardjo di Kompleks Departemen Pertahanan dan Keamanan yang terletak di Jalan Merdeka

Barat. Mobil saya hanya bisa mengantar sampai ke Tugu Tani di Menteng Raya sebab di sanalah "garis perbatasan" terletak.

Dari sana saya masuk ke wilayah Monas, melewati barikade, dengan mobil militer yang dikendarai oleh Mayor Benny, seorang staf kantor Kepala Staf Sosial Politik yang memang ditugaskan menjemput saya di "perbatasan". Monas sepi, jalan-jalan lengang, dan yang bergerak hanya beberapa kendaraan militer. "Penyeberangan" ke dalam wilayah Monas yang terjaga ketat mengingatkan saya pada pengalaman menyeberang dari Berlin Barat ke Berlin Timur yang saya alami pertama kali pada musim semi tahun 1970.

KETIKA MEMASUKI RUANG RAPAT, sudah lebih dulu hadir sejumlah perwira tinggi ABRI—antara lain Letjen TNI Hari Sabarno—dan tim dari Universitas Indonesia (UI) pimpinan Rektor UI. Mantan dosen saya di UI dulu, seorang ahli hukum tata negara, Harun Al Rasyid, juga Prof. Zen Umar Purba, S.H., teman sekantor di majalah *Tempo*, menjadi bagian dari tim UI. Di samping itu juga sudah hadir Prof. Dr. Ryaas Rasyid dan Letjen TNI Susilo Bambang Yudhoyono sebagai tuan rumah. Saya memilih duduk di samping Ryaas Rasyid.

Acara pertama adalah makan malam dengan menu nasi gudeg dalam kotak. Kami tampaknya melewatkan waktu dengan makan untuk menunggu datangnya Panglima ABRI, Jenderal TNI Wiranto. Ketika Panglima ABRI itu datang, rapat lantas dimulai. Bambang

Yudhoyono bertindak sebagai pemimpin rapat. "Kalau Soeharto mundur, bagaimana sebaiknya cara mundurnya?" Itulah agenda rapat.

Harun Al Rasyid menjelaskan, berdasarkan Pasal 8 UUD 45, kalau Presiden mundur atau tidak lagi dimungkinkan menjalankan tugasnya, maka Wakil Presiden yang akan mengambil alih. Tidak ada debat mengenai ini. Semua yang hadir tampaknya sepakat. Tidak lama kemudian, Panglima Wiranto meninggalkan ruangan. Susilo Bambang Yudhoyono meneruskan rapat.

Pembicaraan selanjutnya dipicu oleh pernyataan Hari Sabarno. Setuju dengan pelaksanaan Pasal 8 UUD 45, Sabarno meragukan kewibawaan Wakil Presiden B.J. Habibie untuk tampil menggantikan Soeharto. Pada titik itu, saya mendadak teringat pengalaman hari-hari awal Orde Baru ketika timbul keraguan mengenai apakah Jenderal Soeharto—yang sebelum Gestapu hampir tidak dikenal publik—cukup berwibawa menggantikan Sukarno?

Atas prakarsa Jenderal Nasution, para pimpinan ABRI sepakat menyatakan dukungannya kepada Soeharto. Mantan Pangkostrad itu lalu menjadi yakin maju menggantikan Sukarno. Apakah sekarang pimpinan ABRI tidak bisa menyelamatkan negara dan konstitusi dengan cara mendukung proses peralihan kekuasaan secara konstitusional? Itu pertanyaan saya secara berbisik kepada Ryaas Rasyid. Kata Ryaas, "Anda bicara saja, sampaikan gagasan Anda itu."

Saya mengacungkan tangan minta bicara. Bambang

Yudhoyono mempersilakan. Gagasan saya kemukakan. Karena sifatnya adalah hanya saran untuk dipertimbangkan, dan karena tidak menimbulkan debat, rapat bisa dengan segera diakhiri dan kami pulang dengan masing-masing diantar sampai ke "perbatasan", tempat kendaraan-kendaraan kami menunggu.

Beberapa hari kemudian, saya mendapat informasi, ketika kami masih rapat di Merdeka Barat itu, Presiden Soeharto memerintahkan ajudannya memanggil Panglima ABRI Jenderal Wiranto dan Sekretaris Negara Sa'adillah Mursyid. Sa'adillah Mursyid diminta mempersiapkan timbang terima dari Presiden Soeharto kepada penggantinya, Wakil Presiden B.J. Habibie. Keesokan harinya di Istana Kepresidenan, seperti sudah diketahui, Soeharto mengumumkan mundur dari jabatan yang didudukinya sekitar 30 tahun. Dan Habibie langsung disumpah sebagai Presiden Ketiga Republik Indonesia.

PADA MULANYA tidak jelas bagi kami para peserta rapat malam itu apakah Jenderal Wiranto meninggalkan kami karena dipanggil oleh Soeharto atau karena kemauan sendiri untuk menyampaikan saran-saran berdasarkan rekomendasi rapat kami mengenai bagaimana sebaiknya cara Pak Harto mundur. Untuk jelasnya mengenai apa sebenarnya yang terjadi malam itu, berikut ini penuturan Wiranto kepada saya pada 12 Januari 2012 di Jakarta:

> Ketika rapat masih berlangsung, saya mendapat pesan agar segera menghadap Pak Harto di Jalan Cendana, kediaman pribadi beliau. Saya ditemani oleh dua perwira tinggi, Jenderal Subagio, KSAD waktu itu dan Mayjen Endriartono Sutarto,

Komandan Pasukan Pengamanan Presiden (Paspampres). Sebelum masuk ruangan Pak Harto, saya diberi tahu Ajudan bahwa Pak Habibie, Wakil Presiden, baru saja juga diterima Pak Harto.

Panglima TNI Jenderal Wiranto.

Ada dua hal yang disampaikan Pak Harto kepada saya. *Pertama*, beliau menyatakan akan mundur besok pagi. *Kedua*, menyerahkan dokumen yang juga dikenal sebagai Instruksi Presiden (Inpres) No. 16 Tahun 1998 yang berisi pengangkatan

saya menjadi Panglima Komando Kewaspadaan dan Keselamatan. Ini adalah sebuah Inpres yang berinduk pada Ketetapan (TAP) MPR No. V Tahun 1988 yang memberi wewenang kepada Presiden untuk mengambil langkah-langkah khusus dalam keadaan kritis.

Langkah khusus itu adalah menerbitkan Inpres untuk mengangkat seorang perwira tinggi menjadi Panglima Komando dari badan baru yang disebut Komando Kewaspadaan tersebut. Badan baru itu sebenarnya, sesuai dengan petunjuk Presiden, sudah disiapkan di Mabes ABRI dalam dua pekan terakhir. Para perwira tinggi yang ikut mempersiapkannya melihat badan baru tersebut sebagai semacam Kopkamtib. Biasanya seorang atasan memberi perintah untuk dilaksanakan dan yang menerima perintah akan menerimanya dengan mengucapkan, "Siap, laksanakan!". Malam itu keadaannya lain sama sekali. Penyerahan Inpres diantar dengan ucapan, "Instruksi ini saya berikan, kamu boleh pakai, boleh tidak."

Sebelum menyerahkan Instruksi itu, kepada Pak Harto saya sempat menyampaikan posisi ABRI terhadap beliau. Saya sampaikan bahwa posisi politik beliau sudah sangat lemah. Kendati demikian, "ABRI akan tetap mempertahankan pemerintahan yang sah." Saat itu, pemerintahan Pak Harto meski sudah amat lemah, tapi tetap masih sah karena dukungan MPR belum dicabut. Komentar Pak Harto singkat, "Saya tidak ingin rakyat jadi korban."

Kalau Instruksi itu saya gunakan, saya dan ABRI terpaksa berhadapan dengan mahasiswa yang sudah sejak lama dan di berbagai kota telah bergolak. Saya juga akan mendapat cap sebagai pemimpin rezim militer. Itulah yang ada dalam pikiran saya dalam perjalanan dari Cendana ke Merdeka Barat (kantor Kemhan sekarang).

Di Merdeka Barat menjelang tengah malam, saya mengadakan rapat staf. "Berapa mahasiswa yang akan jadi korban kalau ABRI mengambil alih kekuasaan?" Sekitar 200 hingga 250 kata seorang Jenderal dari staf Panglima. Sejurus kemudian Kepala Staf Sospol, SBY (Susilo Bambang Yudhoyono) minta keputusan. "Panglima akan mengambil alih (kekuasaan)?" Jawab saya tegas, "Tidak. Besok kita bersama-sama akan mengantarkan pergantian Presiden dari Pak Harto ke

Wakil Presiden Habibie lewat sebuah proses yang konstitusional."

Saya lalu menitipkan beberapa poin dan minta staf menyiapkan sebuah pernyataan Panglima. Yang menyusun pernyataan itu adalah SBY yang dengan sedikit perubahan saya bacakan setelah pergantian pimpinan negara di Istana pada pagi hari esoknya. Konsep asli tulisan SBY itu masih saya simpan sampai sekarang.

Liddle Menjelang Subuh

Yang tidak kurang menarik adalah cerita Harmoko, Ketua DPR/MPR waktu itu. Menurut mantan Pemimpin Redaksi Harian *Pos Kota* itu, beberapa saat sebelum pukul 23.00, Ajudan Presiden menelepon Ketua DPR/MPR menyampaikan pesan bahwa pimpinan Dewan akan diterima Presiden di Istana pukul 09.00 keesokan harinya. Harmoko segera menghubungi Wakil Presiden B.J. Habibie untuk melaporkan rencana pertemuan tersebut. Tapi kata Habibie, dia besok pagi akan dilantik sebagai pengganti Soeharto.

Menjelang subuh, saya dibangunkan oleh Prof. William Liddle dari Columbus, Ohio. Lewat sambungan telepon internasional, Liddle bertanya, "Salim, apakah Soeharto betul mundur? Di sini sudah tersiar berita Pak Harto pagi ini akan mengundurkan diri." Waktu di Amerika bagian timur menunjukkan pukul 4 sore. Antara Columbus, Ohio—terletak di Amerika bagian timur—memang ada jarak waktu 12 jam dengan Jakarta. Mereka berada di belakang kita.

Untuk lebih yakin apa yang sebenarnya terjadi, saya langsung menelepon Bambang Yudhoyono. "Betul, Mas,

Pak Harto mundur pagi ini," kata Jenderal yang kini lebih dikenal sebagai SBY. Katanya lagi: "Mas, nanti perhatikan yang keluar dari saku Pak Wiranto. Itu gagasan Mas Salim pada rapat semalam."

DOK. PRIBADI

Presiden Soeharto mengumumkan pengunduran dirinya.

Singkat cerita, setelah Prof. Dr. B.J. Habibie diambil sumpahnya sebagai Presiden Ketiga Republik Indonesia, Panglima ABRI Jenderal Wiranto, mendekati mikrofon sambil mengeluarkan selembar kertas dari saku bajunya. "ABRI mendukung proses pengalihan kekuasaan secara konstitusional," kata Wiranto sesuai yang tertulis pada kertas yang dipegangnya.

Rupanya SBY memberi tahu Wiranto sumber gagasan dukungan ABRI kepada proses pergantian kepemimpinan nasional itu. Beberapa hari kemudian, di Dewan Kesenian Jakarta, kantor saya waktu itu, telepon genggam saya berdering. Jenderal Wiranto di ujung sana. "Terima kasih gagasannya. Tapi saya digebuki dari kiri-kanan," kata Wiranto. Jawab saya dengan cepat, "Lebih baik Anda digebuki sekarang daripada anak buah Anda kocar-kacir kalau tidak ada arahan yang jelas mengenai bagaimana harus bersikap terhadap pergantian Presiden."[]

TENTANG SALIM HAJI SAID

Lahir sebagai anak tertua Haji Said dan Hajjah Ayu Salmah pada 10 November 1943, di Desa Amparita (Kabupaten Parepare, sekarang masuk wilayah Kabupaten Sidrap), Sulawesi Selatan. Salim menjalani pendidikan dasarnya di Kota Parepare sebelum akhirnya menyelesaikan Sekolah Menengah Atas (SMA) di Solo, Jawa Tengah.

Selama lima tahun (1963-1968), dia belajar psikologi pada Fakultas Psikologi Universitas Indonesia (UI). Salim kemudian beralih mempelajari ilmu sosial pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP UI) setelah tidak lagi diizinkan bertahan di sekolah lamanya karena tingkat absennya yang tinggi oleh kesibukannya sebagai aktivis. Dari FISIP UI, Salim Haji Said mendapat gelar sarjana (Drs.) dalam Ilmu Sosiologi pada 1976. Pendidikan tingginya di Jakarta tersendat-sendat dan berlangsung lama karena kegiatannya sebagai aktivis mahasiswa dan kesibukannya

sebagai wartawan.

Pada 1979, Salim Haji Said memulai pendidikan pascasarjana di Ohio University, Athens, Ohio Amerika Serikat. Mendapat gelar Master of Arts in International Affairs (MAIA) pada 1980, dia kemudian diterima pada program doktor di Ohio State University (OSU) dan belajar ilmu politik di bawah bimbingan Prof. Dr. Raymond William Liddle (Bill). Salim Haji Said mendapat gelar Master (M.A.) kedua pada 1983. Kemudian pada Desember 1985, Salim Haji Said memperoleh gelar Ph.D. dalam ilmu politik dengan disertasi mengenai peran politik militer Indonesia pada periode Revolusi Kemerdekaan.

Ketika menyelesaikan pendidikannya pada Jurusan Sosiologi FISIP UI, Salim menulis tesis mengenai sejarah sosial film Indonesia. Tidak terlalu sulit baginya menulis tesis tersebut karena selama bertahun-tahun dia juga bersibuk sebagai kritikus film majalah *Tempo*. Tesis itu adalah usaha penulis menemukan jawaban atas keluhan terhadap rendahnya mutu film Indonesia. Tesis Salim Haji Said tersebut terbit sebagai buku dalam bahasa Indonesia dan Inggris (terjemahan).

Dalam riwayat hidupnya, Salim Haji Said tercatat sebagai wartawan selama 25 tahun. Dari kedudukan sebagai wartawan dan *foreign travelling correspondent* majalah *Tempo*, Salim—juga salah seorang pendiri majalah mingguan itu—berkesempatan berkeliling ke berbagai penjuru dunia dan menulis laporan dan analisis mengenai peristiwa yang terjadi di negara-negara yang dikunjunginya. Salim bangga berkesempatan meliput hari-

hari terakhir Kamboja sebelum jatuh ke tangan Khmer Merah yang menciptakan *killing field,* dan bulan-bulan terakhir sebelum Amerika Serikat dan rezim kanan di Vietnam Selatan secara sempurna terusir dari kawasan Indochina. Salim juga meliput pelaksanaan kesepakatan Camp David yang dicapai bersama Menachim Begin (Israel) dan Anwar Sadat (Mesir). Untuk itu, dengan biaya sendiri dia terbang ke Kairo dan lewat darat (menyeberangi Gurun Sinai) melanjutkan perjalanan ke Israel pada musim panas 1978.

Selama sembilan bulan pada awal masa Reformasi, Salim Haji Said ditunjuk mewakili kaum cendekiawan pada Badan Pekerja MPR (BP-MPR). Pada 2006, Guru Besar Ilmu Politik ini dipercayai Presiden SBY menjadi Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh (Dubes LBBP) untuk Republik Ceko yang berkedudukan di Praha.

Pada tahun-tahun terakhir ini, sebagai Guru Besar Ilmu Politik, Salim Haji Said sibuk mengajar pada Universitas Pertahanan Indonesia (Unhan), Sekolah Staf dan Komando Angkatan Laut (Seskoal), Sesko Angkatan Darat (Seskoad), Angkatan Udara (Seskoau), Sekolah Staf dan Komando TNI (Sesko TNI), dan Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian (PTIK). Dia juga sibuk melakukan penelitian bagi buku yang sedang dipersiapkannya. “Saya terobsesi menyelesaikan penelitian dan menulis buku mengenai dinamika hubungan Presiden Sukarno dan militer dari masa Revolusi hingga naiknya Soeharto,” katanya.[]